



SEJARAH DAERAH SUMATRA UTARA



ektorat
ayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEJARAH DAERAH SUMATERA UTARA

SEJARAH DAERAH SUMATERA UTARA

oleh
**Proyek Penelitian dan Pencatatan
Kebudayaan Daerah**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK PENERBITAN BUKU BACAAN DAN SASTRA
INDONESIA DAN DAERAH
JAKARTA 1978**

Hak pengarang dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR.

Kebudayaan merupakan wujud identitas bangsa. Pengembangan identitas bangsa adalah unsur utama di dalam rangka pengembangan ketahanan nasional untuk mencapai kesatuan bangsa. Meskipun rakyat Indonesia terdiri dari berbagai suku dan mempunyai adat istiadat yang berlainan, hal itu tidak mengurangi rasa kesatuan. Bahkan keanekaragaman itu menambah chazanah kebudayaan nasional.

Oleh sebab itu, segala warisan lama berupa sejarah daerah, cerita rakyat, adat istiadat dan lain-lain perlu dikembangkan dan disebarluaskan, sehingga dapat dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia, agar dapat tercipta iklim dan lingkungan hidup yang lebih baik dan serasi.

Buku mengenai sejarah dan kebudayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan baru sedikit sekali, sehingga tidak memadai untuk menjadi bahan informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaktahuan itu menyebabkan orang kurang menghargai kebudayaan daerah, dan tidak suka menggali dari warisan lama itu.

Orang-orang tua yang mengetahui tentang seluk beluk kebudayaan daerahnya masing-masing banyak yang sudah meninggal. Sadar akan kerugian yang akan kita derita, kalau sampai kebudayaan daerah itu tidak kita bukukan, maka Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan penelitian ke daerah-daerah dan menyusun naskah yang siap untuk diterbitkan.

Selanjutnya yang menerbitkan naskah tersebut menjadi buku ialah Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah Departemen P dan K bekerja sama dengan PN Balai Pustaka.

Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan sumbangan bagi memperkaya kebudayaan nasional.

Jakarta, 1978.

Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra
Indonesia dan Daerah

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baru dimulai dalam tahun 1976/1977 yang meliputi 10 Propinsi :

1. Sumatera Utara
2. Sumatera Barat
3. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
4. Daerah Isitimewa Yogyakarta
5. Jawa Tengah
6. Jawa Timur
7. Bali
8. Kalimantan Timur
9. Kalimantan Selatan
10. Maluku.

Proyek ini bertujuan :

"Mengadakan penggalan penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional."

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah yakni :

- Sejarah Daerah
- Ceritera Rakyat Daerah
- Adat Istiadat Daerah
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah dan
- Geografi Budaya Daerah

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua yaitu :

Kegiatan di Pusat meliputi :

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi :

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1976/1977, proyek ini dapat menghasilkan 50 buah naskah dari 10 Propinsi tersebut di atas.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P dan K. di Daerah Pemerintah Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah Sejarah Daerah Sumatera Utara ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Kepala Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Departemen P dan K. Propinsi Sumatera Utara.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Medan.
3. Pemerintah Daerah Sumatera Utara.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara.
5. Tim penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari :

1. Drs. P.P. Bangun
2. Drs. Nazief Chatib
3. Drs. Anas Mahmud
4. Drs. Sjahlul Alamsyah
5. Dra. Fatimah Harahap
6. Drs. Danil Ahmad
7. Drs. A. Mukti Lubis.

6. Tim penyempurna naskah di pusat terdiri dari :

- | | | |
|--------------|---|-------------------------------|
| — Konsultan | : | 1. Prof. Dr. I.B. Mantra |
| | | 2. Dr. Astrid S. Susanto |
| | | 3. Abdurachman Suryomihardjo. |
| | | 4. A.B. Lapian. |
| | | 5. Bambang Sumadio. |
| — Ketua | : | Sutrisno Kutoyo. |
| — Sekretaris | : | Soenjata Kartadarmadja. |
| — Anggota | : | 1. Mardanas S. |
| | | 2. Masjkuri |
| | | 3. Surachman |
| | | 4. Muchtaruddin Ibrahim |
| | | 5. Sutjiatiningsih. |

7. Editor terdiri dari :

1. Sutjiatiningsih.

8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah,

(Drs. Bambang Suwondo)
NIP. 130117589.

PENGANTAR.

Sejarah Indonesia yang kita miliki sampai saat ini adalah uraian dari peristiwa-peristiwa yang dialami bangsa Indonesia umumnya atau kita sebut Sejarah Nasional. Sejarah Nasional itu disusun berdasarkan hasil penelitian para ahli yang melakukan kegiatan di beberapa daerah menurut banyaknya sumber-sumber sejarah yang tersedia untuk diselidiki.

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pemeliharaan Sejarah Nasional dan memperkuat kepribadian bangsa, maka haruslah ada usaha-usaha penggalian dan pemupukan Sejarah Daerah yang bersifat lokal. Di Sumatera Utara sejarah daerahnya terdiri dari bermacam peristiwa yang dialami oleh beberapa suku bangsa yang mendiami daerah ini.

Warisan Sejarah Daerah Sumatera Utara haruslah diselamatkan dalam rangka pembinaan Sejarah Nasional. Usaha-usaha penyelamatan itu ialah dengan melakukan penelitian, pencatatan dan pendokumentasian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah Sumatera Utara ini. Kegiatan-kegiatan seperti itu, yaitu penelitian, pencatatan, dan pendokumentasian akan dapat menyingkap beberapa banyak warisan atau peninggalan sejarah yang mengandung nilai-nilai perjuangan, nilai budaya sebagai kebanggaan nasional umumnya dan daerah khususnya.

Sebagai suatu langkah yang kongkrit dalam penyelamatan, pemeliharaan, dan pengembangan sejarah daerah itu, maka disusunlah buku ini atas kerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara.

Medan, 31 Desember 1976.-

Tim Penyusun,

Tim penyusun :

1. Drs. P.P. Bangun M.A.
2. Drs. Nasief Chotib
3. Drs. Anas Mahmud.
4. Drs. Sjahlul Alamsjah.
5. Drs. Fatimah Harahap.
6. Drs. Danil Ahmad.
7. Drs. A. Mukti Lubis.

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	v
I. Pendahuluan	1
1.1. Tujuan penelitian	1
1.2. Masalah	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Peneliti- an	2
1.5. Hasil Akhir	3
II. Prasejarah	5
2.1. Asal-usul Penghuni Yang Pertama	5
2.2. Penyelenggaraan Hidup	7
2.3. Organisasi Masyarakat	9
2.4. Kehidupan Seni Budaya	12
2.5. Alam Pikiran dan Kepercayaan	14
Daftar Bacaan	20
III. Zaman Kuno (\pm Abad I – 1500 M)	21
3.1. Pertumbuhan Pemerintahan dan Kenegaraan..	21
3.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	25
3.3. Kehidupan Seni Budaya	27
3.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	30
3.5. Hubungan ke luar	32
Daftar Bacaan	34
IV Zaman Baru (1500 – 1800)	36
4.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	36
4.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	41
4.3. Kehidupan Seni Budaya	45
4.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	48
4.5. Hubungan keluar	51
Daftar Bacaan	53

V.	Abad ke XIX (1800 – 1900)	54
	5.1. Kehidupan Pemerintahan dan Kenegaraan	54
	5.2. Penyelenggaraan hidup dalam Masyarakat	59
	5.3. Kehidupan Seni Budaya	63
	5.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	68
	5.5. Hubungan keluar	72
	Daftar Bacaan	78
VI.	Zaman Kebangkitan Nasional (1900 – 1942)	80
	6.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	80
	6.2. Kaum Pergerakan di daerah	83
	6.3. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	86
	6.4. Kehidupan Seni Budaya	91
	6.5. Alam Pikiran dan Kepercayaan	96
	6.6. Hubungan keluar	101
	Daftar Bacaan	106
VII.	Zaman Pendudukan Jepang	108
	7.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	108
	7.2. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat	112
	7.3. Kehidupan Seni Budaya	115
	7.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	118
	7.5. Hubungan keluar	123
	Daftar Bacaan	126
VIII.	Zaman Kemerdekaan (1945 – 1975)	127
	8.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan	127
	8.2. Penyelenggaraan Hidup	148
	8.3. Kehidupan Pendidikan dan Seni Budaya	157
	8.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan	163
	8.5. Hubungan keluar	168
	Daftar Bacaan	175
	Daftar Responden	176
	Daftar Kata	180

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penelitian.

Penelitian dan penyusunan Sejarah Daerah Sumatera Utara ini bertujuan untuk mempertahankan keutuhan peninggalan - peninggalan warisan sejarah daerah Sumatera Utara dan menghindarkan dari kemusnahan dalam rangka menyelamatkan bahagian kebudayaan nasional Indonesia. Penyusunan Sejarah Daerah Sumatera Utara berarti membina kelangsungan hidup dan pengembangan kebudayaan nasional, kesatuan bangsa dan memperkuat kepribadian bangsa. Usaha-usaha pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan sejarah daerah itu erat hubungannya dengan pengembangan dan pembangunan daerah.

Secara khusus penelitian dan penyusunan Sejarah Daerah Sumatera Utara ini yang terdiri dari beberapa suku bangsa dengan adat-istiadat yang berbeda, bertujuan untuk melengkapi dan memperkaya khazanah Sejarah Nasional.

Di samping hal-hal tersebut, maka penelitian dan penyusunan Sejarah Daerah Sumatera Utara ini juga bertujuan untuk mencegah nilai-nilai budaya yang bersifat subjektif, menanggulangi pengaruh asing yang negatif terhadap kebudayaan daerah agar dapat dipergunakan bagi pembaharuan dalam proses pembangunan yang sesuai dengan kepribadian bangsa.

1.2. Masalah.

Warisan sejarah Bangsa Indonesia yang bertebaran di seluruh Tanah Air masih banyak yang belum terungkap, karena belum diteliti dan belum dikembangkan secara sempurna. Di daerah Sumatera Utara masih banyak peristiwa sejarah yang belum terungkap atau tersusun, sehingga masyarakat Indonesia maupun masyarakat daerah Sumatera Utara belum kenal akan sejarah dan kebudayaan sendiri terutama sekali yang bersumber dari peristiwa masa lampau.

Sampai masa ini sangat terasa sekali kekurangan bahan-bahan tentang sejarah daerah itu yang penting sekali untuk melengkapi dan meramu Sejarah Nasional Indonesia. Jelasnya dapat dikatakan, bahwa sejarah daerah Sumatera Utara belum pernah tergarap sempurna seperti pada beberapa daerah lain di Indonesia.

1.3. Ruang Lingkup.

Di dalam Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Utara, maka ruang lingkupnya ialah meliputi daerah Propinsi Sumatera Utara. Penyusunan Penelitian ini meliputi masa sejak zaman Pra-Sejarah sampai zaman Kemerdekaan, dengan babakan waktu sebagai berikut:

- Zaman Prasejarah.
- Zaman Kuno (\pm Abad Pertama - 1500 M.).
- Zaman Baru (1500 M. - 1800 M.).
- Abad ke-19 (1800 M. - 1900 M.).
- Zaman Kebangkitan Nasional (1900 - 1942).
- Zaman Pendudukan Jepang (1942 - 1945).
- Zaman Kemerdekaan (1945 - 1975).

1.4. Pertanggungjawaban Ilmiah Prosedur Penelitian.

Di dalam melaksanakan penelitian penyusun berpegang kepada metodologi sejarah, yaitu mempergunakan sumber-sumber sejarah sebagai bahan penelitian. Sumber-sumber sejarah itu diperoleh dari hasil **library-research** dan **field-research**.

Bahan-bahan **library-research** antara lain ialah:

- Buku-buku sejarah yang berhubungan dengan Sejarah Daerah Sumatera Utara.
- Brosur-brosur yang diterbitkan oleh berbagai kalangan, organisasi, militer, Jawatan Penerangan, dan sebagainya.
- Surat-surat kabar dan majalah-majalah.

Bahan-bahan **field-research** yang dipergunakan antara lain:

- Benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat pada Museum.
- Bangunan-bangunan bersejarah di daerah-daerah.
- Hasil wawancara dengan pengetua-pengetua dan tokoh-tokoh masyarakat.
- Bahan-bahan dari ceritera-ceritera rakyat.
- Hasil observasi keadaan alam dan kehidupan masyarakat di desa-desa dan kota-kota.

Pada umumnya bahan-bahan yang diperoleh sebagian besar adalah sumber-sumber sekunder, terutama mengenai Zaman Kuno sampai masa tahun 1500. Penelitian lapangan dapat melengkapi sumber sekunder ini dengan beberapa bahan seperti candi, patung-patung dan benda-benda perlengkapan sehari-hari yang dipergunakan untuk keperluan hidup dan peperangan.

Hasil pengumpulan keterangan-keterangan yang dilakukan itu disusun dalam uraian sejarah dengan mempergunakan pendekatan-pendekatan (**approach**) berbagai ilmu sosial lainnya, seperti Antropologi, Sosiologi, Ekonomi, Filologi, sehingga diperoleh suatu gambaran tentang kehidupan yang bersifat menyeluruh dari setiap masa.

Bahan-bahan keterangan yang diperoleh itu disusun menurut kerangka Pola Penelitian dengan cara melakukan seleksi terhadap kejadian-kejadian yang sesuai dengan sifat-sifat yang diperlukan, seperti kejadian yang bersifat politik (pemerintahan), ekonomi (penyelenggaraan hidup), organisasi masyarakat, kehidupan seni budaya dan seterusnya.

Uraian pada Bab II dan III tidak dipecah-pecah menurut pola penelitian yang telah ditetapkan. Uraian pada kedua Bab itu terdiri atas pasal-pasal seperti yang terdapat pada pola penelitian, tetapi tidak dipecah lagi atas sub-sub pasal.

Hal itu dilakukan, karena sumber-sumber untuk kedua Bab tersebut kurang memadai.

Selanjutnya untuk menghindari kontroversi dalam uraian, maka **footnote** tidak dicantumkan dalam penulisan ini. Sedangkan sumber-sumber yang dipergunakan diterakan pada akhir tiap-tiap Bab.

Pengujian terhadap hasil penelitian dilakukan dengan mempergunakan kritik historis, yaitu menguji kebenaran sumber dengan membandingkannya dengan sumber-sumber yang lain; dengan demikian diharapkan akan diperoleh keterangan-keterangan yang valid untuk penyusunan Sejarah Daerah Sumatera Utara ini.

SUMATERA UTARA

1.5 HASIL AKHIR

Buku ini adalah hasil akhir dari suatu rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan sejak semula, seperti yang dapat dilihat pada Pola Penelitian dan Kerangka Laporan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1976/1977.

Mula-mula naskah buku ini disusun oleh Team Peneliti di daerah Sumatera Utara, dan pada tahap berikutnya mengalami proses penilaian yang dilakukan dalam suatu lokakarya yang ditangani oleh Tim Pusat, Tenaga Ahli, maupun Tim Peneliti daerah sendiri. Selanjutnya diikuti oleh proses penyempurnaan secara menyeluruh. Pada kegiatan penyempurnaan itu, juga diperhatikan segi bahasa, dengan mengusahakan supaya kalimat-kalimatnya dapat menjadi lebih lugas dan lancar. Sementara itu berbagai istilah yang bercorak kedaerahan diberi pengertian yang lebih umum, demikian pula diusahakan agar sejauh mungkin mengikuti peraturan bahasa dan cara menulis seperti yang terdapat pada ejaan yang sudah disempurnakan.

Satu segi yang menduduki tempat penting dalam rangka penilaian dan penyempurnaan naskah ini ialah segi pendekatan yang merupakan kriterium utama. Penulisan sejarah daerah dengan menggunakan pendekatan regiosentris, merupakan syarat yang sungguh wajar. Kiranya tanpa pendekatan demikian hasilnya hanya akan berupa penulisan sejarah seperti yang lazim dijumpai pada buku-buku sejarah nasional selama ini.

Berpegang pada kaidah tersebut, maka dalam buku ini kelihatan bahwa usaha mengadakan pendekatan secara regiosentris itu sudah dilakukan, sehingga dapat memberi pengertian yang jelas tentang berbagai aspek kehidupan di masa lampau seperti yang pernah terjadi di Sumatera Utara.

Selanjutnya cara menyajikan bahan dengan menggunakan metode berkisah, merupakan cara yang baik, supaya terjadi komunikasi antara penyusun dengan pembaca. Cara demikian dapat dirasakan kehadirannya pada naskah ini, sehingga data dan fakta yang diungkapkan tidak terasa lepas-lepas dan berdiri sendiri, tetapi telah diramu dalam suatu kisah yang kait-mengait dengan dasar yang logis, lancar, dan terbaca.

Kemudian perlu dikemukakan, bahwa buku ini pada hakekatnya mempunyai kecenderungan untuk berkualitas sebagai identitas data dasar, meskipun di dalamnya termuat cukup banyak data dan fakta sejarah daerah Sumatera Utara, yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat di masa lampau, tersusun dalam suatu kerangka seperti dikehendaki oleh **terms of reference** itu sendiri.

Secara keseluruhan buku ini sebagai hasil Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1976/1977 dapat diharapkan akan memberi dorongan positif untuk usaha-usaha penggalian sejarah daerah di masa depan.

BAB II PRASEJARAH SUMATERA UTARA

2.1. Asal Usul Penghuni Yang Pertama.

Peninggalan-peninggalan prasejarah di Sumatera Utara menunjukkan, bahwa penduduk yang tertua mempunyai ciri-ciri **Austro Melanesoid**. Berdasarkan jenis-jenis artefak yang ditemukan, terbukti bahwa penyebaran mereka berlangsung pada masa prasejarah, yaitu di zaman Mesolitikum (Zaman Batu Tengah).

Penyebarannya ke bahagian timur Indonesia sampai pulau Irian, sedang ke barat jejak-jejaknya terdapat di Sumatera Utara, dan Semenanjung Melayu.

Orang-orang Austro-Melanesoid itu tinggal dalam gua-gua (**Abris sous roche**) dan di muara-muara sungai dekat pantai. Peralatan mereka terdiri dari bilah kasar, alat-alat dari tulang, tanduk, dan kerang. Orang-orang Austro-Melanesoid terutama yang berada di bahagian barat, yaitu di Sumatera Utara hidupnya dari siput dan kerang. Kerang-kerang tersebut dipatahkan ujungnya dan dihisap isinya, lama kelamaan kulit-kulit kerang itu menjadi bukit yang sekarang kita temukan pada beberapa tempat di Sumatera Utara. Rupanya berabad-abad lamanya mereka membuang kulit kerang sehingga menjadi timbunan sampah yang oleh para ahli disebut **kyokken moddinger** (sampah-sampah dapur).

Kyokken moddinger atau sampah-sampah dapur itu dikenal juga dengan nama Bukit Kerang. Beberapa bukit kerang telah ditemui di Sentis (Medan). Terakhir dijumpai di daerah Kabupaten Langkat, yaitu di tiga tempat yang letaknya dekat garis pantai. Pada desa Sukajadi, Kecamatan Hinai-Langkat luas Bukit Kerang itu 2 ha, di desa Paya Rengas 5 ha dan di desa Pasar III Tanjung Beringin 5 ha. Kemungkinan tempat-tempat tersebut merupakan bukit-bukit kerang seperti yang dikemukakan oleh DR.P.V.van Stein Callenfels. Bukit-bukit kerang itu letaknya beberapa kilometer dari garis pantai timur Sumatera Utara sekarang ini.

Kapak batu yang dikenal dengan **flake** dan **pebble** pertama kali ditemukan oleh J.H.Neumann di Batu Kerang (Deli) pada tahun 1924. Benda itu berukuran 155 X 95 X 70 mm. dan dapat dipastikan seumur dengan benda-benda yang diketemukan pada bukit-bukit kerang.

Bukit Kerang dilaporkan untuk pertama sekali pada tahun 1907 diketemukan di dekat Seruwai, tetapi waktu itu belum diduga bahwa itu adalah hasil kegiatan manusia. Kemudian hal itu terbukti, karena di dalamnya diketemukan tulang-tulang binatang, alat penumbuk dan alat pemukul. Penyebaran bukit-bukit kerang itu dijumpai orang pada daerah yang berjarak 130 km dan sekarang terletak 10 sampai 15 km dari garis pantai.

Pada tahun 1925 - 1926 Van Stein Callenfels menemukan bukit-bukit kerang yang diketemukan di perkebunan tembakau di Sentis dekat Medan.

Menurut Van der Meer Mohr 93% dari kerang itu dari jenis *meretrix-meretrix*, dan 6,5% *ostrea*. Beberapa kapak diketemukan dan diketemukan pula beberapa kerang *Melo indica* yang diberi lobang di tengahnya, mungkin dahulu dipergunakan sebagai trompet atau alat penceduk.

Keadaan Bukit Kerang itu dewasa ini kurang mendapat perhatian dan telah banyak dijadikan objek penggalian untuk keperluan memperoleh batu kapur. Salah satu di antaranya di Kecamatan Hinei, yaitu di desa Sukajadi Kabupaten Langkat.

Pada *kyokken moddingger* yang telah diselidiki oleh DR.P.V. van Stein Callenfels antara lain diketemukan:

1. kapak genggam (**pebble**) yang dibuat dari batu kali dikenal dengan nama kapak Sumatera.
2. kapak pendek (**hoche courte**) bentuknya setengah lingkaran.
3. batu penggiling yang dipergunakan untuk menggiling makanan dan untuk menghaluskan cat merah.

Bukit kerang di Kabupaten Langkat masih terus diteliti dan sampai sekarang belum ada penemuan penemuan baru.

Kira-kira 2000 SM. barulah datang suku Melayu tua (**proto Melayu**) dan kemudian kira-kira 1000 SM. disusul oleh suku Melayu Muda (**Deutero Melayu**). Menurut penelitian beberapa ahli, di antaranya Prof. Kern dan von Heine Gelderen, mereka ini berasal dari daratan Asia dan termasuk salah satu cabang ras **Mongoloid**. Dari Proto dan Deutero Melayu itulah tumbuhnya suku-

suku bangsa yang mendiami Sumatera Utara dewasa ini, yaitu suku-suku **Batak, Melayu, dan Nias**.

Orang Batak tinggal di pedalaman yaitu di sekitar Danau Toba. Mereka kemudian terbagi atas beberapa suku, yaitu Batak Toba yang mendiami tepi selatan Danau Toba, yaitu pada dataran Tinggi Toba, Humbang Silindung dan pulau Samosir. Suku Batak Simalungun mendiami tepi timur danau Toba, yaitu Kabupaten Simalungun sekarang. Suku Batak Dairi mendiami tepi barat danau Toba, yaitu Kabupaten Dairi sekarang yang lebih dikenal dengan suku Pakpak. Suku Batak Karo mendiami tepi utara danau Toba, yaitu Kabupaten Karo sekarang ini. Jauh ke selatan dari danau Toba, menyebar suku Batak Mandailing yang mendiami daerah yang sangat luas di Tapanuli Selatan

Di daerah Sumatera Timur suku bangsa Melayu mendiami empat daerah kabupaten sepanjang pesisir timur, yaitu :

Melayu Langkat, mendiami Kabupaten Langkat, Melayu Deli mendiami sebahagian dari Kabupaten Deli Serdang, Melayu Serdang, mendiami sebahagian Kabupaten Deli Serdang, yaitu kota Lubuk Pakam, Perbaungan, dan Tebing Tinggi. Melayu Asahan mendiami kabupaten Asahan dan kabupaten Labuhan Batu. Suku Nias mendiami pulau Nias, yaitu salah satu kabupaten di Sumatera Utara dengan ibukotanya Gunung Sitoli.

2.2. Penyelenggaraan hidup

Pada zaman prasejarah kehidupan penduduk yang tertua ialah dengan mengumpulkan segala sesuatu yang dapat mereka makan, seperti buah-buahan, ikan, kerang, dan binatang buruan. Untuk itu mereka selalu mengembara, karena persediaan makanan pada suatu tempat tidak selalu ada, mereka terpaksa mencari tempat yang baru, yang dapat memberikan makanan bagi mereka

Alat-alat yang mereka pakai sangat sederhana, yaitu berupa kapak genggam, kapak pendek, batu penggiling sebagaimana yang ditemukan pada kyokken moddingger. Pada zaman Mesolitikum rupanya mereka sudah mulai menetap, sekurang-kurangnya untuk sementara waktu, selama persediaan makanan cukup. Hal ini dibuktikan dengan bukit-bukit kerang sebagai sisa-sisa makanan yang mereka tinggalkan.

Sejak kira-kira 2000 tahun SM telah datang ke daerah ini nenek moyang kita dari daratan Asia Tenggara. Di tanah asalnya mereka telah mengenal kehidupan bertani, beternak, menangkap

ikan, malahan telah mengenal musim kemarau dan musim hujan untuk menetapkan waktu yang tepat untuk turun ke sawah. Demikianlah mereka sampai ke Indonesia, setelah, mengarungi samudra yang luas mereka mendarat di berbagai tempat antaranya beberapa tempat di pesisir timur Sumatera. Daerah ini berawa-rawa dan kurang baik untuk pertanian. Oleh sebab itu mereka mengikuti sungai-sungai ke udik dan sampai di pedalaman yang subur di kaki Bukit Barisan. Daerah itu merupakan dataran tinggi yang subur karena abu gunung berapi atau vulkanisme dan baik sekali untuk pertanian.

Rupanya daerah sekitar danau Toba adalah salah satu tempat yang sangat disukai. Di sanalah berdiri desa-desa yang tertua di kalangan orang Batak. Lama-kelamaan mereka menyebar sekitar keliling danau Toba itu dan membentuk suku-suku Batak seperti Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, dan Mandailing.

Pada kira kira tahun 1000 sM datang pula gelombang kedua perpindahan penduduk daratan Asia Tenggara itu. Mereka itu tergolong kepala Melayu Muda atau Deutero Melayu. Mereka menetap di pesisir dan hidup dari penangkapan ikan di laut atau mengolah tanah rawa-rawa itu menjadi tanah-tanah pertanian. Perkampungan mereka tersebar sepanjang sungai-sungai besar yang mengalir ke pantai timur Sumatera Utara itu seperti s. Besitang, s. Wampu, s. Asahan, s. Barumon dan sebagainya. Sungai-sungai itu sangat besar artinya bagi lalu lintas dan penangkapan ikan. Di muaramuara sungai itu tumbuh desa-desa yang lebih besar, dan menjadi pusat pemerintahan atau kerajaan.

Demikianlah tumbuhnya desa desa yang tertua di Sumatera Utara, baik di daerah pedalaman maupun di daerah pesisir. Di sana mereka membangun rumah-rumah dengan alat yang sangat sederhana. Biasanya tipe rumah-rumah itu ialah rumah bertiang tinggi yang dikenal dengan rumah panggung. Di daerah pesisir bahan untuk rumah selalu dari kayu bakau, pelepah-pelepah rumbia atau nipah sedangkan dinding serta atapnya terbuat dari nipah.

Di daerah pedalaman atap ijuk dan dinding bambu atau papan merupakan bahan yang biasa dipakai. Begitu pula kayu-kayu besar dipergunakan untuk tiang, sehingga rumah di daerah pedalaman merupakan rumah-rumah panggung yang tinggi. Rumah-rumah itu dibangun sedemikian rupa untuk melindungi diri dari serangan binatang buas. Biasanya rumah-rumah itu didiami oleh satu keluarga besar di mana hidup orang-orang yang seketurunan di bawah pimpinan seorang kepala keluarga.

Di situ mereka telah mengenal pertanian yang mereka kerjakan di sekitar rumah itu. Tentu saja cara penghidupan lama, seperti berburu masih mereka teruskan, tetapi mereka telah mulai mengenal cara-cara beternak. Beberapa jenis binatang dapat mereka jinakkan seperti babi, kambing, ayam, dan sebagainya. Alat-alat yang mereka pergunakan sudah semakin sempurna, seperti periuk dari tanah liat, kapak-kapak batu besar untuk bertani, tombak untuk berburu, sampan-sampan untuk menangkap ikan. Mereka tentu telah membuat pakaian dari kulit-kulit kayu dan kulit binatang yang mereka olah sedemikian rupa sehingga dapat mereka pergunakan untuk melindungi badan dari serangan udara.

Beberapa hal telah menyebabkan perpindahan penduduk dari desa-desa yang tertua itu, antara lain karena pertambahan anggota keluarga sehingga hasil-hasil mereka dirasakan kurang memadai untuk dimakan bersama. Di samping itu gangguan-gangguan seperti binatang buas, peperangan penyakit telah mendorong mereka untuk mencari pemukiman yang baru. Juga kekurangan subur tanah dan penemuan beberapa tempat yang dianggap lebih subur telah mendorong perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Umumnya sungai sungai memainkan peranan penting bagi lalu lintas di zaman itu. Dengan memakai rakit-rakit mungkin dari bambu, pohon atau batang-batang pisang mereka mengarungi sungai-sungai itu. Dengan demikian sepanjang tepi sungai itu tersebarlah beberapa desa.

2.3. Organisasi Masyarakat.

Pengaturan masyarakat seperti pengaturan pekerjaan dilaksanakan secara gotong-royong. Misalnya dalam melakukan penanaman padi, pembangunan rumah dan upacara-upacara kematian, perkawinan, dan sebagainya. Untuk melakukan kerja sama itu dengan tertib, mereka mengenal aturan-aturan dan norma-norma yaitu adat. Adat-istiadat itu berasal dari aturan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun. Orang desa yang paling mengenal adat, yaitu seorang **primogeniture** dari keluarga tertua (**senior**) berfungsi sebagai pimpinan. Pimpinan-pimpinan desa mempunyai kelebihan-kelebihan lahir dan batin, kuat, sakti, sehingga dihormati oleh penduduk. Di daerah pesisir pemimpin itu disebut **datuk** atau **pawang** sedang di pedalaman yaitu di tanah Batak disebut **datu** atau **guru** di Nias disebut **salawa**.

Inti dari desa itu ialah masyarakat desa yang berupa perikatan

di bawah pimpinan kepala desa. Orang-orang yang berasal dari turunan orang-orang yang mendirikan desa (cakal bakal) adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di dalam desa. Mereka adalah pemilik tanah-tanah pertanian. Para pendatang kemudian, tidak mempunyai hak di dalam pengaturan desa-desa itu.

Di pedalaman Sumatera Utara satuan yang disebut desa itu dinamakan "huta", sedang di pesisir timur dinamakan "kampung".

Daerah yang terpenting di pedalaman Sumatera Utara itu ialah di sekeliling danau Toba. Di tengah-tengah danau itu sekarang terletak pulau Samosir. Sebenarnya dahulu bukan pulau, sebab dihubungkan oleh sebuah tanah genting ke daratan pulau Sumatera di sebelah barat. Pemerintah Belanda telah memutuskan genting itu untuk keperluan pelayaran.

Di sekitar danau itu terdapat gunung **Pusuk Buhit** yang kedudukannya sangat penting bagi orang-orang Batak. Menurut mitologi, di situlah tempat asal nenek moyang orang Batak. Di tempat itulah **Mula Jadi Na Balon** menurunkan **Batara Guru** dari kayangan dan kemudian dari Batara Guru itulah asal mula orang Batak.

Mitos itu memberikan gambaran kepada kita, bahwa di sekitar danau Toba itu, yaitu kira-kira di **Bakkara** merupakan desa-desa yang tertua di kalangan orang Batak. Di dalam bahasa Batak desa disebut **huta**. Dari Bakkara orang-orang Batak itu menyebar ke sekeliling danau Toba.

Tiap-tiap Huta dikuasai oleh "raja" dan yang berhak menjadi raja ialah keturunan asal desa atau huta itu. Keasliannya ditandai oleh marga, misalnya marga Manurung menguasai beberapa desa yang mereka anggap sebagai desa asal mereka. Desa asal itu dinamakan **golat**.

Di antara desa-desa yang dikuasai oleh marga Manurung itu maka sebuah di antaranya lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Begitu pula huta-huta yang dikuasai oleh marga lain terdiri dari beberapa huta, tetapi satu di antaranya lebih tinggi kedudukannya dari huta yang lain. Rupanya dahulu telah terjadi perpindahan penduduk dari **golat** ke huta yang baru. Hubungan antara golat dengan huta yang baru itu seperti saudara tua dengan saudara yang lebih muda menurut adat, kedudukan raja di golat itu lebih tinggi dari pada raja di huta yang baru. Penggabungan itu mungkin pula terjadi akibat peperangan sehingga sebuah huta ditaklukkan oleh huta yang lain. Demikianlah terjadinya perikatan beberapa huta yang di Toba disebut **Handaruan** dan di Mandailing disebut **janjian**,

atau **partohian**. Di tanah Karo beberapa **kuta** (huta=kuta) bergabung menjadi urung, dan tiap-tiap urung dikepalai oleh raja urung sedang tiap kuta dikepalai oleh **penghulu**.

Di dalam melaksanakan tugasnya raja-raja itu dibantu oleh beberapa orang. Di tanah Karo **Sibayak** itu dibantu oleh **Senina** dan **Anak Beru**. Senina itu semarga dengan Sibayak sedang anak beru dari marga yang berbeda dengan sibayak.

Di Pakpak raja dibantu oleh dua orang kepala. Seorang membantu tugas raja sehari-hari dan seorang lagi bertugas mengatur pertanian.

Demikianlah pemerintahan di tanah Batak, terdiri dari sejumlah besar raja-raja. Tiap kerajaan terdiri dari satu atau beberapa huta. Pada tiap-tiap kerajaan terdiri atas beberapa penguasa yang dipimpin oleh raja. Setiap raja sebenarnya tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang lebih tinggi. Beberapa kerajaan selalu mengadakan kerja sama perikatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Walaupun demikian di antara mereka selalu pula terdapat perselisihan dan peperangan-peperangan.

Gambaran huta di Tapanuli dewasa ini menunjukkan sisa-sisa peperangan di zaman lampau. Tiap huta biasanya terdiri dari beberapa rumah, dikelilingi oleh tumbuhan bambu berduri (aur) yang dipergunakan untuk benteng pertahanan dari serangan huta lain. Hubungan kekeluargaan sangat mempengaruhi bentuk hubungan antara raja-raja itu dengan raja lain. Begitu pula hubungan antara raja dengan penduduk huta ditentukan oleh hubungan adat kekeluargaan. Hubungan adat kekeluargaan itu di kalangan orang Batak disebut **dalihan na tolu**. Dalam adat dalihan na tolu itu terdapat tiga pihak yang berkedudukan berbeda-beda. Pertama pihak **hula-hula** (di Tapanuli Selatan disebut **Mora**, Karo - **Kalimbu-bu**), yaitu pihak pemberi anak perempuan. Pihak **Boru** (Karo, **anak beru**), yaitu pihak yang menerima anak perempuan. Ketiga pihak **Dongan sabutuha**, (Karo, senina), yaitu pihak keluarga semarga.

Di Nias tiap negeri disebut **Ori**. Ori adalah gabungan beberapa **banua** (desa). Tiap Banua dihuni oleh bahagian dari beberapa **mado**. Tiap Ori dikepalai oleh **Tuhenori** (kepala Ori) dan tiap Banua dikepalai oleh **Salawa** (kepala Desa).

Dengan sistem dalihan na tolu ini, maka hubungan antar keluarga raja-raja diatur kedudukannya dalam hubungan satu sama lain. Begitu pula hubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dalam hubungan itu kelihatannya pihak **hula-**

hula (mora, kalimbubu) mendapat penghormatan, tetapi harus diingat, bahwa marga pihak hula-hula ini pun menerima pula anak-anak perempuan dari marga lain. Mereka mengambil isteri dari marga lain, oleh sebab itu mereka di dalam keluarga isterinya berkedudukan sebagai boru pula. Dengan demikian, maka secara keseluruhan kedudukan raja-raja itu sama tinggi di dalam pandangan orang-orang Batak.

Salah satu penyebab peperangan-peperangan yang terjadi antara huta-huta Tapanuli di zaman dahulu adalah perselisihan mengenai adat. Hula-hula yang merasa kurang dihormati, boru yang merasa diperas atau teman semarga (**dongan sabutuha**) yang merasa direndahkan. Pergeseran-pergeseran itu terlihat dalam pelaksanaan hidup perekonomian, baik kewajiban penyelenggara-an upacara adat, maupun tentang kewajiban memberi dan hak menerima persembahan atau pemberian.

Di dalam upacara adat, segala sesuatu pada dasarnya ditanggung bersama, tetapi pihak Boru wajib mengeluarkan biaya dan tenaga yang lebih besar. Sebenarnya yang punya kewajiban adalah pihak Boru, tetapi dengan kasih-sayanganya tentu pihak hula-hula akan membantu, begitu pula pihak dongan sabutuha tidak akan berlepas tangan demi menjaga hubungan teman semarga.

Pada suku-suku Melayu yang tinggal di pesisir timur Sumatera Utara di Tamiang di utara sampai ke Labuhan Batu di selatan ikatan-ikatan kekeluargaan kurang berpengaruh. Di daerah ini tidak ada peninggalan-peninggalan marga seperti yang terdapat di daerah pedalaman. Ikatan-ikatan yang penting ialah didasarkan kepada ikatan teritorial. Tiap kampung dipimpin oleh datuk atau pawang. Orang-orang ini adalah orang yang dihormati, sehingga ia diangkat sebagai pengetua baik dalam adat maupun dalam kehidupan masyarakat.

Masalah-masalah pemakaian tanah pertanian, pemakaian tepian untuk penangkapan ikan, teluk dan rantau diatur menurut adat istiadat dan dijalankan di bawah pimpinan **datu** atau **pawang**. Jika terjadi peperangan-peperangan, maka keadaannya tidak jauh berbeda dengan daerah pedalaman.

2.4. Kehidupan Seni Budaya.

Nenek moyang kita tidak mengenal pendidikan formal (melalui sekolah). Peri kehidupan dan ilmu pengetahuan diwaris-

kan langsung melalui kehidupan sehari-hari kepada generasi muda. Begitulah melalui pengalaman anak-anak muda mengenal cara berburu, cara menangkap ikan atau bertani. Di samping itu halaman rumah tiap huta, kampung, atau banua dijadikan alat untuk bermain-main. Melalui permainan, anak-anak berusaha mengidentifikasikan diri mereka seperti orang dewasa, seolah-olah mereka berburu, berperang atau membuat perangkap.

Tidak semua pengetahuan dapat diwariskan dengan jalan demikian. Ilmu-ilmu gaib yang berasal dari datu dan pawang menghendaki pendidikan khusus. Masyarakat telah pernah melihat secara nyata tingkah laku datu dan pawang, namun selalu ada yang bersifat rahasia yang tak mudah dipahami dengan cara melihat saja. Hal itu perlu dipelajari secara mendalam dan sungguh-sungguh kepada datu atau pawang.

Oleh sebab itu datu dan pawang tidak saja didatangi oleh orang yang memerlukan pertolongan, tetapi juga didatangi oleh pemuda-pemuda yang menginginkan ilmu pengetahuan. Pemuda yang bersangkutan hidup dekat datu atau pawang, mengabdikan serta mengikuti latihan-latihan berat. Pengajaran dari datu, pawang kepada pemuda-pemuda itu adalah merupakan salah satu bentuk pengajaran formal yang tertua di negeri kita.

Memperoleh ilmu tersebut tidak mudah. Murid-murid perlu melakukan pengorbanan dan latihan-latihan yang berat. Yang penting bukan kemampuan untuk memahami, melainkan kemampuan untuk merapatkan hubungan dengan guru. Ada kalanya seorang datu atau pawang masih didatangi roh gurunya, untuk mengajarnya, walaupun gurunya sudah lama meninggal. Demikianlah pentingnya masalah rapatnya hubungan antara guru dengan murid di kalangan penduduk di zaman dahulu.

Berdasarkan peninggalan-peninggalan zaman Batu Pertengahan (Mesolitikum) di Sumatera Utara dijumpai peninggalan-peninggalan hasil kebudayaan, antara lain berupa kapak-kapak batu yang sudah diasah halus, alat dari tulang, bahan seni lukis. Pada zaman batu muda (Neolitikum) hasil-hasil kesenian lebih maju dari zaman sebelumnya. Kapak-kapak batu telah diasah demikian halus dan ada pula perhiasan dari batu dan tempayan dari tanah liat. Pada zaman logam dijumpai peninggalan-peninggalan seperti genderang perunggu (nekara), sebagai satu alat untuk upacara. Genderang ini banyak mempunyai ukiran-ukiran seperti lingkaran-lingkaran spiral, ombak-ombak, malahan kadang-kadang ada gambar manusia ataupun bintang.

Hasil karya mereka ini hampir sama dengan benda-benda yang dijumpai di Dongson (Annam, Indo Cina). Motif dan bentuk hiasan seperti peradapan Dongson terlihat pula pada hasil kesenian suku Batak dan Nias. Hal itu terlihat pada ukiran-ukiran yang terdapat pada rumah, pakaian atau alat-alat perang di daerah itu.

Seni tari di kalangan penduduk zaman dulu erat hubungannya dengan kepercayaan. Oleh sebab itu tarian merupakan bahagian yang tak dapat dipisahkan dari upacara-upacara, seperti kematian, minta hujan, menolak bala, panen, perkawinan, dan sebagainya. Tarian-tarian itu kelihatannya sederhana, tetapi mengandung nilai-nilai sakral dan magis. Alat-alat yang dipergunakan biasanya adalah gendang dan serunai. Tarian-tarian itu sekarang masih hidup di kalangan masyarakat, seperti **tor-tor**, **sigale-gale**, tari perang (Nias, Dairi).

Kesusasteraan yang tertua di kalangan penduduk ialah mantra. Mantra itu ialah susunan kata-kata yang bernilai tinggi yang diucapkan oleh datu atau pawang untuk keperluan magis, baik untuk tujuan-tujuan baik atau buruk. Di antaranya mantra-mantra tersebut bertujuan untuk pengobatan, pemanggilan roh, atau untuk menjaga keselamatan.

Salah satu contoh mantra di kalangan orang Melayu ialah:

"Hai roh, aku tahu asalmu jadi.
Ketuban asal mula kau jadi.
Hai arwah, aku tahu asalmu jadi.
Temuni asal mula kau jadi.
Hai reh an, aku tahu asalmu jadi.
Tali pusat asal kau jadi.
Marilah kau datang, di sini rumah tangga
kampung halaman jangan engkau
bergerak dari tubuh si
(sebut nama sisakit)
Koerr semangat !

2.5. Alam Pikiran dan Kepercayaan.

Sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Islam ke Sumatera Utara, suku Melayu mempunyai kepercayaan yang bersifat animisme.

Kepercayaan itu bertitik tolak kepada empat pokok pandangan:

- a. Segala makhluk di dunia ini, hewan maupun tumbuh-

tumbuhan terjadi dari satu daya hidup (jiwa) yang serupa.

- b. Manusia selain mempunyai roh juga mempunyai semangat.
- c. Roh manusia yang telah mati mempengaruhi orang lain, oleh sebab itu wajib dipuja.
- d. Dewa, jin dan alam gaib mempengaruhi kehidupan manusia, maka itu ia dipuja pula.

Suku Melayu percaya pula akan adanya dewa, jin, dan yang tidak berasal dari manusia. Sebagai dewa yang tertinggi dinamai Batara Guru yang menjadikan alam seluruhnya, memelihara ciptaannya, menghukum apa saja yang melanggar keturunan yang dibuatnya.

Pembantu Batara Guru dalam pekerjaannya ialah Sang Hyang, yaitu dewa-dewa yang berdiam antara bumi dan langit. Di samping itu ada dewa yang menjaga laut, gunung, rimba, dan pohon kayu besar. Dewa-dewa ini tidak dapat mengatur sesuatu selain tinggal di tempat-tempat tersebut. Namun mereka dapat mengganggu manusia. Dewa Matahari dan Bulan merupakan dewa penghubung bagi Batara Guru. Dewa ini mempunyai kekuasaan besar untuk mengatur sesuatu di dunia, sebab itu Dewa Matahari selalu disembah dan dipuja untuk mengharapkan suatu rahmat darinya.

Kepercayaan asli suku Batak juga bersifat animisme. Sebelum pengaruh Hindu, Islam, dan Kristen datang, mereka telah mengenal **trinit**, yaitu tentang keilahian. Pada mulanya trinit ini dikenal dalam pengertian yang terbatas, sehingga diasosiasikan dengan roh nenek moyang. Ini terdapat dalam kalimat doa atau mantra (**tonggo-tonggo**). Untuk memuja roh nenek moyang terdapat sebutan, "**Daompung Debata na tolu, natolu gugu natolu haranjaon**". Maksudnya ompung debata yang tiga. Trinit ini digambarkan dengan Mula Jadi Na Bolon dan dewa inilah yang terpenting dalam susunan keilahian. Mula Jadi Na Bolon dianggap sebagai pencipta segala-galanya dan di dalamnya terdapat tiga dewa yakni Batara Guru, Soripada, dan Mangala Bulan. Trinit ini diasosiasikan dengan kosmos yang terdiri dari tiga ruangan:

- a. Banua Ginjang, tempat bersemayamnya Mula Jadi Na Bolon.
- b. Banua Tonga, suatu dunia yang fana, yakni Bumi yang didiami manusia.

- c. Banua Toru, tempat roh-roh jahat dan tempat yang sangat gelap (Hades).-

Di dalam kehidupan sehari-hari orang Batak melambangkan ke tiga Banua itu dengan warna-warna, yakni putih, merah dan hitam dan sifat ketiga warna ini harus dihormati sebagai warna yang suci.

Adat sangat erat hubungannya dengan kepercayaan, alam kosmos dan trinitas keilahian menggambarkan adanya susunan masyarakat teratur. Sebagai nama dewata Mula Jadi Na Bolon yang mengatur susunan alam kosmos dengan sempurna, demikian pula adat mengatur susunan tata kehidupan masyarakat, sehingga adat dianggap sejajar dengan kepercayaan dalam pemujaan dan akhirnya adat disamakan dengan agama atau kepercayaan.

Kepercayaan dan penyembahan kepada roh oleh orang Batak sering disebut *pelbegu*, artinya menyembah *begu* atau roh. *Begu* adalah roh atau badan yang tidak berdaging, karena itu kerap kali disebut "*nabegu do i!*" artinya orang itu kuat sekali. Segala sesuatu ada *begunya* seperti pohon beringin, sumur, hutan, rumah, dan sebagainya.

Pada suku Nias dikenal *pelbegu* yang berarti menyembah roh. Nama yang diberikan oleh penganutnya sendiri adalah "*malohe adu*" (penyembah *adu*). Sifat kepercayaan ini berkisar pada penyembahan roh leluhur atau nenek moyang. Untuk keperluan ini mereka membuat patung-patung yang disebut *adu*. Patung yang ditempati oleh roh-roh leluhur disebut *adu satua* dan harus dirawat dengan baik.

Menurut kepercayaan orang Nias, *pelbegu*, maka tiap orang mempunyai dua macam tubuh, yaitu yang kasar disebut *boto* dan yang halus ada dua macam, yaitu *noso* (napas) dan *lumo-lumo* (bayangan).

Jika orang mati, maka botonya kembali menjadi debu, nosonya kembali pada **Lawa Langi** (Tuhan), sedangkan *lumo-lumonya* berubah menjadi *bekhu* (roh). Selama belum dilakukan upacara kematian, maka *bekhu* akan tetap berada di sekitar makamnya, karena untuk pergi *teteholi 'ana'a* (dunia roh) seorang harus menyeberangi jembatan yang dijaga oleh sang dewa dengan kucingnya yang dinamakan *mao*. Orang yang berdosa dan belum diupacarakan akan didorong masuk ke dalam neraka yang berada di bawah jembatan itu.

Arwah nenek moyang, mereka puja agar anak cucu dilindungi dari segala bencana.

Mereka percaya bahwa yang mati itu tetap mempunyai beberapa kekuasaan terhadap manusia. Pemujaan nenek moyang dan hal-hal yang gaib dilakukan langsung atau dengan perantaraan pawang dan datu. Mereka dapat berhubungan dengan apa yang dipujanya dan nenek moyang itu dapat menjelma dalam bentuk buaya, harimau, belut, babi, ayam putih, dan sebagainya. Malahan ada sementara manusia pendukung animisme itu menganggap dirinya sebagai keturunan dari salah satu binatang, sehingga untuk memberi penghormatan kepada binatang itu tidak lagi disebut namanya tapi disebut dengan panggilan nenek atau datuk. Binatang ini dianggap sebagai penjaga kampung. Jika masyarakat berbuat salah atau melanggar adat, maka binatang itu akan datang ke kampung untuk memakan ternak atau manusia. Jika ini terjadi, dibuatlah upacara untuk meminta maaf atas kesalahan anak cucu yang menimbulkan kemarahan nenek moyang itu. Upacara tersebut dipimpin oleh seorang pawang atau datu, biasanya dengan mengadakan kurban.

Di samping itu jika semangat manusia berkurang atau mengendur, atau dikatakan merajuk, diadakan upacara upah-upah terhadap semangat yang hilang itu. Upah-upah itu biasanya terbuat dari perhiasan, atau perkakas, atau binatang ataupun benda-benda tertentu. Ajimat merupakan hal yang penting juga dalam kehidupan. Untuk segala soal hidup diperlukan ajimat, karena dianggap sebagai perisai atau tangkal yang mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan ajimat ini besar kecilnya tergantung kepada cara memeliharanya. Apabila kurang pemeliharannya, maka kekuatannya menjadi hilang. Cara memakainya ada yang digantung di dada, punggung, leher atau pinggang. Ajimat ini tidak dapat dibuat oleh sembarang orang, melainkan oleh dukun atau datu.

Selain jimat, maka mantra-mantra penting pula kedudukannya dalam kehidupan. Mantra-mantra itu dapat menimbulkan kebaikan atau keburukan.

Pada suku Batak kepercayaan berkorban kepada Begu atau roh itu dilaksanakan oleh datu. Datu mengetahui kehendak roh itu, karenanya orang-orang Batak banyak meminta bantuan kepada datu.

Untuk memberi korban kepada arwah, maka dilakukanlah upacara dengan memukul gendang sehingga salah seorang yang hadir kesurupan. Makanan untuk roh itu disediakan di suatu tempat tertentu. Bekas tempat upacara ini dijumpai di daerah Mandailing,

yaitu Pagaran Si gotol (Dusun yang gatal), di Sipirok disebut Begu Pengikiran dan di Samosir disebut Begu Pusuk Buhit.

Kepercayaan mereka terhadap alam kosmos menjadi perhatian yang istimewa dalam upacara pemujaan. Di dalam kosmos itu terdapat sesuatu kekuasaan luar biasa di mana manusia tidak dapat mengerti kebesarannya. Jadi kosmos dianggap tempat bersemayamnya para dewa, di mana kepercayaan ini adalah suatu realitas yang tinggi sebagai obyek ketakutan sehingga mereka menyembah kepada suatu kekuasaan untuk mendapat kekuatan. Pelaksanaannya dilakukan melalui upacara dengan memukul gendang. Di samping itu mereka melakukan upacara penyembahan dalam bentuk drama dan tarian. Tempat upacara penyembahan dewa itu adalah di Pusuk Buhit. Salah satu ciri khas kepercayaan ini adalah menghormati roh nenek moyang. Mereka percaya, bahwa roh orang mati akan melayang-layang di udara dan dapat mengganggu orang-orang yang masih hidup. Untuk mengatasinya, maka mereka harus membujuk roh itu melalui sajian-sajian yang sesuai dengan keinginannya semasa hidupnya dahulu. Penghormatan haruslah benar-benar diberikan karena akan membahayakan diri sendiri apabila dilakukan tidak dengan sempurna.

Roh itu banyak bersemayam di gunung, hutan, mata air, sungai, batu besar, dan pohon yang disebut **sombaon**, dan harus disembah melalui sesajen. Sombaon ini dapat masuk ke diri seseorang dan sebagai mediumnya ia dapat memberi nasehat dan petunjuk dalam tata kehidupan yang baik. Setiap orang harus berhati-hati akan segala tindakan, karena sombaon yang tinggal di tempat keramat itu dapat mengganggu bagi yang bersalah dalam tindakannya. Itulah sebabnya mereka harus menyembah pohon, batu besar, mata air, sungai dan sebagainya.

Pada suku Nias dalam kepercayaan pelbegu dewa yang penting adalah **Lawa Langi** yang dianggap raja segala dewa di atas dunia. **Latu Radano** adalah raja dewa di dunia bawah, sebagai saudara tua **Lawa Langi** sedangkan **Selewenasara** sebagai dewa pelindung. **Para Ere** (pemuka agama) adalah isteri Lawa Langi. Semua mitologi orang Nias dalam kepercayaannya itu terdapat pada syair yang ditembangkan yang disebut **Hoho**.

Menurut mitologi Nias yang terdapat dalam **Hoho**, maka alam serta isinya adalah ciptaan Lawa Langi dari beberapa warna udara yang diaduk dengan tongkat bernama **Sihai**. Untuk menciptakan manusia, **Lawa Langi** menciptakan dahulu sebuah pohon ke-

hidupan yang disebut **tora'a** yang kemudian berbuah dua buah dan dierami oleh laba-laba emas ciptaan Lawa Langi. Dari buah itu kemudian lahir sepasang dewa pertama yang bernama **Tuhamora'a Auji**, berjenis laki-laki dan **Burutiroangi Burutiraoana'a** sebagai perempuan. Keturunan sepasang dewa ini menjadi penghuni langit dengan dewa Sero Uwu Zehano sebagai rajanya. Dewa ini mempunyai tiga orang isteri yang masing-masing beranak tiga orang putra.

Di antara kesembilan putera ini, kemudian timbul pertengkaran dalam hal memperebutkan mahkota langit. Pada waktu itu Dewa Sirao hendak mengundurkan diri. Untuk membereskan persengketaan ini, ia mengadakan sayembara ketangkasan menari di atas mata sembilan tombak (**soko**) yang dipancangkan di atas tanah. Sayembara ini dimenangkan oleh putera bungsunya yang bernama **Luo Mewona**. Untuk menentramkan kedelapan puteranya yang lain maka Sirao menurunkan mereka ke tanah Nias. Untuk menemani kakaknya, Luo Mawena juga menurunkan putera sulungnya yang bernama Silobu di Hiang Banua Kuo Mondra negeri Ulu Maro'o, di kecamatan Mandrehe (Nias bahagian Barat) sekarang.

Dari kedelapan putera Sirao tadi, hanya empat orang yang dapat sampai di Pulau Nias, sehingga menjadi leluhur suku bangsa Nias. Keempat puteranya yang lain, seorang jatuh menembus bumi menjadi ular besar bernama **Da'o Zanaya tano sisagoro**, atau **Da'o Zanaya tano Sibolo** (pendukung bumi, penyebab gempa bumi). Sedangkan yang lain jatuh ke dalam air menjadi hantu sungai dan menjadi pujaan para nelayan, sedangkan yang terbawa oleh angin tersangkut di pohon menjadi hantu hutan. Yang terakhir jatuh di tempat berbatu-batu di daerah Laraga (12 Km dari Gunung Sitoli) menjadi leluhur dari orang-orang Nias yang berilmu kebal.

Dari mitos ini kita melihat bahwa hubungan antara kepercayaan terhadap roh dan dewa-dewa sangat erat pada suku Nias.

DAFTAR – BACAAN

- Boeke, J.H., **Batas-Batas Dari Masyarakat Pedesaan Indonesia**, Brathara, Jakarta, 1971.
- Duyvendak, J.P.H., **Inleiding Tot De Ethnologie van de Indonesische Archipel**, J.B Wolters, Jakarta, 1946.
- Fischer, Dr.H.Th., Anas Makruf, **Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia**, Cet. IV, PT. Pembangunan, Jakarta 1960
- Harsoyo, Prof., **Pengantar Anthropologi Budaya**, PT. Budi Cipta, 1967.
- Heekeren, H.R. van, **Penghidupan Dalam Zaman Pra Sejarah Indonesia**, Surungan, Jakarta, 1960.
- , **The Stone Age of Indonesia**, The Hague, 1972.
- Husny, T.M.Lah, **Butir-Butir Adat Budaya Melayu**, Badan Penerbit Husny, Medan, 1972.
- Hutagalung, Wasinton, **Torombo Marga Suku Batak**, Penerbit Fa.Sihardo, Medan, 1961.
- Koentjaraningrat, **Sejarah Kebudayaan Indonesia**, New Haven, 1954.
- , **Pengantar Anthropologi**, P.D. Aksara, Jakarta, 1969.
- Meuraxa, Dada, **Sejarah Kebudayaan Suku-Suku di Sumatera Utara**, Penerbit Sastrawan, Medan, 1973.
- Resink, G.J., **Indonesian History Between The Myths**, University of British, Columbia, 1968.
- Siahaan, BA.,N., **Sejarah Kebudayaan Batak**, CV.Napitupulu & Sons, Medan, 1964.
- Soekarno, Drs.R., **Sejarah Kebudayaan Indonesia**, Jilid I, Cet.V, Jakarta, 1973.
- Yamin, Prof.H.Muhammad, **6000 Tahun Sang Merah Putih**, Balai Pustaka, Jakarta, 1958.

BAB III
ZAMAN KUNO
(± Abad I – 1500 M)

3.1. Pertumbuhan Pemerintahan Dan Kenegaraan.

Daerah pesisir Sumatera Utara sebelah timur terletak di tepi Selat Melaka. Selat itu sejak permulaan tarikh Masehi telah ramai dilayari, baik oleh orang-orang Hindu maupun oleh orang-orang Cina. Pada waktu itu jalan darat yang menghubungkan Cina dengan negeri-negeri sebelah barat melalui gurun Gobi diganggu oleh suku-suku liar. Hal itulah yang mendorong majunya pelayaran antara Cina dan India melalui selat Melaka.

Sebagai akibat lalu lintas melalui selat Melaka itu, maka daerah sekitar selat tersebut memperoleh perkembangan dan kemajuan. Beberapa tempat yang strategis, pada teluk-teluk yang aman atau pada muara-muara sungai, lama kelamaan berubah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal asing itu. Kedatangan orang-orang asing itu mengakibatkan berubahnya desa-desa pesisir menjadi pusat lalu-lintas dan perdagangan. Begitu pula kedudukan kepala desa (datu, pawang) sedikit demi sedikit berubah menjadi raja yang turun temurun.

Demikianlah umumnya proses pertumbuhan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia sangat bertalian dengan perkembangan lalu lintas pelayaran internasional antara India dan Cina sejak permulaan tarikh Masehi. Oleh karena daerah pesisir timur Sumatera Utara terletak di tepi Selat Melaka, sebuah selat yang sangat penting dalam pelayaran internasional waktu itu, maka dapat diduga, bahwa di daerah ini perubahan-perubahan itu lebih cepat berlangsung. Tapi sayang sampai sekarang penelitian belum memberikan hasil tentang peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang tertua di daerah ini.

Keadaan alam pesisir timur Sumatera ditandai oleh aliran sungai-sungai yang berasal dari Bukit Barisan, di antaranya yang besar ialah sungai Asahan, sungai Rokan, sungai Kampar, sungai Indragiri, sungai Batang Hari dan sungai Musi.

Peninggalan-peninggalan sejarah membuktikan, bahwa daerah pu-

lau Sumatera bahagian tengah dan selatan, yaitu di lembah sungai Musi dan sungai Batang Hari pada zaman dahulu jauh lebih maju. Di situlah dahulu berpusat kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu, yaitu di Palembang dan Jambi. Lebih ke utara dijumpai pula peninggalan candi-candi berupa stupa di Muara Takus dekat Pakan Baru, kelompok candi-candi di Gunung Tua, dekat Portibi yang terdiri dari beberapa candi.

Oleh karena ketiadaan sumber di daerah ini, maka penulisan sejarah Sumatera Utara dari zaman yang tertua, yaitu sekitar permulaan tarikh Masehi terpaksa dilakukan dengan mempergunakan sumber-sumber yang berasal dari luar. Beberapa kerajaan yang diberitakan dalam sumber-sumber Cina sampai abad ke-VII ialah **Po-Li**, **Cho-p'o**, **Ho-ling**, **Ho-lo-tan**, **Ta-Che**, **Kan-t'o li**, **Mo-lo-yeu**, **Che-li-fo-che**, dan **San-fo-ts'i**.

Beberapa nama yang disebut sumber Cina itu dengan mudah dapat ditandai, misalnya yang dimaksud dengan **Cho-p'o** ialah Jawa, **Ho-ling** adalah Kalingga, **Kan-t'o-li** adalah Kendari, **Mo-lo-yeu** adalah Melayu sedang **Che-li-fo-che** dan **San-fo-ts'i** diidentikkan oleh ahli-ahli sejarah dengan Sriwijaya atau Palembang. Selanjutnya **Ho-lo-tan** disamakan orang dengan sebuah tempat di Semenanjung Melayu, atau ada pula yang menganggap Kalimantan, sedangkan **Po-li** disamakan orang dengan Bali atau mungkin juga sebuah tempat di Sumatera. Sebuah nama lain yang diberitakan juga oleh sumber Cina itu ialah **Ta-che** yang oleh beberapa orang peminat sejarah di daerah ini sering disebutkan sebagai Aceh.

Sebuah tempat di pesisir barat Sumatera Utara, yaitu Barus sering pula menarik perhatian penulis-penulis sejarah di daerah ini. Hal itu sehubungan dengan berita Ptolemaeus dari Alexandria dalam bukunya **Priplous Eritras Talasses** yang menyebutkan beberapa negeri di sebelah timur India. Salah satu di antaranya ialah Barosai yang sering diidentikkan orang dengan Barus. Orang semakin tertarik akan nama Barus itu, karena dari daerah inilah dikeluarkan kamper atau kapur-barus yang diduga sejak zaman purba telah dipakai orang di Mesir Kuno.

Nama-nama negeri yang disebut sumber Cina sampai abad ke-VII itu tidak ada yang dapat kita cari identitasnya di Sumatera Utara. Mungkin di Cina daerah ini dikenal sebagai daerah Sriwijaya, sebab kerajaan itulah yang terbesar yang kekuasaannya meliputi pesisir timur Sumatera sampai ke Semenanjung Melayu. Pusat kekuasaannya terletak di Palembang dan pada abad ke-

VIII kekuasaannya meluas ke utara sampai ke tanah genting Kra. Prasasti Ligor yang bertahun 775 menggambarkan bahwa kekuasaan Sriwijaya telah sampai ke daerah itu. Pada batu itu diberitakan tentang pembangunan beberapa stupa dan menyebut tentang raja Sriwijaya dan pendeta Jayanta.

Sebuah kerajaan di Sumatera Utara disebut dalam maklumat Tanjoore dari tahun 1030 yang dikeluarkan oleh Rajendra Cola Dewa. Raja itu mencatat nama-nama negeri yang dikalahkannya dalam satu ekspedisi menaklukkan Sriwijaya. Negeri-negeri yang disebutnya ialah **Sriwijaya, Pannai, Malayur** dan **Kendara**. Panai menurut N.J.Krom adalah sebuah negeri yang sampai sekarang masih ditandai di tepi sungai yang namanya sama dengan nama negeri itu, jadi sungai Panai.

Selanjutnya dari Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca dari abad ke-XIV kita temukan beberapa nama negeri yang terdapat di Sumatera Utara, yaitu **Pane, Haru, Mandailing, Tamiang, Lawas**, dan **Barus**. Negeri-negeri itu disebut sebagai negeri yang takluk kepada Majapahit.

Abad ke-XV merupakan titik terang dalam sejarah Sumatera Utara, yaitu berkat catatan-catatan yang dibuat oleh dua orang Cina Muslim yang melakukan pelayaran-pelayaran atas perintah Dinasti Ming di bawah pemerintahan Kaisar Yung Lo. Pada masa pemerintahan kaisar Yung Lo (Ming Ch'eng Tsu 1403-1424) tersebut diperintahkanlah laksamana Cheng Ho melakukan ekspedisi-ekspedisi ke Asia Tenggara dan Asia Selatan. Tujuh kali Cheng-Ho melakukan pelayaran ke Asia Tenggara dan ada di antaranya yang sampai ke Laut Merah. Ekspidisi-ekspidisinya diabadikan oleh Ma-Huan (seorang Cina Muslim) dan Fei Hsin dalam bukunya **Ying Yai Sheng Lan** dan **Hsing Cha Sheng Lan**. Cheng Ho sendiri mencatat perjalanannya dalam buku **Hsi Yang Chi** (Catatan Perjalanan ke Laut Barat).

Menurut Ma Huan dalam bukunya **Ying-yai Sheng Lan**, kerajaan **Aru** terletak di muara sebuah sungai yang dapat dicapai empat hari empat malam pelayaran dari Melaka. Sebelah barat kerajaan itu terletak kerajaan Samudera sedang sebelah timur terdapat dataran rendah. Menurut catatan sejarah Dinasti Ming (1368-1643), maka pada tahun 1411 raja Aru Su-lu-tang Hut-sin (Sultan Husin) mengirim utusan ke Cina. Utusan itu dilanjutkan dengan masa pemerintahan puteranya Tuan A-la-sa, yaitu pada tahun-tahun 1419, 1421, 1423, sedang pada tahun 1431 Cheng Ho mengunjungi negeri itu.

Groeneveldt berpendapat, bahwa kerajaan itu terletak di muara sungai Barumun, tetapi ada beberapa kemungkinan lain. Misalnya di Langkat disebut pula sebuah negeri yang sampai sekarang bernama Teluk Haru. Di depan muara sungai Besitang lewat Pangkalan Susu kita temukan pulau Sembilan, sesuai dengan berita Fei Hsin dalam **Hsing-cha Sheng Lan** mengatakan, bahwa Aru itu berhadapan dengan pulau Sembilan. Lagi pula menurut sumber-sumber tadi Aru berbatasan dengan Samudera, jadi pasti-lah letaknya lebih ke utara. Sedangkan Panai masih kita temukan negerinya di tepi sungai Kualu, antara sungai Kualu dengan sungai Panai di Labuhan Batu.

Sebuah kerajaan lain yang diberitakan oleh Ma Huan dan Fei-Hsin ialah kerajaan **Nakur**. Kerajaan ini menurut mereka adalah kerajaan pedalaman di daerah pegunungan dan mungkin sekali terletak di daerah Simalungun sekarang ini. Kerajaan Nakur (Nagur) itu mungkin berpusat di Timur Raya (Simalungun sampai Serdang Hulu) yang luasnya meliputi juga daerah Karo dan Aceh Tengah. Sampai sekarang di daerah itu masih terdapat beberapa negeri yang bernama Nakur, seperti Nagur Bayu, Nagur Usang. Pada masa pemerintahan Al Kahar di Aceh (1537-1568) kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara itu ditaklukkan.

Demikianlah kerajaan Aru yang dahulunya berpusat di daerah pesisir, terpaksa memindahkan ibu negerinya ke pedalaman.

Mungkin pusat daerah kerajaan Aru itu dipindahkan ke Deli Tua. Di daerah itu masih terdapat beberapa peninggalan yang erat hubungannya dengan kerajaan Deli.

Sesudah kerajaan Nagur ditaklukkan Aceh maka berdirilah kerajaan-kerajaan kecil dipimpin oleh marga-marga. Kemungkinan sebelum itu masih banyak negeri-negeri di Simalungun yang ingin meneruskan kerajaan Nagur. Hal itu terbukti dengan banyaknya nama negeri yang memakai nama Nagur di Simalungun, seperti **Nagur Raja**, **Nagur Usang**, **Nagur Bayu**, **Parhutaan Nagur**, di daerah Tiga Dolok dan **Parhutaan Nagur** di Tigarunggu.

Ada pula pendapat yang mengemukakan, bahwa kerajaan Nagur itu terpecah-pecah dan keturunan raja-rajaanya memerintah di Silou, Silima Kuta, Purba, Raya, dan Panei. Di samping itu didapati sebuah kerajaan lain yaitu kerajaan Batang Iou. Kerajaan ini berpusat di daerah Tanah Jawa tidak berapa jauh dari Kasindir. Dari daerah itu telah diketemukan beberapa peninggalan sejarah berupa patung-patung dan arca yang sekarang dapat kita lihat di pekarangan museum Simalungun di Pematang Siantar. Sebuah

di antaranya berupa patung orang yang kepalanya sudah diganti baru berasal dari Raya Kahean.

Kemudian beberapa lagi berupa kura-kura dan profil hewan yang dikendarai. Menurut orang-orang dikenal masyarakat sebagai buah catur raja-raja di zaman dahulu.

Jauh ke pedalaman, yaitu di daerah sekitar danau Toba, di Tanah Karo, Dairi, Toba, dan Mandailing sampai abad ke-XV berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah raja-raja.

Raja-raja itu ada yang luas kekuasaannya ada pula yang kecil dan meliputi satu desa (huta) saja. Pemerintahan di tanah Batak itu terpecah-pecah atas sekian kerajaan yang sering pula mengadakan ikatan-ikatan untuk kepentingan pertahanan, tetapi masing-masing anggota sebenarnya bebas dari ikatan-ikatan kekuasaan yang lebih tinggi.

Dari sekian banyak kerajaan itu, maka kedudukan raja Bakarra dianggap lebih penting. Kedudukan yang lebih penting itu disebabkan adat-istiadat dan tradisi yang menganggap daerah itu sebagai tempat asal orang Batak.

3.2. Penyelenggaraan Hidup Dalam Masyarakat.

Bertani dan beternak adalah mata pencaharian yang makin lama makin penting sejak abad Pertama Masehi. Suku-suku Batak yang termasuk Proto Melayu sejak dari tanah asal di daratan Asia Tenggara telah mengenal pertanian. Tetapi daerah sekitar danau Toba itu makin lama makin hilang kesuburannya. Hal itu disebabkan alur sungai yang makin lama makin dalam, sebab tanah di situ terdiri dari tanah pasir yang mudah sekali termakan erosi. Akibatnya terbentuklah jurang-jurang yang dalam dan sukar diairi. Lembah Silindung di selatan, sekitar Tarutung adalah tempat penyebaran orang-orang Toba yang tertua ke arah selatan dan Dairi, Karo, dan Simalungun adalah penyebaran mereka ke utara dan timur.

Di daerah sekitar percandian di Gunung Tua pun dijumpai bekas-bekas penggarapan tanah yang intensip. Sekarang daerah itu kebanyakan adalah padang rumput yang tandus, tetapi pada beberapa lembah yang rendah didapati kampung-kampung yang subur. Jadi keadaannya hampir sama dengan di Tapanuli Utara.

Rupanya alur sungai Barumon itu makin dalam sehingga air sungai itu tidak dapat lagi mengairi daerah pertanian sekitarnya.

Hal itulah yang menimbulkan kegersangan daerah itu sekarang. Bagaimanapun pada zaman dahulu daerah itu adalah tanah pertanian yang subur.

Tidak saja di daerah pedalaman, melainkan di daerah pesisir timur pun pertanian itu merupakan mata pencarian utama. Ma Huan dan Fei Hsin pada permulaan abad ke-XV menceritakan tentang pertanian dan peternakan di Aru dan Nakur. Penduduk negeri Nakur menurut Ma Huan berladang walaupun hasilnya tidak seberapa. Beberapa binatang ternak yang diceritakan oleh Fei Hsin ialah babi, kambing, dan ayam, tetapi yang sangat menarik ialah bahwa penduduk mengumpulkan belerang dan beberapa wangi-wangian (kapur barus dan kemenyan) untuk dijual kepada pedagang asing. Di samping itu mereka membeli sutera, keramik dan beberapa jenis barang lain dari orang-orang Cina.

Penduduk Aru juga hidup dari pertanian dan menangkap ikan serta beternak. Mereka menjual kapur barus, belerang, dan cula badak kepada orang-orang Cina dan membeli barang-barang lain dari orang-orang asing itu.

Selanjutnya Ma Huan dan Fei Hsin juga menceritakan pakaian penduduk Aru dan Nakur. Mereka memakai bahan kulit kayu, tetapi juga ada yang memakai kain katun yang disebut orang Cina K'a-u-ni. Untuk menangkap ikan mereka memakai sampan. Rupanya sampan yang terbuat dari sebatang kayu yang ditakik itu (biduk, solu) sangat menarik perhatian orang-orang asing itu. Sedang alat senjata bagi orang laki-laki ialah panah. Mereka membawanya bila berburu atau dalam perjalanan mengumpulkan hasil-hasil hutan.

Di dalam menyelenggarakan keperluan hidup, seperti turun ke sawah, membangun rumah, pergi berburu, menentukan hari baik untuk sesuatu pekerjaan, sangat penting kedudukan datu atau pawang. Hal itu masih dijumpai dalam buku-buku tulisan Batak yang kita sebut **pustaka**.

Fei Hsin menceritakan hubungan masyarakat di Nakur yang dianggapnya sangat istimewa. Golongan tinggi dan golongan rendah sama-sama mengerjakan tanah, si kaya tidak memeras si miskin, sebaliknya si miskin tidak perlu mencuri harta si kaya.

Tentu ada perbedaan antara penduduk. Perbedaan itu berdasarkan keturunan antara keturunan bangsawan dan orang biasa. Bentuk rumah dan alat-alat yang dipakai menunjukkan perbedaan-

an derajat. Alat-alat makan raja-raja dan bangsawan terbuat dari kuningan yang mungkin dibeli dari orang asing, sedang alat makan orang biasa terbuat dari kayu (**dulang**) atau bambu.

3.3. Kehidupan Seni Budaya.

Kehidupan seni budaya pada zaman kuno tidak dapat kita pisahkan dengan kepercayaan. Kepercayaanpun tidak dapat dipisahkan dengan adat-istiadat, karena adat itulah pelaksanaan dari kepercayaan masyarakat. Perilaku kehidupan masyarakat diatur dalam adat-istiadat (tradisi) dan di dalam tradisi itu terdapat nilai-nilai kepercayaan.

Pola kehidupan atau budaya masyarakat diteruskan kepada generasi selanjutnya melalui pendidikan. Pendidikan pada zaman kuno tidak dilakukan oleh lembaga yang berdiri sendiri, melainkan dilaksanakan langsung di tengah masyarakat melalui kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang demikian disebut pendidikan yang bersifat informal. Pelaksanaan pendidikan itu tidak hanya mewariskan cara bertani atau berburu, melainkan di dalamnya berisi pula norma-norma adat istiadat dan kepercayaan. Kepada anak-anak diajarkan cara berburu bukan hanya cara mempergunakan panah atau tombak, melainkan diajarkan pula segala mantra dan tabu di dalam berburu itu. Begitu pula jika diajarkan cara bertani maka tidak hanya diajarkan cara mencangkul atau menebas hutan, melainkan diajarkan pula segala segi norma memilih waktu, mantra-mantra serta tabu-tabu yang perlu diperhatikan dengan sempurna.

Salah satu segi pendidikan yang penting ialah bertutur, yaitu cara memperlakukan orang lain dalam hubungan sosial. Kedudukan seseorang terhadap orang lain sangat penting di dalam pergaulan hidup di setiap daerah. Tutur itu di kalangan orang Melayu mengenal hubungan yang terbatas pada beberapa turunan, tetapi di kalangan orang Batak hubungan itu tersusun dalam **tarombo** yang meriwayatkan keturunan orang Batak secara keseluruhan. Tarombo bukan saja penting kedudukan dalam mengenal garis keturunan, melainkan penting pula dalam mengenal kedudukan seseorang terhadap orang lain dalam ikatan kekeluargaan Dalihan Na Tolu. Kedudukan itu menyangkut alam kepercayaan dan penuh dengan larangan-larangan dalam pergaulan (tabu) serta keharusan-keharusan tertentu.

Bagi golongan datu serta keturunan datu sangat penting

pendidikan mengenai alam gaib dan roh-roh serta mantera-mantera. Kumpulan ilmu yang demikian itu terhimpun di dalam tulisan-tulisan yang digoreskan pada bambu dan kulit kayu, yang disebut **pustaka**, ditulis dengan aksara Batak suatu tulisan yang tertua di daerah ini. Tulisan ini dipelajari oleh orang-orang yang ingin mengetahui ilmu-ilmu kedatuan.

Aksara Batak itu digoreskan dengan semacam tinta di atas lempeng-lempeng kulit kayu atau pada bambu. Huruf itu terdiri dari 19 buah **indung ni surat** dan 10 buah **anak ni surat**. Oleh karena indung ni surat terdiri dari 19 buah maka sering disebut **surat sapuluh siah**. Cara menulisnya ada tiga macam:

a. Cekung dan Cembung:

la sa ga ka wa ta na ba ra i dan u

Menurut ceritera rakyat pengajaran membaca dan menulis aksara Batak itu dilakukan bukan dengan cara belajar kepada seorang guru, melainkan si pelajar berkeliling membawa minuman dan memberikan minuman itu pada orang-orang yang ditemukannya dan dari mereka itulah si "murid" belajar menuliskan dan membaca tulisan Batak.

Seni rupa pada zaman Kuno bersifat magis, yaitu dijumpai pada patung-patung nenek moyang yang tersebar luas, baik di Simalungun, Batak, Karo sampai ke Mandailing. Patung-patung nenek moyang itu tidak memakai paku, melainkan dengan cara menyusun bahagian-bahagian sedemikian rupa sehingga kukuh dan tahan terhadap guncangan.

Peninggalan-peninggalan seni bangunan Hindu dijumpai di Portibi, Bahal Batu (Tapanuli Selatan) dan di dekat Labuhan Deli. Penemuan di Portibi dan Bahal Batu berupa candi-candi dan peninggalan dekat Labuhan Deli yang terkenal dengan peninggalan di kota Cina berupa arca-arca.

Bangunan-bangunan di Portibi dan Bahal Batu itu terbuat dari batu bata dan tidak dapat dilihat ukirannya. Patung-patung-nya juga sudah berserakan dan tidak dapat dilihat posisinya pada candi-candi tersebut.

Seni tari zaman kuno erat hubungannya dengan kepercayaan. Tarian adat di kalangan orang Batak disebut **tortor**, yang ditarikan pada waktu tertentu seperti kematian, perkawinan dan berfungsi sebagai persembahan kepada roh-roh nenek moyang. Tari patung dari Tapanuli Utara yang terkenal ialah **Sigale-gale**. Tari ini di-

lakukan dengan mempergunakan patung yang digerakkan dengan tali dan mengikuti irama gendang.

Di tanah Karo tortor disebut **landek**.

Setelah penyiaran agama Hindu - Budha di beberapa tempat tumbuh pusat-pusat peribadatan di bawah pimpinan pendeta. Para pendeta menggantikan kedudukan datu atau pawang dan memberikan pengajaran kepada orang-orang sekitarnya. Pada umumnya kedudukan pendeta tidak dirasakan sebagai hal yang berbeda dengan datu. Jika datu berkedudukan sebagai penasihat raja, maka pendeta juga demikian. Kedudukan pendeta di tengah masyarakat juga tidak berbeda dengan datu. Pendeta memberikan mantera-mantera dan cara membuat atau meramu obat, memberi tuntunan dalam melaksanakan upacara-upacara kurban.

Pada beberapa tempat di Sumatera Utara dijumpai kampung kampung yang bernama **biara**. Mungkin dahulu tempat itu sebagai pusat pengajaran agama Budha.

Setelah penyiaran agama Islam, maka kedudukan ulama sebagai guru memberikan pula pengajaran agama Islam kepada pengikut-pengikutnya. Sifat pengajaran agama Islam itu tidak berbeda dengan pengajaran terdahulu. Pengajaran bersifat non formal, dilakukan oleh ulama kepada murid-murid mengenai berbagai pengetahuan dan memperkenalkan aksara Arab. Tulisan Arab dipergunakan untuk bahasa Melayu. Huruf Arab dikenal masyarakat luas, karena mereka mempelajari membaca Qur'an dalam tulisan Arab.

Selama 1500 tahun sejak abad I di daerah Sumatera Utara telah hidup pertumbuhan berbagai kesenian, baik seni rupa, seni tari, dan seni sastra. Pertumbuhan itu menunjukkan perkembangan dari kesenian asli yang mendapat pengaruh Hindu dan Islam.

Seni sastra kuno termuat dalam berbagai mantera-mantera. Mantera-mantera itu diucapkan dengan kata-kata tertentu yang mengandung magi dan diucapkan oleh pawang dan datu. Beberapa mantera ditulis dalam **pustaka**. Pustaka itu berisikan cara pengobatan dan norma-norma kehidupan yang berbentuk kepercayaan.

Di kalangan orang Batak tersusun uraian mengenai riwayat keturunan yang disebut **tarombo**. Tarombo tidak saja menggambarkan garis keturunan, melainkan juga diperlengkapi dengan ceritera pengalaman tokoh yang disebut dalam garis keturunan itu.

Pengalaman itu penuh pula dengan berbagai mitos yang dipercayai sebagai kejadian yang sebenarnya berlaku.

Di kalangan orang Melayu selain mantera sejak zaman kuno telah berkembang seni pantun, yang kemudian berkembang menjadi seni rakyat melukiskan berbagai situasi. baik berupa nasehat, percintaan dan mungkin dahulu juga berasal dari mantera. Ceritera tentang garis keturunan tidak begitu populer di kalangan suku Melayu, tetapi banyak ceritera tentang dewa-dewa kayangan, hantu, dan peri. Pengaruh Islam memberikan bentuk ceritera dalam hikayat dan syair.

Di kalangan rakyat banyak terdapat ceritera-ceritera rakyat yang berisikan pendidikan, norma-norma dan kehidupan alam gaib. Ceritera-ceritera itu terus hidup dan berkembang sampai sekarang.

3.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan

Bekas-bekas pengaruh Hindu dijumpai pada beberapa tempat di Sumatera Utara. Yang paling banyak ialah di kompleks percandian di Portibi dekat Gunung Tua. Kompleks percandian itu sebenarnya tersebar pada beberapa tempat yaitu candi Bahal I, Bahal II, dan Si Pamutung. Peninggalan-peninggalan lain dijumpai di Bahal Batu dekat Padang Sidempuan dan terakhir pada tahun 1974 ditemukan beberapa arca dekat kota Labuhan Deli di sekitar persawahan yang terkenal dengan kota Cina.

Peninggalan itu belum dapat memastikan pengaruh Hindu ataupun Budha yang ada di daerah ini. Namun demikian dapatlah dikatakan, bahwa daerah sekitar Selat Melaka sejak abad I Masehi telah ramai didatangi orang-orang Hindu dalam arus lalu lintas antara India dan Cina. Pelayaran pada zaman kuno itu mempergunakan tenaga angin dan masa pelayaran sangat lama. Untuk beberapa waktu mereka singgah pada beberapa tempat di pesisir Selat Melaka untuk menunggu angin yang baik dan untuk menambah perbekalan. Demikianlah kemungkinan datangnya orang-orang Hindu ke daerah ini sejak permulaan tarikh Masehi.

Pertemuan antara penduduk setempat dengan orang-orang Hindu telah menyebabkan tersebar beberapa pokok ajaran Hindu ke tengah masyarakat. Di Tapanuli pada suku Toba terlihat ciri-ciri pengaruh itu pada sebutan dewa seperti istilah Batara Guru dan pada suku Karo didapati beberapa nama marga yang menggambarkan nama-nama yang terdapat di India seperti

Sembiring Brahmana, Colia, Pandia, Lingga, dan sebagainya.

Sumber-sumber Cina tidak menyebut pengaruh Hindu pada kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sumatera Utara seperti Aru dan Nakur pada abad XV. Malahan dikatakan, bahwa di Aru itu orang beragama Islam, sedang di Nakur dikatakan penduduk menyembah berhala.

Sejarah Melayu menyebutkan tentang penyiaran agama Islam ke daerah Samudera Pasei. Tokoh Syekh Ismail digambarkan sebagai penyar agama Islam yang pertama ke daerah ini dan telah mengislamkan Merah Silu raja pertama kerajaan Samudera Pasei dengan gelar Sultan Malikul Saleh pada akhir Abad XIII.

Penyiaran agama Islam ke beberapa daerah di pesisir timur Sumatera Utara berlangsung dari Melaka sejak abad XV, kemudian dilanjutkan oleh Aceh pada abad XVII pada masa Sultan Iskandar Muda. Sampai abad XV sebenarnya hanya sebagian kecil orang-orang di pesisir timur Sumatera Utara itu yang telah menganut agama Islam. Sebagian besar penduduk masih berkepercayaan pelbegu dan bersifat animisme-dinamisme.

Sisa-sisa kepercayaan seperti itu rupanya sangat kuat bertahan di tengah masyarakat, hingga pada saat ini masih banyak penganutnya di daerah pedalaman seperti di Tanah Karo dan Pakpak. Hal itu jadi pertanda pula bahwa pengaruh Hindu-Budha di Sumatera Utara pada zaman dahulu tidak kuat, sebab ternyata sekarang orang-orang di daerah ini yang bukan Islam atau Kristen ternyata tidak menganut agama Hindu atau Budha, melainkan **pelbegu** atau **permalim**.

Ciri-ciri kehinduan di daerah ini tersimpan pada beberapa bangunan yang telah kita sebut di atas, yaitu di Portibi dan Bahal Batu. Kemungkinan bangunan-bangunan itu didirikan pada sekitar abad XIV, yaitu ketika kekuasaan Melayu Minangkabau meluas ke daerah itu di masa pemerintahan Aditya Warman. Melihat peninggalan-peninggalan yang terdapat di luar Sumatera Utara, di Muara Takus, yaitu di daerah Riau, maka kemungkinan kekuasaan Melayu-Minangkabau pada masa dahulu meluas sampai meliputi daerah sebelah timur Bukit Barisan dari alur sungai Batang Hari di selatan sampai ke alur sungai Barumun di Tapanuli Selatan. Sisa-sisa kerajaan itu kelak terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang berdiri sendiri.

Intinya menjadi kerajaan Pagar Ruyung di Sumatera Barat.

Walaupun agama Islam telah tersiar di beberapa tempat

di Sumatera Utara sejak Abad XIII, namun belum dapat kita sebut peninggalan-peninggalan bangunan yang diperbuat untuk keperluan agama itu. Mesjid-mesjid yang tersohor yang kita temukan sekarang di Sumatera Utara dibangun orang pada masa kebesaran kerajaan Deli, Langkat, Serdang, dan Asahan, yaitu pada masa Abad XIX. Mungkin sekali bangunan pada masa yang tertua dari pengaruh Islam itu dibuat sangat sederhana dari kayu dan tidak mungkin bertahan lama. Sampai sekarang di kampung-kampung di pesisir kita temukan jenis bangunan yang sederhana, terbuat dari kayu, berupa rumah-rumah panggung. Bangunan seperti itulah yang dibuat orang untuk surau-surau atau langgar dan mesjid pada zaman yang tertua.

3.5. Hubungan ke Luar.

Pada umumnya desa-desa di Sumatera Utara pada zaman kuno adalah desa yang berdiri sendiri. Segala keperluan masyarakat di desa itu dihasilkan oleh mereka sendiri. Hampir-hampir tidak diperlukan peredaran barang-barang dari satu daerah ke daerah lain.

Lalu lintas kemudian berkembang antara daerah pedalaman dengan daerah pesisir akibat kemajuan dan perkembangan penduduk, yaitu semakin padatnya penduduk dalam satu kampung. Migrasi itu tertuju untuk mendapatkan tanah pertanian yang baru. Lembah-lembah yang subur, dataran tinggi yang luas seperti di Tanah Karo, Pakpak, Simalungun, menarik perhatian orang-orang dari Toba. Demikianlah terintis jalan-jalan kecil antara satu daerah dengan daerah lain. Jalan itu sangat sepi dan jarang dipergunakan, karena pekerjaan utama masyarakat ialah bertani di kampungnya masing-masing.

Penduduk yang berdiam di sepanjang sungai-sungai lebih mudah bergerak sepanjang aliran sungai itu dengan rakit atau sampan. Mereka mencari tanah-tanah pertanian yang baru dan mendirikan tempat-tempat pemukiman yang baru di beberapa tempat. Lama kelamaan sepanjang sungai itu terdapat beberapa kampung.

Teluk-teluk yang tenang lama-kelamaan berubah menjadi pusat pemukiman para nelayan. Melalui sungai-sungai mereka yang tinggal di pesisir itu dapat berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Demikianlah beberapa muara sungai berubah menjadi tempat pusat lalu lintas yang ramai.

Kedatangan orang-orang asing seperti Hindu dan Cina pada beberapa tempat di pesisir menyebabkan perubahan struktur desa pantai itu. Tempat pemukiman para nelayan dan pusat lalu lintas di muara sungai berubah menjadi pusat perdagangan.

Demikianlah hubungan yang tertua dengan bangsa-bangsa asing seperti Hindu dan Cina, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Persia dan Arab menyebabkan terjadinya berbagai hubungan dengan dunia luar.

Akibat penting dari hubungan itu ialah pertemuan kebudayaan dan agama. Bahasa Melayu telah dipergunakan sebagai bahasa pengantar bagi penduduk pesisir yang lama kelamaan meluas sampai ke beberapa daerah. Pengaruh Hindu-Budha dan Islam telah meluas pula sejak permulaan tarikh Masehi di beberapa daerah di Sumatera Utara sebagai akibat hubungan itu.

Oleh karena pada zaman kuno peri kehidupan sangat terikat pada kepercayaan atau agama, maka perubahan alam pikiran dan kepercayaan turut mengubah peri kehidupan masyarakat.

Walaupun demikian pola kehidupan lama yang bersifat animisme dinamisme di bawah pimpinan datu, dukun atau guru tetap berpengaruh di tengah masyarakat.

DAFTAR – BACAAN

- Alfian, Teuku Ibrahim,. **Kronika Pasai, Sebuah Tinjauan Sejarah**, Gajah Mada University Press, Jokjakarta, 1973
- Bagchi, Prabadh Chandra, **India and China**, second ed., Philosophical Library, New York, 1951.
- Bosch, F.D.K., **Masaalah Penyebaran Kebudayaan Hindu di Kepulauan Indonesia**, Bhratara, Jakarta, 1974.
- Groeneveldt, W.P., **Notes on the Malay Archipelago and Mallaca Compiled From Chinese Sources**, CV.Bhratara, Jakarta, 1960.
- Harisson, Brian., **South East Asia, A Short History**, Mac Millan & Co Ltd., London, 1955.
- Kartodirjo, Dr.A.Sartono., **Struktur Sosial Dari Masyarakat Tradisionil dan Kolonial**, Lembaran Sejarah No.4, Fak. Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajahmada, Jokjakarta, 1969.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, **Desa**, Cet.2, Sumur Bandung, Bandung, 1965,
- Kuntjaraningrat, Prof.Dr., **Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia**, Jambatan, Jakarta, 1971.
- Krom, Prof.Dr.N.J., Arief Effendy., **Zaman Hindu**, Cet.II, PT. - Pembangunan, Jakarta, 1956.
- Leur, J.G. van., **Indonesian Trade and Society**, W.van Hoeve Ltd., The Hague, Bandung, 1955.
- Marsden's., **History of Sumatra**, Oxford University Press, London, 1963.
- Moens, J.L., Terjemahan Koetjaraningrat dan Soerjono Soekamto, **Budhisme di Jawa dan Sumatera Dalam Masa Kejayaannya terakhir**, Bhratara, Jakarta, 1974.
- Munsji, Abdullah Ibnu Abdul Kadir., **Sejarah Melayu**, Diberi anotasi oleh Situmorang, Jambatan, Jakarta, 1958.
- Resink, G.J., **Indonesian History Between The Myths**, University of British, Columbia, 1968.
- Siahaan, Manihut, N.H.Pardede., **Sejarah Perkembangan Marga-Marga Batak**, Percetakan Indra, Balige.
- Soedarsono, **Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisionil di Indonesia**, Gajahmada University Press, Jokjakarta, 1972.

- Soekarno, Drs., **Sejarah Kebudayaan Indonesia**, Jilid II, Cet.V, Kanisius, Jakarta, 1973.
- Tarigan, Drs.T.E., Emilkan Tambunan., **Struktur Dan Organisasi Masyarakat Toba**, Nusa Indah, Ende, Flores, 1974.
- Tobing, Ph.O.L., **The Structure of The Toba Batak Belief In the High God**, Jacob van Gampen, Amsterdam, 1963.
- Van Dijk, R. Prof.Dr.Mr.A.Soehardi., **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, W.van.Hoeve, Bandung, 1954.
- Winstedt, Sir Richard., **A History of Classical Malay Literature**, Oxford University Press, London, 1969.
- Yamin, Muhammad., **Tata Negara Majapahit**, Jilid II, Prapanca, Jakarta, 1962.
- , **6000 Tahun Sang Merah Putih**, Balai Pustaka, Jakarta, 1958.
- Yayasan Museum Simalungun., **Seminar Kebudayaan Simalungun**, (I), Pematang Siantar, 1974.

BAB IV ZAMAN – BARU

(1500 - 1800)

4.1. Kehidupan Pemerintahan Dan Kenegaraan.

4.1.1. Pertumbuhan.

Di sekitar tahun 1500 di daerah Sumatera Utara terdapat beberapa kerajaan, yaitu kerajaan Nagur, Aru, Panai, dan kerajaan Batangiou. Di samping itu terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan yang lebih besar ini.

Kerajaan-kerajaan itu satu dengan yang lain selalu terlibat dalam peperangan-peperangan, yang motifnya perluasan daerah kekuasaan dari masing-masing kerajaan. Untuk perluasan kekuasaan itu masing-masing kerajaan berusaha berebut pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di sekitarnya.

Di antara kisah peperangan-peperangan itu ada yang sampai sekarang tetap populer di kalangan masyarakat, yaitu peperangan antara Nagur dengan kerajaan Batangiou.

Menurut kisah kerajaan Nagur terletak di Simalungun Uluan, sedang kerajaan Batangiou adalah kerajaan pengaruh raja Jawa yang terletak di Simalungun. Menurut kisah itu peperangan tersebut disebabkan oleh masalah taruhan permainan catur antara raja Nagur dengan raja Batangiou. Dalam peperangan itu Nagur menang sehingga kekuasaannya meliputi seluruh Simalungun.

Di daerah pedalaman Tapanuli pertumbuhan kerajaan berasal dari masing-masing **bius**. Tiap **bius** ialah sebuah kerajaan kecil yang terdiri dari satu keluarga pemilik tanah pertanian.

Di daerah itu sekitar abad XVI mulai timbul suatu kerajaan yang didirikan oleh Keturunan Sisingamangaraja. Kerajaan ini lama-kelamaan meluaskan pengaruhnya ke seluruh Tapanuli sampai ke Angkola, Mandailing, malahan sampai ke Dairi.

Pertumbuhan Keturunan Sisingamangaraja itu disebabkan kepercayaan masyarakat, bahwa keluarga Raja Sisingamangaraja memiliki kesaktian. Riwat Keturunan Sisingamangaraja dimulai dengan riwayat Si Raja Batak. Raja ini mempunyai

dua orang anak, yaitu Guru Tetea Bulan dan Raja Isombaon. Raja Isombaon mempunyai tiga orang anak, yaitu Tuan Sisingamangaraja, Raja Asiasi dan Songkar Somalindung. Tuan Sisingamangaraja mempunyai tiga orang isteri. Dari isteri ketiga, yaitu Boru Sanggal Haomason beliau mendapat dua orang anak, yaitu Tuan Sorbanibadua dan Raja Tunggal. Selanjutnya Tuan Sorbanibadua mempunyai dua orang isteri dan dari isteri yang pertama Nai Anting Malela lahirlah lima orang anak. Anak yang keempat Raja Oloan memperoleh enam orang anak. Anak beliau yang keempat yaitu Sinambela mempunyai tiga orang anak. Anak beliau yang ketiga yaitu Raja Bona ni Onan bergelar Raja Mangakutal atau Raja Sisingamangaraja I. Beliau inilah pendiri keturunan Sisingamangaraja yang berkuasa sampai dua belas turunan. Keistimewaan Raja Sisingamangaraja I itu tetap menjadi kepercayaan masyarakat sampai sekarang. Keistimewaan itu dilukiskan, bahwa ketika beliau berumur dua tahun telah mempunyai rambut yang lebat, gigi yang lengkap dan lidah berbulu.

Mulai abad XVI di daerah pesisir timur Sumatera Utara berkuasa Kerajaan Aru. Kerajaan ini meliputi daerah yang sangat luas, dari perbatasan Aceh sampai ke muara sungai Barumon di selatan, yaitu meliputi daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu.

4.1.2. Perkembangan.

Demikianlah pada abad XVI di Sumatera Utara terdapat tiga kekuasaan, yaitu Nagur, kerajaan Batak di bawah kekuasaan Raja Sisingamangaraja, dan Aru.

Antara ketiga kekuasaan itu terus menerus terjadi peperangan untuk memperebutkan hegemoni di daerah Sumatera Utara. Jika kita lihat dari susunan kerajaan-kerajaan itu, maka tiap-tiap kerajaan tak lain dari pada penggabungan kerajaan-kerajaan kecil ke dalam satu ikatan kekuasaan yang lebih besar. Dengan demikian, sebenarnya pada tiap-tiap daerah tetap ada kerajaan-kerajaan kecil yang sangat banyak jumlahnya yang mengaku takluk kepada kerajaan-kerajaan yang lebih besar. Apabila kepemimpinan dari raja penakluk itu lemah, maka biasanya raja-raja kecil itu berusaha memerdekakan diri atau jatuh ke tangan raja lain yang lebih kuat. Begitulah selalu terjadi pergeseran-pergeseran di dalam perkembangan kerajaan-kerajaan besar mau-

pun kerajaan-kerajaan kecil seperti Aru, Nagur, dan kerajaan Batak di bawah kekuasaan Raja Sisingamangaraja.

Perkembangan kekuasaan kerajaan Nagur pada masa puncaknya meluas ke daerah-daerah pedalaman Asahan, Serdang Hulu, Tanah Karo sampai ke daerah Gayo Alas. Daerah kekuasaan itu sangat luas meliputi daerah pedalaman bahagian utara Sumatera Utara. Seterusnya kekuasaan kerajaan Batak di bawah pemerintahan Keturunan Raja Sisingamangaraja lama kelamaan meluas pengaruhnya ke seluruh Tapanuli, seperti Angkola, Mandailing, Dairi. Kemudian beberapa daerah di Tanah Karo, Simalungun yang dahulunya di bawah pengaruh Nagur jatuh pula ke bawah pengaruh Sisingamangaraja itu.

Demikianlah sejak Abad XVI daerah Sumatera Utara terbagi atas tiga kekuasaan besar, yaitu Aru, Nagur, dan kerajaan Batak. Daerah pesisir di bawah kekuasaan Aru dan daerah pedalaman di bawah kekuasaan Nagur dan kerajaan Batak.

4.1.3 Kepemimpinan.

Susunan kekuasaan di dalam kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara sejak Abad XVI terdiri dari kekuasaan raja-raja besar dan raja-raja kecil. Raja-raja besar ialah raja-raja penakluk dan raja kecil adalah raja yang ditaklukkan.

Tiap-tiap raja kecil menguasai beberapa desa, Umumnya tiap-tiap desa itu berdiri sendiri, hidup dalam tradisi dalam susunan di bawah kekuasaan datu-datu atau para pawang.

Kedudukan datu atau pawang dalam hal ini bukan saja sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai penguasa atau "raja" dalam pengertian yang umum.

Kedudukan kepala-kepala desa yang tunduk kepada raja-raja diatur dalam tata-cara pembayaran upeti atau pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh raja-raja kepada mereka. Demikian pula kedudukan raja-raja kecil ditentukan oleh aturan-aturan pengabdian mereka kepada raja-raja besar atas dasar kekuasaan yang ada pada raja-raja besar itu. Dengan demikian tersusunlah suatu masyarakat kebangsawanan yang bertingkat-tingkat, suatu tata masyarakat feodal dalam suatu suasana agraris-tradisional.

4.1.4. Hubungan antar Negara.

Di atas telah dibicarakan hubungan antara ketiga kerajaan-kerajaan besar di Sumatera Utara, yaitu Nagur, Aru, dan kerajaan

Batak. Peperangan-peperangan yang berlaku di antara ketiga kerajaan itu menyebabkan mudahnya masuk pengaruh kekuasaan dari luar, misalnya dari Aceh, Melaka, Portugis, Siak, dan Minangkabau.

Sejak Abad XV daerah pesisir timur Sumatera Utara telah menjadi perhatian kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka mencapai puncak kekuasaannya pada pertengahan Abad XV, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Shah (1458 - 1477).

Pada masa pemerintahan Sultan ini, kekuasaan Melaka diluaskan ke beberapa tempat di Sumatera, di antaranya Kampar, Indragiri, Siak, dan Rokan. Peperangan antara Melaka dan Aru pecah pada masa pemerintahan Alauddin Syah. Sejarah Melayu menceritakan tentang peperangan itu, di mana serangan Aru ke Melaka dapat dibendung oleh Melaka.

Peperangan-peperangan antara Aru dengan Melaka terus berlangsung sepanjang abad XV untuk memperebutkan pengaruh atas daerah pesisir timur Sumatera.

Setelah Melaka diduduki Portugis (1511) berlangsung hubungan baik antara Aru dengan Portugis. Portugis dan Aru mengikat kerjasama menghadapi sisa kerajaan Melaka yang berkedudukan di Bintan dan Kampar. Kerja sama itu terikat karena selama ini Aru juga bermusuhan dengan Melaka. Lagi pula Aru dan Portugis menghadapi musuh bersama yaitu kerajaan Aceh yang mulai bangkit sejak Abad XVI. Kebangkitan Aceh itu disebabkan jatuhnya Melaka ke tangan Portugis. Pedagang-pedagang Islam dari Melaka banyak pindah ke Aceh dan sejak itu Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia sebelah barat.

Untuk membendung serangan-serangan Portugis ke pesisir Sumatera bahagian timur, Aceh melakukan serangan ke daerah itu. Setelah Portugis dapat diusir dari Pidie dan Pasai, maka serangan Aceh ditujukan ke kerajaan Aru. Serangan itu dipimpin oleh Laksamana Ibrahim. Untuk menghadapi serangan Aceh ini, maka Aru minta bantuan Portugis yang berkedudukan di Melaka.

Selama abad XVI Aru selalu mendapat ancaman dari tiga kekuasaan yang berperan di selat Melaka, yaitu Aceh, Portugis dan Johor. Johor berdiri sebagai penerus kerajaan Melaka. Akibat serangan-serangan itu, maka Aru terpaksa melepaskan beberapa daerah yang penting di pesisir dan memindahkan pusat kerajaan ke pedalaman.

Menurut ceritera yang populer pusat kerajaan Aru yang baru itu ialah Deli Tua, sebuah tempat kira-kira sepuluh kilometer dari Medan sekarang ini. Di tempat itu sekarang masih diketemukan beberapa peninggalan sejarah.

Dengan pemindahan pusat pemerintahan Aru, kerajaan itu berubah sifatnya dari kerajaan maritim menjadi kerajaan agraris.

Pada akhir Abad XVI serangan-serangan Aceh dilanjutkan ke pedalaman Sumatera Utara, yaitu ke daerah-daerah kekuasaan Aru. Serangan Aceh ke Deli Tua ini sekarang masih populer di kalangan rakyat dengan kisah Puteri Hijau. Isi pokok dari kisah itu ialah kepahlawanan seorang puteri Aru mempertahankan kedaulatan kerajaan Aru. Serangan Aceh sampai juga ke daerah Simalungun. Di sini dikenal juga kisah yang sama atau yang ada hubungannya dengan kisah Puteri Hijau. Diceriterakan tentang seorang putera yaitu adik Puteri Hijau berjuang terus menahan serangan Aceh. Berdasarkan hal tersebut kemungkinan ada hubungan antara Aru dengan Dolok Silou di Simalungun dan dari daerah inilah adik Puteri Hijau melanjutkan perlawanan terhadap Aceh.

Demikianlah masuknya pengaruh Aceh ke daerah Sumatera Utara pada abad XVII, yaitu pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Pada waktu itu pengaruh Aceh telah besar di daerah ini dan untuk mengatur daerah ini Aceh mengangkat panglima-panglima. Salah seorang panglima Aceh, yaitu Gocah Pahlawan yang datang ke Deli Tua sekitar tahun 1632 kawin dengan puteri Wan Baluan dari Sunggal. Kelak Gocah Pahlawan berusaha melepaskan diri dari kerajaan Aceh. Tuanku SriPaduka atau Gocah Pahlawan inilah yang menurunkan raja-raja Deli dan raja-raja Serdang.

Pada tahun 1669 beberapa daerah pesisir timur Sumatera Utara direbut oleh Siak. Oleh karena waktu itu Siak takluk kepada Johor, maka dapat dikatakan daerah ini pun takluk kepada Johor. Ketika Siak di bawah pemerintahan Raja Kecil dapat memerdekakan diri dari Johor, maka daerah ini langsung dikuasai oleh Siak. Tanah Putih, Kubu, Asahan, dan Batu Bara ditaklukkan oleh Siak kemudian disusunlah pemerintahan berdasarkan aturan Minangkabau oleh Siak.

Demikianlah daerah pesisir timur Sumatera Utara pada abad XVI dan XVII menjadi rebutan dari beberapa kekuasaan, yaitu Melaka, Aceh, Portugis, Johor, dan Siak. Pada abad XVIII tekanan-tekanan dari luar itu sudah berkurang sehingga di daerah itu mulai

timbul kerajaan kerajaan yang merdeka, di antaranya Deli, Serdang, Langkat, Asahan, Kotapinang, Panai, Bilah, Kualuh, Leidong dan Batu Bara.

Di daerah pedalaman, yaitu di Simalungun berdiri pula beberapa kerajaan, yaitu kerajaan Dolok, Panei, Siantar, dan Tanah Jawa; keempat kerajaan ini dikenal dengan kerajaan maropat

Daerah pedalaman, yaitu daerah Karo dan Toba yang berdekatan dengan kerajaan-kerajaan di pesisir timur masuk pengaruh kerajaan-kerajaan pesisir, yaitu Langkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu adalah daerah yang terdiri dari beberapa perkampungan suku Karo yang termasuk kekuasaan kerajaan Langkat, Deli, dan Serdang. Begitu pula Asahan menguasai beberapa daerah yang didiami oleh suku Toba.

Di Tanah Karo pada masa abad XIX berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Lingga, Sari Nembah, Suka, Barus Jahe, dan Kutabuluh. Kerajaan-kerajaan ini menguasai beberapa **Urung** yang masing-masing diperintah oleh Raja Urung, sedang raja yang lebih tinggi disebut Sibayak.

Di daerah Tapanuli sampai Abad XIX raja raja huta (kampung) tunduk kepada kekuasaan yang lebih tinggi dari keturunan Sisingamangaraja. Daerah itu dibagi atas empat daerah kekuasaan yang masing-masing di bawah pemerintahan raja yang menjalankan kekuasaan raja Sisingamangaraja. Keempat raja raja ini disebut "**rajana opat**"

Pada Abad XIX itu pula masuklah pengaruh Minangkabau ke Tapanuli yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Paderi. Kekuasaan Paderi itu tidak lama, tetapi di Tapanuli Selatan berdirilah kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh raja-raja yang menganut agama Islam. Demikianlah kekuasaan Raja Sisingamangaraja di daerah Tapanuli Selatan makin lama makin berkurang.

4.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat.

4.2.1. Pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemenuhan kebutuhan hidup sejak Abad XVI di daerah Sumatera Utara mengalami perkembangan, akibat berdirinya beberapa kerajaan yang memerintah dengan lebih teratur. Pertanian semakin maju terutama di daerah pedalaman Sumatera Timur, Tanah Karo, dataran tinggi Toba sampai ke Tapanuli Selatan.

Pada umumnya suku Melayu di pesisir timur hidup dari bertani, sedangkan lebih ke pesisir hidup dari menangkap ikan. Ke-

giatan-kegiatan lain antara lain menganyam tikar, membuat atap dari nipah dan bertenun. Perdagangan mulai muncul dan turut mempengaruhi kehidupan masyarakat. Barang dagangan yang penting seperti hasil-hasil hutan yaitu kemenyan, kapur barus, damar dan berbagai jenis kulit binatang, mulai semakin banyak dikumpulkan. Begitu pula hasil-hasil pertanian untuk perdagangan seperti lada, pinang semakin banyak ditanam. Kegiatan perdagangan itu dilakukan oleh raja-raja atau bangsawan, tetapi masyarakat turut terlibat dalam hal mengumpulkan dan menanamnya.

Kehidupan pertanian makin berkembang dan juga perdagangan di mana beberapa pelabuhan di pesisir timur Sumatera telah ramai didatangi oleh pedagang-pedagang dari Malaka, Aceh, Arab, India, dan Cina dan malahan bangsa Barat yaitu Portugis, kemudian Belanda, dan Inggris. Pada masa kebesaran Aceh Pelabuhan di Sumatera Utara itu tidak dapat berkembang. Seluruh kegiatan perdagangan di Aceh terutama perdagangan lada, tetapi ketika Aceh lemah sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Thani (1641), pengawasan Aceh terhadap perdagangan di daerah ini mulai hilang. Namun daerah ini belum dapat memerdekakan diri karena daerah ini masuk pula ke dalam pengaruh kerajaan Siak.

Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. Hal ini turut mempengaruhi perdagangan di daerah pesisir Sumatera Utara karena VOC mematikan peranan perdagangan di kota Malaka dan memusatkan perdagangan di Batavia. Bagi daerah Sumatera Utara mengakibatkan pula semakin banyak pedagang-pedagang Arab, Cina, India yang datang ke daerah ini membawa hasil dagangan ke Aceh. Setelah Inggris memperoleh kedudukan di Pulau Penang maka mulai pula bangsa Inggris berdagang ke daerah ini. Sampai abad XIX perdagangan Inggris dengan pesisir timur Sumatera sangat berkembang.

4.2.2. Hubungan antara golongan.

Pada Abad XVI telah berdiri beberapa kerajaan di antaranya yang terbesar adalah kerajaan Aru, Nagur, dan kerajaan Batak. Hubungan antar golongan mulai teratur antara penduduk dengan penguasa, keadaan mulai terarah dan tersusunnya lapisan masyarakat yaitu kaum bangsawan dan rakyat biasa.

Di daerah pesisir timur Sumatera Utara kerajaan Aru merupakan yang berkuasa dari perbatasan Aceh sampai ke Labuhan Bilik. Hubungan antar golongan dijumpai di mana raja kecil yang takluk menjalankan aturan raja penguasa. Rakyat biasa hanya se-

bagai petani harus menyerahkan sebahagian hasil pertaniannya kepada raja kecil. Selanjutnya raja kecil menyerahkan upeti kepada raja yang berdaulat atas daerahnya. Begitu juga hubungan antar golongan di kerajaan-kerajaan di daerah Simalungun, Karo, dan Tapanuli.

Di daerah pesisir Sumatera Utara agama Islam telah berkembang dengan pesat. Di sini kaum ulama mendapat tempat di istana dan menjabat sebagai kadhi. Di kerajaan, kadhi adalah sebagai seorang penasehat raja di bidang agama, sedangkan di tengah masyarakat ulama dihormati, sebagai pembimbing masyarakat, pengetua, berilmu, dan sebagai penghubung antara raja dengan rakyat. Di daerah pedalaman raja yang merangkap sebagai pemuka agama mengatur kehidupan sesuai dengan kepercayaan mereka yaitu Parmalim. Dalam bidang kepercayaan raja dibantu oleh datu-datu.

Semenjak pesisir timur ramai dikunjungi kaum pedagang bangsa asing seperti Arab, India, Cina, dan Portugis maka terjadilah hubungan antara bangsa asing dengan bangsa Melayu dalam bentuk perdagangan. Sedangkan raja dan kaum bangsawan mulai memonopoli perdagangan di daerah kekuasaannya. Di samping itu raja memaknai tenaga rakyat sebagai pekerja sehingga terjadilah hubungan pengabdian rakyat pada raja. Perkembangan perdagangan di pesisir timur itu membawa pengaruh pula bagi suku suku di pedalaman seperti suku Batak dan suku Karo. Suku suku ini mengadakan transaksi dagang dengan pedagang pesisir sehingga terjadilah pergaulan antar suku di daerah ini.

Akibat kemajuan perdagangan di daerah pesisir timur ini pada akhir Abad XVIII maka suku Karo dan Batak mulai menetap di sepanjang pesisir timur begitu juga bangsa asing India, Arab, dan Cina mulai menetap dan berasimilasi dengan penduduk asli.

4.2.3. Kepemimpinan.

Di dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik pertanian, kerajinan, maupun perdagangan, maka kedudukan para bangsawan dan raja-raja sangat penting. Berbagai kegiatan, seperti perdagangan, penanaman beberapa jenis tanaman misalnya lada dikuasai oleh raja atau bangsawan yang mengatur kepentingan raja.

Jika bangsawan melakukan kegiatan seperti itu, maka bangsawan itu diwajibkan membayar pajak kepada raja. Begitu pula kedudukan bangsawan di tengah petani. Beberapa tanah yang su-

bur dan penting dikuasai oleh bangsawan. Tanah ini dikerjakan oleh petani untuk kepentingan kaum bangsawan. Jika tanah itu dikerjakan oleh petani atau bangsawan rendah, maka sebahagian hasilnya hendaklah diserahkan kepada bangsawan penguasa tanah itu.

Untuk melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan berat, dipakailah tenaga budak. Kedudukan budak tidaklah selamanya menderita, karena di antara mereka ada yang dipekerjakan di lingkungan istana dan mendapat perlakuan yang cukup baik, sesuai dengan kemampuannya.

Di bidang pemerintahan raja mengatur dan mengangkat para pembantunya dari kaum bangsawan dan ulama, seperti hakim, panglima, bendahara, raja kecil, dan kadhi.

4.2.4. Pengaturan Masyarakat.

Di daerah pesisir timur Sumatera Utara kehidupan masyarakat diatur dengan tata aturan kerajaan. Di daerah ini masyarakat telah menganut agama Islam.

Kerajaan mengatur masyarakat berdasarkan agama yang telah disesuaikan dengan adat-istiadat masyarakat, untuk itu raja mengangkat para pembantunya seperti panglima, bendahara, hakim dan di daerah takluk diangkat Raja Kecil. Seluruh rakyat harus tunduk dan patuh terhadap segala perintah raja walaupun melalui pembantunya.

Di bidang agama masyarakat menjalankan kepercayaannya dengan bimbingan kadhi dan ulama. Rakyat yang pada umumnya sebagai petani dikenakan pajak dari hasil pertaniannya seperti, pajak hasil bumi, dan sebagai pedagang dikenakan pajak hasil penjualan. Setiap kejahatan di tengah masyarakat yang bertentangan dengan aturan kerajaan dan agama dihukum sesuai dengan hukum agama Islam.

Rakyat yang bekerja di istana dianggap sebagai abdi raja, mereka hidup dari pemberian pihak raja. Pada umumnya masyarakat di daerah pesisir diatur oleh kaum bangsawan yang diangkat oleh raja. Kedudukan ulama dianggap sebagai suatu golongan yang terletak antara raja dan masyarakat.

Di daerah pedalaman Karo, Tapanuli, dan pulau Nias kehidupan masyarakat diatur oleh raja yang berkuasa. Dalam pengaturan masyarakat raja berkuasa penuh. Sebelum agama Islam dan Kristen masuk ke daerah ini raja berkuasa penuh di bidang agama sebagai

datu. Begitu pula di bidang militer sebagai panglima. Di daerah takluk masyarakat diatur melalui Raja Kecil. Rakyat harus membayar upeti kepada raja yang berdaulat melalui Raja kecil.

Setiap rakyat yang pada umumnya sebagai petani dikenakan pula cukai jika mereka menjual hasil pertaniannya. Setiap kehidupan keagamaan, raja adalah sebagai pemimpin upacara agama. Setiap kejahatan yang bertentangan dengan adat-istiadat, agama atau kepercayaan dihukum seperti kerja paksa, dikucilkan, atau didenda dari hasil panen dan ternak.

Dalam menjalankan pemerintahan dan pengaturan masyarakat, raja mengangkat pembantu-pembantunya yang diambil dari lingkungan keluarga raja atau berdasarkan kepercayaannya terhadap seseorang.

Sampai tahun 1800 pengaturan masyarakat berjalan menurut bentuk masing-masing daerah yaitu di pesisir timur berdasarkan agama Islam yang diperintah oleh raja, sedangkan di daerah pedalaman diperintah oleh raja yang berdasarkan adat-istiadat, kepercayaan masyarakat Permalim dan pelbegu.

4.3. Kehidupan Seni Budaya.

4.3.1. Pendidikan.

Sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat desa, baik di pesisir maupun di pedalaman, sebagai penangkap ikan dan petani yang sederhana maka pendidikan anak-anak berlangsung secara informal. Dengan tidak sengaja anak-anak terikut dalam proses kehidupan sehari-hari, menangkap ikan, berburu atau berladang. Dengan cara demikian perilaku kehidupan orang-orang tua diwarisi oleh anak-anak mereka. Kelak jika anak-anak itu telah dewasa, maka anak-anak itu dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dilakukan orang-orang tua mereka. Anak-anak sedikit demi sedikit terlatih dalam kehidupan sehari-hari untuk mengerjakan tugas-tugas kehidupan.

Peranan keluarga sangat penting di dalam pendidikan semacam itu. Begitu pula peranan masyarakat lingkungan tempat tinggal anak-anak, karena anak-anak menerima warisan kebudayaan melalui pergaulan sehari-hari. Peranan ibu, kakek, dan nenek sangat penting bagi pembentukan alam pikiran anak-anak. Pada waktu waktu tertentu anak mendengar ceritera dari ibu mereka atau kakek ataupun nenek mereka. Isi ceritera itu membentuk alam pikiran anak-anak dan menjadi benih alam kepercayaan serta adat-isti-

adat. Anak berkenalan dengan makhluk-makhluk halus seperti hantu, jembalang, begu, peri, dan sebagainya melalui ceritera-ceritera tersebut. Diperkenalkannya kepada anak-anak tentang keindahan dan kesempurnaan, martabat yang tinggi, kesaktian raja dan benda-benda istana. Ceritera-ceritera dunia hewan seperti si kancil dan raja hutan selain bersifat hiburan, juga berisi pendirian intelek, yaitu bagaimana si lemah harus pandai berhadapan dengan si kuat.

Pendidikan non-formal berlangsung di lingkungan datu dan pawang telah kita kenal sejak zaman kuno. Pada Abad XVI agama Islam telah tersiar di pesisir timur dan pesisir barat Sumatera Utara. Pada beberapa tempat, para ulama atau guru, populer karena ketinggian ilmu batinnya, pandai mengobati berbagai penyakit, pandai mengusir setan dan peri, pandai menawar racun dan sebagainya. Cara peribadan ulama yang berbeda dan asing bagi penduduk menarik perhatian dan menyebabkan orang semakin banyak menaruh harapan kepadanya untuk memperoleh bantuan. Jika raja atau bangsawan di daerah itu menganut agama Islam, maka ulama itu juga menjadi pendukung kekuasaan formal, sehingga kedudukannya makin lama makin tinggi.

Di tempat itu berdiri mesjid atau surau tempat beribadat dan tempat mengajarkan berbagai ilmu keagamaan. Bentuk pengajaran kebatinan, yaitu bentuk tarikat lebih diminati penduduk sebab dapat dipergunakan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang serba magis. Ilmu semacam itu dapat pula memberi kepuasan terhadap kehausan jiwa menghadapi berbagai tantangan alam yang serba ganas. Ilmu firasat, takbir mimpi, nujum, pekasi banyak mendapat perhatian. Pada dasarnya pertolongan seperti itu tidak asing bagi penduduk karena telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Sekarang peradaban lama itu mendapat bentuk baru dengan unsur-unsur Islam.

Lama kelamaan masalah ibadat dan hukum (fiqih) menarik perhatian pula, terutama bagi kepentingan pengaturan masyarakat. Hukum Islam dijadikan aturan kerajaan dan ulama besar berubah kedudukannya sebagai hakim (**Kadhi**). Pengajaran baru itu memperkenalkan huruf Arab. Al Qur'an, doa dan bacaan salat dibaca dalam bahasa Arab, sedang berbagai buku ilmu agama yang lain dipelajari dalam bahasa Melayu dengan huruf Arab. Huruf Arab Melayu itu memakai aturan penulisan yang sesuai dengan tata susunan kata bahasa Melayu dan sampai sekarang masih terpakai di beberapa daerah dan masih dipahami oleh segolongan besar pendu-

duk yang beragama Islam. Pengajaran huruf Arab dan bahasa Arab dengan berbagai bahagiannya seperti **nahu**, **syaraf**, **mantik** dan **ma'ani** lama kelamaan juga menjadi bahan pelajaran bagi para calon ulama.

Demikianlah kepustakaan di daerah ini dikenal dalam dua pola, di daerah pedalaman kepustakaan dalam aksara Batak dan di pesisir kepustakaan dengan aksara Arab-Melayu.

4.3.2. Kesenian.

Seni tari dan sastra tradisional di Sumatera Utara, baik di pedalaman maupun di pesisir merupakan bahagian dari kegiatan religi. Tortor Batak, Karo, Simalungun, dan Mandailing adalah tarian religius yang bersifat sakral. Tarian itu ditarikan pada waktu-waktu tertentu, seperti kematian, perkawinan, dan sebagainya. Kegiatan itu lama kelamaan berlangsung dalam berbagai kesempatan, seperti panen dan menyatakan syukur atas perlindungan dari dunia gaib.

Alat alat yang dipakai ialah gendang, serunai, dan gong. Ulos dipakai untuk menari. Jenis ulos memperlihatkan tingkatan kebangsawanan. Seni tortor tidak dapat dipisahkan dari seni kata atau tutur yang berisi ucapan-ucapan kata adat yang dikemukakan di dalam upacara adat. Kata-kata itu dipilih berisikan hikmah yang sesuai dengan keperluan upacara.

Gendang Melayu pada mulanya adalah tarian yang dilakukan para nelayan sebelum pergi ke laut. Isi tarian itu sebagai pembangkit semangat menghadapi bahaya jembalang dan makhluk halus di laut di bawah pimpinan pawang. Beberapa orang laki-laki menari sesuai dengan irama gendang dan laki-laki yang lain duduk berkeliling sambil bertempik sorak. Tarian itu dapat juga berbentuk perkelahian yang melambangkan perkelahian melawan setan-setan dan makhluk halus.

Di samping tari-tarian rakyat terdapat pula tarian istana. Tarian-tarian seperti tari **huda-huda** di Simalungun dan **gambus** di pesisir timur, **sikambang** di pesisir barat adalah jenis tarian istana yang dipertunjukkan di istana.

Kesusastraan lama dalam bentuk mantra yang dilakukan oleh datu dan pawang mendapat pengaruh Islam pada abad XVI. Pengaruh itu melahirkan syair dan pantun. Di samping itu terdapat bentuk prosa yang disebut hikayat. Hikayat sering pula berbentuk puisi, yaitu syair. Isi hikayat itu bermacam-macam. Ada yang menceritakan legenda tokoh-tokoh seperti Hikayat Amir Hamzah,

Hikayat Muhammad Hanafiah. Ada pula berisi dongeng seperti Hikayat Bayan Budiman, Hikayat Kalila dan Damina. Di samping itu ada pula yang berisi sejarah seperti Hikayat Raja-raja Pasei, Sejarah Melayu, Bustan as Salatin. Buku-buku itu tidak seluruhnya diciptakan di daerah ini, melainkan di berbagai tempat seperti Aceh, Melaka, dan Johor, tetapi masyhur di seantero negeri pesisir. Ditinjau dari isi dan bentuknya, maka banyak sekali pengaruh ke-susastraan Arab dan Persia di dalamnya.

Di kalangan penduduk kebanyakan masyhur pula berbagai ceritera seperti ceritera Pak Belalang, ceritera Lebai Malang, ceritera Pak Pandir, ceritera si Kebayan, malahan ceritera Abu Nawas pun banyak dikenal orang. Banyak pula hikayat menceritakan hal yang berhubungan dengan peri hidup Nabi, seperti Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Nabi bercukur, dan sebagainya.

4.4. Alam Fikiran dan Kepercayaan.

4.4.1. Perkembangan Agama.

Pada abad ke-XVI agama Islam tersiar dengan luas di Sumatera Utara, terutama di daerah pesisir timur dan barat. Pada abad ke-XV menurut berita Cina di kerajaan Aru masyarakatnya telah beragama Islam. Serangan Aceh ke Sumatera Timur memperluas pengaruh Islam itu. Begitu pula daerah pesisir barat Sumatera mungkin telah menerima agama Islam dari Aceh yang mengembangkan kekuasaannya pada abad XVII.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa pada abad ke XIV sebenarnya agama Islam telah dianut orang di Pasei, (Samudera, Perlak, dan Pasei), tetapi pada pertengahan abad ke-XIV kekuasaan Pasei runtuh akibat serangan Majapahit. Pada abad ke-XV pedagang-pedagang Islam dari Melaka telah menyebarkan agama Islam ke daerah pesisir timur Sumatera, begitu pula pedagang-pedagang lain yang beragama Islam. Sementara itu pada abad XV itu di Sumatera menurut Ma Huan telah terdapat beberapa kerajaan Islam yaitu Samudera, Pasei, Pedir, Lambri, dan Aru.

Daerah pedalaman menganut kepercayaan yang bersifat animisme dan dinamisme yang terkenal dengan kepercayaan pelbegu. Pengaruh Islam di kalangan penganut pelbegu pada abad XVII itu terlihat dalam kepercayaan permalim.

Waktu penduduk pedalaman pindah ke pesisir mereka pun menganut agama Islam. Sering disebut mereka masuk "Melayu" karena bukan saja mereka berubah kepercayaan, tetapi berubah

pula adat-istiadat dan ikatan-ikatan keluarga mereka malahan mereka tidak memakai marga sebagai mana penduduk pedalaman. Penduduk pesisir barat sedikit berbeda, sebab walaupun mereka menganut agama Islam, tetapi mereka tetap mempertahankan pemakaian marga. Ke daerah ini (pesisir barat) tidak saja datang orang-orang Batak dari pedalaman Sumatera Utara, tetapi banyak pula bermigrasi penduduk dari Sumatera Barat dan Aceh. Bahasa di daerah pesisir barat itu menunjukkan banyaknya pengaruh bahasa Minangkabau.

Di pesisir barat itu terdapat kota Barus sebuah kota yang penting di zaman dahulu. Kota itu menjadi pusat pelayaran di pesisir barat Sumatera Utara pada zaman kebesaran Aceh. Menurut pendapat beberapa orang, kota itu sudah sangat tua. Malahan ada yang berpendapat, bahwa Barosai yang disebut Ptolemeus pada abad pertama Masehi itu adalah kota Barus. Barus adalah pusat penyebaran agama Islam di pesisir barat Sumatera Utara.

Permalim disebut juga agama si Raja Batak atau disebut juga **parbiringin**. Keturunan Sisingamangaraja yang memerintah atas dasar spiritual menurut kepercayaan ini. Kepercayaan ini turut diasosiasikan dengan adat. Pengenalan kepada yang Maha Kuasa dengan sebutan Mula Jadi Na Bolon. Peranan datu sangat besar di dalam kepercayaan ini para datu sangat dihormati dan memimpin acara kerohanian. Melalui datu sebagai medium, maka roh nenek-moyang yang telah menjadi sombaon dapat memberi nasehat. Datu membacakan doa-doa kepada Mula Jadi Na Bolon (tonggo), menentukan hari-hari yang baik untuk sesuatu pekerjaan, melakukan upacara menolak penyakit dan sebagainya.

Upacara yang terpenting ialah **mamele**, yaitu membujuk roh untuk hadir dengan saji-sajian dan doa-doa. Upacara yang bersifat umum dilakukan hari Sabtu yang merupakan hari besar dan hari liburnya.

4.4.2. Pengaruhnya.

Pengaruh agama Islam bagi alam pikiran dan kepercayaan penduduk di pesisir timur dan pesisir barat Sumatera Utara pada abad XVI sampai abad XIX tergambar pada pelaksanaan peri kehidupan masyarakat. Adat-istiadat Melayu di daerah pesisir timur Sumatera Utara disusun berdasarkan ajaran agama Islam. Melaksanakan adat-istiadat Melayu dianggap secara langsung melaksanakan ajaran agama Islam. Demikianlah misalnya dalam pelaksanaan upacara perkawinan menurut adat Melayu, seperti berinai, tepung ta-

war, mandi berdimbar, dianggap sebagai bahagian yang tak dapat dipisahkan dari upacara tersebut. Begitu pula dalam kenduri perkawinan itu, bila diadakan pembacaan doa, maka pembacaan kasidah, kitab berzanji yang sebenarnya adalah acara kesenian, namun dianggap sebagai bahagian upacara agama. Begitu pula dalam upacara pengkhitanan dan kematian, banyak dilakukan upacara-upacara adat yang telah dianggap sebagai bahagian kepercayaan. Misalnya dalam perkhitanan diadakan upacara rebana tepung tarwar, kenduri, kesenian gambus dan sebagainya yang dianggap sebagai bahagian dari upacara agama.

Dalam hubungan sosial mulai terbentang hubungan baru yaitu perasaan seagama yang mengajarkan persaudaraan sesama agama Islam. Walaupun demikian adat istiadat Melayu mengajarkan tentang hubungan antara keturunan bangsawan dengan orang biasa. Percampuran antara alam pikiran menurut adat dan agama itu menyebabkan hubungan antara raja, bangsawan dan rakyat memperoleh dasar yang baru, yaitu hubungan kasih-sayang antara golongan yang lebih tinggi kepada golongan yang lebih rendah. Dengan dasar ini, maka Sultan, bangsawan (Datuk, Wan dan sebagainya) hendaklah bersifat pemurah, suka memberi, suka mengampuni, sedang orang kebanyakan wajib menaruh sifat hormat, takzim kepada raja dan bangsawan. Kepatuhan kepada raja dianggap sebagai bahagian dari pelaksanaan ajaran agama Islam, begitu pula kemurahan seorang raja dianggap sebagai pelaksanaan ajaran agama. Hal itu terlihat dalam berbagai kegiatan, misalnya di waktu salat Jum'at raja atau bangsawan memperoleh tempat pada shaf depan yang istimewa, dan tiap-tiap bulan Ramadan, Nuzul Quran, Maulud, raja memberikan sedekah kepada fakir-miskin atau penduduk berupa uang dan makanan di mesjid.

Alam pikiran Melayu sangat banyak dipengaruhi ajaran tasawuf, mereka lebih mementingkan kesucian hidup di dunia, menjauhkan diri dari sifat loba dan tamak. Menjauhkan diri dari dosa, berusaha hidup sederhana untuk dapat memusatkan pikiran kepada Tuhan dan mencapai kemenangan di alam akhirat. Begitu pula pada orang-orang Islam di pesisir barat, yang terdiri dari berbagai golongan suku bangsa, ada yang datang dari pedalaman (Batak), Minangkabau, Aceh, maka ajaran agama Islam telah menjadi alat untuk berhubungan secara terbuka antara satu dengan lain. Adat-istiadat di daerah pesisir barat ini bercampur dari berbagai golongan, tetapi akhirnya ajaran agama dapat membentuk sikap masya-

rakat, sehingga mereka dikenal dengan sebutan "Orang Pesisir."

Bagi penduduk pedalaman yang masih menganut kepercayaan permalim dan pelbegu, alam pikiran animisme dan dinamisme masih tetap dengan norma-norma adat-istiadat tetap dijalankan sesuai dengan kepercayaan itu. Melaksanakan adat, seperti hubungan sesama masyarakat menurut Dalihan na Tolu dianggap sebagai melaksanakan kepercayaan yang kudus. Melanggar adat dianggap akan mendapat bala dari orang-orang halus atau begu yang diidentikkan dengan roh nenek-moyang.

4.5. Hubungan keluar.

4.5.1. Bentuk Hubungan.

Sejak beberapa abad sebelumnya Sumatera sebagai bahagian kepulauan Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah rempah, terutama lada, kemenyan, dan kapur barus. Sampai abad XVIII daerah Sumatera Timur menjadi rebutan dari dominasi kerajaan-kerajaan besar sekitarnya seperti Aceh, Siak, Melaka, Johor, dan kekuasaan Portugis yang berkedudukan di Melaka pada tahun 1511.

Usaha-usaha perluasan kekuasaan itu bertujuan untuk memonopoli perdagangan di sekitar Selat Melaka. Dengan demikian maka daerah pesisir Sumatera Timur selalu silih berganti mendapat serangan dari kekuasaan-kekuasaan tersebut. Pada abad XVIII daerah Sumatera Timur ini dapat dikuasai oleh dua kerajaan besar, yaitu Aceh dan Siak. Pengaruh Aceh sampai ke daerah Asahan dan pengaruh Siak pada akhir abad XVIII meluas pula sampai ke Langkat. Maka di daerah-daerah kerajaan di Sumatera Timur terdapat dua macam pengaruh, sebab baik Aceh maupun Siak menganggap daerah Sumatera Timur itu sebagai daerah kekuasaannya.

Sebagai akibat dari pertentangan antara Aceh dan Siak, maka di Sumatera Timur berdiri kerajaan-kerajaan kecil seperti Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Panei, Leidong, Bilah, Kotapinang dan dari tiap-tiap pusat kerajaan ini muncul pelahan-pelahan bandar sebagai pusat perdagangan.

Daerah pesisir barat Sumatera Utara pada masa itu telah dikenal sebagai pelabuhan rempah-rempah seperti Barus, Natal yang banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang Minangkabau dan Aceh. Begitu pula saudagar-saudagar India, Cina, Arab telah datang ke kota itu. Malahan pada abad XVII Belanda telah membuka perdagangan dengan daerah ini. Pada abad XVII itu daerah ini masuk

pengaruh Aceh, sehingga bangsa-bangsa asing tidak bebas berdagang.

4.5.2. Akibat Hubungan.

Sebagai akibat kemajuan perdagangan di daerah pesisir, maka terbuka pulalah hubungan antara daerah pesisir dengan daerah pedalaman. Kerajaan-kerajaan pedalaman seperti yang terdapat di Tanah Karo, Simalungun, dan Toba mulai mengadakan kontak dengan kerajaan pesisir guna memasarkan hasil bumi dari pedalaman. Adapun barang dagangan dari pedalaman umumnya adalah hasil hutan, seperti damar, kemenyan, kapur barus, kulit binatang. Bagi kerajaan pedalaman itu diperlukan barang-barang seperti kain, sutera, dan barang-barang porselen.

Akibat lain dari kemajuan perdagangan itu ialah mulai adanya perpindahan penduduk ke arah pesisir. Orang-orang Karo dan Toba mulai pindah menuju pesisir timur dan untuk menyesuaikan diri dengan penduduk asli di daerah itu yang telah beragama Islam, maka mereka pun menganut agama Islam. Begitulah keadaannya orang-orang Karo di Langkat, Deli, dan Serdang dan orang-orang Batak Toba di Asahan dan Labuhan Batu.

Di bidang kebudayaan, hubungan dengan dunia luar menimbulkan percampuran kebudayaan setempat dengan kebudayaan Islam sehingga terbentuklah kebudayaan Melayu dan kebudayaan pesisir barat. Kebudayaan ini selain bersifat Islam, juga bersifat feodal, karena mengenal berbagai bentuk kesenian yang berbeda antara kesenian istana dengan kesenian rakyat. Bahasa Melayu memperoleh bentuk keningratan di istana raja-raja Melayu sebagai mana juga di Melaka di zaman dulu. Kata-kata dalam bahasa Melayu yang dipakai di istana berisi kata-kata yang khusus seperti patik, duli, hamba, beradu, bersiram, dan sebagainya.

DAFTAR – BACAAN

- Ahmad, Zakaria., *Sekitar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520 – 1675*, Monora, Medan, 1972.
- Ali, Drs. Mohammad.R., *Peranan Bangsa Indonesia Dalam Sejarah-Asia Tenggara*, Bhratara Jakarta, 1963.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid II, Pradjna Paramita, Jakarta, 1970.
- Burger, Prof. Dr. D.H. Prajudi, Prof. Dr. Mr., *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, J.B. Wolters NV. Jakarta.
- Harisson, Brian, *South East Asia, A Short History*, Mac Millan & Ltd, London, 1955.
- Pires, Tome., *Suma Oriental*, Hakluyt Society, London, 1944.
- Hall, D.G.E., *A History of South East Asia*, Mac Millan & Co Ltd, London, 1960.
- Husni, T.M. Lah., *Lintasan Sejarah Peradaban dan Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur 1612 1950*. B P. Husny, Medan 1975.
- Leur, J.C van., *Indonesian Trade and Society*, W. Van Hoeve Ltd The Hague, Bandung, 1955.
- , *Abad ke 18 Sebagai Kategori Dalam Penulisan Sejarah Indonesia*, Bhratara, Jakarta, 1973.
- Mansoer, MD., *Sejarah Minangkabau*, Bhratara, Jakarta 1970
- Meuraxa, Dada., *Sejarah Masuknya Islam ke Bandar Barus*, Penerbit Sastrawan, Medan, 1975.
- , *Sejarah Hari Jadinya Kota Medan 1 Juli 1950* Penerbit, Medan, 1975.
- Said, Muhammad., *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, Waspada, Medan 1961.
- Soekmono, Drs. R., *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Jilid III, Cet V, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1973.
- Vlekke, Bernard H.M., *Nusantara A History of Indonesia*, A Manteau S.A. Bruxelles, 1961.
- Zainuddin, H.M., *Tarich Aceh dan Nusantara* Jilid I, Iskandar Muda, Medan, 1961.
- , *Singa Aceh*, Iskandar Muda, Medan, 1957.
- Panitia Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, *Risalah Seminar Masuknya Islam ke Indonesia 1963*, Medan, 1963.

BAB V
ABAD KE XIX
(1800 – 1900)

5.1. Kehidupan pemerintahan dan kenegaraan

5.1.1. Keadaan pada tahun 1800.

Sebagaimana telah dibicarakan pada bab yang lalu, bahwa daerah Sumatra Utara pada abad ke XVIII terpecah atas beberapa kerajaan. Daerah pesisir timur pada abad XVII termasuk pengaruh kekuasaan Aceh, tetapi kemudian daerah itu dipengaruhi oleh Siak. Pada hakekatnya daerah itu adalah kerajaan-kerajaan yang merdeka, karena baik Aceh maupun Siak tidak mampu melaksanakan penguasaan atas daerah tersebut.

Pada abad XIX terjadi perubahan penting di daerah ini karena masuknya pengaruh kekuasaan Belanda. Sebelum abad XIX kekuasaan Belanda dipusatkan di pulau Jawa, dan beberapa tempat di Maluku. Tetapi pada abad XIX Belanda mulai menaruh perhatian ke daerah-daerah di luar pulau Jawa termasuk Sumatra Utara. Sejak penyerahan Indonesia ke tangan Belanda dalam **Convention of London 1814** yang diperbaharui pada **Treaty of London 1824** hampir seluruh Indonesia diakui oleh Inggris sebagai daerah pengaruh Belanda. Walaupun demikian Inggris terus berusaha untuk memperoleh kedudukan di beberapa tempat yang dirasa penting bagi perdagangan di antaranya Siak di Sumatra dan Brunai di Kalimantan.

Keinginan Inggris untuk memperoleh kedudukan itu mempengaruhi pandangan Belanda terhadap "daerah seberang" yaitu pulau-pulau di luar pulau Jawa. Belanda berusaha menanam kekuasaannya di daerah-daerah tersebut.

Menurut **Treaty of London** masing-masing pihak, baik Belanda maupun Inggris tidak boleh mengambil tindakan sepihak terhadap Aceh. Sementara itu Inggris yang berkedudukan di pulau Penang sejak permulaan abad XIX selalu berusaha mengadakan hubungan perdagangannya dengan Aceh dan daerah pesisir Sumatra Timur. Usaha-usaha Inggris itu di antaranya mengirim utusan yang penting ialah **missi John Anderson** yang datang ke Sumatera Timur pada tahun 1832. Hasil kunjungannya itu ditulisnya dalam satu laporan

yang penting dan kemudian kita pergunakan untuk mengenal daerah ini pada abad XIX. Catatan-catatan mengenai daerah ini dikumpulkan dalam bentuk buku yakni "**Mission to East of Sumatra**" dan "**History and description of the East Coast of Sumatra**".

5.1.2. Hubungannya dengan kekuasaan Eropa

Hubungan kekuasaan di daerah ini adalah melalui kerajaan Siak. Siak adalah jembatan yang dipergunakan Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Sumatera Timur. Daerah Sumatera Timur itu sebagaimana kita lihat di atas adalah merupakan daerah pengaruh Aceh. Pada tahun 1854 untuk penghabisan sekali armada Aceh di bawah pimpinan seorang Panglima menanamkan kekuasaan kembali ke daerah Sumatera Timur. Masa Aceh diperintah oleh Sultan Ibrahim, sekali lagi daerah-daerah Sumatera Timur seperti Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan mendapat "**Cap Sembilan**" dari Aceh. Cap Sembilan itu adalah tanda takluk daerah tersebut kepada Kesultanan Aceh.

Sultan Ismail dari Siak melihat kedudukan Aceh yang kuat di pesisir Sumatera Timur itu sebagai ancaman bagi pengaruhnya. Oleh sebab itu Sultan Ismail meminta bantuan kepada Inggris dari Singapura. Di samping itu berguna pula untuk menyelamatkan tahtanya yang terancam oleh raja mudanya sendiri yaitu Tengku Putra. Demikianlah mulai masuknya pengaruh Inggris ke Siak.

Untuk bantuan itu Inggris akan memperoleh sepertiga dari keuntungan perdagangan di daerah yang kelak akan ditaklukkan, sebaliknya Tengku Putra minta bantuan Belanda untuk menghancurkan Sultan, namun Belanda selalu berhati-hati tidak segera mengirim bantuan kepada Tengku Putra.

Melihat keadaan yang serba sulit itu, maka Inggris mengambil keuntungan lebih dahulu. Didudukinya pulau Bengkalis tetapi kedudukan itu digempur Belanda. Pada 1 Februari 1859 ditandatangani satu perjanjian yang penting antara Belanda dengan Siak yang dikenal dengan Traktaat Siak.

Isi yang terpenting dari perjanjian itu ialah pengakuan dari penguasa-penguasa Siak bahwa daerah Siak termasuk di bawah kekuasaan Belanda dan kedaulatan Belanda di atasnya. Dalam perjanjian itu juga ditetapkan bahwa Siak mengizinkan Belanda membangun pangkalan di Bengkalis dan daerah lain yang dirasa perlu. Selanjutnya Siak tidak diizinkan berhubungan dengan bangsa lain. Hal yang penting lagi dalam perjanjian itu adalah Belanda bila

perlu diizinkan mengutip pajak di daerah-daerah kekuasaan Siak

Realisasi perjanjian itu Belanda mengangkat seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Siak. Dengan perjanjian ini selain dari kekuasaan Belanda tertanam di Siak, maka yang terpenting ialah kekuasaan Belanda secara formal meliputi seluruh jajahan Siak yaitu daerah pesisir timur Sumatera. Beberapa kerajaan di pesisir timur Sumatera Utara seperti Leidong, Bilah, Batubara, Kota Pinang, Asahan, Deli, Langkat, dan Serdang, termasuk di bawah kekuasaan Siak, bahwa kekuasaan itu bertitik tolak pada dalil bahwa dahulu daerah ini masuk kekuasaan kerajaan Malaka yang berpusat di Kampar.

Orang yang paling berjasa bagi Belanda untuk menanamkan kekuasaan Belanda di Sumatera Timur ialah Eliza Netscher (1825-1880). Ia memangku jabatan sebagai Residen Riau pada tahun 1861. Netscher mempergunakan kesempatan sewaktu terjadi perselisihan antara Sultan Langkat dengan Tuanku Hasyim. Kekuasaan Tuanku Hasyim di Langkat Hilir mengancam Pangeran Langkat, sehingga Pangeran Langkat pergi ke Batubara dan terus ke Bengkalis untuk meminta bantuan Belanda. Pada tanggal 1 Februari 1862 Pangeran Langkat menghadap Residen Belanda di Bengkalis. Beliau menyatakan diri sebagai wakil enam orang raja di Sumatera Timur untuk meminta bantuan Belanda.

Atas permintaan bantuan Pangeran Langkat tersebut Residen Riau E. Netscher datang dengan kapal perang "Reiner Classen" disertai Asisten Residen, Controleur beserta orang-orang besar Siak. Pada tanggal 3 Agustus 1862 kapal itu berlabuh di Panai dan Sultan Panai menanda tangani kontrak dengan Belanda. Selanjutnya tanggal 11 Agustus Langkat menanda tangani perjanjian pula. Demikian pula berturut-turut Sultan Serdang, Sultan Deli menanda tangani kontrak dengan Belanda pada tanggal 16 dan 22 Agustus 1862.

Perjanjian-perjanjian yang disodorkan oleh E. Netscher disebut "**Acte van Erkenning en Bevestiging**" yang pokoknya adalah berisi sebagai berikut :

Pada pasal I dikemukakan bahwa Belanda mengakui Sultan Siak sebagai Raja dari kerajaan kerajaan ini, di bawah kedaulatan pemerintah Hindia Belanda sebagai yang dipertuan kerajaan Siak. Kemudian pada pasal VI diakui bahwa raja-raja yang menanda tangani surat itu tidak akan berkirim surat dan berhubungan dengan kerajaan-kerajaan lain sebelum mendapat izin Residen Riau. Pada pasal 7 ditetapkan pula bahwa kerajaan-kerajaan itu tidak

akan mengizinkan orang-orang Eropa untuk tinggal di dalam kerajaan sebelum diperkenankan oleh Belanda.

Dari isi perjanjian itu, ternyata bahwa secara tidak langsung kerajaan-kerajaan tersebut telah mengakui bahwa kerajaan mereka adalah bahagian dari kekuasaan Belanda.

Penanaman kekuasaan Belanda di pesisir barat Sumatera Utara dimulai sejak akhir perang Paderi di Sumatera Barat. Kedudukan Belanda diperkuat di beberapa tempat seperti, Singkil dan Barus (1839—1840). Tujuannya adalah untuk memblokade lautan agar orang-orang Paderi tidak mendapat bantuan dari utara (Aceh). Ke daerah pedalaman Tapanuli, kekuasaan Belanda masuk pada masa Perang Paderi. Raja Gadombang dari Mandailing minta bantuan Belanda untuk menghadapi Paderi. Ikatan antara raja Belanda dikenal orang Batak dengan "Perjanjian Tembaga". Dengan perjanjian ini maka Belanda mendapat jalan untuk menguasai Tanah Batak bahagian pedalaman. Kedudukan Belanda di pulau Nias diperkuat dengan serangan mereka pada tahun 1863.

5.1.3. Akibat hubungan.

Tidak selamanya kekuasaan Belanda tertanam dengan mudah di Sumatera Utara. Rakyat Tapanuli Selatan yang pada mulanya mengharap bantuan Belanda untuk menghadapi Paderi, akhirnya sadar bahwa Belanda lebih berbahaya dari kaum Paderi. Hal itu mulai dengan usaha Belanda membentuk bestuur di daerah itu dan mulainya berlaku Sumatera Reglement bagi daerah tersebut yaitu Tapanuli termasuk daerah keresidenan Sumatera Barat. Pengadilan-pengadilan gubernemen sangat mengurangi kekuasaan raja-raja, karena pengadilan serupa itu mengurangi hak penguasa daerah. Pada tahun 1837 Asisten Residen Bonet memaklumkan kepada raja-raja, agar semua perkara dibawa ke pengadilan gubernemen di Singengu Kota Nopan. Demikianlah sebagai reaksi atas beberapa peraturan, timbullah perlawanan rakyat dipimpin oleh Raja Mangkutur pada tahun 1839 tetapi perlawanan ini dapat dipadamkan oleh Belanda.

Setelah kekuasaan Belanda tertanam di Tapanuli maka dibentuklah pemerintahan Belanda sebagai suatu daerah keresidenan yaitu keresidenan Tapanuli pada tahun 1834 dan pada 7 Desember 1842 diperluas ke daerah Sigompolan, Sigotom, Sipahutar, dan Pangaribuan. Keresidenan Tapanuli ini berpusat di Sibolga yang terdiri dari empat daerah afdeling yaitu **Sibolga en Omstreken, Angkola en Sipirok, Bataklanden, dan Nias.**

Sedangkan di pesisir timur Sumatera Utara, masuknya kekuasaan Belanda ke daerah ini mengakibatkan timbulnya beberapa perlawanan. Perlawanan Sultan AhmadSyah dari Asahan kepada Belanda terjadi pada masa Residen E. Netscher yang memaksakan kontrak kepadanya. Sultan tidak bersedia menandatangani kontrak tersebut dengan alasan tidak tunduk kepada Siak melainkan kepada Aceh. Sementara itu Asahan berusaha menarik simpati Inggris dan memohon bantuan untuk menghadapi Belanda.

Sultan Ibrahim yang pada waktu itu menduduki tahta Kesultanan Aceh berusaha agar Belanda membantu Asahan, namun tidak berhasil. Inggris yang berkedudukan di pulau Penang telah mengubah politiknya terhadap Sumatera, walaupun beberapa tahun sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan Aceh untuk saling membantu. Alasan Inggris ialah bahwa mereka di Penang tidak berhak mengeluarkan putusan kecuali dengan ketentuan Gubernur Jendral Inggris di Kalkuta, oleh karena itu kapal-kapal perang Inggris hanya melakukan perlawatan ke Sumatera Timur dan tidak memberikan bantuan dalam bentuk apa pun.

Dalam perlawanan itu Sultan Asahan mendapat bantuan dari penduduk Batak di pedalaman dan memperoleh bantuan pula dari kerajaan Serdang dan Lima Puluh namun perlawanan itu tidak berhasil dan dapat dipatahkan Belanda. Sultan AhmadSyah dapat ditawan dan dibuang ke Riau. Pada tahun 1885 Sultan AhmadSyah boleh kembali ke Asahan dan setahun kemudian beliau menandatangani perjanjian dengan Belanda.

Selanjutnya Belanda dapat menguasai daerah Sumatera Timur melalui perjanjian dengan raja-raja yang berbentuk kontrak yang disebut **Lange Verklaring** (Perjanjian Panjang) dan **Korte Verklaring** (Perjanjian Pendek). Pada tanggal 1 Maret 1887 Belanda membentuk daerah Sumatera Timur menjadi daerah keresidenan yang sebelumnya termasuk daerah keresidenan Sumatera Timur berkedudukan di Bengkalis. Kemudian keresidenan Sumatera Timur berpusat di Medan dan terdiri atas empat daerah afdeling yaitu Deli dan Serdang, Simalungun dan Karolanden, Langkat dan Asahan.

Setelah daerah Sumatera Timur dikuasai Belanda, maka usaha Belanda yang utama di daerah ini ialah pembukaan perkebunan-perkebunan. Usaha membuka perkebunan itu dilakukan dengan kontrak-kontrak penyewaan tanah dengan Sultan. Dengan adanya perjanjian seperti itu maka penduduk merasa sangat dirugikan. Di mana-mana para petani melakukan perlawanan dalam bentuk

pengrusakan perkebunan. Salah satu di antaranya yang agak penting ialah perlawanan Datuk Kecik dan Datuk Sulung di Sunggal. Perlawanan itu demikian hebatnya sehingga memakan tempo 22 tahun dari tahun 1872 – 1894.

Setelah Belanda dapat menguasai pesisir timur dan barat Sumatera Utara, maka Belanda terus meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman yaitu Tanah Batak.

Perlawanan rakyat pedalaman Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja XII. Perlawanan itu bukan saja berlangsung di Toba, tetapi meliputi daerah kekuasaan Sisingamangaraja yaitu Aceh Tenggara, Dairi, Pakpak, Karo, Simalungun, dan Toba sebelah selatan. Tiap-tiap daerah melakukan perlawanan menentang kekuasaan Belanda, dan Sisingamangaraja mengkoordinasikan perlawanan itu. Oleh sebab itulah makanya Sisingamangaraja selalu melakukan perjalanan di dalam masa perlawanan itu. Setelah melakukan perlawanan selama lebih kurang 30 tahun (1877 – 1907) akhirnya Sisingamangaraja gugur dalam suatu pertempuran di Bakara.

Setelah Belanda dapat mematahkan perlawanan Sisingamangaraja XII di daerah pedalaman itu, maka praktis Sumatera Utara berada di bawah kekuasaan dan pengaruh pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia.

5.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat.

5.2.1. Pengaruh kekuasaan Eropa.

Abad ke-19 membawa perubahan-perubahan besar bagi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Hal itu sebagian besar adalah sebagai akibat masuknya pengaruh Eropa terutama Belanda. Kekuasaan Belanda yang mulai tertanam di daerah ini pada bahagian kedua abad XIX cepat membawa perubahan, karena pembukaan perkebunan-perkebunan terutama di daerah Sumatera Timur.

Pelopor pertumbuhan perkebunan di Sumatera Timur ialah Jacobus Nienhuys yang datang ke Deli pada tahun 1863, yaitu beberapa bulan saja sesudah negeri Deli menanda tangani kontrak dengan Belanda. J. Nienhuys bekerja untuk perusahaan Van den'Arend dan pada tahun 1864 berhasil dalam percobaannya untuk penanaman tembakau di Deli. Setelah berhasil dalam percobaan-percobaan tahun berikutnya, maka pada tahun 1867 diperoleh hak konsesi untuk masa 99 tahun. Sepuluh tahun kemudian dalam rangka pengembangan, maka perusahaan Van den'Arend dijadikan **Naamloze Vennootschap**, dan pada tahun 1869 dibentuklah satu perusahaan besar yaitu **Deli Maatschappij**.

Pada mulanya untuk onderneming sangat sukar sekali memperoleh tenaga kerja (kuli-kuli). Nienhuys mula-mula mendatangkan orang-orang India (Keling) dan Cina dari Penang untuk bekerja di perkebunan. Hal itu terpaksa dilakukan karena penduduk di sini tidak bersedia bekerja di perkebunan itu. Keengganan mereka bekerja di perkebunan tersebut disebabkan adanya ketidakadilan yang mereka alami sebab selama ini daerah tersebut adalah tanah tanah pertanian mereka sendiri. Kuli-kuli Cina dan Keling itu pun banyak yang melarikan diri atau melawan karena kerja sangat berat dan penghasilannya rendah.

Salah satu hal sampingan yang ditimbulkan oleh kedatangan berbagai bangsa ke daerah ini ialah masalah hukum. Pada mulanya orang Eropa dan begitu pula orang Cina dan India itu berada di bawah kekuasaan pengadilan Sultan, tetapi pada tahun 1872 diadakanlah suatu perjanjian dengan kuasa Residen yang berkedudukan di Labuhan Deli. Ikatan itu dikenal "**Suppletoire Verklaring**". Di situ Sultan mengaku bahwa segala orang Eropa serta yang disamakan dengannya, orang India (Keling) dan Cina dan bangsa Timur asing lainnya yang berada pada kerajaan Deli berada di bawah hukum pemerintahan Hindia Belanda. Berdasarkan perjanjian itu, maka dikeluarkanlah suatu peraturan pada tahun 1873 yang menetapkan, bahwa kuasa Residen berhak untuk menggugat perkara bangsa asing tersebut. Namun pada waktu itu Residen berkedudukan di Bengkalis sehingga terasa sukar untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat banyak itu. Kemudian dipindahkanlah administrasinya ke daerah Sumatera Timur yaitu Labuhan Deli.

Cara peradilan yang disusun itu dirasakan oleh pengusaha perkebunan sangat sulit proses peradilannya. Lebih-lebih setelah semakin banyaknya tenaga kerja (kuli) yang didatangkan dari pulau Jawa. Untuk mengatasi persoalan ini, maka untuk pertama sekali pengusaha perkebunan pada tahun 1873 mengajukan permohonan kepada pemerintah Belanda, agar kepada **eigenaar** atau **administrateur** perkebunan diberi hak untuk mengadili kuli. Untuk mengawasi kuli yang melanggar aturan maka para mandur perkebunan diberi hak menjadi opas sebagai polisi di perkebunan. Masalah yang penting bagi perusahaan perkebunan itu ialah terjaminnya tenaga buruh untuk perkebunan mereka. Walaupun tugas-tugas kepolisian tidak diberikan kepada perkebunan, namun pemerintah tidak cukup tenaga untuk itu. Praktis petugas perkebunan menjadi petugas kepolisian dan dalam **Staatsblad** 1872 No. 111 diatur ancaman kepada buruh yang dianggap melalaikan tugas atau menolak

melakukan pekerjaan pada masa ia masih terikat dengan kontrak pada perkebunan. Ancaman yang diberikan kepadanya berupa kerja paksa.

Pada tahun 1880 keluar pula undang-undang yang mengatur bentuk kontrak bagi kuli-kuli perkebunan, ditentukan pula dalam aturan itu bahwa jika ia tidak bekerja, maka gajinya tidak diberikan dan tidak diperkenankan meninggalkan perkebunan dengan tidak seizin majikan.

Demikianlah aturan-aturan yang berat telah dijalankan oleh majikan kepada para kuli yang terkenal dengan "*poenale sanctie*" yang mengakibatkan rendahnya kedudukan kuli kontrak di perkebunan bangsa Eropa.

5.2.2. Pemenuhan kebutuhan.

Di luar perkebunan, rakyat Sumatera Utara pada umumnya hidup dari pertanian. Daerah pertanian yang subur didapati di daerah dataran tinggi Karo, Deli Serdang, dan Tapanuli Selatan. Penduduk Melayu yang tinggal di tepi pantai hidup dengan menangkap ikan, sebahagian dari mereka yang tinggal di pedalaman hidup dari pertanian. Sebagai nelayan mereka pergi ke laut di kala subuh, yakni sewaktu pasang surut dan barulah kembali apabila pasang naik. Pada beberapa tempat di tepi pantai para nelayan berkumpul; biasanya di muara-muara sungai seperti Batang Serangan (Tanjung Pura), Teluk Nibung di muara sungai Asahan. Bandar Kalifah dekat Tebing Tinggi sekarang, Labuhan Deli, Percut, dan sebagainya. Pada tempat-tempat tersebut hasil penangkapan ikan mereka jual atau ditukarkan dengan hasil bumi yang mereka perlukan. Setelah orang-orang Cina menjadi tengkulak-tengkulak ikan maka orang-orang Cina memonopoli pembelian ikan itu dan menjualnya kepada penduduk. Untuk memasukkan uang ke Kas Kerajaan Sultan memungut cukai dari ikan dan hasil pertanian yang dijual para petani. Di samping itu Sultan juga memungut cukai dari hasil pemasukan barang dari luar negeri.

Di pedalaman yaitu di tanah Karo kebanyakan penduduk bertani. Di daerah ini pertanian sayur-sayuran semakin maju setelah kedatangan bangsa Eropa. Penduduk Karo mulai mengenal tanaman kol, wortel, kentang, tomat, dan lain-lain, sedangkan orang-orang suku Toba lebih memusatkan hasil dari penanaman padi, kopi, dan hasil hutan. Di Tapanuli Selatan penduduk menanam padi di samping juga melakukan kewajiban menanam kopi. Penanaman kopi di Tapanuli Selatan wajib dilaksanakan semenjak

tahun 1841 yaitu setelah masuknya kekuasaan Belanda di daerah ini.

Orang-orang Nias selain menangkap ikan, bertani juga mengumpulkan hasil hutan. Rotan dan kelapa banyak dihasilkan dari pulau Nias itu. Rotan menjadi bahan kerajinan tangan rakyat dan kelapa menjadi barang dagangan yang utama.

Pada umumnya wanita Melayu, Karo, Batak, dan Nias selain sebagai petani juga melakukan pekerjaan bertenun, dari pertenunan ini mereka menghasilkan bermacam-macam kain, tenunan Batak dan Melayu terkenal sejak dahulu dan telah mencapai mutu yang tinggi sejak sebelum kedatangan Belanda ke daerah ini.

5.2.3. Gerakan perlawanan.

Semenjak daerah Sumatera Utara di bawah kekuasaan Belanda banyak perlawanan rakyat antara lain disebabkan soal tanah, kerja, kekuasaan, dan adat

Dari sekian banyak perlawanan adalah kejadian yang menunjukkan perlawanan terhadap penguasa perkebunan yang telah dilakukan oleh kaum buruh. Pada perlawanan kaum buruh yang terjadi di perkebunan sungai Tawar (Langkat) tahun 1876 mengakibatkan rumah seorang administratur dibakar. Kemudian di Tandem seorang petugas Belanda terbunuh, dan banyak lagi perlawanan dilakukan oleh buruh perkebunan. Salah satu dari perlawanan terhadap Belanda diorganisasikan oleh seorang Gayo yang bergelar panglima Selan. Perlawanan ini ditujukan pula kepada toke-toke perkebunan dan hal ini memberi bukti kepada kita walaupun dalam keadaan yang sulit orang masih berani menyatakan perlawanan, meskipun diancam dengan hukuman yang berat.

Pada mulanya Belanda melakukan perjanjian dengan Sultan untuk menyewa tanah untuk dijadikan perkebunan, dari hasil perkebunan itu pihak Belanda membayar sewa tanah kepada Sultan. Akibat dari perjanjian banyak penduduk sebagai rakyat penunggu di tanah Sultan tergusur ke daerah yang tidak subur. Hal itu mengakibatkan rakyat menjadi miskin. Apalagi setelah perjanjian kontrak 1 Januari 1876, di mana Sultan memberikan hak kepada **gubernemen** Belanda, maka pemerintah Belanda memberikan tanah kepada pengusaha perkebunan, memungut pajak (cukai) dan memonopoli berbagai perdagangan. Salah satu perlawanan rakyat akibat persoalan tanah ini adalah perlawanan rakyat Sunggal yang dipimpin oleh Datuk Kecik dan Datuk Sulung. Perlawanan itu sa-

ngat hebat sekali dan memakan waktu selama 22 tahun dari tahun 1872 – 1894

5.2.4. Keadaan masyarakat pada akhir abad 19.

Perkembangan kehidupan masyarakat sampai akhir abad XIX mulai menunjukkan kemajuan. Sebagian masyarakat Sumatera mulai mengenal tanaman baru bagi pertanian, perdagangan menunjukkan kemajuan. Di samping itu sarana komunikasi juga diperbaiki.

Perhubungan perniagaan antara beberapa daerah pesisir ke daerah pedalaman di Tapanuli sampai ke Toba berjalan pesat sesuai dengan arus perdagangan. Untuk melakukan pemenuhan kehidupan orang Batak dan Karo melakukan hubungan dengan daerah pesisir barat maupun pesisir timur untuk membeli kebutuhan pokok yaitu garam. Sebaliknya mereka membawa hasil pertaniannya seperti beras, kopi, sayuran, hasil hutan untuk dijual ke daerah pesisir.

Dengan kedatangan bangsa Belanda ke daerah ini masyarakat mulai mengenal sistem perdagangan, sistem pertanian, walaupun begitu masyarakat belum meninggalkan adat istiadat dan nilai-nilai tradisional yang masih tetap mereka pertahankan.

5.3. Kehidupan Seni Budaya.

5.3.1. Pengaruh Seni Budaya Asing.

Pergaulan dengan orang-orang Belanda di kalangan bangsawan, baik dengan tuan-tuan perkebunan maupun dengan pembesar-pembesar pemerintahan (Residen, Asisten, Controleur) membawa pengaruh kepada tata cara hidup mereka. bahasa Belanda, tata-cara pergaulan, susunan rumah tangga dicontoh oleh kalangan elite bangsa Indonesia.

Pelajar-pelajar yang telah memasuki sekolah Belanda baik di Sumatera, Jawa atau yang pergi ke negeri Belanda merasakan betapa terbelakangnya peri kehidupan Bumiputera dibandingkan dengan bangsa barat. Oleh sebab itu mereka menyukai kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan, dengan cara mengambil sebanyak-banyaknya dari bangsa Barat dan meninggalkan tradisi yang dianggap sudah usang. Demikianlah orang-orang Indonesia yang telah bersekolah dan mendapat kesempatan bekerja baik di kantor-kantor pemerintah maupun di kantor perusahaan adalah pelopor pembaharuan cara mengambil pola-pola kehidupan barat. Mereka

berpakaian ala barat, dengan pantalon, jas, dan berdasi lengkap dengan topi seperti orang Barat. Engku Jaksa, Engku Guru, Engku Sep, Engku Klerek (juru tulis) hidup berbeda dengan orang kebanyakan. Golongan inilah yang mula-mula mendapat pengaruh seni budaya barat. Mereka membaca buku-buku, koran dan majalah, menonton opera, orkes dan sekali-sekali berkesempatan hadir pada pertemuan-pertemuan dengan orang Belanda. Dalam pertemuan-pertemuan itu mereka berkenalan dengan tata pergaulan barat.

Perkembangan agama Kristen di Tapanuli dan Simalungun membawa perubahan pula pada sikap hidup orang-orang Indonesia yang telah menganut agama itu. Mereka memperoleh ajaran agama dari orang-orang barat. Sedikit demi sedikit tumbuhlah pemuka-pemuka gereja dari kalangan orang Batak. Mereka mendapat kesempatan belajar dari pendeta-pendeta orang-orang barat dalam berbagai pengetahuan dan tata cara hidup. Di samping itu misi-misi mendirikan pula sekolah-sekolah, baik sekolah yang diperuntukkan bagi pelayan gereja maupun sekolah umum. Demikianlah tumbuh di tengah masyarakat atau golongan pemuka agama yang telah memperoleh pengaruh barat di kalangan orang Batak yang kelak membawa pengaruh besar dalam peri kehidupan masyarakat Batak.

Melalui lapisan kaum bangsawan, kaum terpelajar, dan golongan pemuka agama Kristen itu lama kelamaan seni budaya barat mulai dikenal dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Pertumbuhan itu berjalan melalui inovasi di dalam pendidikan dan pergaulan hidup. Bangsa Indonesia menerima pengaruh itu disebabkan kelebihan-kelebihan yang mereka lihat pada bangsa barat. Namun mereka tetap merasa dirinya sebagai bangsa Indonesia dan tetap mencintai nilai-nilai keluhuran seni budaya asli Indonesia. Oleh sebab itu pengaruh seni budaya barat tidak menenyapkan unsur-unsur kebudayaan asli, melainkan memperkayanya dengan unsur-unsur baru.

5.3.2. Pendidikan.

Masalah pendidikan dan sekolah umum di Sumatera Utara sesudah masuk pengaruh barat berlangsung melalui dua jalan, yakni melalui pendidikan atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan sekolah umum. Lancarnya pendidikan di Sumatera Utara adalah berkat bantuan dari pemerintah Belanda, di mana

pemerintah Belanda memberi peluang kepada misi misi agama Kristen untuk membangun sekolah-sekolah tadi. Pada masa ini pendidikan yang menonjol di Sumatera Utara adalah di bidang agama, baik di Tapanuli yang mayoritas penduduknya beragama Kristen mendalami pendidikan di bidang agama tersebut dan begitu pula penduduk yang menempati daerah Sumatera Timur memajukan pula pendidikan dan mendirikan Madrasah-Madrasah Islam. Penyiaran agama Kristen di daerah pesisir tidak membawa kemajuan, karena sebahagian besar penduduk pesisir Sumatera bagian utara telah sejak lama tertanam pengaruh agama Islam.

Perkembangan pendidikan dan agama Kristen di Tanah Batak mengalami kemajuan pesat pada tahun 1864 di mana badan yang mempelopornya adalah orang Inggris. Selain dari misi Inggris sebagai pengembang agama Kristen ke Tanah Batak juga terdapat misi agama Kristen dari Jerman. Jemaat Kristen pertama dijumpai di Huta Dame. Akan tetapi bukanlah berarti bahwa agama Kristen masuk ke Sumatera Utara pada waktu itu pula lalu dianut oleh penduduk Tapanuli. Agama Kristen masuk ke Sumatera atau Tanah Batak ditandai dengan berdirinya Gereja pertama dekat Sibolga. Kontak pertama dengan agama Kristen terjadi baru di sekitar tahun 1800 Masehi, yakni dengan berdirinya Gereja Sekte Nestorian di Barus.

Pemerintah Belanda yang mengadakan sekolah sekolah di Sumatera Utara ini hanya terbatas untuk kalangan kalangan tertentu saja. Bangsa Belanda menyadari, bahwa dengan membebaskan setiap bumiputera untuk bersekolah niscaya nantinya akan berakibat besar, yakni kesangsian akan bumiputera yang sudah terdidik untuk menyusun kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia yang akan membahayakan pemerintah Belanda, oleh karena yang boleh dimasuki oleh bumiputera adalah sekolah sekolah Desa (**Volksschool**) yang memakan waktu selama 3 tahun. Mengenai biaya sekolah-sekolah desa ini tidak begitu besar dan administrasinya diatur oleh pemerintah setempat. Bagi orang orang yang menyelesaikan sekolah desa, pemerintah Belanda membuka lagi yang agak tinggi sebagai lanjutannya. Setiap orang yang tamat dari sekolah desa bisa diterima sebagai juru tulis di kantor kantor. Setelah tamat dari sekolah desa mereka berhak menjadi kerani dan sekolah untuk ini dinamakan **Vervolgschool**. Tapi sekolah kerani ini dibatasi pertumbuhannya oleh pemerintah Belanda. Semasa zaman kolonial dulu di Medan saja hanya dijumpai lebih kurang 9 buah "**Gemeente – Volksschool**".

Bagi orang Belanda dan yang disamakan kedudukannya dengan Belanda, dibuka sekolah Belanda. Sekolah Belanda ini dibedakan pula, atas tiga macam sesuai dengan penggolongan penduduk menurut politik kolonial, yakni orang Belanda, golongan Timur Asing dan Bumiputera. Khusus bagi orang-orang Belanda yang berada di Sumatera Utara, bagi mereka dibuka **Europese Lagere School (ELS)**, untuk keturunan asing (Cina) dibuka sekolah **Hollands Chinese School**. Kemudian untuk keturunan Bumiputera disediakan sekolah yang disebut, "**Hollands Inlandse School (H.I.S.)**).

Di Sumatera Utara tingkat pelajaran yang tertinggi pada zaman penjajahan Belanda ialah H.B.S. Tenaga pengajar semuanya orang Belanda. Jika kita nilai pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dengan sistem sekolah-sekolah Gubernemen itu jelaslah, bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi bagi anak-anak bumiputera sangat terbatas sekali. Lain dari itu tamatan sekolah Gubernemen memperoleh pendidikan Belanda. Mereka dididik bukan sebagai anak Indonesia tetapi sebagai anak Belanda.

5.3.3. Kesenian.

Bertemunya pengaruh barat dan pengaruh Islam di daerah ini memberikan corak tersendiri dalam kebudayaan, terutama dalam seni tari dan drama. Tari pergaulan barat dirasa tidak disukai karena tidak diperkenankan menurut kaidah agama orang-orang laki dan perempuan berpasangan, berpelukan atau bersentuhan. Oleh sebab itu berbagai kesulitan timbul, karena dirasakan pula keinginan untuk mencontoh tari barat itu. Sebagai akibatnya timbul bermacam tari pergaulan di kalangan penduduk, baik penduduk Melayu, Batak maupun pesisir barat. Pada penduduk pesisir pemakaian alat-alat musik barat seperti biola, akordion menandai pengaruh itu. Bermacam tarian di kalangan istana seperti tari Kuala Deli, Serampang Dua Belas dan sebagainya. Di Karo tumbuh pula bermacam tarian pergaulan di samping tari-tarian adat muncul tari tari Karo dengan **gendang aron**, sehingga berkembang menjadi tari-tarian daerah Karo yang sekarang terkenal jumlah lima puluh kurang dua". Lendek yang tertua dikenal "**Terpangir Ku Lau**", bersifat kepercayaan "**Simalungun raja**", yaitu lendek bagi raja-raja, tetapi kemudian muncul pula tari-tarian piso surit dan sebagainya, yang semua berjumlah empat puluh delapan tarian. Alat-

alat tradisional seperti gung, serunai, penganak (gung kecil), peng-gual (tambur) tidak banyak berubah, jika dalam penciptaan lagu-lagu Karo ada pengaruh adat modern, itu hanya pengaruh belak-kangan ini saja.

Di Tapanuli baik di utara maupun di selatan, di samping tor-tor untuk keperluan adat, maka muncul pula **gondang naposo** berupa tari pergaulan. Tari-tari Simalungun modern menggambar-kan pengaruh barat dan berisi pergaulan antara muda mudi.

Seni suara mengalami perubahan penting dengan masuknya agama Kristen ke tanah Batak. Lagu-lagu gereja berbeda dengan lagu-lagu tradisional dalam susunan nadanya. Vokal lebih penting dari bunyi bunyian. Alat-alat seperti piano berfungsi mengikuti suara penyanyi, sedang dalam seni suara tradisional suara instru-men yang lebih diutamakan. Yang lebih penting ialah perluasan isi nyanyian karena memakai kata kata kudus di dalam bahasa daerah yang kurang diresapi. Sampai sekarang orang Batak terke-nal dengan kesukaan bernyanyi.

Pengaruh lain ialah di dalam seni drama. Seni drama barat mempengaruhi perhatian penduduk dan akibatnya lahirlah berba-gai seni drama klasik yang terkenal di Sumatera Timur dengan sebutan "Bangsawan". Rombongan bangsawan itu banyak pula yang datang ke daerah ini dari luar daerah seperti dari Jawa. Opera adalah bentuk yang paling tua dalam drama di daerah ini. Berbagai perkumpulan muncul dalam bentuk rombongan baik di kalangan Melayu maupun Batak. Di dalam opera terdapat tari, nyanyi dan dialog. Mungkin hal itulah yang sangat menarik orang.

Kepandaian menulis dan membaca memperkenalkan berbagai ceritera tertulis sebagai unsur baru dalam kesusastraan di daerah ini, baik berupa prosa maupun puisi. Buku-buku pelajaran memba-ca di sekolah-sekolah berisi ceritera ceritera kehidupan masyarakat. Bahan pelajaran bahasa Belanda memperkenalkan pula ceritera dari dunia barat, yaitu ceritera tentang kejadian di negeri Belanda. Bahasa Melayu dipergunakan di sekolah-sekolah desa di Sumatera Timur, sedangkan di Tapanuli dipergunakan bahasa Batak. Sejalan dengan itu tumbuhlah kesusastraan daerah melalui tulisan-tulisan berbahasa Melayu dan Batak.

Willem Iskandar adalah seorang sastrawan yang terkenal pada masa ini dengan karya sastranya yang terkenal antara lain *Si Bulus Bulus*, *Berita Na Maragam* dan *Si Rumbuk-Rumbuk*. Hasil karyanya ini menjadi bahan bacaan di sekolah-sekolah pada masa itu. Sanjak-sanjak Willem Iskandar berisi sindiran dan kritik ke-

pada pemerintah Belanda oleh sebab itu kemudian tidak dibenarkan sebagai bacaan di sekolah-sekolah.

5.4. Alam pikiran dan Kepercayaan.

5.4.1. Perkembangan agama.

Sebelum tahun 1800 sebagian besar penduduk Sumatera Utara di pesisir barat dan pesisir timur telah menganut agama Islam. Di daerah pedalaman seperti ini di Tanah Karo, Dairi, Toba, Simalungun penduduk menganut kepercayaan asli yang bersifat animisme dan dinamisme. Kepercayaan seperti itu di Tanah Karo disebut **pelbegu** dan di Toba disebut **permalim**. Daerah Tapanuli Selatan yaitu daerah Mandailing, dan Angkola telah menerima penyiaran agama Islam pada permulaan Abad XIX yang disiarkan oleh kaum Paderi dari Sumatera Barat. Di Nias kepercayaan asli itu juga bersifat animisme dan dinamisme.

Kejadian penting dalam penyiaran agama di Sumatera Utara pada abad XIX ialah masuknya agama Kristen yang disiarkan oleh berbagai misi ke daerah pedalaman, yaitu ke daerah Toba, Silingdung, Karo dan Simalungun. Lain dari itu kedatangan orang-orang Cina ke Sumatera Utara menyebabkan terdapatnya penganut agama lain, yaitu agama Budha. Mereka menyebar di berbagai tempat dan kota, sehingga kehidupan beragama orang-orang Cina itu dikenal pula oleh penduduk di beberapa tempat. Walaupun demikian, pengaruh agama ini kepada penduduk asli hampir dapat dikatakan tidak ada. Begitu pula orang-orang India yang berkulit hitam yang di sini disebut Keling menganut agama Hindu dengan kegiatan peribadatan tersendiri bersifat kehinduan. Penyebaran mereka di berbagai kota juga menyebabkan terdapatnya penganut-penganut agama itu di beberapa tempat di Sumatera Utara, terutama di daerah pesisir timur yang berdekatan dengan perkebunan. Namun penganut agama ini terbatas pada lingkungan orang-orang Keling itu saja. Mereka beribadat di kuil-kuil yang khusus mereka dirikan dan melakukan upacara upacara pemakaman tersendiri.

Di samping itu orang-orang Sikh yang datang ke Sumatera Utara pada abad XIX juga mendirikan organisasi-organisasi agama (**Khalsa**) dengan lembaga-lembaga keagamaan mereka. Kuil-kuil Sikh terdapat pada beberapa daerah di Sumatera Utara, terutama di kota-kota yang dekat perkebunan seperti Medan, Binjai, Kisaran, Tebing Tinggi.

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa agama Budha, Hindu

dan Sikh itu tidak ada pengaruhnya kepada penduduk asli. Penganut-penganut agama itu terbatas pada orang-orang asing, yaitu Cina, Keling, dan Hindu (Sikh). Agama Islam dan agama Kristenlah yang banyak pengaruhnya pada penduduk asli. Daerah-daerah pedalaman yang penduduknya berkepercayaan pelbegu atau permalim banyak yang berubah menjadi penganut agama Islam atau Kristen sejak abad XIX.

Penyiaran agama Kristen ke Sumatera Utara dipelopori oleh Burton pada tahun 1820 di daerah sekitar Sibolga. Pada waktu itu telah dimulai menterjemahkan pasal I dari Al Kitab ke dalam bahasa Batak. Pada mulanya penyiaran itu dilakukan di daerah pesisir tetapi hasilnya tidak seberapa, karena penduduk di daerah pesisir telah menganut agama Islam. Pada tahun 1824 Burton dan Ward mulai masuk daerah pedalaman sampai ke Silindung.

Setelah kekuasaan Inggris di Sumatera bahagian barat diserahkan kepada Belanda, maka pulau Sumatera menjadi perhatian misi-misi agama Kristen dari negeri Belanda, maka diutuslah Gutzloff untuk menyebarkan agama Kristen, tetapi gagal. Pada tahun 1834 misi Agama Kristen dari Amerika mengirim Munson dan Lyman ke Sibolga. Mereka terus ke pedalaman Tapanuli, yaitu ke daerah Silindung, tetapi mereka mengalami kegagalan dan dibunuh oleh penduduk di desa Lobu Pinang. Pada tahun 1837 pekabar Injil yang bernama Ennis mencoba lagi memasuki daerah pedalaman, tetapi sekali lagi mengalami kegagalan.

Agama Kristen mulai memperoleh kemajuan di Tapanuli setelah serangan-serangan kaum Paderi ke Tapanuli. Penyerangan-penyerangan itu dapat dibendung oleh Belanda dan sejak itu terbukalah kesempatan bagi pekabar-pekabar Injil ke Tapanuli. Dalam penyiaran agama Kristen itu sangat besar pula pengaruh Dr. Junghun yang telah melakukan berbagai penelitian perihal suku Batak. Berdasarkan hasil penelitian Junghun, maka Lembaga Alkitab Negeri Belanda mengirim seorang ahli bahasa N. van der Tuuk dan ia berhasil menyalin Alkitab ke dalam bahasa Batak. Pada tahun 1856 G. van Asselt yang semula ditempatkan di Padang dipindahkan ke Angkola-Sipirok. Di tempat yang baru ini beliau dapat mengembangkan agama Kristen bagi penduduk asli. Setelah berhasil mengembangkan agama Kristen di daerah itu, maka pada 7 Oktober 1861 untuk pertama kali pekabar Injil mengadakan Konferensi pertamanya di Sipirok dan mendirikan HKBP (Huria Kristen Batak Protestan).

Penyiaran agama Kristen di Sumatera Utara pada mulanya dimulai di daerah Tapanuli Selatan dengan pusatnya di Sibolga dan Barus tetapi mengalami kegagalan karena masyarakat di daerah ini telah menganut agama Islam. Oleh sebab itu kegiatan penyiaran agama Kristen dialihkan ke utara. Di Padang, Bolak mereka dapat mendirikan beberapa Jemaah yang disebut Hutaibaru Pargarutan. Pada tahun 1869 seorang pekabar Injil dari Rusia mengalami kegagalan di Pakantan.

Walaupun kekuasaan Belanda belum sampai ke daerah pedalaman Tapanuli, namun pada tahun 1876 penyiaran agama Kristen yang dipelopori oleh Nomensen telah dipusatkan di Silindung. Hasil penyiaran di daerah itu cukup besar, sehingga pada tahun 1881 penganutnya telah berjumlah 4000 orang. Kemudian diadakanlah konperensi orang Kristen di Pea-Raja, yang dihadiri oleh beberapa jemaat, seperti Pea-Raja, Simorangkir, Sipoholon dan Hutabarat. Sepuluh tahun kemudian penyiaran agama Kristen telah memasuki daerah Samosir dan di sini berhadapan dengan kekuasaan raja Sisingamangaraja. Pada akhir abad XIX inilah daerah Tapanuli Tengah dan Utara dikeristenkan dan berdirilah berpuluh-puluh jemaat dan gereja. Daerah Karo menerima agama Kristen yang dipelopori oleh Dr. Kruyt di Buluh Hawar di daerah pedalaman. Dua belas tahun kemudian barulah penyiaran itu berhasil baik dan berpusat di Kabanjahe. Di daerah Nias agama Kristen mulai masuk tahun 1874 di kampung Hilino'a dan sembilan tahun kemudian berpusat di desa Ombalata. Pada 1890 agama Kristen masuk ke Gunung Sitoli yang dipelopori oleh Denninger. Pada akhir abad ke XIX agama Kristen di pulau Nias terus berkembang ke daerah Sirombu (pantai Barat) daerah Lololua dan Lohusa. Sifao-roasi di pedalaman dan beberapa tempat di bahagian utara selatan dan timur pulau itu.

Sementara itu di daerah pesisir timur Sumatera Utara, yaitu di kerajaan kerajaan Deli, Langkat sampai ke daerah Labuhan Batu agama Islam telah tertanam dengan kuat. Kerajaan-kerajaan itu diperintah oleh Sultan-sultan yang memajukan kegiatan pengajaran dan penyiaran agama Islam. Mesjid-mesjid dan tempat pengajian mendapat bantuan dari sultan-sultan dan pada abad XIX itulah didirikan beberapa mesjid yang indah di berbagai tempat di Sumatera Timur, antaranya Mesjid Labuhan Deli, Mesjid Raya di Medan, Mesjid Azizi di Langkat dan lain-lain. Selain itu tempat-tempat pengajian berdiri pula yang dipimpin oleh ulama-ulama, di antara-

nya yang terkenal ialah Basilam (Babussalam) di Langkat. Basilam adalah pusat tarikat Naksabandiah yang didirikan oleh Tuan Syech Abdul Wahab Rokan dan murid-muridnya tersebar di seluruh Sumatera dan Semenanjung Melayu. Kemudian di berbagai tempat berdiri pula pusat-pusat tarikat yang dipimpin oleh tuan-tuan Syech, seperti di Tapanuli Selatan, Labuhan Batu, Asahan.

5.4.2. Kehidupan Intelektual.

Golongan ulama dan guru-guru agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Mereka diberi tugas menjadi hakim (**kadhi**) yang berfungsi sebagai pengendali hukum. Oleh karena menguasai hukum-hukum Islam (**Fiqh**) maka kedudukan mereka sebenarnya juga sebagai pembina hukum. Raja-raja dan para bangsawan melaksanakan pemerintahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang dirumuskan oleh para ulama.

Di tengah masyarakat para ulama berkedudukan sebagai pemimpin, yaitu memberikan petunjuk-petunjuk dalam berbagai segi kehidupan, dan sebagai guru memberi pendidikan agama kepada anak-anak dan orang dewasa. Jika di masa dulu kedudukan intelektual berada di tangan para datu yang memberi nasehat dan pengobatan di tengah masyarakat, maka setelah menganut agama Islam para ulama banyak pula yang berkedudukan sebagai dukun dan dianggap sebagai orang yang mempunyai pengetahuan mistik.

Di kalangan orang-orang Kristen para pendeta mempunyai kedudukan penting. Para pendeta memimpin kegiatan rohani dan turut menyelesaikan berbagai perselisihan di tengah masyarakat. Para pendeta membuka beberapa kegiatan pendidikan untuk memperoleh tenaga penginjil. Pada mulanya kegiatan itu sedikit-sedikit dari beberapa tenaga penginjil, lama kelamaan dibuka pula beberapa kegiatan lain seperti tenaga bidan, perawat dan tenaga administrasi yang mengatur pekerjaan di gereja.

Orang-orang yang telah memperoleh pendidikan ini lama kelamaan memperoleh kedudukan lebih baik dari masyarakat sekitarnya dan pada abad XIX golongan ini merupakan pemimpin di kalangan pribumi, dan memperoleh kepercayaan dari pemerintah Belanda.

Raja raja pribumi yang telah berada di bawah kekuasaan Belanda sedikit demi sedikit memperoleh pengaruh dari orang-orang Belanda. Hubungan-hubungan dengan orang Belanda mulai membuka mata mereka untuk memperoleh kedudukan yang lebih

tinggi dengan cara menyesuaikan diri dengan pola kehidupan barat. Anak anak mereka mulai diarahkan untuk memperoleh kedudukan sebagai amtenar dengan memperoleh pendidikan barat.

Situasi istana diatur menurut cara barat. Susunan perkantoran istana mulai menurut perkantoran barat dengan tata pegawai yang dinilai berdasarkan pengetahuan barat seperti bahasa Belanda, menulis Latin yang sangat diperlukan untuk berhubungan dengan Belanda. Golongan yang memperoleh pendidikan barat itu semakin banyak setelah pada beberapa tempat mulai dirintis untuk membuka sekolah-sekolah. Sebenarnya sekolah-sekolah baru dibuka pada abad XX, tetapi pada abad XIX telah ada beberapa orang Indonesia yang pada mulanya bekerja sebagai juru tulis di kantor-kantor, kemudian berhasil memperoleh kesempatan untuk belajar lebih tinggi. Seorang di antara mereka itu yang paling terkenal ialah Willem Iskandar seorang anak desa Pidoli (dekat Penyabungan) yang mendapat kesempatan bersekolah di negeri Belanda dan kembali sebagai guru sekolah Normal. Karya-karya sastra Willem Iskandar dalam bentuk puisi dipergunakan pada masa itu sebagai bahan bacaan di sekolah-sekolah.

Lembaga-lembaga yang menempa golongan intelektual pada abad XIX adalah surau-surau, mesjid atau pesantren-pesantren bagi golongan Islam, gereja, sekolah-sekolah bagi golongan Kristen dan melalui sekolah-sekolah bagi golongan yang cenderung kepada kebudayaan barat, seperti kaum bangsawan dan raja-raja.

5.5. Hubungan ke luar.

5.5.1. Bentuk dan sifat hubungan.

Hubungan ke luar daerah Sumatera Utara sejak zaman kuno ialah hubungan perdagangan. Pedagang-pedagang Cina, Arab, dan India telah lama berdagang ke daerah ini untuk memperoleh berbagai barang dagangan seperti, kapur barus, pinang, lada, kemenyan dan keperluan konsumsi seperti beras dan sebagainya. Sepanjang abad XIX hubungan itu tetap berlangsung. Pedagang pedagang Cina, Arab, dan India tetap mengadakan hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di pesisir terutama di Sumatera Timur.

Pada abad XIX kedudukan Inggris di Selat Melaka berpusat di pulau Penang, kemudian disusul tumbuhnya Singapura. Hubungan dagang yang erat antara Inggris dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur dibuktikan oleh catatan-catatan John Anderson yang berkunjung ke daerah ini pada tahun 1823. Kota-kota dan

pusat-pusat pemerintahan yang penting di Sumatera Timur telah didatangi oleh Anderson untuk menguatkan hubungan dagang Inggris dengan daerah itu.

Kekuasaan Belanda masuk ke Sumatera Utara pada abad XIX, melalui traktat Siak (1863) yang dipergunakan Belanda untuk memaksa raja-raja di Sumatera Timur untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda. Kekuasaan Belanda yang mulai tertanam di Sumatera Timur itu mengakibatkan dibukanya perkebunan-perkebunan oleh pengusaha (*ondernemers*) Belanda. Pada abad XIX itu penanaman tembakau yang diutamakan dan sehingga Deli terkenal di seluruh dunia dengan tembakaunya. Sesudah Belanda berkuasa di daerah-daerah lain seperti Mandailing yang kemudian diwajibkan menanam kopi maka perdagangan Belanda semakin maju. Pelabuhan Sibolga menjadi semakin penting sejak waktu itu di pantai barat, menggantikan kedudukan pelabuhan-pelabuhan Air Bangis, Pariaman, Barus yang pada waktu sebelumnya lebih penting kedudukannya.

Penyiaran agama Kristen ke Tapanuli membentuk hubungan lain yang bersifat hubungan agama. Penyiar agama Kristen itu bekerja di bawah pimpinan organisasi misi yang ada di negeri Belanda (*NZG Nederlands Zendelinggenootschap*), Jerman (*RMG – Rheinische Missions Gesellschaft*), Himpunan Pekabar Injil Baptis dari Inggris, (*Baptists Missionary Society*). Misi-misi itu melakukan kegiatan terkoordinasi di dalam usaha pengembangan agama di berbagai daerah di Sumatera Utara. Kegiatan-kegiatan lain bersifat kegiatan sosial, seperti membangun sekolah-sekolah, mendirikan rumah-rumah sakit, mendidik para pelayan gereja, bidan atau mantri mantri rumah sakit dilakukan oleh misi-misi itu dengan biaya-biaya yang mereka keluarkan secara teratur.

5.5.2. Sikap terhadap daerah lain.

Pada umumnya hubungan perdaganganlah yang sangat diinginkan oleh kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara dengan dunia luar. Perdagangan itu langsung dilakukan oleh raja atau bangsawan yang ada di bawah kekuasaan raja. Pedagang pedagang asing datang membeli atau menjual barang-barang ke daerah ini membayar cukai kepada raja-raja. Raja-raja menginginkan perdagangan yang terbuka dengan semua bangsa, karena dengan cara demikian itu mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Walaupun demikian raja-raja terpaksa memberikan hak-hak atau janji-janji kepada

pedagang-pedagang yang kuat seperti Inggris dan Belanda. Pada waktu itu kegiatan perdagangan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan politik. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan bangsa asing mengenai perdagangan sebenarnya mempunyai latar belakang politik, seperti pemaksaan keinginan mendapat sahabat atau keinginan mendapat perlindungan. Daerah Sumatera Timur misalnya ingin sekali bebas dari kekuasaan Aceh dan Siak, sehingga menginginkan hubungan-hubungan langsung dengan Inggris dan Belanda.

Walaupun demikian, kedatangan kekuasaan Belanda ke Sumatera Timur pada abad XIX telah ditolak oleh raja-raja Sumatera Timur, atau diterima dengan rasa terpaksa. Sikap menolak itu disebabkan oleh karena hilangnya kemerdekaan di bawah kekuasaan Siak yang dipergunakan Belanda sebagai alat penanam kekuasaan di Sumatera Timur. Pertentangan-pertentangan dan peperangan-peperangan antara kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur menyebabkan timbulnya dorongan pada raja-raja untuk menerima kekuasaan Belanda. Peperangan antara Langkat dengan Deli, perselisihan antara Deli dengan Serdang, pertentangan di kalangan istana mengenai kedudukan raja seperti Pangeran Langkat dengan Tuanku Hasyim di istana Langkat turut mendorong raja-raja untuk memperoleh perlindungan dari Belanda. Begitu pula ancaman yang dirasakan oleh raja Gedumbang di Mandailing dari kaum Paderi menyebabkan raja itu mengharapkan bantuan atau perlindungan dari Belanda.

Penduduk pesisir yang telah menganut agama Islam menolak ajaran agama Kristen. Selama berpuluh tahun usaha misi yang berpusat di Sibolga dan Barus tidak mencapai kemajuan apa-apa. Di daerah pedalaman Tapanuli, penduduk yang belum beragama Islam itupun menolak ajaran agama Kristen. Usaha-usaha di bidang sosial, seperti bantuan-bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang kesulitan, pengobatan, menimbulkan simpati di kalangan masyarakat dan lama kelamaan terbentuklah jemaah jemaah Kristen di berbagai tempat. Usaha-usaha itu lama kelamaan meluas sampai ke Toba. Di daerah ini pengaruh agama Kristen mengalami tantangan yang hebat dari pengikut-pengikut Sisingamangaraja. Barulah setelah perlawanan raja Sisingamangaraja dipatahkan oleh Belanda agama Kristen meluas sampai ke Toba, kemudian ke daerah-daerah sekitar Toba seperti Simalungun, Karo dan Dairi.

5.5.3. Pengaruh dan Akibat.

Kemajuan perdagangan pada abad XIX menyebabkan timbulnya lalu-lintas antara daerah pesisir dengan pedalaman. Dari daerah pedalaman terdapat beberapa jalan kecil ke pesisir, ke kota-kota pusat perdagangan atau pemerintahan. Peningkatan perdagangan Inggris dari pulau Penang ke Sumatera Timur telah memajukan perdagangan itu. Di beberapa daerah pedalaman pada abad XIX telah dikenal semacam pasar dengan memakai mata uang, walaupun pemakaian uang itu masih sangat terbatas sekali.

Masuknya pengaruh ekonomi Belanda ke daerah Sumatera Timur menimbulkan beberapa hal. Pertama hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain harus dibatasi dengan seizin pemerintah Belanda. Akhirnya seluruh kegiatan perdagangan itu dikuasai oleh Belanda. Raja-raja yang selama ini berhak memungut cukai, kemudian hak itu diserahkan kepada Belanda dengan penggantian sejumlah uang kepada raja-raja setiap tahun. Kedua usaha Belanda dalam membuka perkebunan di daerah ini menimbulkan masalah tanah di Sumatera Timur. Tanah-tanah itu diperoleh pengusaha dari raja-raja berupa tanah konsesi atau hak *erfpacht* yang meliputi 99 tahun. Para petani Melayu pada mulanya harus menyingkir dari tanah-tanah yang telah dijadikan perkebunan itu, tetapi karena kebun tembakau tidak ditanami terus menerus, melainkan secara musiman (rotasi), maka bekas bekas tanah perkebunan itu untuk beberapa tahun dapat dikerjakan kembali oleh penduduk. Tanah-tanah inilah yang kita sebut tanah jaluran dan hak mengerjakannya diserahkan kepada penduduk asli (Melayu) yang disebut rakyat penunggu.

Pembukaan perkebunan-perkebunan besar (*onderneming*) di daerah ini memerlukan tenaga buruh. Tenaga ini tidak dipergunakan dari penduduk asli, karena biasanya penduduk daerah ini tidak suka bekerja sebagai buruh (*koeli*) dan mereka masih dapat hidup secara bebas dengan mencari tanah lain atau menunggu tanah jaluran pada musim yang akan datang. Orang-orang Batak juga tidak dapat dipergunakan sebagai buruh, karena mereka menunjukkan sikap melawan dan banyak kejadian kebun-kebun dirusakkan oleh orang-orang Batak.

Untuk mengatasi persoalan ini, maka *ondernemers* terpaksa mendatangkan buruh yang dikontrak dari Cina, India dan kemudian dari Jawa. Demikianlah mulai berdatangan orang-orang Cina, Sikh dan Keling serta orang Jawa ke Sumatera Utara.

Kemajuan perkebunan dan perdagangan di Sumatera Utara, terutama di Sumatera Timur, mengakibatkan daerah Deli menjadi tanah impian bagi perantau-perantau, terutama dari Mandailing, Minangkabau serta Aceh. Tanah Deli terkenal dengan tanah dolar. Kota-kota tumbuh di sekitar perkebunan dan semakin maju. Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Kisaran, Pematang Siantar adalah kota-kota yang tumbuh akibat perkebunan. Di kota-kota itu lama-kelamaan muncul para pedagang kecil dari kalangan pribumi, tetapi lama-kelamaan orang-orang Cina lebih maju usahanya.

Usaha perkebunan, dan juga berbagai kegiatan, seperti perdagangan, transportasi, kereta api, motor, telepon, pos, mengakibatkan berbagai kemajuan dalam lalu lintas dan perekonomian. Lapangan kerja diberbagai kantor dan berbagai usaha mulai terbuka sehingga orang-orang dari pedalaman mulai turun ke daerah Sumatera Timur. Banyak pekerjaan dipegang oleh orang-orang pribumi yang berasal dari berbagai suku seperti Mandailing, Minang, Batak, mereka menjadi guru, pegawai kereta api, pos, kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor perkebunan.

Pengaruh Belanda di bidang pemerintahan menyebabkan berkurangnya kekuasaan raja-raja. Raja-raja menyerahkan hak pengadilan, hak mengatur pemerintahan (**Bestuur**) hak memungut pajak kepada pemerintah Belanda dan yang tinggal menjadi kegiatannya hanyalah pengaturan adat-istiadat yang dikerjakan bersama-sama dalam kerapatan-kerapatan adat. Tugas lain yang menjadi urusan kerajaan ialah urusan agama seperti perkawinan, kematian, pembangunan dan kesejahteraan mesjid. Lain dari itu raja-raja dan bangsawan mengurus tanah-tanah yang langsung di bawah kekuasaannya. Dalam hal ini raja-raja mengeluarkan surat-surat hak tanah kepada pemilik-pemiliknya.

Di samping itu pemerintahan gubernemen semakin teratur. Pada mulanya daerah Sumatera Timur adalah bahagian dari keresidenan Riau, kemudian menjadi keresidenan Sumatera Timur. Begitu pula daerah Tapanuli mulanya adalah bahagian dari Sumatera Barat, tetapi kemudian menjadi Residensi Tapanuli. Akhirnya terbentuklah dua keresidenan yaitu keresidenan Sumatera Timur dan keresidenan Tapanuli. Tiap keresidenan dibagi atas beberapa afdeling dan tiap-tiap afdeling dibagi pula atas beberapa **onder-afdeling**. Di samping pemerintahan Belanda terdapat pemerintahan raja-raja yang diatur dalam perjanjian-perjanjian dan pemerintahan raja-raja itulah yang disebut **landschap**.

Perkembangan agama Islam telah lama tumbuh di daerah pesisir, kemudian meluas ke Tapanuli Selatan. Penyiaran agama Kristen meluas ke daerah Tapanuli Utara pada abad XIX dan pada abad XX meluas ke Karo, Simalungun, dan Dairi. Akhirnya sebagian besar orang-orang Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, dan Dairi menjadi penganut agama Kristen. Di daerah pedalaman masih terdapat penganut kepercayaan asli yaitu pelbegu dan permalim.

Perkembangan di bidang politik, ekonomi, dan agama itu mempengaruhi perkembangan pendidikan, seni budaya, dan hubungan sosial.

DAFTAR -- BACAAN

- Anderson, John., *Acheen*, Oxford University Press London, 1971.
- , *Mission To the East Coast of Sumatra In 1823*, Oxford University Press London, 1971
- Berkhof, Dr.H, Dr.I Enklaar. *Sejarah Gereja*, Cet III, Badan - Penerbit Kristen, Jakarta, 1962.
- Biegman, G.J.F., *Hikayat Tanah Hindia* Cet V, Percetakan Gouvernemen, Betawi, 1915.
- Burger, Prof. Dr.D.H, Prajudi Prof Dr.Mr., *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, J.B. Wolters NV, Jakarta, 1957.
- Colenbrander, Dr. H.T., *Koloniale Geschiedenis*, Martinus Nijhoff , s-Gravenhage, 1925.
- Harisson, Brian., *South East Asia A Short History*, Mac Millan & Co Ltd, London, 1955.
- Graaf, H.J , *Geschiedenis van Indonesie*, s Gravenhage, Bandung, 1949.
- Hall, D.G.E. *A History of South East Asia*, Mac Millan Co & Ltd, London, 1960.
- Husny, T.M. Lah., *Lintasan Sejarah Peradaban dan Penduduk Melayu Deli Sumatera Timur 1612-1950*, B P. Husny, Medan, 1975.
- Kartodirdjo, Dr. A. Sartono. *Struktur Sosial Dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial* Lembaran Sejarah No. 4 Fak. Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajahmada, Jokjakarta, 1969.
- , *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad XIX - XX*, Lembaran Sejarah No. 1, Fak. Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajahmada, Jogjakarta, 1967;
- Kruger, Dr. Th. Muller., *Sejarah Gereja di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1959.
- Napitupulu SH, O.L., *Perang Batak Perang Sisingamangaraja*, Jilid I, Penerbit Yayasan Pahlawan Nasional, -----, 1971.
- Neumann, J.H., *Sejarah Batak Karo*, Sebuah Sumbangan, Bhratar, Jakarta, 1972
- Parlindungan, Mangaraja Onggang, *Tuanku Rao*, Penerbit Tajung Pengharapan, --- , 1967.
- Polak, Drs. J.B.A. F. Mayor , *Perekonomian Indonesia Dan "Barter" Di Luar Pulau Jawa Di Sekitar Tahun 1850*, Atom Book Store, Malang, 1958.

- Reid, Anthony., *The Contest Far North Sumatra*, Oxford University Press, London, 1969.
- Schrieke, B.J O , *Penguasa-Penguasa Pribumi*, Bhratara, Jakarta, 1974.
- Sinar, T. Lukman., *Sari Sejarah Serdang*, Jilid I, ———, Medan, 1971.
- Stapel, F.W., *Geschiedenis van Nederlandch Indie*, Jilid II Amsterdam.
- Tobing, Adniel., *Perang Sisingamangaraja I – XII* Tidak terbaca.
- Wertheim, W.F., *Indonesian Society In Transition*, 2nd ed, Sumur Bandung, Bandung, 1956.
- Wesswlink, H.A.W., *Sejarah Ekonomi*, Noordhoff—Kolff NV, Jakarta, 1956.
- Majalah "DELI GIDS", tidak terbaca.
- Lembaga Arsip Nasional, *Arsip Nasional R.I. No. 5*, Jakarta, 1973.
- Panitia Almanak Nasional., *Almanak Sumatra*, Medan, 1969.

BAB VI

ZAMAN KEBANGKITAN NASIONAL (1900 – 1942)

6.1. Keadaan Pemerintahan dan Kenegaraan.

6.1.1. Kerajaan-kerajaan.

Dengan masuknya kekuasaan Belanda di Sumatera Utara, kekuasaan raja-raja di daerah ini berada di bawah kekuasaan Belanda. Raja-raja diikat dengan perjanjian-perjanjian (kontrak). Di dalam kontrak itu ditetapkan bahagian-bahagian kekuasaan yang diserahkan kepada pemerintah Belanda. Ada dua macam bentuk kontrak, yaitu **lange verklaring** (perjanjian panjang) dan **korte verklaring** (perjanjian pendek).

Pada tahun 1873 kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur dianggap sebagai bahagian dari **Landschap Siak**. Walaupun pada waktu itu Belanda telah meresmikan berdirinya keresidenan Sumatera Timur yang berkedudukan di Bengkalis, tetapi daerah yang langsung diperintah Belanda hanyalah pulau Bengkalis dengan ketentuan Belanda membayar tiap tahun kepada Sultan Siak.

Pada tanggal 1 Maret 1887 ibu kota keresidenan Sumatera Timur dipindahkan ke Medan, pada waktu itu di daerah tersebut terdapat 35 **Zelfbesturend Landschap**. Ketiga puluh lima **landschap** itu mempunyai pemerintahan sendiri dan tunduk kepada pemerintahan gubernemen sesuai dengan kontrak yang ditandatangani oleh raja-raja yang bersangkutan. Kerajaan-kerajaan Deli, Langkat, Serdang, Asahan, Kualuh, Leidong, Siak, Palalawan terikat dalam perjanjian panjang (**lange verklaring**) dengan Belanda, artinya terhadap daerah tersebut kekuasaan Belanda terbatas pada sejumlah yang disebutkan pada isi perjanjian. Kerajaan-kerajaan yang lain terikat dengan Belanda menurut **korte verklaring** (perjanjian-pendek), maksudnya, bahwa kerajaan-kerajaan itu langsung berada di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda sesuai dengan bunyi kontrak tersebut, yang menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan tersebut mengakui kekuasaan Belanda di daerahnya.

Sifat pemerintahan di dalam **landschap** dijalankan oleh raja (**bestuurder**) bersama-sama dengan pembesar negeri itu sesuai de-

ngan adat-istiadat yang berlaku di negeri tersebut. Contoh pelaksanaan susunan pemerintahan itu dapat kita lihat di Tanah Karo. Sejak dulu negeri di Tanah Karo telah terbagi atas Urung-urung yang diperintah oleh Raja Urung. Pada zaman pemerintahan Belanda di negeri tersebut terdapat 18 raja Urung. Kesemuanya diatur ke dalam 5 **Zelfbesturend-landschap** yaitu Lingga, Sarinembah, Kutabulun, Barusjahe, dan Suka.

Di daerah Simalungun tiap-tiap huta yang penting telah ada pemerintahan Pertuanan dan pada masa pemerintahan Belanda dibagi atas 7 kekuasaan **Zelfbestuur landschap** yaitu Raya, Silimakuta, Silou, Siantar, Tanah Jawa, Purba, dan Pane. Jika di Tanah Karo tiap-tiap daerah **landschap** diperintah oleh Sibayak, maka di Simalungun diperintah oleh raja.

6.1.2. Pemerintahan Hindia Belanda.

Dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda, Sumatera Utara terdiri dari dua keresidenan, yaitu keresidenan Sumatera Timur dan keresidenan Tapanuli. Gubernur berkedudukan di Medan sejak tahun 1887, yang kekuasaannya meliputi seluruh keresidenan yang terdapat di Sumatera.

Residen merupakan penguasa pemerintah setempat (**hoofd van plaatselijk bestuur**), yang tunduk kepada kekuasaan Gubernur. Daerah yang berada di bawah kekuasaan Belanda dapat kita bagi dua, yaitu daerah yang langsung diperintah oleh kekuasaan kolonial (**Rechtstreeks Bestuusgebied**), dan daerah-daerah swapraja (**Zelfbesturende-Landschappen**). Gubernur yang berkedudukan di Medan berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat yang berkedudukan di Betawi (Batavia) yaitu di bawah **Directeur van het Binnenlands Bestuur** (Direktur Urusan Pemerintahan Umum). Direktur inilah yang membantu pelaksanaan tugas Gubernur Jenderal dalam urusan pemerintahan di tanah jajahan.

Di bawah Residen berkedudukan **Asisten Residen** yang mengepalai **afdeling**. Tiap-tiap **afdeling** dipecah lagi atas beberapa **onder-afdeling** yang masing-masing dikepalai oleh **Controleur**. Tiap-tiap **Onder-afdeling** dipecah pula atas beberapa distrik yang diperintah oleh kepala distrik (**districtshoofd**) atau disebut juga Demang. Tingkat pemerintahan yang terendah ialah negeri yang diperintah oleh kepala negeri di Tapanuli Utara disebut Negari, di Padang Lawas disebut Luhak, di Tapanuli Selatan disebut Kuria sedang di Nias disebut Ori.

Jabatan **Controleur** ke atas dipegang oleh orang-orang Belanda saja, mereka termasuk "**Europese Bestuurs Ambtenaren**" (Pegawai Pemerintah keturunan Eropa). Jabatan Demang ke bawah dapat dipegang oleh orang-orang Bumiputra. Mereka disebut **Indlandse Bestuurs Ambtenaren**" (Pegawai Pemerintahan Asal Bumi Putra).

Demang atau **districtshoofd** sebenarnya adalah alat **controleur** untuk menyampaikan perintah kepada instansi pemerintahan di bawahnya atau negeri. Daerah yang dipegang oleh seorang Demang serupa saja dengan daerah yang dikuasai oleh **controleur**, namun daerah yang dikuasai oleh **controleur** dapat juga terdiri dari beberapa **distrik**.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Utara bertujuan untuk menjalankan politik kolonialnya. Dengan cara-cara tertentu diusahakan untuk mengurangi kekuasaan kepala adat sehingga nantinya kekuasaan Belanda dapat langsung berurusan dengan kepala negeri. Kedudukan kepala negeri pada satu pihak mewarisi kekuasaan berdasarkan adat dan tradisi dan menurut susunan kolonial, maka mereka menerima kekuasaan dari atas, yaitu dari lembaga-lembaga yang telah disusun oleh pemerintah Belanda. Hal itu nyata kita lihat di Tapanuli dan Nias, yaitu daerah yang diperintah secara langsung oleh Belanda (**Rechtstreeks Bestuursgebied**).

Dalam melaksanakan kewajibannya kepala negeri dibebani tugas yang sangat berat, karena pemerintah kolonial menyusun tata aturan baru dalam berbagai segi hidup, terutama mengenai soal tanah, pertanian, kehutanan, pertambangan yang menurut hukum adat dianggap sebagai milik masyarakat (**Communaal Bezit**).

Pada beberapa kota besar di Sumatera Utara seperti Medan, Tebing Tinggi, Binjai, Tanjung Balai, dan Pematang Siantar dibentuk pemerintahan kota (**Gemeente**), yang dikepalai oleh **Burgermeester** atau Walikota. Dalam menjalankan tugasnya **Burgermeester** didampingi oleh Dewan kota (**Gemeenteraad**) dan juga mempunyai **wethouder** yaitu semacam Badan Pemerintah Harian. Keadaan seperti itu dijumpai pada kota Medan, sedang kota Pematang Siantar diperintah oleh **Fungerend Burgermeester** (Pejabat Walikota) yang dirangkap oleh Asisten Residen sebagai kepala pemerintahan.

Dewan-dewan atau raad diadakan oleh Belanda menurut kebutuhan politik kolonialnya. Di daerah Sumatera Timur diadakan suatu Dewan yang disebut **Cultuur Raad** yang diketuai oleh Resi-

den Sumatera Timur. Di daerah Sipirok dan Angkola diadakan **Locale Raad** yang diketuai oleh **Controleur van Angkola en Sipirok** selaku pejabat tertinggi pemerintahan di daerah tersebut.

Kota-kota Binjai, Tanjungbalai, Tebingtinggi pemerintahan disebut **Gemeente** diketuai oleh pejabat pemerintahan yang tertinggi pangkatnya di daerah tersebut dengan sebutan "**voorzitter**" (ketua).

Wewenang dari kepala-kepala distrik (*districts gerecht*) di bidang kehakiman meliputi perkara yang bernilai 100 rupiah ke bawah. Hal itu menunjukkan bahwa pejabat-pejabat pemerintahan mempunyai wewenang dalam bidang hukum perdata. Tetapi bukan dalam bidang perdata saja pejabat-pejabat mempunyai wewenang, malahan juga dalam menyelesaikan masalah pidana sebagai yang diatur dalam H.I.R., misalnya mengenai gangguan keamanan (*tuchtrecht*).

Pada tahun 1938 di tiap-tiap negeri dibentuk suatu dewan yang disebut "**Inlandse Gemeenteraad**" yang diketuai oleh kepala negeri dan anggota-anggotanya terdiri dari kepala-kepala kampung di negeri tersebut.

6.2. Kaum Pergerakan di daerah.

6.2.1. Timbulnya.

Kemajuan daerah Sumatera Utara pada permulaan abad XX membawa berbagai perubahan sosial. Perubahan yang penting ialah kemajuan pendidikan dan lapisan-lapisan masyarakat yang telah memperoleh pendidikan itu mulai bergerak di bidang politik melalui berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu pada mulanya berjalan sendiri-sendiri melalui tulisan-tulisan, pengajaran di sekolah-sekolah atau melalui pembicaraan-pembicaraan khusus, tetapi lama kelamaan semakin terarah dengan adanya beberapa organisasi berdiri di daerah ini.

Pesantren-pesantren (madrasah) adalah tempat pembinaan alam pergerakan yang penting. Di sana dibentuk kader-kader pemimpin, sehingga banyak dari para pemimpin pergerakan di daerah ini berasal dari pesantren atau madrasah.

Beberapa tokoh yang terkenal dalam pergerakan di Sumatera Utara ialah Adenan Nur Lubis, M. Joni (terkenal dengan gelar **Banteng Gemuk**), Xarim Ms. M. Saleh Umar, Mahalas, Baharuddin Lubis, Amer Daulay, di samping beberapa nama lain seperti Mr. Iwa

Kusuma Sumantri dan Tan Malaka, Dr. Pirngadi yang pada sekitar tahun tigapuluhan bertugas di Sumatera Utara dan menjadi pelopor di berbagai bidang pergerakan.

Perjuangan melalui organisasi-organisasi politik berlangsung di kota-kota dan hampir tiap kota mengenal adanya organisasi-organisasi seperti Serikat Islam yang kelak menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia, PNI, Gerindo, Partindo, di samping juga organisasi-organisasi sosial seperti Nahdatul Ulama (pada waktu itu masih merupakan organisasi sosial), Muhammadiyah, Al Jami atul Washliyah. Kemudian di samping organisasi-organisasi sosial itu, sekolah-sekolah juga merupakan lembaga pergerakan, seperti Taman Siswa Perguruan Josua, Ivoorno, Taman Pendidikan Kita Madrasah Arabiah Ismailliah, Perguruan Rakyat dan sebagainya. Sebagian organisasi-organisasi itu adalah cabang-cabang dari organisasi yang berpusat di Jawa, seperti Budi Utomo, **Indische Partij** Serikat Islam, PNI, Gerindo, Parindra, Muhammdiyah, Nahdatul'l Ulama, Taman Siswa dan sebagian lagi ada yang berpusat di Sumatera Utara.

Organisasi sosial terbesar yang berpusat di Medan ialah Al Jami'atul Washliyah. Organisasi itu didirikan oleh pelajar-pelajar di kota Medan pada tanggal 30 November 1930. Beberapa orang pelopor yang terpenting ialah Ismail Banda. A. Rahman Syihab, M. Arsyad Thalib Lubis, Oedin Syamsuddin, Tuan Syekh Hasan Matsum, Kadhi H. Ilyas, Syekh H.M. Joenoes.

Di daerah Tapanuli selain dari organisasi-organisasi yang bersifat nasional, terdapat pula beberapa macam yang bersifat nasionalisme di kalangan gereja. Sejak abad XIX daerah itu telah di kristenkan dan pada Abad XX daerah tersebut telah merupakan daerah Kristen. Sebagai pengaruh Nasionalisme ke dalam tubuh gereja sekitar tahun '30 dibentuklah oleh orang-orang perkumpulan Hatopan Kristen Batak. Mereka mengeritik gereja yang masih dipimpin oleh bangsa asing. Pada tahun 1930 organisasi ini mengadakan synode dan menetapkan berdiri sendiri dan tata gereja yang baru ditetapkan pula. Tujuannya hendak membentuk suatu gereja yang lepas dari pengaruh-pengaruh barat. Oleh karena itu berpisahlah mereka dari HKBP dan ini berlangsung beberapa kali kemudian. Nama **schismanya** disebut HKB (Huria Kristen Batak dan HKI (Huria Kristen Indonesia).

6.2.2. Sikap dan Gerakannya.

Sebagaimana umumnya gerakan kebangsaan kita mengenal adanya sikap yang keras dan lunak. Kekerasan menuju kepada perlawanan-perlawanan dari bentuk yang sekeras-kerasnya seperti pengrusakan, pembunuhan, pemberontakan sampai kepada sikap yang agak lunak seperti non koperasi, sikap oposisi, dan sebagainya. Di samping itu banyak pula gerakan yang bersikap koperasi, mereka sadar bahwa mereka belum cukup mampu dan memerlukan waktu untuk membina ke dalam, memajukan masyarakat, mendidik, mengejar kemajuan dengan memanfaatkan segala kesempatan yang masih terdapat di alam penjajahan.

Gerakan ekstrim yang keras di Sumatera Utara ialah gerakan komunis. Sebenarnya rakyat di daerah sedikit sekali yang mengenal adanya partai komunis, namun banyak diantara mereka yang di buang ke Digul dengan alasan komunis, antara lain M. Joni, yang lebih terkenal dengan Banteng Gemuk, M. Saleh Umar (Surapati). Mereka yang dibuang ke Digul, begitu pula orang-orang yang dihukum karena membunuh orang kulit putih. oleh masyarakat dianggap sebagai "pahlawan". Pengaruh para pemimpin lebih penting bagi rakyat dari pada pengaruh organisasinya. Penduduk pada waktu itu tidak peduli asal golongan aliran seseorang, asal seseorang tersebut berani, mereka akan menganggapnya sebagai pahlawan.

Sesudah tahun tigapuluhan, gerakan gerakan organisasi yang keras tidak ada secara formal. Adapun Gerindo, dan Parindra adalah organisasi yang bersikap kooperatif dan diberi hak oleh kaum kolonial. Begitu pula organisasi-organisasi agama yang bersifat sosial, tentu saja tidak memakai garis politik, maksudnya tidak menonjolkan gerakan politik. Pada umumnya organisasi ini mendapat dukungan masyarakat dan bergerak untuk memperbaiki masyarakat terutama di bidang pendidikan dan dakwah agama

Keadaan seperti itu bukan berarti, bahwa para pemimpin bekerja sama dengan kaum kolonial. Mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan melawan kaum kolonial, hal itu akan terbukti dengan pokok-pokok pembicaraan dalam pertemuan-pertemuan, tulisan di surat-surat kabar, pengajaran di sekolah-sekolah. Pada setiap kesempatan yang memungkinkan para pemimpin berusaha membina kesadaran nasional agar pada saatnya mampu berjuang melawan penjajahan.

Surat-surat kabar yang terpenting pada waktu itu ialah, Pe-

warta Deli (1911) yang dipimpin oleh Jamaludin Adinegoro, Sinar Deli (1930) yang dipimpin oleh Burhanuddin M. Diah, Pelita Andalas (sezaman dengan P W D.) dipimpin oleh T. Hasyim, T. Jafizham, Amarullah O. Lubis. Di samping koran koran yang berhaluan nasional itu ada pula surat kabar yang berbahasa Belanda untuk kepentingan-kepentingan tuan-tuan perkebunan dan kalangan kaum kolonial dan ada pula yang khusus untuk orang-orang Cina. Di antaranya **Deli Courant** 1885, **Dagblad Nieuw China**, **De Sumatera Bin Poh**, dan **De Sumatra Post**.

Di kalangan pengusaha Belanda, untuk memperjuangkan kepentingannya terutama masalah perkebunan, mereka mempergunakan surat kabar **Deli Courant** dan **Sumatera Post**.

Di samping surat-surat kabar, majalah-majalah juga sangat penting pada zaman penjajahan. Malahan dibandingkan dengan sekarang, maka jumlah penerbitan berkala (majalah) pada zaman penjajahan itu jauh lebih besar. Pada umumnya isi majalah itu ialah mengenai agama, sosial, dan pendidikan. Di kota Medan saja tercatat beberapa majalah seperti Panji Islam, Pedoman Masyarakat, Penjebar, Seruan Kita, Lukisan Dunia, Al Atfal, Al Qur'anul Qariem, Bintang Islam, Dewan Islam, Industri, Medan Islam, Taman Pelajar, Cahaya Islam, sedangkan di kota-kota lain ialah Poestaha (bahasa daerah), Percaturan. Suara Tapiannaoeli, ketiganya dari Sibolga. Suara Kita (Pematang Siantar), Suara Batak (Tarutung). Bintang Batak (Balige), Almoektabas (Tanjung Balai), Suara Islam (Pangkalan Berandan) dan Imanuel (Tarutung).

6.3. Penyelenggaraan Hidup dalam Masyarakat.

6.3.1. Pengaruh kekuatan Eropa.

Pada permulaan abad XX di daerah Sumatera Utara pengaruh Eropa telah terasa di tengah masyarakat. Perkebunan-perkebunan telah melahirkan berbagai usaha baru seperti di bidang pengangkutan, perdagangan, perkapalan, perkeretaapian. Orang-orang Eropa memegang kedudukan yang tinggi kemudian lama kelamaan muncul suatu lapisan ekonomi menengah yang terdiri dari orang-orang Cina, Jepang, dan Arab. Kaum "Bumiputera" hidup sebagai lapisan terendah, yaitu sebagai petani, kuli kebun, kuli pelabuhan dan paling tinggi sebagai juru tulis dan guru. Beberapa jabatan tinggi seperti **commies** dan **hoofdcommies** yang sekarang sering kita samakan dengan kepala tata usaha, tetapi sebenarnya ialah kepala tata usaha pada kantor **Controleur** telah terbuka buat orang-orang Indo-

nesia. Di kantor seperti itu diperlukan seorang "**Bumiputera**" sebab **Controleur** itu adalah pejabat kolonial yang paling rendah yang akan berhadapan dengan pengusaha-pengusaha "**Bumiputra**". Begitu pula di kantor jaksa, kantor polisi diperlukan pegawai pegawai bangsa Indonesia untuk jabatan yang agak tinggi karena dalam tugasnya mereka berhadapan dengan orang-orang Indonesia. Jabatan-jabatan jaksa, hakim menjadi terbuka bagi orang-orang Indonesia.

Kemajuan daerah Sumatera Timur menyebabkan daerah ini menjadi pusat perantauan dari berbagai suku bangsa. Orang-orang Jawa telah didatangkan kemari untuk memenuhi keperluan buruh perkebunan, orang Aceh dan Minangkabau datang untuk berdagang sedang orang-orang Tapanuli banyak yang bekerja di kantor-kantor Tanah Deli dianggap sebagai **Tanah Dolar Sumatera**. Anak negeri Melayu tidak banyak berpengaruh kecuali lapisan kecil raja-raja dan orang-orang istana.

Untuk memberikan gambaran tentang perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatera Timur, dapat dikemukakan bahwa perusahaan yang terbesar ialah **NV Deli Bataviaasch Maatschappij** yang mempunyai 9 onderneming; **Deli Maatschappij** mempunyai 24 perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit. **NV Holland Sumatera Tabak Maatschappij** mempunyai 13 onderneming, kemudian terdapat beberapa perusahaan-perusahaan perkebunan karet yang meliputi berbagai bangsa yang tergabung dalam perusahaan-perusahaan internasional seperti Amerika, Inggris, Belgia, Belanda memiliki tidak kurang dari berpuluh-puluh onderneming dan bahagian-bahagian badan usaha.

Tumbuhnya daerah ini menjadi pusat perusahaan dan perdagangan mengakibatkan tercapainya berbagai kemajuan di bidang transportasi (motor, kereta api, kapal), komunikasi (telepon, pos radio, telegraf), akomodasi (hotel, pariwisata, bioskop). Sehubungan dengan itu maka timbullah berbagai lapangan usaha seperti advokat, akontan, pabrik, administrasi perkantoran, apotik, arsitek dan anemer, asuransi, agen-agen kendaraan, perusahaan angkutan bermotor, bengkel-bengkel dan agen onderdil, bank-bank, perpustakaan, klub, bioskop, perusahaan bunga, toko buku, perusahaan roti dan kue, rumah obat restoran **wasscherij**, percetakan, tukang pangkas, konsultan, klinik, fotografi, perusahaan ekspedisi tukang mas, hotel-hotel, perusahaan impor ekspor, dan lain lain.

Bentuk kegiatan dalam segi-segi kehidupan dalam perusahaan-

perusahaan itu benar-benar merupakan bentuk baru sebagai pengaruh kekuatan Eropa sebab selama ini belum dikenal di tengah masyarakat tradisional. Organisasi pimpinan, pembiayaan, administrasi, disiplin dari perusahaan-perusahaan itu didasarkan kepada segala sesuatu yang berbentuk barat yang hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang telah menerima pendidikan barat.

6.3.2. Pemenuhan kebutuhan.

Pada umumnya penduduk bangsa Indonesia di zaman penjajahan Belanda hidup sebagai petani miskin. Di daerah Sumatera Timur telah dibuka perkebunan-perkebunan tetapi penduduk asli di daerah ini tidak banyak yang bekerja di perkebunan, tenaga buruh didatangkan dari Cina, India, dan Jawa. Tenaga tenaga pegawai kecuali orang-orang kulit putih, dipegang oleh orang-orang pendatang seperti orang-orang Tapanuli dan Minang.

Di daerah pedalaman penduduk bertani dan sedikit sedikit mulai berdagang. Pertanian sedikit banyaknya mengalami perubahan akibat kemajuan lalu lintas dan peredaran uang. Makin banyak orang yang meninggalkan kampung, makin banyak pula perpindahan hak tanah dan orang mulai berusaha mencari pekerjaan lain seperti menjadi guru, pedagang atau pegawai. Kedudukan sebagai pegawai adalah impian orang-orang tua. Mereka sangat ingin anak mereka kelak dapat menjadi pegawai, karena kehidupan sebagai pegawai sungguh sangat menyenangkan sedang buruh hidupnya sangat sulit. Para petanipun menderita kesulitan, karena dibebani tugas membayar belasting (pajak) dan tugas rodi (kerja wajib).

Perusahaan perkebunan, perkapalan, perdagangan impor ekspor, bank, perkeretaapian, adalah perusahaan-perusahaan besar milik orang-orang Eropa. Kehidupan mereka tentu lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan menengah, seperti perusahaan transpor, bengkel, toko toko, tukang mas, tukang roti, dan sebagainya, kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Cina. Sebagian orang menganggap bahwa hal ini terjadi karena orang Indonesia bodoh, tetapi ternyata pendirian seperti itu tidak benar, sebab di kalangan orang-orang Indonesia banyak pula yang telah berilmu dan memegang jabatan sebagai advokat (Mr. Luat Siregar, Mr. M. Jusuf, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan lain-lain), sebagai guru, amtenar, yang semuanya tentu menunjukkan ketinggian pendidikan yang mereka peroleh.

6.3.3. Partisipasi masyarakat dalam Pergerakan kebangsaan.

Usaha-usaha para pemimpin dalam membangkitkan Pergerakan Kebangsaan mendapat sambutan dari seluruh lapisan masyarakat baik di kota maupun di desa-desa. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam kebangkitan nasional sesuai dengan keadaan lingkungannya.

Pada umumnya di tiap desa selalu ada orang-orang yang telah menjadi anggota salah satu organisasi, sekurangnya telah menjadi simpatisan dari suatu organisasi. Mereka itu adalah ulama atau guru-guru. Para pemimpin desa ini sering menceritakan tentang tokoh-tokoh seperti Tan Malaka, Sukarno, Hatta, Cokroaminoto dan sebagainya. Begitu pula pengalaman-pengalaman orang dalam pembuangan di Digul selalu menarik perhatian masyarakat. Masyarakat pada umumnya sangat tertarik pada ceritera-ceritera seperti itu, malahan mereka memitoskan para pemimpin.

Usaha yang positif di kalangan masyarakat ialah memajukan pendidikan anak-anak mereka. Sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah didirikan oleh masyarakat desa untuk mendidik anak-anak, agar kelak mereka mengambil bahagian dalam perjuangan kemerdekaan. Sesuai dengan tingkat kehidupan dan pengetahuan, pada umumnya orang tidak berani terang-terangan menjadi anggota partai politik. Mereka takut dicap sebagai komunis, pengacau dan hal lain yang sangat berbahaya bagi kehidupan mereka. Pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat selalu diikuti oleh PID yang mengawasi pembicaraan dalam rapat-rapat itu. Lagi pula pemerintah kolonial sering mengirim orang-orangnya untuk memasuki organisasi dengan tujuan memata-matai semua gerak orang partai.

Perusahaan-perusahaan, kantor-kantor sangat teliti terhadap calon pegawai. Jika diketahui, bahwa seseorang mengikuti salah satu partai atau organisasi, maka orang itu tidak akan mendapat kesempatan untuk bekerja. Begitu pula orang-orang yang tamat dari sekolah nasional seperti Taman Siswa, Ivoorno, Josua Instituut, amatlah sulit bagi mereka untuk memperoleh jabatan sebagai pegawai. Demikian pula bagi para amtenar, walaupun mereka itu tergolong cendekiawan, tetapi mereka takut ikut secara aktif dalam pergerakan kebangsaan. Selanjutnya raja-raja pun merasa khawatir terhadap usaha-usaha kaum pergerakan dan sebagian di antara mereka sebenarnya telah merasa puas dengan keamanan di bawah kekuasaan Belanda.

Pada umumnya orang-orang swasta yang mengambil pe-

ranan aktif di dalam perjuangan pada masa itu. Sekolah-sekolah didirikan oleh orang swasta dan mendapat sokongan dari masyarakat yang tidak mendapat kesempatan untuk bersekolah di sekolah pemerintah. Jadi partisipasi masyarakat di dalam pergerakan kebangsaan itu terutama di bidang pendidikan. Kegiatan kegiatan lain ialah gerakan guru melawan ordonansi sekolah yang membedakan kedudukan Bumiputra dalam membuka sekolah dan mengajar. Mereka diwajibkan mendapat izin lebih dahulu untuk mengajar. Di kalangan buruh perkebunan telah dilakukan usaha pemogokan dan dibela oleh advokat bangsa Indonesia seperti Mr. Iwa Kusuma Sumantri, tetapi para pembela ini akhirnya disingkirkan.

Sampai masa kedatangan Jepang, jiwa kebangsaan itu telah tertanam di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu ketika Jepang datang ke daerah ini banyak orang yang pada mulanya merasa sangat senang. Mereka mengharapkan agar dapat memerdekakan diri dari kekuasaan Belanda. Tentu saja propaganda Jepang memainkan peranan penting di dalam hal ini, terutama sebagai golongan F (Fujiwara) yang telah membentuk kolone kelima dan memberikan kampanye secara berbisik pada masyarakat. Golongan orang yang bodoh banyak yang termakan oleh propaganda itu, tetapi beberapa orang yang pandai telah menyadari sebagai bahaya baru bagi bangsa Indonesia.

6.3.4. Keadaan masyarakat selama periode 1900–1942.

Jika kita tinjau kehidupan masyarakat Sumatera Utara sekitar tahun 1900 sampai tahun 1942, maka dapat kita bedakan penduduk pedalaman dengan daerah-daerah yang telah maju.

Di Tanah Batak Raja Sisingamangaraja tewas dalam menghadapi Belanda pada tanggal 17 Juni 1907. Perlawanan rakyat diteruskan, di antaranya di daerah Pakpak terdapat organisasi "Silimin" yang mengatur perlawanan kepada Belanda. Di tempat lain terdapat organisasi "Sigudamdandam" yang sangat fanatik dan dapat menimbulkan kekacauan di Siborong-borong dan Samosir. Pengikut permalim di daerah Asahan masih tetap melakukan perlawanan sampai ke Kualuh, Aek Kanopan, dan daerah-daerah lain. Beberapa pemimpin mereka yaitu Si Galung Mentan, Guru Ali, Mangolohon dan Olop dihukum mati oleh Belanda.

Setelah perlawanan-perlawanan ini dipadamkan, begitu pula perlawanan-perlawanan orang-orang suku Karo (terkenal dengan pemberontakan Aron), pemberontakan orang-orang Melayu di

Sunggal dan sebagainya, maka Belanda mulai mengatur pasifikasi Usaha yang penting ialah mengatur pemerintahan. Raja-raja Indonesia telah berada di bawah kekuasaan Gubernemen dan telah diatur tugas-tugasnya, baik di lapangan pemerintahan maupun peradilan. Penduduk di daerah-daerah tidak merasa secara langsung dikuasai oleh Belanda. Mereka berhadapan dengan penguasa penguasa Bumiputera, yaitu Raja-Sibayak, Kepala Kuria, kepala Ori dan pembantu-pembantunya. Dengan dukungan kekuasaan kolonial, maka kedudukan para penguasa ini semakin terarah sesuai dengan pengaruh kekuasaan Eropa. Pada kira-kira tahun dua puluhan sedikit demi sedikit masyarakat semakin maju, tetapi akibat pemberontakan tahun 1926, penduduk merasa takut untuk berbicara masalah "kemajuan". Pada tahun tiga puluhan gerakan-gerakan sedikit demi sedikit mendapat bentuk terutama di lapangan sosial dan agama. Beberapa pemuka masyarakat telah mulai tampil ke tengah masyarakat baik melalui organisasi maupun melalui tulisan-tulisan di surat kabar. Namun sebahagian besar penduduk sibuk memikirkan kehidupan sehari-hari yang amat sulit.

Walaupun daerah ini telah menjadi sumber kekayaan bagi pengusaha-pengusaha asing, namun kehidupan sebagian besar penduduk sangat menyedihkan. Buruh (kuli) perkebunan hidupnya sangat sengsara, begitu pula para petani yang dibebani rodi dan **belasting**. Orang-orang yang bekerja dengan pemerintah seperti guru, pegawai dianggap oleh masyarakat sebagai orang berkecukupan, walaupun sebenarnya kehidupan mereka jauh berada di bawah tingkat kehidupan orang-orang Belanda. Pedagang-pedagang kecil di kalangan orang-orang Indonesia mulai pula tumbuh, baik di desa maupun di kota. Pada umumnya mereka pedagang kecil dan kedudukan mereka jauh di bawah pedagang-pedagang Cina, India, atau Arab, apa lagi kalau dibandingkan dengan pedagang pengusaha Belanda.

Jika kita lihat dari luar, maka jelas ada perbedaan yang ber tingkat-tingkat di dalam masyarakat, yaitu golongan orang-orang Belanda dan kulit putih yang dianggap sebagai "tuan", kemudian orang-orang asing seperti Cina, Arab yang dianggap sebagai orang-orang kaya, akhirnya Bumiputra sebagai golongan terendah.

6.4. Kehidupan Seni Budaya.

6.4.1. Pengaruh Kebudayaan Asing.

Kehidupan orang-orang Belanda di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai golongan minoritas yang dianggap lebih unggul

banyak mempengaruhi peri kehidupan dan perdagangan Bahasa Belanda dianggap lebih penting dan dijadikan ukuran bagi golongan orang-orang penting dan golongan orang-orang yang rendah. Tulisan Latin dapat dijadikan ukuran bagi orang-orang yang bersekolah dengan orang yang tidak bersekolah. Oleh karena orang-orang yang bersekolah itu jumlahnya masih sangat sedikit, maka kedudukan mereka sangat penting. Pandai menulis dapat menjadi seorang pegawai pemerintah atau pegawai perusahaan dan itu berarti suatu kesenangan karena memperoleh gaji yang menjamin kehidupan mereka.

Peri kehidupan masyarakat kota banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa barat. Orang kota jauh berbeda dengan orang desa (dusun). Pakaian, perumahan, makanan dan gerak-gerik orang-orang kota jauh lebih "sempurna" bagi orang-orang dusun. Orang-orang kota dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna, menonton film, sandiwara, orkes adalah kesempatan bagi orang-orang kota. Bagi orang desa hal itu sangat sukar untuk dapat mengikuti dan menikmatinya.

Walaupun di desa-desa telah dibuka sekolah-sekolah desa tetapi oleh karena bahan bacaan tidak ada, maka anak-anak yang tamat sekolah akan kembali menjadi buta huruf. Di kota orang dapat membaca buku-buku, majalah, surat kabar sehingga perbedaan antara orang kota dengan orang desa juga berarti perbedaan golongan masyarakat berdasarkan kecerdasan.

Walaupun bahasa Belanda itu dianggap tinggi dan sangat berguna, tetapi tidak semua orang berkesempatan belajar bahasa Belanda. Di sekolah-sekolah desa bahasa Belanda tidak dipelajari begitu pula di sekolah sambungan, bahasa Belanda dipelajari di HIS dan tidak sembarangan orang dapat memasuki sekolah itu. Lama kelamaan kedudukan bahasa Melayu tetap lebih penting di tengah masyarakat. Penulisan bahasa Melayu dengan aksara Arab cepat berubah menjadi penulisan dalam bahasa Latin. Kelak bahasa Melayu menjelma menjadi bahasa Nasional Indonesia, dan orang-orang mempopulerkannya dalam penulisan di surat-surat kabar, majalah dan buku-buku.

6.4.2. Pendidikan.

Perluasan kekuasaan Belanda di Sumatera Utara dan pembukaan perkebunan serta perusahaan-perusahaan memerlukan tenaga-tenaga pegawai yang mengerti bahasa Indonesia dan mampu men-

jadi pegawai rendahan. Untuk anak-anak yang telah tamat sekolah dapat mengikuti ujian pegawai rendahan **Klein Ambtenaars Examen**. Tenaga mereka diperlukan menjadi juru tulis atau kerani di kantor-kantor perusahaan partikulier kaum modal asing. Lain dari itu beberapa tenaga juga diperlukan dalam kantor-kantor gubernemen. Kegunaan lain dari pendidikan tulis baca itu agar setiap anak yang tamat sekolah dapat membaca segala pemberitahuan yang disampaikan pemerintah secara tertulis kepada mereka.

Sekolah yang pertama sekali dibuka ialah apa yang disebut Sekolah Kelas II (**Inlandsche School 2e klasse**). Pada mulanya dibuka di kota-kota tempat kedudukan residen, kemudian meluas ke kota-kota tempat kedudukan, *controleur* lalu meluas ke desa-desa. Lama belajar 3 tahun, tetapi kemudian dirasakan, bahwa tenaga yang dihasilkan oleh sekolah semacam itu kurang memenuhi harapan untuk memperoleh tenaga-tenaga yang diperlukan di kantor. Oleh sebab itu sekolah diperluas menjadi 4 tahun dan pada tahun keempat diajarkan Bahasa Belanda. Kemudian lama belajar ditambah satu tahun dan menjadi 5 tahun dan untuk memenuhi keperluan guru-guru maka dibukalah sekolah Guru di Padang Sidempuan (**Kweekschool**). Mereka ternyata tidak cukup untuk memenuhi tenaga pengajar dan untuk mengatasi soal ini, maka diangkatlah guru bantu.

Di daerah Tapanuli pada kelas satu sampai kelas tiga dipakai bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sedangkan di kelas empat dan lima dipakai bahasa Melayu, sedangkan di Sumatera Timur sejak kelas satu memakai bahasa Melayu sebagai Bahasa Pengantar.

Di kerajaan-kerajaan Sumatera Timur muncul sekolah-sekolah yang disebut "Sekolah Landschap" yang lama belajarnya tiga tahun. Anak-anak yang tamat dari situ dapat melanjutkan pelajaran ke kelas empat Sekolah Kelas II. Kemudian pada beberapa tempat didirikan "Sekolah Sambungan" (**Vervolgschool**) yang lama belajarnya dua tahun setaraf dengan tahun keempat dan kelima pada "Sekolah Kelas II".

Pada tahun 1926 diadakan pemisahan dengan sebutan "Sekolah Desa" (**Volksschool**) bagi sekolah tahun pertama sampai tahun ketiga, dan "Sekolah Sambungan" (**Vervolgschool**) bagi sekolah tahun keempat dan kelima. Dengan demikian lama kelamaan tidak dikenal lagi sebutan "Sekolah Kelas II" dan hanya dikenal "Volksschool" dan "Vervolgschool". Bagi anak-anak perempuan didirikan "Meisjesvolksschool" (3 tahun) dan "Meisjevervolgschool" atau "Kopschool" (2 tahun).

Pada beberapa kota di Sumatera Utara yaitu di Pancur Batu, Binjai, Kabanjahe, Tinggaderket, Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Siborong-borong dan Sidikalang didirikan kelas pertanian (**Landbouw klas**) yaitu menambah sekolah sambungan satu tahun lagi menjadi 6 tahun.

Di daerah-daerah perkebunan didirikan pula sekolah sekolah desa yang dibiayai oleh perkebunan dan guru-gurunya banyak datangkan dari Jawa, karena bahasa pengantar di sekolah itu adalah bahasa Jawa. Lama pelajaran di sekolah-sekolah perkebunan itu adalah 4 tahun. Makin lama makin banyak orang-orang Eropa (Belanda) menetap di Sumatera Timur. Mereka memerlukan sekolah dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Untuk itu dibukalah sekolah yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa Pengantar yaitu seperti "**Delische School**" "**Asahansche School**" Orang orang kaya dan anak-anak raja dan bangsawan tertarik pula untuk memasuki sekolah itu karena mengharapkan pendidikan yang bermutu tinggi. Demikianlah bermula sekolah-sekolah rendah yang memakai bahasa Belanda yang kelak disebut "**Hollands – Inlandsche School**" (H.I.S.). Pada zaman penjajahan sekolah-sekolah seperti itu didapati di Medan, Binjai,, Tanjungpura, Tebing Tinggi, Perbaungan, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Sibolga, Balige, Padang Sidempuan, Hutanopan dan Dolok Sanggul.

Bagi orang-orang Belanda dan Cina yang menginginkan pendidikan lebih sempurna, didirikan E.L.S. (**Europese Lagere School**) dan anak-anak dari sini dapat melanjutkan pelajarannya ke **Hogere Burger School (HBS)**. Bagi anak-anak Cina berdiri pula HCS (**Hollands Chinese School**) yang setingkat dengan ELS.

Bagi anak-anak Indonesia yang ingin melanjutkan pelajarannya ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi dari HIS disediakan sekolah perantara **Schakel School** dan setahun kemudian masuk MULO yang hanya ada sebuah saja di Medan. Kesempatan lebih tinggi ke AMS hanya terdapat di Jawa, tetapi kesempatan untuk masuk MULO, AMS, apalagi HBS sangat tipis sekali. Oleh sebab itu orang-orang Indonesia yang menginginkan pendidikan yang lebih tinggi, mendirikan sekolah-sekolah partikulier yang disponsori oleh organisasi-organisasi ataupun pelopor-pelopor pendidikan, seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, Josua Institut di Medan, Ivoorno di Medan, Josua Instituut dipimpin oleh G.B Josua, Ivoorno (**Instituut voor Neutrale Onderwijs**) dipimpin oleh Muhammad Nuh, **Neutrale H.I.S.** oleh Ronggor Harahap, Pergoeroean Kita oleh

Munar S. Hamijoyo di Medan, Muhammadiyah oleh Abd. Malik Munir, Taman Siswa dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo, Al Washliyah dan sekolah sekolah yang didirikan oleh Zending agama Kristen.

Di samping HIS Gubernemen maka Zending mendirikan HIS di Sigompulan (Tarutung), Narumonda (Porsea) yang dikoordinasi oleh **Rijnsche Zending** dan mendapat subsidi dari gubernemen. Untuk sekolah guru Zending mendirikan pula sekolah guru di Sipoholon dan Narumonda.

Di pulau Nias pada zaman penjajahan terdapat pula beberapa sekolah Desa (**Volksschool**) dan Sekolah Sambungan (**Vervolg School**). Bagi tamatan sekolah ini dapat melanjutkan ke Sekolah Seminari (3-4) tahun dan setamat dari Sekolah Seminari itu dapat menjadi guru di Sekolah Desa 3 tahun (**Volksschool**). Pada tahun 1930 baru berdiri **Meisjesvervolgsschool**. H.I S. di pulau Nias didirikan oleh zending yang terkenal "**Dr. Nomensen Schoolvereniging**" (Chr. HIS.).

6.4.3. Kesenian.

Di desa-desa kesenian asli tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Perkembangan agama Kristen di Tapanuli, Simalungun, Karo, dan Dairi tidak merombak tata kehidupan seni dan adat istiadat penduduk. Tor-tor, Landek tetap dilakukan dalam upacara-upacara kematian, perkawinan, dan upacara upacara penting lain di samping upacara gereja. Lagu-lagu gereja berdampingan dengan tor-tor dan gondang di kalangan masyarakat.

Di daerah pesisir yang pada umumnya beragama Islam terdapat berbagai sikap terhadap kesenian. Akibat pengaruh barat, berbagai kesenian barat seperti seni musik yang berbentuk symphony, jazz, mars, bolero, mulai dikenal dan digemari oleh lapisan masyarakat yang telah memperoleh pendidikan barat. Di samping itu kesenian yang bernaifaskan Islam mulai berkembang pula, seperti gambus, nashid, dan sebagainya. Sikap orang-orang Islam terhadap kesenian seperti itu masih ditentang oleh golongan ortodoks karena hal itu dianggap sebagai melemahkan keimanan.

Semacam diffusi kebudayaan kita lihat munculnya grup-grup tonil baik yang tumbuh di Sumatera Utara maupun yang datang dari Jawa. Beberapa (tonil) yang datang dari Jawa ialah Dardanella, Ratu Asia Mis Ribut dan di daerah ini muncul pula Surya Negara, dan Nirwana.

Bentuk lain yang tumbuh di kalangan kaum bangsawan ialah opera yang sebenarnya masih sederhana dan berbentuk operette. Di kalangan masyarakat permainan itu dikenal dengan "Bangsawan", misalnya "Indra Bangsawan."

Penerbitan-penerbitan yang berkembang pesat mendorong lahirnya karya sastra yang berbentuk novel, pada waktu itu dikenal sebagai roman picisan. Pengarang yang terkenal di zaman itu ialah Yusuf Sou'ib, Emnast (Muchtar Nasution), Si Uma (Usman), Merak Jingga dan Matu Mona. Di samping itu para pemimpin ada pula yang berhasil melahirkan roman-roman di Balai Pustaka seperti Or. Mandank, Madong Lubis, Mozasa, Saleh Umar, Adi Negoro, Hamka, Dahlan, dan sebagainya.

Banyaknya orang-orang Jawa di Sumatera (di daerah perkebunan) memperkenalkan berbagai kesenian, seperti wayang, musik keroncong, ketoprak, gamelan yang membawakan berbagai ceritera sebagai Mahabarata, Ramayana dan tokoh-tokoh seperti Arjuna, Bima, Gatotkaca mulai dikenal oleh orang-orang Sumatera Utara. Walaupun kebanyakan orang-orang suku lain tidak mengerti (memahami) ucapan-ucapan dalang, namun pertunjukkan seperti itu biasanya dilihat juga oleh orang-orang suku lain. Orkes Keroncong lebih banyak pengaruhnya di tengah masyarakat dan banyak penggemarnya.

6.5. Alam Pikiran dan Kepercayaan.

6.5.1. Perkembangan Agama.

Pada permulaan abad XX agama Kristen tersiar di Tapanuli Utara, yaitu setelah perlawanan Raja Sisingamangaraja dipatahkan Belanda. Kemudian pada tahun 1903 konperensi para pekabar Injil memutuskan untuk ke daerah seberang danau Toba jurusan sebelah utara. Di daerah itu berdiam suku Batak Simalungun dan daerahnya terbentang sampai ke Sumatera Timur yang baru dibuka oleh perkebunan-perkebunan raksasa. Keputusan konperensi disetujui RMG (**Rheinische Missions Gesellschaft**) di Bremen.

Dengan demikian, maka pengkristenan daerah Pematang Raya, Pematang Siantar dan Bandar dimulai. Di daerah-daerah itu terdapat migrasi-migrasi orang-orang Toba dan mereka hidup sebagai petani di daerah yang subur itu. Sebelum pindah ke sana mereka telah menganut agama Kristen, sehingga di daerah yang baru, maka para imigran itu sebagai pangkalan permulaan pembentukan jemaat Kristen

Akhirnya terbuka pula daerah sebelah barat laut, yaitu daerah Dairi dan Pakpak yang baru diduduki oleh pemerintah Belanda pada tahun 1917. Ke daerah Dairi dan Pakpak banyak pula pindah orang-orang Toba yang telah beragama Kristen dan dengan demikian tumbuhlah permulaan pembentukan Jemaah orang Kristen di daerah itu.

Pengkristenan daerah Karo yang terletak di utara Danau Toba dilakukan oleh misi NZG dari negeri Belanda. Pada tahun 1920 hampir di seluruh daerah Batak telah dianut agama Kristen, walaupun masih banyak di antara penduduk di daerah itu menganut agama pelbegu dan permalim. Begitu pula penduduk Tapanuli Selatan dan Angkola yang telah beragama Islam tetap menganut agama Islam.

Sementara itu penyiaran agama Islam tetap berlangsung menurut pola-pola yang tradisional. Peranan guru agama di kerajaan di Sumatera Timur menyebabkan agama Islam dapat diatur perkembangannya. Orang-orang Batak yang pindah ke daerah-daerah kerajaan itu telah menganut agama Islam. Mereka berubah menjadi orang-orang Melayu. Begitulah penduduk kerajaan Langkat banyak yang berasal dari orang-orang Karo, tetapi mereka menjadi pemeluk agama Islam dan melupakan asal usul mereka. Begitu pula penduduk Deli Serdang.

Di Asahan dan Labuhan Batu yaitu pada kerajaan-kerajaan Asahan, Kotapinang, Bilah, Pane dan Leidong banyak orang-orang Toba yang pindah ke sana dan mereka menganut agama Islam.

Sisa-sisa penganut kepercayaan pelbegu dan permalim masih tetap ada di kalangan orang-orang Karo, Pakpak dan Toba, tetapi jumlah mereka semakin berkurang dan keturunan mereka banyak yang menganut agama Kristen atau Islam.

6.5.2. Perjuangan Pergerakan Nasional

Dengan motivasi agama.

Di atas telah dikemukakan, bahwa partisipasi masyarakat dalam Perjuangan Pergerakan Kebangsaan itu ialah melalui pendidikan. Pendidikan itu ada yang bercorak sekolah-sekolah umum dan ada yang bercorak sekolah agama. Sekolah-sekolah agama itu bukan saja penting artinya ditinjau dari segi penyiaran agama tetapi penting pula ditinjau dari segi pergerakan nasional. Dari pesantren-pesantren lahir pemimpin-pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan. Ajaran agama Islam yang mengajarkan persamaan derajat manusia mendorong sifat anti penjajahan.

Di daerah ini pesantren-pesantren berbeda dengan di Jawa dan lebih tepat disebut madrasah atau tarikat. Di antaranya yang terkenal ialah: Pesantren Syekh Hasan Ma'sum di Medan, Pesantren Syekh Abdul Wahab Rokan di Baussalam (Tanjungpura), Pesantren Syekh Abdul Wahab Sungai Lumut, Panei, Labuhan Bilik (Labuhan Batu), Pesantren/Madrasah Abdul Hamid di Tanjung Balai, Pesantren Syekh Sulaiman At Tambusai di Kualuh. Pada umumnya pendidikan di pesantren ini tidak memakai kurikulum dan tidak mendapat ijazah. Beberapa orang yang pandai telah diberi gelar "**Khalifah**" dan mereka yang telah menjadi khalifah itulah kelak akan membuka pesantren pula di tempat lain.

Beberapa perubahan dalam lapangan pendidikan Islam telah terjadi dengan lahirnya madrasah-madrasah. Sifat madrasah ini lebih formal dan telah mengenal kurikulum, kelas-kelas dan ijazah-ijazah. Pembaruan itu berlangsung sebagai akibat pengaruh pendidikan umum dan juga sebagai akibat pembaharuan pendidikan Islam di negeri lain terutama di Mesir

Di antara madrasah yang terkenal dan banyak melahirkan ulama-ulama ialah Madrasah Mas Lurah yang didirikan pada tahun 1912 di Tanjungpura, kemudian sebagai lanjutan dari madrasah Mas Lurah itu dibukalah tingkat Tsanawiyah dengan sebutan Madrasah Aziziah pada tahun 1923, yang dipelopori oleh Syekh Abdullah Afifuddin. Sebuah madrasah yang terkenal pula ialah Madrasah Tuan Syekh Hasan Ma'sum di Medan, seorang ahli ilmu-ilmu agama yang kenamaan di kerajaan Deli. Sebuah madrasah yang paling penting bagi perkembangan organisasi Islam kemudian ialah Makhtab Islamiyah Tapanuli di Medan yang didirikan pada tahun 1918. Pada tahun 1928 oleh pelajar-pelajar makhtab itu didirikan semacam "**Debating Club**" dan dari organisasi itulah lahirnya Al Djami'atul Washliyah pada tahun 1930. Pelopor-pelopornya ialah A. Rahman Syihab, Ismail Banda, M. Arsyad Thalib Lubis, dan di bawah lindungan beberapa ulama besar sebagai penasehat, yaitu Tuan Syekh H.M. Joenoes, Tuan Syekh Hasan Ma'sum, Kadhi H. Iljas, Syekh M. Yoenoes.

Organisasi ini bercabang di tempat lain dan terbagi atas beberapa departemen (majelis), seperti Majelis Tarbiyah, Majelis Mubaligh, dan sebagainya. Yang penting bagi pendidikan dan pergerakan ialah majelis **Studiefonds**, Majelis Pandu dan Majelis Putri.

Pergerakan agama yang lain ialah Muhammadiyah yang mulai bergerak di Sumatera Utara pada tahun 1927. Pelopor yang per-

tama ialah Hr. Muhammad Said, Juin Sutan Pangulu, Mas Pono, Pengulu Manan, St. Saidi Tanjung, Muhammad Arif dan lain-lain. Salah satu tujuan gerakannya ialah mendirikan sekolah-sekolah dalam rangka memajukan pendidikan dan kemudian bergerak pada bidang-bidang lain seperti Bidang Kesejahteraan Umum, bidang Da'wah (Tabligh), dan bidang lain-lainnya

Gerakan ini cepat berkembang, tetapi mendapat tantangan dari raja-raja dan kalangan perkebunan, sebab gerakan ini menyinggung soal kedudukan umat Islam di tengah masyarakat. Dalam hal ini kedudukan sebagai masyarakat jajahan dan kedudukan sebagai orang miskin dan bodoh telah disadarkan oleh Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya. Pada waktu itu, baik pemerintah kolonial (Gubernemen), pihak raja raja (**Zelfbestuurders**) maupun pihak pengusaha perkebunan (**Ondernemers**) masih dihantui oleh rasa takut kepada komunis. Oleh sebab itulah maka gerakan-gerakan apapun yang bersifat perjuangan dihalang-halangi dan ditentang. Rapat-rapat diawasi sekolah-sekolah juga diawasi. Misalnya saja rapat umum yang direncanakan di Pancur Batu pada tanggal 19 Januari 1928 dibatalkan dan tempat rapat dijaga ketat dengan alasan tidak mempunyai izin.

Menjelang tahun 1932 sudah kelihatan pula tanda-tanda perkembangan baru bagi rakyat Sumatera Utara, di mana kader-kader pergerakan bermunculan di mana-mana hasil didikan dan binaan dari madrasah dan organisasi Islam itu. Rakyat semakin sadar dengan tindakan pemerintah terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Salah satu tindakan pemerintah yang mempercepat matangnya pergerakan ialah munculnya **Ordonantie Wilde Scholen** (ordonansi Sekolah Liar) yang ditentang dengan keras oleh kaum pergerakan. Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya menentang ordonansi itu dengan tegas dan tidak menyetujui adanya **Toezicht Ordonantie Particulier Onderwijs**.

Pergerakan kaum Islam di Sumatera Utara pada masa itu berlandaskan dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang diajarkan di madrasah dan pesantren. Walaupun perjuangan mereka itu tidak akan luput dari cobaan-cobaan tetapi siapapun tentu tidak akan lepas dari Sunnah Rasul. Partisipasi kaum Islam dalam pergerakan di Sumatera Utara melalui proses yang dimulai dengan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, sosial kemudian lapangan politik.

Gerakan permalim dapat dianggap suatu gerakan bermotifkan kepercayaan yang berkembang sejak mangkatnya Raja Sisingama-

ngaraja. Gerakan itu berusaha mencari pengikut di kalangan penduduk di sekitar Kualuh Hulu. Pengikut-pengikutnya berpakaian serba putih dan setiap pengikut yang baru diwajibkan **berpangir** (dimandikan) kemudian baru **di amin** (dimanterakan) oleh guru permalim. Jika penduduk tidak bersedia ikut dalam gerakan itu, maka dilakukanlah tindakan kekerasan. Gerakan itu dipadamkan oleh Yang Dipertuan Kualuh dengan bantuan pasukan Belanda.

Nasionalisme yang muncul di daerah-daerah mulai memengaruhi masyarakat Tapanuli. Pada tahun 1926 dibentuklah oleh orang-orang Nasionalis Perhimpunan Hatopan Kristen Batak. Perhimpunan ini mengeluarkan kritik terhadap gereja yang masih dipimpin oleh orang asing. Pada tahun 1930 sinode yang berdiri sendiri dibentuk, tata kerja yang baru ditetapkan. Akan tetapi Hatopan Kristen Batak tidak merasa puas. Mereka hendak membentuk suatu gereja yang lepas seluruhnya dari pengaruh barat. Oleh karena itu berpisahlah mereka dari gereja besar. Pemisahan mereka terpecah belah dari atas beberapa kali kemudian, yaitu HKB (Huria Kristen Batak)

Petugas-petugas gereja dari luar negeri diterima sebagai petugas tetap di dalam HKBP. Petugas-petugas itu diangkat oleh RMG begitu pula Badan Pekerja Sinode sebagian diangkat dari Bremen sedang yang sebagian lagi diangkat oleh sinode sendiri. Kegiatan-kegiatan pendeta Jerman itu terhenti ketika pecah Perang Dunia II di Eropa. Pendeta-pendeta itu pada mulanya akan digantikan oleh orang-orang Belanda, tetapi tindakan itu tidak disetujui oleh orang-orang Batak. Pada tahun 1940 orang-orang Batak mengadakan sinode yang bebas dan mengangkat orang-orang Batak sendiri sebagai petugas gereja HKBP. Sejak waktu itu seluruh jabatan dipegang oleh orang-orang Batak, pada tahun 1942 pendeta J. Sihombing memegang pimpinan gereja HKBP sebagai **ephorus**.

6.5.3. Kehidupan intelektual

Sampai akhir penjajahan Belanda di Indonesia tingkat pendidikan sangat rendah. Orang yang tamat HIS dianggap sudah tinggi di tengah masyarakat. Orang itu sudah dianggap kaum intelek. Guru-guru sekolah desa (**Volksschool**, **Vervolgschool**) dianggap manusia luar biasa, begitu pula Engku Jaksa atau Mantri Polisi.

Beberapa orang Bumiputra telah pula berhasil memperoleh pendidikan lebih tinggi, sebagai ahli hukum, dokter, dan mereka antara lain Mr. Joesoef, Mr. Luat Siregar, Dr T. Mansoer, Mr. T.

Dzulkarnain, dan lain-lain, tetapi jumlah mereka sangat sedikit bila dibandingkan dengan sarjana sarjana Belanda yang bekerja di daerah ini. Sebagai perbandingan misalnya guru dalam tahun 1938 di HBS Medan ada 15 guru, tidak seorangpun guru orang Indonesia. Begitu pula di MULO terdapat sembilan orang guru, tidak seorangpun guru bangsa Indonesia. Beberapa kepala HIS terdiri dari orang-orang Indonesia, kepala-kepala kantor telepon, kepala stasiun kereta api sudah ada yang dipangku oleh orang-orang Indonesia.

Anggapan orang pada masa itu kaum lapisan atas seperti bangsawan, orang-orang kaya, anggota anggota club, pegawai pegawai gubernemen, adalah lapisan orang-orang pandai Mereka membentuk masyarakat sendiri dengan pola hidup sendiri yang berbentuk keeropaan, namun mereka tidak dapat secara bebas bergaul dengan orang-orang kulit putih yang membentuk societieit sendiri. Jadi kedudukan orang kulit putih dianggap lebih tinggi, lebih cerdas sedang orang Indonesia, walau bagaimana tinggi pendidikannya tetap dianggap lebih rendah kedudukannya.

Wartawan dan penulis juga dianggap sebagai lapisan masyarakat yang tinggi tingkatannya. Mereka termasuk golongan pemimpin yang dihormati oleh masyarakat, terutama masyarakat pergerakan.

Ulama-ulama sebagai lapisan intelek Muslim, begitu pula pendeta-pendeta sebagai lapisan intelek Kristen adalah lapisan yang sangat besar pengaruhnya dalam lingkungan masing-masing.

Pada abad XX lapisan intelektual inilah yang memegang peranan penting di dalam perjuangan Pergerakan Kebangsaan.

6.6. Hubungan ke luar.

6.6.1. Bentuk dan sifat hubungan.

Abad XX telah membuka hubungan internasional yang sangat luas di bidang perekonomian. Perusahaan-perusahaan perkebunan, perkapalan, ekspor-impor seluruhnya bersifat internasional dan dilaksanakan oleh Belanda, yang membuat hubungan-hubungan dengan negeri-negeri lain di Eropa dan Amerika.

Di bidang politik daerah Sumatera Utara sebagai bahagian dari Hindia Belanda tidak mengenal hubungan internasional yang berdiri sendiri. Seluruhnya diatur oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Kerajaan-kerajaan yang terdapat di Sumatera Utara tak

lain daerah kekuasaan Belanda yang tidak punya wewenang untuk mengadakan hubungan luar negeri.

Di bidang sosial budaya, terutama di bidang agama dan pendidikan terdapat perbedaan-perbedaan setempat. Di dalam agama Kristen kita menemukan organisasi misi seperti RMG (Jerman), NZG (Belanda), perkumpulan Baptis Amerika, Bala Keselamatan, yang berbentuk lembaga dan melakukan hubungan hubungan kerja terorganisir. Pengiriman petugas gereja, pendidikan, bantuan-bantuan dilakukan oleh lembaga misi yang bersangkutan melalui saluran organisasi.

Di kalangan orang Islam terjadi juga kontak sesama umat Islam, misalnya kepergian orang-orang dari daerah ini untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekkah, pergi ke Madinah atau Kairo menuntut pelajaran di perguruan-perguruan yang ada di daerah itu. Tetapi kegiatan seperti itu dilakukan secara pribadi, tidak melalui saluran organisasi. Orang-orang Islam tidak mengenal lembaga misi Agama.

Kesempatan untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah-sekolah dokter sekolah hukum telah dimanfaatkan pula oleh beberapa pemuda dari daerah ini. Hal itupun dilakukan secara pribadi dan sangat terbatas sekali.

6.6.2. Sikap terhadap daerah lain.

Di kalangan orang-orang Islam terdapat berbagai sikap terhadap dunia luar, terutama Eropa (Belanda). Golongan orang kolot tidak senang terhadap pengaruh barat baik politik, sosial budaya apalagi agama. Mereka khawatir jika anak-anak mereka masuk sekolah barat, mereka akan sesat dan menjadi kafir. Tetapi golongan ini tidak hanya menutup pintu bagi dunia barat saja. Malahan terhadap pembaharuan di kalangan Islam sendiri tidak mereka sukai. Pikiran-pikiran baru tentang ajaran Islam tidak mereka sukai, malahan sering terhadap seni (gambus, nasyid), dianggap telah melemahkan ajaran Islam.

Sebaliknya banyak pula orang-orang Islam mulai menyadari pentingnya membuka pintu bagi penerimaan pendidikan barat. Mereka dengan giat memajukan pendidikan anak-anak mereka. Jika kesempatan untuk memasuki sekolah Gubernemen tertutup, mereka memasukkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah swasta yang pada waktu itu banyak terdapat di Medan, seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, Ivoorno, Josua Instituut, dan sebagainya.

Tujuan yang hendak dicapai pada waktu itu ialah memperoleh kesempatan untuk memajukan kedudukan di lapangan pendidikan dan pekerjaan. Sekolah-sekolah itu melakukan ujian-ujian negeri dan bila dapat mereka akan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka dengan biaya yang sangat tinggi. Biaya itu ditanggung mereka demi kemajuan pendidikan anak-anak mereka.

Pada mulanya orang-orang Batak menolak pengaruh agama Kristen, tetapi berkat ketekunan dan kelincahan usaha para petugas gereja, maka gereja dapat tumbuh dan berkembang. Akhirnya mereka menerima alam pikiran barat melalui gereja. Dalam berbagai hal kehidupan mereka seperti orang barat, cara berpakaian, bersekolah, tetapi dalam hal yang merupakan sendi-sendi masyarakat mereka tidak menerima pengaruh itu. Orang-orang Batak tidak kehilangan adat-istiadatnya setelah mereka memeluk agama Kristen. Dalihan Na Tolu tetap mereka pertahankan, tor-tor tetap mereka lakukan dalam segala kegiatan penting, misalnya di kala kematian, perkawinan, dan sebagainya. Dalam hal ini kelihatannya para missionaris tidak berkeberatan terhadap langgengnya lembaga-lembaga tradisional di samping lembaga lembaga gereja.

Pada umumnya kedudukan barat dianggap sangat tinggi. Bagi sebahagian besar rakyat desa dan orang-orang miskin kedudukan sebagai orang barat itu benar-benar tinggi, malahan dianggap lebih tinggi dari lembaga-lembaga tradisional. Rasa rendah diri, rasa tidak berdaya, putus asa menyebabkan sebahagian masyarakat apatis, menganggap diri mereka telah ditakdirkan oleh yang Mahakua untuk menjadi bangsa yang hina. Setelah pemimpin pergerakan berusaha sekuat tenaga melalui sekolah-sekolah, pesantren, gereja, surat kabar, majalah, kesenian, maka sedikit demi sedikit orang mulai sadar akan harga dirinya.

Menjelang kedatangan Jepang sikap orang-orang Indonesia terhadap dunia luar mulai terbuka. Berita mengenai negeri lain telah banyak didengar orang melalui para pemimpin dan surat-surat kabar. Situasi dalam negeri seperti pembicaraan-pembicaraan dalam **Volksraad**, situasi perang Dunia II di Eropah, soal milisi mulai menjadi pembicaraan orang banyak.

6.6.3. Pengaruh dan akibatnya.

Pengaruh barat dalam berbagai lapangan kehidupan sangat terasa seperti pertanian, perdagangan, pemerintahan, dan pendidikan. Perkebunan-perkebunan yang dibuka oleh perusahaan-peru-

sahaan besar di Sumatera Timur telah membawa pengaruh terhadap pertanian rakyat. Penduduk mengenal berbagai jenis tanaman ekspor yang baru seperti kopi, tembakau, dan karet. Di samping kebun-kebun milik perusahaan asing, para petani mulai pula menanam tembakau, kopi, dan karet. Perkebunan rakyat itu terdapat di Tapanuli Utara, Dairi dan Tapanuli Selatan. Di Tanah Karo yang hawanya sejuk baik sekali untuk penanaman sayur-sayuran dan bunga-bunga. Selain untuk keperluan dalam negeri (kota Medan, kota-kota lain) maka hasil sayur-sayuran dari Tanah Karo itu di ekspor ke Singapura, dan Malaya.

Dalam susunan masyarakat di masa penjajahan, orang kulit putih ditempatkan pada lapisan paling tinggi. Di bawahnya kedudukan bagi orang-orang asing lainnya seperti Cina, Arab, India, dan Jepang. Penduduk pribumi yang tempatnya di lapisan paling bawah itu terdiri pula atas beberapa lapisan, seperti kaum bangsawan, ulama, cendekiawan, orang-orang kaya dan sebagian besar adalah petani miskin. Di perkebunan-perkebunan tinggal kaum buruh (kuli) yang hidupnya sangat miskin. Lapisan masyarakat yang miskin ini lama kelamaan sebagian menjadi manusia yang apatis menyerah kepada nasib dan tertanam dalam pikiran mereka, bahwa mereka tidak akan sanggup meningkatkan taraf hidup mereka ke arah yang lebih baik. Ada di antara mereka lari dari alam nyata ke alam khayal. Mereka ingin memperoleh kebahagiaan di hari kemudian dan menjauhkan diri dari kehidupan dunia.

Dalam lapangan pendidikan, pendidikan barat semula dimaksud untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja murah dari kalangan orang-orang Indonesia. Mereka dididik di sekolah untuk menjadi juru tulis, kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan kantor lainnya. Bahagian kecil dari anak-anak Indonesia mencapai pendidikan yang lebih tinggi, tetapi kedudukan mereka tetap lebih rendah dari anak-anak Belanda yang berpendidikan sama. Malahan banyak anak-anak Belanda yang berpendidikan lebih rendah berhasil menduduki posisi lebih penting dari anak Indonesia yang berpendidikan lebih tinggi.

Rasa tidak puas terhadap ketidakadilan ini telah menjadi pendorong bagi Pergerakan Kebangsaan, menimbulkan kesadaran atas nasib bangsa sebagai bangsa terjajah. Golongan yang sadar itulah yang mendorong majunya pergerakan dengan berbagai usaha, dan yang terpenting ialah memajukan sekolah-sekolah.

Sistem barat dalam lapangan pemerintahan, perdagangan,

perkantoran memiliki sistem administrasi yang benar-benar baru bagi bangsa kita. Kita mengenal cara cara mengatur lebih baik melalui organisasi pemerintahan, melalui sistem peredaran uang sistem perbankan, dan sebagainya. Hal itu tidak mudah dicontoh begitu saja, karena memerlukan pendidikan formal. Pada garis besarnya sistem itu kita warisi dengan berbagai perubahan sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. Susunan pemerintahan dari Gubernurnemen tetap menjadi dasar pembahagian daerah di negeri kita sampai saat ini dengan perubahan-perubahan seperlunya

Pada umumnya masyarakat mengambil hal-hal yang diperlukan dari pengaruh dunia luar. Pendidikan, pertanian, perdagangan sistem administrasi mereka ambil. Begitu pula kesenian barat seperti aliran-aliran musik, sastra, tetapi mereka tidak meninggalkan sama sekali nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Mereka tetap memegang teguh adat dan orang-orang yang meninggalkan adat istiadatnya, walaupun telah berpendidikan tinggi tetap akan dibenci oleh masyarakat. Umumnya makin tinggi pendidikan dan kedudukan seseorang, makin hati-hati orang itu memelihara adat-istiadatnya.

DAFTAR – BACAAN

- Adiwilaga, Rustandi R, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Baru, Jakarta, 1962.
- Damste, O, *Nederland Indonesia Dalam Abad ke XX*, Noordhof-Kolff, Batavia, c, 1949.
- Hamka, *Ayahku*, Penerbit Jayamurni, Jakarta, 1967.
- , 1908, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jilid I, II, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hutasoit, M, *Compulsary Education in Indonesia*, UNESCO, Paris, 1954.
- Jayodisuro, Akhmad Subarjo, *Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta 1975.
- Junus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1960.
- Kansil, Drs C.S.T, Drs. Yulianto S.A, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Cet II, Erlangga, Jakarta, 1972.
- Kartodirdjo, Dr. A. Sartono, *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Abad XIX – XX*, Lembaran Sejarah No. 1, Fak. Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajahmada, Jokjakarta, 1967.
- , *Kepemimpinan Dalam Sejarah Indonesia*, Balai Administrasi Universitas Gajahmada, Jokjakarta, 1964.
- Kruger, Dr. Th. Muller, *Sejarah Gereja di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1959.
- Malaka, Tan, *Dari Penjara ke Penjara*, Bhg I, Cet ke 3, Penerbit Wijaya, Jakarta, 1947.
- Napitupulu SH, O L, *Perang Batak Perang Sisingamangaraja* Jilid I, Penerbit Yayasan Pahlawan Nasional, 1971.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Noer, Deliar, *The Modern Muslim Movement*, Oxford University Press London, 1973
- Santoso, Tonny Suryo, Hadi Suryo Santoso, *Pantja Windhu Kebangkitan Perjuangan Pemuda Indonesia*, Jajasan Kesedjahteraan Keluarga Pemuda 66, Jakarta.
- Schrieke, B, *Indonesia Sociological Studies*, Part One, Sumur Bandung, Bandung, 1960.

- , *Penguasa-Penguasa Pribumi*, Bhratara, Jakarta, 1974.
- Supomo, Dr. R, *Sistim Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Noor Kemala, Jakarta, 1960.
- Wertheim, W.F, *Indonesian Society in Transition*, 2nd ed., Bandung, Bandung, 1956.
- Panitia Besar Peringatan Muhammadiyah, *Peringatan 30 Tahun Muhammadiyah di Daerah Sumatera, Timur, Luhur*, Medan, 1957.
- Pengurus Besar Al Jamiatul Washliah, *Al Jamiatul Washliah Setengah Abad*, ———, Medan, 1956.
-

BAB VII

ZAMAN PENDUDUKAN JEPANG

7.1. Keadaan pemerintahan dan kenegaraan.

7.1.1. Kerajaan-kerajaan.

Pada tanggal 13 Maret 1942 bala tentara Jepang memasuki Medan. Mereka datang dengan menaiki sepeda. Mesjid Raya mereka pakai sebagai benteng pertama. Pasukan-pasukan itu mendarat di pantai timur Deli Serdang (Pantai Cermin) sedangkan daerah Tapanuli diduduki melalui Sibolga. Kemudian dengan serangkaian serangan kilat dalam waktu singkat tentara Jepang dapat menduduki kota-kota penting di Sumatera Utara. Perlawanan dari Belanda hampir tidak ada sama sekali.

Pasukan-pasukan Belanda mengundurkan diri ke daerah pegunungan di Kotacane yang terkenal dengan gunung Setan, tetapi pertahanan itupun tidak ada artinya dan segera dapat dihancurkan Jepang. Pasukan-pasukan Belanda dan orang-orang sipil Belanda dimasukkan ke dalam kamp-kamp tawanan. Di sana mereka hidup sangat menderita dan segera mental mereka patah di bawah kekuasaan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang kedudukan kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara masih tetap dilaksanakan seperti biasa. Di residenan Sumatera Timur masih terdapat pemerintahan raja-raja seperti pemerintahan **Zelfbestuur-Landschap** di zaman Belanda. Pada masa pendudukan Jepang raja-raja ditugaskan untuk membantu pelaksanaan kebijaksanaan politik pemerintah Jepang. Dalam hal ini raja bertugas mengurus persoalan adat istiadat saja. Raja yang diangkat oleh pemerintah Belanda, begitu juga pegawai-pegawainya masih tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan garis-garis yang ditentukan Jepang.

Pada mulanya kepala pemerintahan Jepang hanya campur tangan jika perlu saja, tetapi akhirnya segenap lapisan dan golongan masyarakat baik raja-raja, pegawai, dan rakyat berangsur-angsur menuju ke arah kepatuhan terhadap kepemimpinan Jepang. Hal itu mengakibatkan kedudukan raja di tengah masyarakat makin ber-

kurang. Badan-badan yang dibentuk Jepang untuk membantu Perang Asia Timur Raya dan Badan-badan perwakilan yang dipersiapkan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari berbagai lapisan dan golongan, makin lama makin besar pengaruhnya di tengah masyarakat menggantikan pengaruh raja-raja.

7.1.2. Pemerintah Jepang.

Sewaktu bala tentara Jepang menduduki Sumatera Utara, pimpinan Angkatan Perangnya dipusatkan di Bukittinggi. Sejak itu secara resmi pusat pemerintahan Belanda yang berkedudukan di Medan telah dipindahkan ke Bukittinggi. Panglima Angkatan Darat Jepang merangkap pula sebagai kepala pemerintahan sipil yang disebut **Saiko Sikikan**. **Saiko Sikikan** itu tunduk kepada atasannya di Shonan (Singapura).

Istilah-istilah Belanda dalam lapangan pemerintahan diganti dengan istilah Jepang, begitu juga istilah-istilah jabatan. Nama keresidenan diganti dengan **Syu** dikepalai oleh **Syu-Tjokan**. Afdeling atau Kabupaten diganti dengan **Bunsyu**, dikepalai oleh **Bunsyu-Tjo**. Onderafdeling diganti dengan **Gun**, dikepalai oleh **Gun-Tjo**. Jabatan **Gun Tjo** sebagian diserahkan kepada bangsa Indonesia, yaitu di daerah-daerah yang dianggap oleh pemerintah Jepang tidak begitu penting.

Jumlah **afdeling** di zaman Belanda ada delapan dan di zaman Jepang menjadi 10, yaitu 10 **Bunsyu** yang masing-masing dikepalai oleh **Bunsyu-Tjo**. Deli Serdang, Langkat, Tanah Karo, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Sibolga, Angkola, Batak, dan Nias, Medan dijadikan **Shi** semacam kotamadya dan dikepalai oleh **Shi Tjo**. Jabatan itu dipangku oleh seorang militer Jepang.

Daerah swapraja yang dikenal dengan **Landschap** diganti sebutannya dengan **Son** yang dikepalai oleh **Son-Tjo**.

Perubahan lain yang diadakan Jepang ialah pemisahan kekuasaan kepolisian dengan pamongpraja. Di tiap keresidenan (**Syu**) kepolisian berdiri sendiri yang dikepalai oleh **Keimubutjo** dan untuk Kabupaten dipegang oleh **Keisatsu-tjo**. Jabatan ini dipangku oleh orang Jepang.

Di samping polisi umum dibentuk pula polisi istimewa yang bersenjata disebut **Tokubetsu**, semacam brigade-mobil.

Di bidang peradilan masing-masing keresidenan mengeluarkan peraturan yang disebut **Shu-rei** yang menyederhanakan lembaga peradilan yang beraneka ragam di zaman Hindia Belanda.

Untuk membantu pemerintahan Jepang maka dibentuklah semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari berbagai golongan yang disebut **Shu Sangikai**. Kemudian dibentuk pula Badan Kebaktian Rakyat disebut **Seikan Gansyu Hookokai** dan sejalan dengan janji kemerdekaan Indonesia oleh Jepang dibentuk suatu Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera yang disebut **Sumatora Tyuo Sangiin** berkedudukan di Bukittinggi. Anggota-anggotanya diangkat dari tiap keresidenan dan ketuanya disebut **Gitjo** yang dipangku oleh Muhammad Sjafei.

Untuk memperkuat pemerintahan Jepang di bidang pertahanan, maka Jepang membentuk **Talapeta** (Taman Latihan Pemuda Tani) yang dimaksudkan sebagai pelopor pertahanan semesta dan membantu di bidang pertahanan dan perbekalan. Organisasi lain di Sumatera Timur ialah **Mokutai** (Barisan Harimau) sebagai persiapan gerilya di pegunungan dan **Kenko Tai Sin Tai** yang disebut juga **Kaijo Jikei Dan** (Barisan Pantai dan Laut), yang diharapkan sebagai pengawal dan pengintai musuh dari pantai.

Pasukan-pasukan pembantu Tentara Jepang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia, Barisan **Hei-Ho** (Pembantu Prajurit), **Keibodan** (Barisan Pemadam Kebakaran, khususnya dalam serangan musuh), **Seinendan** (Barisan Pemuda), dan akhirnya **Peta** (Pembela Tanah Air). Seterusnya untuk memobilisir seluruh tenaga rakyat maka diadakanlah **Romusha** untuk membantu Jepang dalam pembangunan Pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Banyak para **Romusha** itu yang dikirim ke luar negeri seperti ke Birma, Thailand dan tempat-tempat lain di Asia Tenggara.

Menjelang akhir pemerintahan Jepang maka dibentuklah oleh Jepang suatu badan di Sumatera Timur yang disebut **Bompa** (Badan Untuk Membantu Pertahanan Asia) dan di Tapanuli dibentuk **Bapen** (Badan Pertahanan Negeri). Badan-badan ini bertugas untuk menegakkan kepentingan peperangan Jepang.

Di dalam Bompa terhimpun pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berpengaruh seperti A. Xarim Ms, Sugondo Kartoprojo, Adnan Nur Lubis, S.M. Tarigan, dan lain-lain.

7.1.3. Sikap Terhadap Pemerintah Jepang.

Pada masa menjelang kedatangan Jepang telah tersiar khabar-khabar akan kedatangan Jepang ke Indonesia yang bertujuan memerdekakan bangsa Indonesia dari Belanda. Khabar khabar ini disengaja untuk mempengaruhi sikap bangsa Indonesia. Siaran-

siaran dalam bahasa Indonesia dari Radio Jepang diakhiri dengan lagu Indonesia Raya. Barisan mata-mata Jepang di daerah ini dikenal dengan leter F (Fujiwara) yang bertugas mempersiapkan masyarakat untuk menyambut Jepang. Toko Jepang di mana-mana menjual barang dengan harga murah, malahan banyak yang memberi persenan-persenan. Dengan tindakan itu Jepang ingin memperoleh kesan dari bangsa Indonesia, bahwa kelak setelah Jepang datang, maka kemakmuran segera akan tercapai.

Harapan-harapan itu ternyata hampa, sebab kenyataannya jauh dari apa yang diharapkan. Segera sesudah beberapa hari Jepang berada di Medan, maka diadakanlah rapat umum di Medan yang mengumumkan agar Merah Putih diturunkan dan lagu Indonesia Raya tidak boleh dilagukan. Ditegaskan pula, bahwa tugas yang penting ialah membantu tentara Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya.

Partai-partai politik dilarang, surat surat kabar seperti *Pewartar Deli*, *Sinar Deli*, *Sinar Andalas* dilarang terbit, rakyat dipaksa bekerja di tempat-tempat tertentu dan kehidupan sangat sulit. Pemerintahan dilaksanakan dengan tangan besi dan sangat menyakiti hati penduduk. Akhirnya rakyat benci kepada Jepang, tetapi sikap perlawanan akan sia-sia sebab Jepang mempunyai badan badan yang telah ditanam untuk mengawasi kegiatan masyarakat. Tiap-tiap orang yang ke luar masuk suatu daerah mesti diketahui oleh kepala lorong (**komico**). **Komico** dianggap sebagai badan pemerintahan yang paling rendah yang mengatur hubungan antara pemerintah Bala Tentara Jepang dengan penduduk.

Walaupun demikian kerasnya tindakan Jepang namun perlawanan-perlawanan masih tetap dilakukan oleh golongan pemuda yang militan misalnya pemberontakan **Gyu-gun** di Pematang Siantar dipimpin oleh Hotman Sitompul, perlawanan **Hei Ho** di Belawan, pemberontakan **Gyu-gun** di Langkat yang dipimpin oleh Karim Saleh dkk. Perlawanan-perlawanan itu sebenarnya banyak dilakukan dengan cara-cara sendiri yang semuanya ditindas dengan kekejaman oleh tentara Jepang.

Hal lain yang sangat menyayat hati penduduk ialah kerja paksa dan kesulitan bahan makanan, pakaian dan kewajiban penduduk meninggalkan kota-kota. Penduduk yang tidak bekerja tertentu di kota diperintahkan ke luar kota untuk bertani. Sebaliknya hasil yang mereka peroleh kelak dirampas oleh Jepang untuk kepentingan perangnya. Lain lagi sikap para ulama yang merasa tersinggung

terhadap kewajiban melakukan **Seikere**, yaitu menyembah ke arah matahari terbit terhadap **Tenno Heika**. Hal itu dianggap bertentangan dengan agama Islam. Di dalam agama Islam tidak boleh seorang muslim itu menyembah sesuatu lain dari pada Allah.

Orang-orang tua merasa khawatir terhadap tingkah laku tentara Jepang yang kasar. Anak-anak gadis banyak yang dibawa Jepang dengan alasan disekolahkan, ternyata mereka dijadikan bunga rumah-makan untuk menghibur para opsir Jepang.

Tegasnya sikap bangsa Indonesia terhadap Jepang itu ialah rasa tunduk dengan rasa takut. Patuh dengan rasa takut yang amat sangat.

7.2. Penyelenggaraan hidup dalam masyarakat

7.2.1. Keadaan sosial.

Pada masa pendudukan Jepang terjadi perubahan-perubahan penting di lapangan kehidupan sosial di daerah ini. Sebab-sebab perubahan itu ialah politik pemerintahan militerisme Jepang dan kesulitan penghidupan.

Kedudukan raja-raja dan bangsawan sangat ditekan dan sebagai akibatnya penghormatan yang berlebih-lebihan pada golongan ini makin lama makin berkurang. Begitu pula kelemahan golongan ini yang tidak mampu memberikan bantuan atau pun memimpin masyarakat yang dalam kesulitan, menyebabkan penduduk lama kelamaan merasakan bahwa raja dan para bangsawan tidak berpengaruh lagi dalam kehidupan mereka.

Begitu pula rasa hormat dan pertuanan kepada Belanda dan orang kulit putih telah lenyap dengan pendudukan Jepang itu. Orang-orang Belanda interniran yang dibawa dengan truk terbuka dilihat orang kurus-kurus dan sengsara. Semangat mereka telah patah dan sangat menderita batin. Kenyataan ini telah menyebabkan hilangnya pandangan super kepada orang-orang kulit putih.

Masyarakat diajar hidup praktis. Adat istiadat tetap dijunjung tinggi, tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan praktis sesuai dengan kenyataan kesulitan sandang dan pangan. Tata aturan adat dan agama dilakukan dengan patuh, tetapi pelaksanaannya tidak perlu dengan kemewahan, karena pada waktu itu makanan sangat sulit dan orang hidupnya menderita. Upacara perkawinan, misalnya dilakukan dengan tidak menyimpang dari agama dan adat tetapi tidak perlu dengan **jambar** dan pesta yang meriah. Mereka

melakukan sesuatu dengan sederhana, tetapi tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat dan agama.

Di sana sini kelihatan pula orang-orang yang bekerja dengan Jepang. Mereka hidupnya jauh lebih baik, cukup makanan dan pakaian, tetapi mereka diwajibkan bertindak sesuai dengan pola pemerintahan militerisme Jepang. Mereka diharuskan menghilangkan rasa sebangsa dan berbuat kejam sesama bangsa sendiri. Pandangan orang kepada pegawai-pegawai di masa pendudukan Jepang berbeda sekali dengan di masa penjajahan Belanda. Kalau pada zaman Belanda orang kagum melihat Engku Jaksa, Engku Mantri Polisi, maka pada zaman Jepang orang benci kepada "Kaki Tangan Jepang".

Salah satu sarana yang berpengaruh bagi perataan rasa senasib ialah sistem kerja paksa. Pada hari hari tertentu pemerintah militer Jepang memaksa semua orang tanpa kecuali, malahan juga orang-orang Jepang sendiri ikut melaksanakan kerja paksa yang disebut **kingrohoshi**. Proyek-proyek yang dibuat sesuai dengan keperluan Jepang, misalnya mengorek lobang-lobang perlindungan, membersihkan lapangan terbang, dan sebagainya. Banyak kisah dari orang-orang yang mengalami **kingrohoshi** itu yang menyedihkan, misalnya rasa lapar dan haus yang amat sangat, tetapi tidak diperkenankan makan, sebaliknya jika diberi makan nasi bercampur antah harus dihabiskan, tidak boleh bersisa. Jika ketahuan ada yang mencuri tebu waktu **kingrohoshi** dipaksa memakan sekian banyak tebu dan harus ditelan dengan ampas-ampasnya. Itu semua menimbulkan rasa senasib di kalangan orang-orang Indonesia, sebab orang-orang Jepang yang turut bekerja memperoleh makanan cukup dan baik.

Berbeda dengan orang-orang Indonesia yang bertugas sebagai "Kaki Tangan Jepang" yaitu menjadi tukang tunjuk, yang ditugaskan menunjuk siapa siapa orang yang melawan Jepang, siapa-siapa orang pernah bercakap menghina Jepang, sedangkan pegawai biasa seperti guru, pegawai kantor hidupnya sangat susah. Gaji sangat kecil dan makanan tidak tersedia di pasaran. Jika kepada mereka diberi **catu**, maka anak isteri harus antri mengambil **catu**. Penghargaan orang terhadap pegawai sangat kurang. Disiplin tidak ada dan orang mulai mengenal sogok, korupsi, dan sebagainya.

Golongan pedagang hampir tidak dapat bekerja dengan normal, karena perdagangan hampir tidak ada. Barang-barang keperluan hidup hilang dari pasaran. Pada waktu itulah berkembang se-

macam golongan pedagang yang disebut "tukang catut". Tugas mereka membeli barang yang diseludupkan dari gudang Jepang, kemudian secara sembunyi-sembunyi menjualnya kepada umum. Jika tertangkap dapat dihukum mati. Bahan-bahan yang dicatutkan itu ialah rokok, gula, kain, pokoknya bahan keperluan sehari-hari.

Penyakit masyarakat yang berkembang sejak zaman Jepang itu ialah gelandangan dan pelacuran. Orang-orang menceritakan, bahwa gelandangan dengan borok-borok besar di badannya selalu berkeliaran mencari sesuatu apa saja yang dapat dimakan seperti anjing yang tidak berharga layaknya. Begitu pula pelacuran berkeliaran untuk mengharapkan sesuatu pemberian yang dapat membeli sesuap nasi. Di samping pelacuran rendah itu terdapat "rumah kuning" yaitu tempat opsir-opsir Jepang dihibur oleh gadis-gadis Indonesia.

7.2.2. Keadaan Ekonomi.

Politik ekonomi pemerintah militer Jepang berdasarkan regionalisme, yaitu agar setiap daerah mencukupi segala keperluan sendiri. Peredaran barang, seperti beras, kopi, ikan tidak diperkenankan. Kalau hal itu dilakukan oleh pedagang dengan seludup-seludupan, maka hal itu termasuk kegiatan "mencatut" dan dapat dihukum berat. Kereta api dan bus-bus digeledah mencari barang-barang catutan itu. Pos-pos penjagaan didirikan dan pemeriksaan dilakukan dengan keras. Tukang-tukang tunjuk (mata-mata) Jepang disebar untuk mencari barang-barang seperti itu.

Pemerintah berusaha mengatur distribusi dengan mengambil atau membeli hasil bumi dengan harga sangat rendah. Sebagian hasil bumi dan ternak diserahkan kepada pemerintah, kemudian disalurkan melalui koperasi koperasi. Tetapi untuk memperoleh sesuatu dari koperasi itu sangat sulit. Barang-barang seperti garam, sabun, gula, rokok pada waktu itu termasuk barang-barang mewah. Beras sulit diperoleh dan harganya segera meningkat 100 kali dari masa sebelumnya. Kalau pada zaman Belanda harga beras di daerah ini sepuluh sen sebambu, maka sesudah Jepang masuk harganya naik menjadi dua belas rupiah setengah sebambu jadi naik 125 kali. Uang dicetak sebanyak-banyaknya, sehingga uang hampir hampir tidak bernilai. Orang-orang berceritera, bahwa untuk membeli beberapa kilo beras orang membawa segumpal besar uang kertas. Ada yang menceritakan, bahwa untuk membayar gaji guru orang

membawa sekarung uang kertas, tetapi uang itu tak cukup untuk membeli sesuatu yang berharga.

Barang-barang luar negeri tidak mungkin diperoleh. Begitu pun halnya dengan onderdil dan alat-alat mobil sangat sukar diperoleh. Motor hampir tidak jalan sehingga hubungan sangat sulit. Minyak bensin tidak ada di pasaran dan dibuat minyak sintetis dari karet. Minyak karet ini dipergunakan untuk mobil dan dipakai ban mati untuk jenis-jenis kendaraan seperti sepeda dan lain lain. Pertambangan minyak di Pangkalan Brandan terlantar, karena telah dirusakkan Belanda sebelum kedatangan Jepang. Perbaikan-perbaikan belum memberi hasil. Tenaga orang-orang Indonesia dipakai tetapi kehidupan mereka tidak memadai, sehingga hasil atau produksi pun tidak dapat diharapkan dalam waktu yang singkat. Sampai Jepang kalah produksi minyak di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu itu hanya dapat sekedar keperluan militer.

Kebun-kebun terlantar. Jepang menginginkan produksi tetapi tidak melakukan pemeliharaan terhadap kebun-kebun itu. Situasi perang menyebabkan urusan untuk itu belum dapat dikerjakan Jepang. Ketika penduduk kota kehabisan bahan makanan, maka penduduk disuruh pergi ke desa untuk bertani. Banyak tanah tanah kebun yang digarap untuk penanaman padi atau ubi.

7.3. Kehidupan Seni Budaya.

7.3.1. Pendidikan.

Tujuan pendidikan pada zaman Jepang sesuai dengan tujuan penjajahan Jepang, yaitu menanamkan pengabdian kepada **Tenno Heika** (Kaisar Jepang). Sejalan dengan itu ditanamkan semangat Jepang kepada anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia (**Nippon-Seizin**). Di dalam menanamkan semangat Jepang itu, maka sifat pengajaran ditekankan kepada aktivitas fisik, bersifat praktis dan berdisiplin militer.

Tiap sekolah mendapat bendera Jepang yang harus dihormati setiap pagi setelah selesai pelajaran gerak badan (**taiso**), kemudian mulai kelas satu anak-anak telah diajar membaca dan menulis huruf **Katakana** (huruf Jepang). Pelajaran Bahasa Jepang diutamakan, untuk itu pada sore hari guru-guru diwajibkan belajar bahasa Jepang kepada orang-orang Jepang. Guru dan murid yang pandai berbahasa Jepang dan menang dalam perlombaan yang sering diadakan, diberi hadiah. Sejalan dengan itu pula, lagu-lagu Jepang juga diajarkan. Sering pula diadakan perlombaan antar sekolah dalam

hal lagu-lagu Jepang itu. Murid-murid dan sekolah yang menang diberi pula hadiah.

Selain dari pelajaran Bahasa Jepang dan lagu lagu Jepang, maka di dalam kurikulum pada masa itu diutamakan pula pelajaran baris-berbaris dan **taiso**. Pelajaran **taiso** itu diakhiri dengan upacara **seikere**, yaitu menundukkan badan ke arah matahari terbit sebagai penghormatan kepada **Tenno Heika**.

Sejalan dengan perubahan-perubahan baru itu, maka pelajaran bahasa Belanda dilarang. Buku-buku pelajaran dalam bahasa Belanda dibakar. Selanjutnya bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar ditutup, malahan sekolah-sekolah swasta yang dulu memakai nama Belanda, seperti Josua Instituut dan Ivoorno, pada zaman Jepang diubah menjadi perguruan Josua dan Perguruan Kesatria.

Salah satu hal yang penting ialah perubahan sistem persekolahan. Pada zaman Belanda dikenal bermacam sekolah seperti HIS, ELS, HCS, MULO, AMS, HBS, maka pada zaman Jepang sekolah-sekolah itu diseragamkan. Begitu pula pada sekolah-sekolah negeri uang sekolah dihapuskan. Dengan demikian timbul semacam demokrasi dalam dunia pendidikan di tanah air kita. Susunan sekolah yang baru itu ialah Sekolah Rakyat (**Kokumin-Gakko**) 6 tahun, **SLP (Cu-Gakko)** untuk laki-laki 3 tahun, **Zyu-Gakko** untuk anak perempuan juga 3 tahun. Di samping itu terdapat beberapa sekolah kejuruan yang mengutamakan ketrampilan. Sistem sekolah yang baru ini belum dapat dikembangkan, tetapi banyak pengaruhnya bagi susunan sekolah-sekolah di Indonesia pada zaman kemerdekaan.

7.3.2. Kesenian.

Pada masa pendudukan Jepang kegiatan kesenian adalah bagian dari urusan penerangan dan propaganda Jepang. Semangat yang ditanamkan adalah semangat anti barat (Belanda, Inggris dan Amerika). Jepang mengkoordinir kegiatan kesenian itu yang dilakukan oleh bagian penerangan (**Sendenhan**). Di Medan diorganisir **Bunkuka** yang menghimpun para seniman dan mengkoordinir pertunjukan-pertunjukan.

Pertunjukan-pertunjukan dilakukan di gedung-gedung bioskop, baik drama maupun musik. Pertunjukan musik (orkestra) dilakukan juga di tanah lapang atau di kebun binatang dengan menda-

pat pembiayaan dari bahagian penerangan dan propaganda Jepang. Salah satu syarat dari pertunjukan itu ialah kewajiban melagukan beberapa lagu Jepang, atau lagu-lagu mars yang isinya anti Inggris dan Amerika. Tiap kampung mendirikan kelompok drama dan kesenian. Kegiatan latihan dan pertunjukan dilakukan dalam hubungan kerja gotong-royong yang pada zaman itu banyak sekali dilakukan.

Ditinjau dari segi perkembangan semangat kebangsaan, maka pada waktu itu terdapat semacam penempatan semangat kebangsaan yang meluap-luap di tengah masyarakat. Janji-janji kemerdekaan yang diberikan Jepang, terlepas dari palsunya janji itu, namun tetap membekas di hati rakyat.

Film-film barat dilarang. Sebagai gantinya dipertunjukkan film-film Jepang. Berbeda dengan kekerasan militerismenya, dalam film Jepang orang dapat menyaksikan kehalusan seni budaya Jepang itu. Di samping itu film-film Indonesia sangat disukai dan mulai banyak mengisi pertunjukan di bioskop. Bagaimanapun jumlah film masih kurang diedarkan, sehingga gedung-gedung bioskop sering diisi dengan acara pertunjukan sandiwara atau musik (orkes).

Lagu-lagu Jepang yang populer di kalangan masyarakat ialah **Teiho Kosinkoku**, **Gukanmaci**, **Wakare Dume**, **Sakura**, **Sihano Yoru**, dan lain-lain.

7.3.3. Pengaruh seni budaya Jepang.

Pada umumnya masa pendudukan Jepang yang pendek itu tidak banyak memberikan pengaruh kepada seni budaya di daerah ini. Pola seni budaya Jepang itu masih sangat baru bagi penduduk dan kalangan bangsa Indonesia masih belum serasi dengan pola itu.

Latihan-latihan kemiliteran telah memperkenalkan kepada pemuda-pemuda berbagai seni bela diri seperti **Judo** dan **Yujitsu**, tetapi perkembangan seni bela diri yang dewasa ini berkembang di negeri kita tidak secara langsung diakibatkan oleh pendudukan Jepang. Begitu pula film-film Jepang yang dewasa ini banyak digemari juga tidak langsung sebagai akibat masa pendudukan Jepang itu.

Penderitaan hidup yang amat sangat pada masa itu telah menimbulkan semacam kebencian kepada Jepang. Lebih lebih lagi kekerasan militerisme Jepang, kekejaman, pembunuhan, penyiksa-

an yang dilakukan terang-terangan sangat menyayat hati penduduk. Kelaparan dan kesengsaraan itu telah membuat orang selalu berdoa agar Jepang segera angkat kaki dari negeri ini. Oleh sebab itu bahasa Jepang yang pada masa pendudukan itu diintensifkan pengajarannya, segera dilupakan orang setelah Jepang kalah.

Secara tidak langsung masa pendudukan Jepang itu menghapuskan dominasi kebudayaan barat, tetapi sebagai gantinya orang mengembangkan kebudayaan nasional. Hapusnya bahasa Belanda tidak berarti orang memakai bahasa Jepang. Bahasa Jepang belum cukup dipahami orang, kecuali beberapa kata seperti **bagero**, **arigato**, **arimaseng**. Begitu pula ucapan pemieo Jepang dalam bahasa Indonesia "Nippon, Indonesia sama sama ne !" diucapkan orang dengan cemoohan, karena ternyata Jepang menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tidak berharga.

Demikianlah tari-tarian Jepang, nyanyian nyanyian, musik, seni bangunan, seni lukis, tidak banyak berpengaruh. Bukan saja disebabkan masa pendudukan itu terlalu pendek, tetapi masa yang pendek itu telah diisi dengan rasa kebencian.

7.4. Alam Pikiran dan Kepercayaan.

7.4.1. Perkembangan Agama.

Pada umumnya pemerintah militer Jepang tidak mencampuri urusan agama. Satu-satunya campur tangan yang agak langsung ialah tentang kedudukan para pendeta bangsa barat. Mereka tergolong sebagai musuh Jepang (Inggris, Belanda, Amerika) dan dimasukkan ke dalam tawanan. Walaupun demikian kegiatan gereja tidak terganggu, sebab sejak penjajahan Belanda kedudukan pejabat-pejabat gereja telah dipangku oleh orang-orang Batak, malahan pada tahun 1942 pimpinan HKBP seluruhnya telah berada di tangan orang Batak dengan pendeta J. Sihombing sebagai **Ephorus**. Di Nias sejak 1940 **Ephorus** orang Nias Atefona Harefa, sedang di Karo sebagai **Modromen** GBKP ialah Thomas Sibero.

Menghadapi kesulitan-kesulitan hidup di zaman pendudukan Jepang itu, masyarakat merasa perlu mencari pegangan hidup yang kuat, yaitu agama. Dalam keadaan seperti itu kegiatan beribadat semakin kuat. Kesulitan-kesulitan hidup tidak melemahkan orang beribadat, malahan menyebabkan orang semakin yakin akan kebesaran Tuhan yang akan melepaskan mereka dari kesengsaraan.

Kegiatan-kegiatan dakwah agama berjalan seperti biasa seko-

lah-sekolah agama tidak diganggu oleh Jepang. Kesulitan-kesulitan hidup tentu mengganggu kehidupan guru-guru dan orang tua murid, tetapi kesulitan itu bukan hanya dirasakan oleh lapisan guru guru saja, sehingga pekerjaan itu mereka teruskan. Pada masa itu setiap orang baik pendeta, ulama ataupun guru-guru agama telah terbiasa untuk mencari nafkah tambahan dengan cara bertani, berjualan makanan; atau melakukan kegiatan apa saja untuk menambah penghasilan guna mempertahankan hidup. Namun demikian mereka tidak lari dari tugas pokok sebagai pemimpin rohani umat sesuai dengan ajaran agama.

Tindakan-tindakan Jepang banyak yang melukai hati para rohaniawan, baik Muslim maupun Kristen, kerja paksa kezaliman, kemiskinan, akibat pendudukan pasukan Jepang menimbulkan rasa prihatin pemimpin-pemimpin rohani. Di samping itu penyiksaan, perkosaan, pembunuhan menyebabkan masyarakat merasa gelisah dan memerlukan ketenangan batin. Di sinilah peranan ulama mereka memberikan ketenangan hidup bagi pengikut pengikutnya.

Di samping kejadian-kejadian itu masalah yang paling menyenggu perasaan ialah kewajiban **seikere**, menyembah ke arah matahari terbit yang diwajibkan Jepang kepada anak-anak dan orang dewasa. Hal itu bertentangan dengan keyakinan agama bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1942 tentara Jepang mengumpulkan penduduk kota Medan di lapangan untuk melakukan "sembahyang" menghadap ke arah timur ke tempat istana **Tenno Heika**. Tentu saja itu sangat menyenggu perasaan umat beragama.

Jawaban terhadap peristiwa ini yang bersifat positif ialah semakin eratnya hubungan antara umat beragama di daerah ini. Antara golongan ulama yang pada zaman penjajahan Belanda terdapat perselisihan paham, misalnya antara Muhammadiyah Al Itihadiyah, Al Washliyah, maka pada zaman Jepang hubungan mereka satu dengan yang lain semakin erat. Malahan toleransi beragama antara orang-orang Kristen dengan Islam mulai terjalin dengan baik. Satu peristiwa simbolik yang patut dicatat dalam toleransi itu ialah pelaksanaan ibadah golongan Kristen di Binjai pada zaman Jepang dilakukan buat pertama kali di sekolah Muhammadiyah.

Bagi organisasi Muhammadiyah terdapat beberapa perkembangan semasa pendudukan Jepang. Untuk pertama kali organisasi itu diperkenankan melakukan salat Jum'at tersendiri dengan

mengambil tempat di Jalan Demak Medan. Kemudian berdirilah di mana-mana mesjid-mesjid Taqwa, yaitu mesjid yang didirikan oleh Muhammadiyah. Pada zaman penjajahan Belanda kegiatan seperti itu tidak diperkenankan oleh **Zelfbestuurders** tetapi pada zaman Jepang pengaruh raja-raja sudah sangat berkurang, sehingga kegiatan orang-orang Muhammadiyah itu semakin maju.

Begitu pula kongres-kongres atau konperensi organisasi-organisasi Islam dapat dilakukan, walaupun sering pula mendapat halangan dari Jepang. Konperensi Muhammadiyah Sumatera Timur telah dilaksanakan di Medan pada zaman Jepang. Kongres keempat Al Jami'atul Washliyah telah dilaksanakan pada tahun 1944 di Medan di bawah pimpinan H. Abdul Rahman Syihab. Kongres itu telah berhasil memecahkan beberapa hal mengenai pendidikan dan soal pemuda. Pada zaman Jepang pula perguruan Al Jami'atul Washliyah berhasil menamatkan murid-murid Al Qismul Ali sebanyak tujuh orang di bawah pimpinan Al Ustaz H. Arsyad Thalib Lubis. Pada waktu itu, tingkat Al Qismul Ali itu adalah tingkat paling tinggi bagi pendidikan agama Islam di daerah ini.

Kegiatan-kegiatan dakwah Islam telah dilakukan oleh pemuka-pemuka Al Jami'atul Washliyah ke Porsea dipimpin oleh Abdul Rahim Ja'far, Muhammad Daud, Muhammad Junus, Amir Hamzah Pulungan, Bahrum Jamil, Harun Amin, Muhammad Nuh Hudawy, dan lain-lain. Atas usaha mereka sampai sekarang kita lihat perkembangan agama Islam di Porsea di tengah-tengah suku Batak Toba yang umumnya beragama Kristen.

7.4.2. Gerakan Perlawanan Dengan Motivasi Agama.

Rasa tidak puas, putus asa, penderitaan tidak mungkin disalurkan secara terang-terangan. Pasukan-pasukan Jepang mengikuti tiap gerak gerik orang dengan seksama. Kedatangan orang dari satu daerah ke daerah lain diawasi dengan ketat melalui **Kumico** (kepala lorong) yang ditugaskan untuk pengawasan itu. Bila terjadi pelanggaran, akibatnya membawa risiko, besar, penganiayaan, malahan mungkin juga pembunuhan dengan tuduhan mata mata musuh.

Situasi siap-siaga terus dikembangkan ke tengah masyarakat Latihan-latihan baris berbaris perang-perangan, dapur umum kerja bakti (**kingrohoshi**) mengikat hidup sehari hari. Tiap malam diadakan jam malam. Lampu-lampu dimatikan baik di jalan jalan maupun di tiap rumah. Yang berani melanggar akan mendapat hukuman sekurang-kurangnya tempeleng. Penjagaan kampung-

kampung dilakukan oleh semacam ronda kampung. Kode-kode dihafalkan, bila salah dapat dijadikan sasaran tembakan atau sekurang-kurangnya ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan.

Dalam situasi seperti itu, setiap bentuk perlawanan tidak mungkin diorganisasikan secara terbuka. Organisasi-organisasi legal hanya mungkin berdiri untuk kepentingan Jepang seperti juga organisasi-organisasi agama, Muhammadiyah, Al Jami'atul Washliyah, Al-Itihadiyah yang membangun sekolah-sekolah, begitu pula sekolah-sekolah gereja diperkenankan bergerak dengan pedoman pedoman dari Jepang. Lagu-lagu Jepang, bahasa Jepang, **Taiso** menjadi pelajaran di sekolah-sekolah itu. Begitu pula organisasi-organisasi ini bertugas menggerakkan kerja bakti dapur umum dan latihan-latihan pertahanan.

Pada umumnya orang-orang patuh kepada Jepang, patuh disertai rasa takut yang amat sangat. Namun rasa melawan tidak dapat disembunyikan Caci-maki sindiran sindiran meluas di kalangan penduduk. Sementara itu tersiar kabar ceritera tentang cidera yang dialami Jepang karena sikapnya yang kasar. Sering disiarkan, bahwa seorang Jepang mati tergeletak karena menempeleng seorang tua yang telah jompo. Di dalam ceritera itu dikatakan orang tua itu ialah orang yang saleh, berkat kesalehannya, maka orang yang ditempeleng Jepang itu tidak merasa sakit. Sebaliknya Jepang itu kesakitan, bahkan sampai mati. Ceritera semacam itu banyak terdengar di masa Jepang dan orang-orang senang mendengar ceritera semacam itu. Diceriterakan pula bahwa tuan Syekh Baringin ditangkap Jepang karena tidak mau bekerja bakti (**kingro-hoshi**). Sepasukan Jepang mengendarai beberapa truk mengepung tempat tinggal tuan syekh itu, tetapi tuan syekh tenang-tenang saja beribadat di mesjid. Orang-orang yang sedang salat di mesjid itu terlihat oleh Jepang laksana lebah yang mau menyengat, sehingga Jepang itu lari ketakutan. Demikian ceritera-ceritera rakyat yang mengasyikkan penduduk waktu itu.

Terlepas dari benar atau tidaknya kejadian sebenarnya dari ceritera ceritera itu, namun hal itu menggambarkan betapa rasa agama telah menjadi saluran perlawanan rakyat. Mitos kesaktian orang-orang alim dan saleh telah menjadi semangat untuk tetap berdiri dan hidup, menunggu saat untuk membalas kekejaman Jepang. Demikianlah, ketika Jepang kalah maka dari segala pelosok orang menyerukan Allahu Akbar dan menyerang Jepang di tangsi-tangsi militer untuk merebut senjata

Dari bentuk perlawanan semacam itu, ternyata bahwa secara fisik orang tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap Jepang yang keras pembawaannya. Dalam kelemahan seperti itu, orang menaruh harapan-harapan kepada pertolongan Tuhan, agar menghukum Jepang yang telah memperkosa hak-hak bangsa Indonesia. Menjelang Jepang kalah, maka organisasi-organisasi agama itu berfungsi sebagai pembentukan kader-kader pejuang yang kelak mengambil bahagian dalam perang kemerdekaan sejak tahun 1945.

7.4.3. Kehidupan Intelektual.

Pada masa pendudukan Jepang terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menduduki posisi-posisi penting terutama di lapangan pemerintahan, militer, pendidikan, kesenian, perkantoran semakin luas. Orang-orang Indonesia dipergunakan Jepang untuk memangku pekerjaan-pekerjaan membantu kekuasaan Jepang dalam mengambil over pemerintahan kolonial Belanda. Banyak jabatan dalam pemerintahan dan badan badan semi pemerintah diserahkan kepada orang-orang Indonesia.

Kaum intelek, yaitu orang-orang Indonesia yang telah berpendidikan semakin dekat dengan rakyat, tidak seperti di zaman Belanda. Pada zaman Belanda mereka menjadi lapisan yang terpisah dengan ciri-ciri jiwa kolonial, berbahasa Belanda, hidup seperti orang Belanda, tetapi di zaman Jepang mereka memakai bahasa Indonesia, hidup di tengah penderitaan rakyat dan semakin berjiwa kerakyatan. Sebaliknya rakyat jelata yang selama ini hidup pada lapisan bawah, merasa diri rendah tidak berharga maka pada zaman Jepang melihat persamaan, karena kaum bangsawan pun di zaman Jepang itu hidupnya juga susah. Oleh karena kesulitan-kesulitan hidup, dan perlakuan orang-orang Jepang yang sengaja merendahkan golongan bangsawan, menyebabkan orang-orang kebanyakan mulai merasakan persamaan derajat dengan kaum bangsawan itu.

Cara berpikir di zaman Jepang adalah praktis, maksudnya orang tidak berpikir tentang hal yang muluk-muluk dan berusaha memecahkan persoalan-persoalan penting secara cepat terutama mengatasi keperluan hidup sehari-hari. Cara berpikir tradisional yang banyak terikat kepada tata cara adat istiadat kedudukan sosial pendidikan, maka pada zaman Jepang mulai ditinggalkan orang. Hal itu karena desakan hidup, kesulitan-kesulitan yang dialami, menyebabkan orang melaksanakan sesuatu secara sederhana. Upacara-upacara perkawinan, kematian, perayaan-perayaan hari

besar yang pada zaman dulu banyak menjadi perhatian orang dengan kemewahan dan syarat syarat keuangan yang besar, pada zaman Jepang dilakukan secara sederhana sesuai dengan kehidupan di zaman itu. Kaum intelek yang bekerja sama dengan Jepang, tidak selamanya mengikuti segala perintah Jepang itu dengan tulus. Mereka menyadari bahwa kedudukan Jepang di negeri ini sebagai bangsa Penjajah. Oleh sebab itu mereka selalu berusaha mengikuti perkembangan politik internasional, terutama perkembangan Perang Asia Timur Raya. Informasi yang mereka dapati secara diam-diam didiskusikan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat bagi bangsa Indonesia.

Rasa kebangsaan mencapai puncaknya pada zaman Jepang itu. Jika pada zaman Belanda para pemimpin lahir dari golongan bangsawan, golongan terpelajar, tetapi pada zaman Jepang kepemimpinan semakin meluas. Orang-orang yang selama ini tidak terhitung sebagai pemimpin, misalnya orang-orang kebanyakan, kaum agama, pemuda-pemuda, pada zaman Jepang mereka mendapat kesempatan untuk dilatih sebagai pimpinan. Latihan latihan militer yang diperoleh pemuda melahirkan pimpinan-pimpinan yang memegang peranan penting dalam Perang Kemerdekaan. Ulama-ulama yang selama zaman penjajahan Belanda dihitungkan sebagai kaum kolot yang ketinggalan zaman pada zaman Jepang mendapat kesempatan untuk bekerjasama dengan pengikut yang lebih luas. Mereka menggerakkan massa rakyat dalam perjuangan melalui pendidikan, khotbah-khotbah serta fatwa-fatwa mereka untuk membangkitkan semangat perlawanan rakyat pada masa revolusi.

Demikianlah ketika Jepang kalah dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, maka kaum intelektual, bersama seluruh lapisan masyarakat, ulama, pemuda, buruh, tani, wanita, membentuk barisan, menyusun pemerintah RI, dan berjuang mempertahankan kemerdekaan.

7.5. Hubungan ke Luar.

7.5.1. Terbuka.

Pada masa pendudukan Jepang bangsa Indonesia tertutup dari dunia luar. Perkembangan politik dan peperangan tidak diketahui oleh bangsa kita. Radio yang ada pada penduduk disegel atau disita. Radio yang ada pada badan-badan pemerintahan atau lembaga-lembaga hanya diperkenankan mengikuti siaran siaran radio Jepang. Siaran-siaran radio di dalam negeri bertujuan untuk pro-

paganda Jepang. Demikianlah studio radio Medan di zaman Jepang yang disebut **Medan Hosokyo** berfungsi sebagai penanam semangat Nippon kepada bangsa Indonesia.

Surat-surat kabar dibreidel seluruhnya. Tidak boleh ada penerbitan di luar penerbitan resmi yang dilakukan oleh tentara Jepang. Bagi daerah ini hanya tersedia satu surat kabar yang terbit di Medan, yaitu **Sumatora Shinbun**. Mulanya surat kabar ini terbit di Medan dan Bukittinggi. Kemudian di Medan berubah menjadi **Kita Sumatora Shinbun**. Baik radio maupun surat kabar hanya memberitahukan kemenangan-kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Perjalanan ke luar negeri terputus sama sekali, kecuali pengiriman **romusha** ke Birma, Malaya, dan Thailand. Kemudian banyak pula pemuda yang dikirim belajar ke Syoonan (Singapura) dan ke Jepang. Mereka dididik dalam berbagai hal, terutama dalam lapangan militer dan pemerintahan. Mereka ini tidak dapat memberi keterangan apa-apa tentang dunia luar, sebab kedudukan mereka di negeri ini sekembali dari luar negeri selalu dimata-matai dan ditempatkan di luar daerahnya semula.

7.5.2. Di Bawah Tanah.

Kaum pergerakan tidak mungkin hidup di alam kegelapan. Mereka membentuk gerakan Anti Fasis yang dipimpin oleh Saleh Umar dan kawan-kawannya. Gerakan itu tidak bersifat massa, melainkan kelompok-kelompok kecil. Tugas pokok mereka terbatas pada usaha mengenal dunia luar dengan cara mendengarkan siaran-siaran luar negeri melalui radio secara sembunyi sembunyi. Tentu saja pekerjaan itu sangat berbahaya, oleh sebab itu orang-orang yang mengetahuinyapun sangat dibatasi. Kemudian usaha selanjutnya menyampaikan informasi kepada teman-teman sepaham. Penyampaian berita-berita yang benar dari radio luar negeri itu dilakukan secara rahasia pula, sebab di mana-mana mata-mata Jepang dapat membahayakan mereka.

Hubungan antara Sumatera Timur dengan Semenanjung Melaka banyak dilakukan secara diam-diam. Ada kalanya dengan cara menyamar sebagai nelayan, atau dengan motorbot mencoba menerobos penjagaan Jepang. Mereka membawa barang-barang dagangan dari Sumatera Utara seperti karet, kopi, dan sebagainya, dan dari Malaya membawa beberapa jenis barang keperluan sehari-hari terutama pakaian dan makanan. Hubungan seperti itu banyak

dilakukan di beberapa kota kecil di pesisir timur Sumatera seperti Tanjungpura, Bandar Khalifah, Teluk Nibung, dan Labuhan Bilik. Banyak sedikit mereka mengetahui juga perkembangan dunia luar, tetapi pengaruhnya tidak seberapa, karena umumnya mereka ini menitik beratkan usahanya pada perdagangan.

DAFTAR – BACAAN

- Damste, O, *Nederland Indonesia Dalam Abad ke 20*, Noordhoff—Kolff, Batavia, c, 1949.
- Hamka, 1908—, *Kenang-Kenangan Hidup*, Jilid I, II, Bulan Bintang, Jakarta.
- Joyodisuryo, Akhmad Subarjo, *Peranan Ide-Ide Dalam Gerakan Kemerdekaan Indonesia*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1975.
- Kansil, Drs. C.S.T, Drs. Yulianto S.A., *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Cet ke 2, Erlangga, Jakarta, 1972.
- Gunseinkanbu, *Boekoe Pengoempulan Oendang-Oendang*, Kakumin Tosyokyuku (B.P). Djakarta 2604.
- Panitia Almanak Nasional Sumatra, *Almanak Sumatera*, Medan, 1969.
- Panitia Besar Peringatan, *Peringatan 30 Tahun Muhammadiyah di Daerah Sumatera Timur*, Luhur, Medan, 1957.
- Pengurus Besar Al Jami'atul Washliyah, *Al Jami'atul Washliyah Setengah Abad*, Medan, 1956.
- Pustaka Al Washliyah, *21 Tahun Al Djami'atul Washliyah*, Pustaka Al Washliyah, Medan 1951.
-

BAB VIII ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 1975)

8.1. Keadaan Pemerintahan Dan Kenegaraan.

8.1.1. Tumbuhnya Pemerintahan RI Di Sumatera Utara

Sepuluh hari sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, maka pada tanggal 27 Agustus 1945 sampai lah di Medan Mr. Teuku Mohammad Hasan dan Dr. M Amir dari Jakarta setelah menghadiri sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedua orang ini membawa instruksi dari Jakarta untuk menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Kemerdekaan Indonesia di Sumatera.

Sesuai dengan penjelasan Presiden tanggal 23 Agustus 1945 untuk membentuk Komite Nasional di daerah-daerah, maka ke dua orang ini mengundang pemuka-pemuka masyarakat di kota Medan untuk membentuk Komite Nasional itu. Usaha tersebut mengalami kegagalan, karena nampaknya pemuka pemuka yang diundang masih ragu ragu. Mereka melihat bahwa Jepang masih berkuasa, wakil tentara Sekutu telah tiba di Medan, malahan di kalangan orang-orang Indonesia telah ada satu Panitia yang disebut. "Comite van Ontvangst" yang mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima kedatangan Belanda. Komite ini diorganisir oleh orang-orang "Persatuan Sumatera Timur" (PST) dan "Siap Siaga" (SS) yang pada zaman Jepang bergerak di bawah tanah.

Sementara itu lapisan masyarakat banyak terutama para pemuda merasa gelisah, tidak sabar menunggu realisasi Proklamasi Kemerdekaan di daerah ini. Kegelisahan itu sangat beralasan, karena kedua pemimpin yang datang dari pusat sebegitu jauh baru berhasil membentuk "Panitia Kebangsaan" pada tanggal 17 September 1945 yang berusaha di lapangan sosial.

Gerak-gerik orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang, yaitu bekas Knil dan orang Sipilnyadi Medan semakin mengkhawatirkan pihak pemuda. Mereka telah membebaskan diri dan berhimpun di Grand Hotel, Hotel de Boer dan sebuah pension di Jalan Bali, Medan. Mereka diperkuat oleh orang-orang Belanda yang datang

ke Medan yang menyamar sebagai Palang Merah Internasional. Orang-orang Belanda itu membentuk suatu badan yang disebut **"Voedings Middelen Fonds"** (VMF) yang bertugas mengumpulkan bahan makanan untuk orang-orang Belanda. Jadi kelihatannya kegiatan-kegiatan antara PST, SS, dan VMF sejalan dan semakin terarah kepada pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia.

Didorong oleh keinginan bertanggung jawab terhadap pembangunan Indonesia merdeka, maka para pemuda Indonesia di Medan pada tanggal 23 September 1945 mengadakan pertemuan di Fuji Dori No. 6 (Jalan Imam Bonjol, sekarang Hotel Dirga Surya), menyusun **"Barisan Pemuda Indonesia"** untuk menegakkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan pertaruhan segenap jiwa dan raga. Barisan ini dipimpin oleh A. Tahir sebagai Ketua I, Abdul Malik Munir Ketua II dan M.K. Jusni sebagai Sekretaris Umum.

Gedung tempat pertemuan itu adalah bekas asrama pemuda-pemuda **Seinen Ren Seisyo** (Sekolah Lanjutan Jepang) dan di gedung itulah pada tanggal 23 September 1945 berkumpul pemuda-pemuda dari **Seinen Zyuku**, Talapeta, bekas **Hei Ho** dan **Gyu Gun** dan pemuda-pemuda dari Pendidikan Nasional Indonesia (PNI), Perpindo dan Indonesia Muda yang semasa Jepang dibekukan gerakannya.

Pertemuan di Fuji Dori yang dihadiri 52 orang pemuda itu dilanjutkan dengan pertemuan di Jalan Amplas, yaitu di sekolah Taman Siswa antara pemuda-pemuda dengan pemuka-pemuka masyarakat yang menimbulkan ikrar Proklamasi Kemerdekaan dan menaikkan Sang Saka Merah Putih. Sejak itu maka berdirilah barisan-barisan pemuda seperti **"Kebaktian"** yang bermarkas di Jalan Arjuna, **"Barisan Keamanan Rakyat"** yang bermarkas di Jalan Kanton.

Secara resmi pemerintah Republik Indonesia di Sumatera diumumkan oleh Gubernur Teuku Mohammad Hassan pada tanggal 3 Oktober 1945. Peresmian itu dijalankan dengan pengangkatan residen-residen se Sumatera dan Staf Gubernur dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Sehari sesudah itu, yaitu pada tanggal 4 Oktober 1945, setelah mengatasi beberapa halangan dari pihak Jepang berlangsunglah pengibaran bendera Merah Putih di lapangan Esplanade (lapangan Merdeka sekarang) Medan. Pengibaran itu diikuti oleh instansi-instansi pemerintahan yang baru direbut dari pihak Jepang. Kebe-

ranian merebut kekuasaan itu disandarkan pula kepada situasi kota Medan yang telah diliputi situasi kemerdekaan yang tergambar pada pawai menyambut kemerdekaan yang dilaksanakan di kota Medan pada tanggal 6 Oktober 1945.

Demikianlah pemerintahan kota Medan direbut dan Wali Kota Mr. Luat Siregar memindahkan pusat pemerintahan kota ke Jalan Istana No. 15 yang sejak itu menjadi pusat kegiatan perjuangan seluruh kota Medan. Dewasa ini di atas persil tanah Jalan Istana 15 telah dibangun Gedung Juang 45.

Pembentukan dan pertumbuhan pemerintah Negara Republik Indonesia di daerah-daerah se Sumatera Utara berlangsung melalui berbagai perjuangan, seperti di Sumatera Timur, Tapanuli, dan Nias.

Di Sumatera Timur pada mulanya diangkat Mr. Luat Siregar sebagai Residen, tetapi di dalam keresidenan Sumatera Timur itu terdapat banyak kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan. Dengan demikian terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan raja dan sultan memerintah secara otokrat sedangkan pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan sistem demokrasi.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka pada bulan Januari 1946 diadakan rapat antara Komite Nasional Indonesia dengan Gubernur Sumatera bersama sama dengan sultan-sultan dan raja-raja yang dihadiri juga oleh residen Sumatera Timur waktu itu yaitu T. Hafaz dan Mr. Luat Siregar memangku jabatan sebagai residen diperbantukan pada Gubernur Sumatera.

Rapat itu memutuskan supaya dalam tempo yang singkat sultan-sultan dan raja-raja mengubah cara pemerintahannya dari otokrasi menjadi demokrasi. Raja-raja dan sultan sultan berjanji akan menyesuaikan sistem pemerintahannya dengan alam demokrasi, tetapi secara diam-diam terdapat kesan, bahwa raja-raja dan sultan-sultan itu berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan menyusun kekuatan bersenjata dan organisasi-organisasi pada kerajaan-kerajaan itu, antara lain di Deli disebut PADI (Perkumpulan Anak Deli Islam). Di kerajaan-kerajaan lain seperti Langkat Serdang, Asahan dibentuk juga kekuatan-kekuatan bersenjata untuk melindungi raja.

Pada beberapa tempat rakyat mulai mengambil tindakan terhadap raja. Dalam pada itu untuk mengendalikan situasi dibentuk Markas Agung yang merupakan kesatuan komando yang di dalamnya terdapat unsur unsur KNI, Pemerintah dan Tentara. Pada tang-

gal 3 masuk 4 Maret 1946 berlangsunglah pergolakan di Sumatera Timur terhadap kekuasaan sultan sultan dan raja raja. Pergolakan ini melalui organisasi-organisasi rakyat dan pemuda sesuai dengan kekuatan pengaruhnya setiap tempat, misalnya di Asahan terutama diserahkan kepada Pesindo, untuk Tanah Karo diserahkan kepada Pesindo, Langkat kepada Pesindo-PKI PNI Serdang kepada Pesindo dan PNI, Pesindo dan Masyumi.

Pada waktu itu Gubernur Sumatera Mr Teuku Mohammad Hasan sedang berada di luar Sumatera Timur mengadakan perjalanan inspeksi ke daerah-daerah di Sumatera dan oleh Wakil Gubernur Dr. M. Amir diumumkan, bahwa sejak tanggal 13 Maret 1946 pemerintahan sipil di Sumatera Timur dibubarkan dan sejak saat itu di seluruh Sumatera Timur dijalankan pemerintahan militer.

Pemerintahan sipil di Sumatera Timur diatur kembali dengan mengangkat Mr. Luat Siregar Residen diperbantukan pada Gubernur Sumatera sebagai pasifikator. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1946 pemerintahan sipil dapat tersusun kembali di Sumatera Timur.

Penyusunan pemerintah Republik Indonesia di Tapanuli dimulai di Tarutung, sebagai ibu kota keresidenan Tapanuli. Pada tanggal 8 September 1945 terbentuk sebuah badan di Tapanuli Selatan, yaitu di Padang Sidempuan yang diketuai oleh Raja Junjungan. Panitia mendapat mandat dari rakyat Tapanuli Selatan untuk membentuk pemerintah Republik Indonesia. Panitia itu berpendapat bahwa penyusunan KNI sebaiknya dilakukan di Tarutung, sebab kota itu sebagai Ibu Kota Keresidenan Tapanuli dan di kota itu pula berkedudukan pemimpin pemimpin seperti Dr. F. Lumban Tobing, Abdul Hakim, dan Sutan Naga.

Sementara itu Hamzar Lubis diutus ke Bukittinggi untuk menjumpai pemimpin-pemimpin guna memperoleh keterangan mengenai Proklamasi. Beliau kembali dengan membawa teks proklamasi dan Undang-Undang Dasar.

Sementara itu, di waktu Jepang mengumumkan kekalahannya di Tarutung maka di kota itu dibentuk Badan Keselamatan Rakyat (BKR). Pemimpin-pemimpinnya antara lain Dr. F. Lumban Tobing, Sutan Naga, Abdul Hakim, Mr Rufenus Lumbantobing, Mr. H. Silitonga dan Dr. Luhut Lumbantobing. Badan itu pada mulanya bertugas menjual barang-barang keperluan masyarakat yang diambil dari peninggalan Jepang. Untuk memperluas gerak BKR, maka cabang-cabang **Gyo Hoko Kai** yang di masa Jepang

dibentuk untuk membantu perang Asia Timur Raya diubah menjadi cabang-cabang BKR.

Rombongan Raja Junjungan, Kari Usman dan Fakhrudin Nasution berangkat ke Tarutung pada tanggal 12 September 1945 dan pada tanggal 14 September 1945 berlaku demonstrasi pemuda di Tarutung ke kantor Tyokan untuk menuntut agar pemerintahan diserahkan kepada RI.

Hasil pertemuan antara Raja Junjungan yang membawa mandat rakyat Tapanuli Selatan dengan pengurus BKR di Tarutung memutuskan menunjuk Abdul Hakim sebagai formatur KNI. Pembentukan ini berjalan dengan lancar, sebab badan badan yang sudah ada, yaitu BKR dibubarkan dan diubah menjadi KNI.

Pada tanggal 3 Oktober 1945 diterima pengangkatan Residen Tapanuli, yaitu Dr. F. Lumbantobing dan dengan demikian pula maka KNI secara resmi pada hari itu mengumumkan proklamasi di tiap kewedanaan melalui rapat-rapat umum. Dalam rapat-rapat umum itu dengan resmi pula dikibarkan bendera Merah Putih dan penduduk menyambutnya dengan rasa gembira.

Selanjutnya dilakukanlah pembentukan KNI di tiap wilayah atau kecamatan dan para pemuda bergabung dalam PRI (Pemuda Republik Indonesia). Untuk membiayai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dan perjuangan, maka dibentuklah Fonds Kemerdekaan pada tanggal 15 Oktober 1945. Puncak kegiatan dalam menyambut Proklamasi Kemerdekaan itu dilakukan dalam suatu rapat umum di Tarutung yang dibanjiri oleh penduduk dari segala pelosok dan dalam rapat umum itu rakyat mengucapkan ikrar setia kepada pemerintah Republik Indonesia. Rapat umum itu diadakan dalam rangka hari Proklamasi telah berumur tiga bulan, yaitu pada tanggal 17 Oktober 1945.

Demikianlah sampai bulan Januari 1946 pemerintahan di Tapanuli telah tersusun dengan baik. Masalah yang penting di daerah ini ialah masalah kedudukan raja-raja dan kepala-kepala Kuria atau kepala Luhak atau Negeri. Kedudukan mereka yang menurut tradisional turun temurun mulai mendapat sorotan rakyat, terutama akibat pengaruh revolusi sosial di Sumatera Timur. Walaupun demikian tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan pertumpahan darah, karena raja-raja di daerah Tapanuli bersedia dengan rela mengundurkan diri dan kepala kepala pemerintahan desa yang baru dipilih secara demokratis. Aturan-aturan pemilihan itu dikeluarkan oleh Residen Tapanuli dengan surat ketetapan No 274 tertanggal

14 Maret 1946 dan diperkuat lagi 11 Januari 1947 No 1/DPT yang isinya antara lain memberi hak memilih bagi warga negara RI yang telah dewasa baik laki laki maupun perempuan.

Suasana pembentukan pemerintahan Republik Indonesia di pulau Nias yang jauh terpencil dari daratan pulau Sumatera dimulai dengan jatuhnya surat-surat selebaran yang ditanda tangani Van Mook pada tanggal 21 Agustus 1945. Isi selebaran itu menyatakan, bahwa Jepang telah kalah dengan Sekutu dan suatu pemerintahan baru segera akan datang untuk menggantikannya. Pada mulanya berita-berita itu dibantah oleh Jepang, tetapi pada tanggal 30 Agustus 1945 pembesar Jepang mengumumkan, bahwa Jepang meletakkan senjata dan pegawai sipil Jepang mulai meninggalkan Nias. Pemerintahan diserahkan kepada putera Nias D Marunduri yang jabatannya semasa Jepang ialah sebagai **Gun Tyo**.

Pada awal Oktober mulailah tersiar kabar-kabar tentang kemerdekaan dan secara resmi pada tanggal 6 Oktober 1945 Residen Tapanuli mengirim kawat menyatakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. D. Marunduri diangkat menjadi kepala **Afdeeling** dengan pangkat Asisten Residen. Segera setelah diterima kawat itu, maka D. Marunduri membalasnya dan menyatakan setia kepada pemerintah Republik Indonesia atas nama rakyat Nias.

Selanjutnya maka pada tanggal 8 Oktober 1945 diadakanlah upacara menyambut proklamasi secara resmi di Gunung Sitoli, seterusnya penyusunan pemerintahan yang stabil diikuti dengan pembentukan KNI pada tanggal 13 Oktober 1945. Pengurus KNI itu diketuai oleh P.R. Telambanua sebagai Ketua I, R.K. Prawirodinto sebagai Ketua II dan S.L. Marham sebagai Sekretaris I.

Dalam pada itu partai-partai politik yang dibekukan semasa pemerintahan Jepang muncul kembali, seperti PNI, MIT (Majelis Islam Tinggi), Parki (kelak menjadi Parkindo), Parsi (kelak menjadi PSI), PRI (kelak menjadi Pesindo) Petwani (kelak menjadi Perwari), dan lain-lain.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka KNI pada setiap rapat-rapatnya mengikut sertakan ketua ketua partai politik tersebut.

Selanjutnya di bidang keamanan telah dibentuk BKR yang kelak menjadi TKR dan seterusnya menjadi TRI

Pada pertengahan Nopember 1945 seorang Jepang yang bernama Suzuki datang kembali ke Nias dan meminta agar pemerintahan dikembalikan kepada Jepang dan kelak ia akan menyerahkannya

kepada pemerintahan di bawah Sukarno-Hatta. Permintaannya itu dengan tegas ditolak dan ia diusir dari Nias. Pada akhir Nopember 1945 KNI telah selesai dibentuk pada tiap kecamatan, seterusnya dibentuk pula KNI pada setiap **Ori** (Kampung).

Pada tanggal 17 April 1946 di Bukittinggi dilantik Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera yang terdiri dari 100 anggota. Keresidenan Sumatera Timur mengirim 20 orang wakil, Tapanuli mengirim 11 orang wakil dan Aceh 10 orang wakil. Dalam sidang ini Dewan memutuskan, bahwa Propinsi Sumatera dibagi atas tiga sub-Propinsi, yaitu sub-Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur dan keresidenan Tapanuli, Sub-Propinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari Riau, Jambi dan Sumatera Barat dan Sub-Propinsi Sumatera Selatan. Tiap-tiap sub-Propinsi dikepalai oleh Gubernur Muda.

Pada waktu agresi Belanda pertama tanggal 21 Juli 1947, Wakil Presiden Moh Hatta berada di Sumatera dan pada tanggal 23 Juli 1947 Wakil Presiden mengadakan rapat umum di Tebing Tinggi. Perjalanan Wakil Presiden menuju Bukittinggi penuh dengan situasi pertempuran dan serangan-serangan Belanda di Sumatera menyebabkan Wakil Presiden mengeluarkan keputusan penting mengenai pembagian daerah dan status daerah di Sumatera Utara sebagai berikut :

Dengan surat ketetapan Wakil Presiden tanggal 26 Agustus 1947 yang dikeluarkan di Bukittinggi, maka daerah daerah keresidenan Aceh, kabupaten Langkat, kabupaten Tanah Karo, dijadikan satu daerah pemerintahan militer dengan Tengku Mohammad Daud Breueh sebagai Gubernur Militer. Selanjutnya daerah daerah keresidenan Tapanuli, kabupaten Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu menjadi sebuah daerah pemerintahan militer dengan Dr Gindo Siregar sebagai Gubernur Militer. Masing masing Gubernur Militer itu diangkat dengan pangkat Mayor Jenderal.

Selanjutnya menurut U.U. No. 10 tahun 1948 yang dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 15 April 1948 menetapkan, bahwa pulau Sumatera dibagi atas tiga propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Propinsi Sumatera Utara meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Bentuk pemerintah daerah pada waktu itu ialah terdiri dari badan legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi yang diketuai oleh Gubernur dan Badan Eksekutif yang terdiri dari lima anggota yang dipilih oleh Dewan dan diketuai oleh Gubernur Komisariat

Pemerintah Pusat menyelenggarakan segala sesuatu pada masa peralihan dan dipangku oleh Gubernur Sumatera Mr. Tengku Moh. Hassan yang berkedudukan di Bukittinggi. Sebagai Gubernur Sumatera Utara diangkat Mr. S.M. Amin yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Kutaraja pada tanggal 19 Juni 1948.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan dalam UU. No. 10 tahun 1948 itu, maka dilakukanlah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara yang pertama di Tapak Tuan pada tanggal 13 Desember 1948. Dewan itu terdiri atas 45 orang anggota dan yang berhasil menghadiri sidang itu ialah 29 orang yang terdiri dari unsur-unsur berbagai golongan, seperti Masyumi PSII, PNI, Pesindo, Parkindo, Sobsi, BTI, PKI, dan non partai. Dalam pemilihan-pemilihan yang dilakukan untuk anggota Badan Pekerja DPRD terjadi semacam ketegangan antara anggota anggota dari FDR yang meliputi PKI, Partai Sosialis, Sobsi BTI dan Pesindo dengan golongan lain yang terdiri dari Masyumi, PNI, PSII dan Parkindo. Akhirnya anggota-anggota FDR meninggalkan sidang dan sidang dilanjutkan dengan 21 anggota dan berhasil membentuk Badan Pekerja yang terdiri dari Amelsz, M. Nur Ibrahimy, M. Junan Nasution, Melanthon Siregar dan Jahja Siregar.

Sementara itu pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer kedua dan dalam agresi kedua ini Presiden Republik Indonesia memberi mandat kepada Mr. Safrudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Untuk menghadapi situasi pada waktu itu, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengangkat Mr S M Amin, Gubernur Sumatera Utara menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, selanjutnya kekuasaan sipil dan militer dipusatkan pada Gubernur Militer. Untuk daerah Tapanuli dan Sumatera Timur bahagian selatan kekuasaan itu dipegang oleh Dr. F. Lumbantobing selaku Gubernur Militer Aceh, Kabupaten Langkat, Tanah Karo kekuasaan sipil dan militer dipegang oleh Tengku Mohammad Daud Breueh sebagai Gubernur Militer.

Sesudah KMB dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat, maka Aceh menjelma menjadi satu Propinsi pada 1 Januari 1950 melalui peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/Wkpm tahun 1948. Selaku Gubernur ialah Tengku M Daud Breueh bekas Gubernur Militer Sejak 1 Februari 1950 melalui peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 17 Desem-

ber 1949 No. 9/Des/Wkpm maka Tapanuli dan Sumatera Timur menjadi satu propinsi dengan Gubernur Dr. F. Lumbantobing bekas Gubernur Militer. Propinsi ini disebut Propinsi Tapanuli/Sumatera Timur.

8.1.2. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan.

Segera setelah proklamasi diketahui daerah-daerah di Sumatera Utara, maka para pemuda tampil membentuk kekuatan bersenjata. Mereka itu dapat kita bagi atas dua bahagian, yaitu bekas **Heiho**, **Gyugun**, **Tokubetsyu**, **Seinen Renseisyo**, **Talapeta**, **Seinendan**, **Keibodan**, dan lain-lain. Mereka inilah yang menjadi inti menjadi kekuatan bersenjata di kalangan pemuda, sebab mereka telah mempunyai pengalaman cukup, unsur kedua ialah yang belum pernah menerima latihan dari kalangan militer, tetapi mempunyai semangat yang cukup tinggi dan merasa bertanggung jawab terhadap Nusa dan Bangsa. Mereka itu dari kalangan guru, pegawai, buruh pedagang ataupun petani, baik laki-laki maupun perempuan.

Pada waktu di kota Medan terdapat situasi keseimbangan menghadapi Proklamasi Kemerdekaan, maka para pemuda dari berbagai kalangan berkumpul di Fuji Dori 6 menghimpun kekuatan dan membentuk **Barisan Pemuda Indonesia**, atau **BPI**. Pertemuan yang penting itu berlangsung pada tanggal 23 September 1945. Kemudian para pemuda mengadakan upacara pengibaran bendera Merah Putih pada tanggal 30 September 1945 bersama sama dengan pemimpin-pemimpin rakyat yang militan di gedung Taman Siswa jalan Ampelas Medan.

Kedua kejadian itu sangat penting artinya bagi pertumbuhan kekuasaan Republik di daerah ini, karena Teuku Mohammad Hassan telah sekian lama berada di Medan sekembali dari Jakarta namun belum berhasil menghimpun kekuatan. Demikianlah setelah peristiwa penaikan bendera di jalan Ampelas itu, maka pada tanggal 3 Oktober Mr. Teuku Mohammad Hassan mengumumkan berdirinya pemerintah Republik Indonesia di Sumatera. Besoknya tanggal 4 Oktober kekuasaan pemerintah Republik telah berjalan di Sumatera dan bendera Merah Putih telah berkibar di tempat penting di kota Medan, dimulai dengan upacara pengibaran bendera Merah Putih di lapangan Esplanade Medan. Upacara itu pun sungguh penting artinya, karena memberi corak kepada wajah

kota Medan yang diliputi kibaran Merah Putih. Lebih nyata lagi, pawai pemuda tanggal 6 Oktober 1945 yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat benar benar memberikan keyakinan penuh kepada orang-orang Republik, sebaliknya menyudutkan orang-orang yang pro-Belanda di kota Medan.

Sekitar bulan Oktober sampai Desember 1945 di Sumatera Utara diliputi situasi gejolak perjuangan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dan merampas senjata Jepang. Situasi ini semakin panas karena pihak Belanda yaitu orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang yang telah ke luar dari kamp interniran mulai melakukan berbagai intimidasi. Akibat dari situasi itu ialah terjadinya pertumpahan darah di berbagai tempat baik menghadapi Jepang maupun menghadapi Nica. Beberapa peristiwa penting sehubungan dengan itu ialah :

- 13 Oktober 1945 peristiwa Jalan Bali Medan.
- 15 Oktober 1945 peristiwa Siantar Hotel di Siantar.
- 25 November 1945 peristiwa Matahari Hotel di Berastagi.
- 13 Desember 1945 peristiwa Tebing Tinggi

Dalam peristiwa-peristiwa di atas terjadi bentrokan-bentrokan antara para pemuda dengan pihak Belanda yang menimbulkan korban, sedang dalam peristiwa Tebing Tinggi Jepang yang diberi wewenang menjaga keamanan oleh Sekutu telah menembaki dan menangkap pemuda-pemuda di kota Tebing Tinggi Deli dan terjadilah pembunuhan besar-besaran.

Sampai kepada agresi Belanda pertama 21 Juli 1947 para pemuda berhadapan dengan pasukan-pasukan Inggris yang sebagian besar terdiri dari Gurkha atas nama Sekutu dan kemudian dengan pasukan-pasukan Belanda di sekitar kota Medan. Di luar kota Medan sampai agresi I itu Inggris dan Nica belum masuk tetapi pemuda berhadapan dengan Jepang.

Pertempuran-pertempuran sekitar kota Medan demikian hebatnya sehingga terbentuklah front sekitar Medan yang diperkuat oleh para pemuda yang datang dari Tapanuli dan Aceh.

Pertempuran-pertempuran melawan Sekutu (Inggris) di sekitar Medan dimulai dengan provokasi Inggris yang dikeluarkan oleh komando Sekutu Brig. Jend. T.E.D. Kelley pada tanggal 18 Oktober 45. Dalam pengumumannya itu diperintahkan agar seluruh senjata yang ada di tangan rakyat diserahkan kepada Sekutu. Ultimatum Kelley itu disambut oleh pemuda dengan mobilisasi umum pada tanggal 20 Oktober 1945. TKR bersama dengan las-

kar-laskar dan seluruh penduduk bertekad untuk mempertahankan daerah mereka dari serangan Sekutu.

Para pemimpin yang menonjol pada waktu itu ialah Ahmad Thaher, Nip Zarim, Sarwono, Kayamuddin, Ngamban Surbakti, Zein Hamid, Jacob Lubis, Abdul Razak, Marzuki Lubis, D. Egon Timur Pane, B. Hutajulu dan lain lain. Mereka ini dari kalangan pemuda, sedang dari kalangan orang-orang tua tersebut nama-nama Mr. Teuku Mohammad Hassan, Abdul Xarim M S. Nathar Zainuddin, M. Saleh Umar, Mr. Laut Siregar, Mr. Moh. Jusuf, dan Sugondo Kartoprojo dan lain-lain.

Pertentangan-pertentangan dengan Inggeris di Medan mencapai puncaknya pada tanggal 10 Desember 1945. Pada waktu itu Inggeris menyerang Markas Komando Laskar Medan Area di Deli Tua yang terkenal dengan **Two-Rivers (Trepes)** Serangan itu menyebar ke sekitar Medan dan pertempuran pertempuran antara laskar dengan pasukan Inggeris tidak dapat dielakkan lagi.

Sementara itu orang-orang Nica yang membonceng pada Sekutu mulai melakukan terror di bawah pimpinan R T. Westerling dan van der Plank. Kedua orang ini menggerakkan orang-orang bersenjata yang mereka bayar untuk melakukan teror di sekitar kota Medan. Tujuan gerakan Westerling di Medan itu jelas untuk memperkeruh suasana dan untuk memancing agar pihak Inggeris semakin jauh bertindak terhadap para pemuda yang dianggap sebagai penyebab kekacauan itu. Dengan cara ini Nica berharap agar Medan dapat diamankan untuk diserahkan Sekutu kepada Nica.

Dengan terjadinya teror di kota Medan banyak penduduk yang mengungsi ke luar kota kemudian di kalangan orang-orang Cina dibentuk pasukan-pasukan bersenjata dengan bantuan Inggeris. Pasukan bersenjata orang-orang Cina itulah yang terkenal dengan nama **Poh An Tui**. Kemudian **Poh An Tui** diperalat oleh Nica untuk menekan perjuangan para pemuda di kota Medan.

Di samping TKR yang telah ada, untuk menghadapi serangan musuh, dibentuklah laskar-laskar pemuda di kota Medan dan juga diseluruh Sumatera Utara.

Kemudian dibentuklah Markas Agung yang bertugas mengkoordinasi seluruh perjuangan dan mendampingi Gubernur dalam menegakkan wibawa pemerintah Negara Republik Indonesia.

Adapun laskar-laskar itu adalah kesatuan-kesatuan bersenjata yang berdiri sendiri di bawah organisasi-organisasi politik, misalnya Napindo (Nasional Pelopor Indonesia), Syarikat Nelayan Indonesia.

Barisan Harimau Liar. Hisbullah dari Masyumi, Bintang Merah dari PKI, Barisan Parkindo dari Parkindo, Laskar Buruh dari Partai Buruh Indonesia, Kesatria Pesindo dari Pesindo, Barisan Mujahidin dari PUSA. Di antara laskar laskar ini maka Pesindo (Kesatria Pesindo) dan Napindo adalah yang terkuat, begitu pula Hisbullah dan Mujahidin adalah pasukan-pasukan laskar yang termasuk kuat juga.

Untuk mengatur pertahanan sekitar Medan Area, maka Markas Agung membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area di bawah pimpinan Nip Xarim. Kemudian pertahanan Medan dibagi atas empat sektor pertahanan, yaitu Sektor Medan Barat di bawah pimpinan Abdul Hamid dari Napindo, Sektor Medan Utara di bawah pimpinan Bejo (Napindo), Sektor Medan Timur di bawah pimpinan M. Jacob (Napindo), dan sektor Medan Selatan di bawah pimpinan Maliki (Pesindo). Pada tiap tiap sektor dibentuk dewan pimpinan yang terdiri dari berbagai unsur termasuk unsur tentara. Komando ini dibentuk pada tanggal 10 Agustus 1946 dan pada awal tahun 1947 komando ini berubah menjadi Komando Medan Area.

Sementara itu di front pertempuran Medan Area para pejuang telah berhadapan secara langsung dengan pasukan Belanda Inggeris telah mulai meninggalkan Medan dan Belanda telah mengambil alih tempat-tempat kedudukan Inggeris. Pada tanggal 16 November 1946 Kolonel P. Scholten mengambil alih komando dari tangan Inggeris, dan dengan resmi Brigade Z dibentuk di Medan pada tanggal 20 November 1946 dengan mengambil bekas bekas Knil dan orang-orang Belanda yang dilatih serta pasukan-pasukan Belanda yang menyertai Inggeris.

Sementara para pejuang giat menyusun kekuatan menghadapi Jepang, Inggeris, Belanda dan **Poh An Tui**, maka di pihak lain timbul gerakan rakyat menentang raja raja dan Sultan Sultan di Sumatera Timur, karena mereka dianggap tidak dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru yang bersifat demokratis. Lain dari itu rakyat menganggap, bahwa para raja menginginkan kembalinya kekuasaan Belanda. Dalam revolusi sosial yang pecah di Sumatera Timur pada tanggal 3 Maret 1946 itu, maka peranan pemuda sangat penting. Urusan-urusan untuk menyelesaikan revolusi itu diserahkan kepada organisasi-organisasi pemuda yang kuat di tiap daerah, seperti Napindo, Pesindo, dan sebagainya. Dalam revolusi sosial itu banyak jatuh korban dan banyak pula di antara para raja dan bangsawan itu yang ditawan dan dibawa ke Siantar dan Brastagi.

Dalam rangka menyempurnakan segala kegiatan perjuangan dan menyesuaikan diri dengan UU No. 19 tanggal 19 September 1946 yaitu tentang peraturan laskar dan barisan yang dikeluarkan oleh Dewan pertahanan Negara maka pada tanggal 7 Januari 1947 diresmikanlah berdirinya Biro Perjuangan Daerah Sumatera Timur yang dipimpin oleh Mayor Jamin Gintings dan Burhanuddin. Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area bubar dan sebagai gantinya dibentuk Komando Markas Pertempuran Medan Area yang berkedudukan di Tanjung Morawa. Dengan pembentukan Markas Komando ini diharapkan agar penyaluran perbelanjaan untuk tentara dan laskar rakyat di Medan Area dapat diatur dengan sebaik-baiknya dan yang lebih penting lagi ialah menempatkan laskar Rakyat dan TRI di bawah satu komando.

Kesatuan Komando itu sangat diperlukan, karena di antara para laskar malahan antara laskar TRI sering terjadi salah mengerti dan persaingan untuk memperebutkan daerah pengaruh. Bila satu pasukan berada di satu tempat maka daerah itu dianggapnya sebagai daerah kekuasaannya. Bila pasukan lain datang ke daerah itu lalu dilucuti atau terjadi pertempuran Akhirnya tiap komandan laskar menganggap dirinya sebagai komando tertinggi dan terjadilah perpecahan yang sangat menyedihkan di kalangan laskar itu. Napindo yang kuat itu terpecah delapan yaitu di bawah pimpinan Selamat Ginting (Halilintar), Matheus Sihombing (Pengempur), Timur Pane (Naga Terbang), Liberty Malau (Banteng Marsose), Jakob (Napindo Tembung) Lahiraja Munthe (Napindo Medan Timur) Bejo (Napindo Medan Utara) dan Sakti Lubis (Napindo Kuala Namu). Pesindo pecah dua, yaitu di bawah pimpinan Sarwono dan Aladin Sitompul.

Untuk beberapa waktu terjadi semacam kekacauan di kalangan pertahanan rakyat, kedudukan A. Taher selaku komando terancam, begitu pula kedudukan Gubernur Sumatera T.M. Hasan. Dalam keadaan seperti itu Gubernur Muda Mr. S.M. Amin, Residen Aceh (T.M. Daud Syah), Residen Sumatera Timur (Mr. Abu Bakar Ja ar), Residen Tapanuli (Dr. F. Lumbantobing) mengadakan pertemuan dan mengeluarkan seruan agar mereka bersatu dan waspada terhadap politik pecah belah musuh.

Akhirnya dengan ketetapan Presiden Republik Indonesia maka sejak tanggal 5 Mei 1947 TRI dan laskar Rakyat dilebur menjadi TNI. Dalam peleburan ini pasukan-pasukan TRI dan laskar yang berada di sekitar Medan Area bergabung dengan Divisi X di bawah pimpinan Kolonel Husin Yusuf dan Kolonel H. Sitompul.

Sementara itu Timur Pane telah mengumpulkan pasukan yang kuat dan disebutnya 'Tentara Marsuse' dan menyatakan dirinya sebagai telah masuk TNI dengan pangkat Jenderal Mayor Kemudian beberapa orang diangkat menjadi Kolonel dan kesatuan-kesatuannya diberi pangkat tentara. Namun hal itu dapat diatasi dengan menjadikan pasukan-pasukan Timur Pane itu sebagai pasukan pengempur. Seterusnya proses integrasi antara Barisan Harimau Liar dan Napindo dengan TNI berlangsung dengan lancar pada tanggal 26 Juli 1947. Kedua kesatuan laskar itu digabung menjadi Brigade A Divisi X di bawah pimpinan Selamat Ginting dan Brigade B Divisi X di bawah pimpinan Mayor Bejo.

Pertempuran-pertempuran dengan Belanda di daerah luar Sumatera Timur tidak ada, kecuali usaha kapal perang Belanda mendekati pelabuhan Sibolga pada tanggal 12 Mei 1947. Usaha kapal 'Banckert' itu disambut dengan tembakan tembakan dari darat sehingga gagal untuk mendarat.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan-serangan melanggar garis demarkasi dan dikenal dengan agresi I Dalam tempo yang singkat garis pertahanan Medan Area dapat dijebolnya dan menduduki kota kota Binjai, Stabat, Deli Tua, Pancur Batu pada hari itu juga. Pada tanggal 27 Juli 1947 bantuan Belanda datang melalui Pantai Cermin dan langsung menduduki Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Kabanjahe, Brastagi, dan Tanjung Pura. Kota kota itu jatuh dalam tempo satu minggu. Pasukan-pasukan kita melakukan politik bumi hangus dan mengundurkan diri dengan teratur.

Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB mengadakan resolusi dan pada tanggal 4 Agustus 1947 Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata memerintahkan untuk penghentian tembak-menembak, dan kembali ke meja perundingan, sehingga untuk sementara pertempuran reda.

Saat yang baik ini dipergunakan untuk konsolidasi TNI dengan membagi dua daerah atau komando, yaitu Divisi X TNI yang dipimpin oleh Kolonel Husin Yusuf yang terdiri dari empat resimen, yaitu :

Resimen I dipimpin oleh Mayor Hasballah Haji.

Resimen II dipimpin oleh Mayor A. Rahman

Resimen III dipimpin oleh Mayor T. Manyak.

Resimen IV dipimpin oleh Mayor Jamin Ginting.

Sebuah Resimen berkedudukan di Kuala Simpang (KSBO) dipimpin oleh Mayor A. Wahab Machmur

Selanjutnya di daerah Sumatera Timur dan Tapanuli dibentuk Sub-Teritorium agresi bawah pimpinan Let. Kol. A.E. Kawilarang dan Kepala Stafnya Let. Kol. Washington Siahaan. Sub-Teritorium ini dibagi atas empat sektor, yaitu

- Sektor I di bawah pimpinan Bejo (Mayor)
 - Sektor II di bawah pimpinan Liberty Malau (Mayor)
 - Sektor III di bawah pimpinan Mayor Selamat Ginting
 - Sektor IV di bawah pimpinan Mayor Maraden Panggabean
- Samudera dipimpin oleh Mayor (L.) P. Simanjuntak.

Dengan terbentuknya kesatuan-kesatuan itu tidak berarti peranan rakyat sama sekali terhapus dari kegiatan pertahanan. Nanti akan ternyata bahwa barisan-barisan rakyat akan membantu usaha tentara dalam agresi II. Yang terjadi pada 19 Desember 1948 waktu itu pasukan-pasukan TNI telah tersusun dalam kesatuan komando-komando. Sehingga dengan mudah pasukan dikerahkan ke daerah kantong dan didirikanlah di mana-mana PRS yaitu Perlawanan Rakyat Semesta. Organisasi ini bertugas membantu tentara. Bantuan rakyat dalam masa itu sangat menentukan dalam melaksanakan perang gerilya. Tanpa bantuan rakyat perang gerilya itu tidak mungkin dapat dilakukan.

Pada waktu itu semua kota-kota penting telah jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 19 Desember Belanda memasuki Asahan dan terus ke Rantau Prapat dan Wingfoot. Kemudian pada tanggal 23 Desember 1948 Belanda memasuki Ajibata dan mendaratkan pasukan di Balige melalui Danau Toba. Kemudian pasukan payung diterjunkan di Silangit dan Siborong borong terus langsung ke Tarutung

Garis pertahanan sebelah barat diuji dengan pendaratan Belanda di Sibolga. Pada awal tahun 1949 Padang Sidempuan jatuh lalu pada tanggal 21 Januari Sipirok diserang dari tiga jurusan, yaitu dari Padang Sidempuan, Tarutung dan Pangaribuan.

Demikian pula kota-kota lain seperti Langga Payung Gunung Tua jatuh ke tangan Belanda dan TNI melakukan perang gerilya. Dalam perang gerilya itu terkenal nama nama orang di kalangan penduduk yang sangat dikagumi akan keberaniannya seperti : Sahala Muda Pakpahan di Sipirok, Maraden Panggabean, Henry Siregar, Sahala Hutabarat, Sinta Pohan, Parlindungan, Rivai, Pulungan yang beroperasi antara Sibolga dan Tarutung. Perlawanan di daerah antara Sibolga dan Padang Sidempuan dipimpin oleh Nanti Sitorus W. Tampubolon, Z. Tambunan, M. Lingga, C. Mar-

paung, dan Situmeang Di antara kota Sibolga dan Barus operasi gerilya dilakukan oleh pasukan Alri dan Mobrig. Pasukan Mobrig banyak melakukan pertempuran di Tapanuli di bawah pimpinan Kadiran.

Kota-kota di Dairi dan Tanah Karo yang telah diduduki Belanda dikacau oleh pasukan di bawah pimpinan Jamin Gintings dan Selamat Ginting. Kol. A.E. Kawilarang berkedudukan di Tanah Karo dan dalam peristiwa Cingkes panglima hampir tertangkap oleh Belanda.

Di daerah perkebunan Sumatera Timur, pasukan yang dipimpin oleh Bejo melakukan perang gerilya, berhadapan dengan pasukan-pasukan O.B. (Ondernemings Bewaker) atau pengawal perkebunan.

Daerah gerilya lainnya ialah Simalungun di bawah pimpinan Bunga Simanungkalit, Labuhan Batu di bawah pimpinan Munaf Lubis dan Sani, Langkat di bawah pimpinan Nip Xarim.

Dalam mengkoordinasi pemerintahan dan kekuatan militer pada waktu itu, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia mengangkat Mr. S.M. Amin Gubernur Sumatera Utara menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Kemudian dibentuk dua daerah pemerintahan perang. Tapanuli dan Sumatera Timur bahagian selatan di bawah kekuasaan Gubernur Militer Dr F. Lumbantobing. Aceh, Langkat dan Tanah Karo di bawah kekuasaan Gubernur militer Tengku M Daud Breueh.

Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah-daerah maka di tiap daerah dibentuk Dewan Pertahanan Daerah yang dapat melaksanakan kekuasaan atas nama Gubernur Militer. Dengan demikian maka Bupati, Wedana, dan Camat berada di bawah kekuasaan Dewan Pertahanan Daerah masing-masing.

Demikianlah situasi menjelang KMB dan setelah itu maka dalam masa RIS disusunlah kembali pemerintahan sipil

8.1.3. Sesudah Pengakuan Kedaulatan.

Republik Indonesia Serikat yang diciptakan sebagai hasil KMB menimbulkan dua macam pemerintahan di Sumatera Utara, yaitu pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan pemerintahan Negara Sumatera Timur. Sesuai dengan UU No. 10 tahun 1948 yang berlaku sejak tanggal 15 April 1948 maka berdirilah Propinsi Sumatera Utara yang merupakan daerah otonomi. Pada tanggal 13 Desember 1948 diresmikanlah adanya lembaga DPRD Sumatera Utara yang sidangnya dibuka di kota Tapak Tuan.

Pada waktu agresi Belanda yang kedua berdiri Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Suliki (Sumatera Barat). Oleh pemerintah PDRI kedudukan Gubernur Sumatera Utara diubah menjadi Komisaris Pemerintah Pusat yang bertugas mengawasi daerah-daerah otonom. Pada waktu daerah Sumatera Utara dipecah menjadi dua kekuasaan yang masing-masing dipegang oleh seorang Gubernur Militer yaitu Aceh—Langkat Tanah Karo dipimpin oleh Gubernur Militer Tengku Daud Breueh dan Tapanuli—Sumatera Timur dipimpin oleh Gubernur Militer Dr F. Lumbantobing

Setelah perang kemerdekaan berakhir, maka sesuai dengan peraturan Pemerintah RIS tgl 14 Agustus 1950 No. 21 tahun 1950, maka ditetapkan kembali berdirinya Propinsi Sumatera Utara. Peraturan pemerintah itu dikuatkan dengan UU no. 5 tahun 1950.

Di samping Propinsi Sumatera Utara terdapat Negara Sumatera Timur sebagai Negara Bahagian RIS. Negara Sumatera Timur itu dibentuk pada tanggal 25 Desember 1947 dengan beslit Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook dengan Dr T. Mansoer sebagai Wali Negara. Pembentukan NST itu ternyata tidak disetujui oleh rakyat dan setelah KMB di daerah ini timbul reaksi yang keras terhadap bertahannya NST. Di mana mana timbul gerakan-gerakan yang bertujuan menghapuskan Negara Sumatera Timur dan kembali menjadi bahagian Propinsi Sumatera Utara di bawah naungan Republik Indonesia.

Sekitar masa pengakuan Kedaulatan, maka pemuda Sumatera Utara mengadakan Konperensi (26–28 Des. 1949) yang mengeluarkan mosi agar pemerintah RI dikembalikan di Sumatera Timur. Kemudian pada 21–22 Januari 1950 Front Nasional Sumatera Timur mengadakan konperensi dan menghasilkan resolusi yang menuntut agar NST segera digabungkan dengan RI. Di dalam Front Nasional itu tergabung organisasi-organisasi politik dan organisasi-organisasi sosial.

Situasi semakin memuncak dan di mana-mana timbul "Aksi Tuntutan Rakyat." Aksi-aksi itu dilakukan dengan rapat rapat umum dan demonstrasi seperti yang terjadi di Tanah Karo, Langkat, Deli Asahan, dan Labuhan Batu. Akhirnya terbentuklah Kongres Rakyat se Sumatera Timur yang berlangsung di Medan pada tanggal 27 April sampai 1 Mei 1950 yang dihadiri pula utusan pusat sebagai peninjau antara lain : Mr. Tambunan (Wakil Ketua

Parlemen RIS), Wangsawijaya (Utusan P.M. RIS), Roeslan Abdulgani Sek. Jen Kementrian Penerangan RIS dan lain-lain.

Kongres Rakyat Sumatera Timur memutuskan agar penggabungan NST ke dalam RI sebagai mana mosi Yunan Nasution dan Yamin segera direalisasi dan realisasinya dilakukan dengan mendengar Badan Sekretariat Kongres Rakyat Sumatera Timur.

Setelah melalui perjuangan yang sulit di tingkat nasional, baik melalui RIS, maka persoalan Negara-Negara Bahagian di dalam RIS diselesaikan secara Nasional, yaitu kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia dengan UUDS 1950. Setelah disahkan berlakunya UUDS – 1950, di Medan dilakukan upacara hapusnya Negara Sumatera Timur dan segala wewenang dan kekuasaannya diserahkan kepada Panitia Persiapan Negara Kesatuan. Untuk Sumatera Timur (PPNKST) diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo. Untuk menjalankan roda pemerintahan maka PPNKST yang dibentuk berdasarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri RIS tgl. 14 Juli 1950 menunjuk pejabat-pejabat sementara yang meliputi bidang-bidang pemerintahan.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950, maka Sumatera Utara merupakan satu daerah propinsi yang bersifat administratif dan akan menuju kepada bentuk daerah otonomi. Pembentukan daerah otonomi itu meliputi kabupaten-kabupaten yang terdapat di Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.

Persiapan untuk pembentukan Propinsi Sumatera Utara itu telah dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P4SU) yang dibentuk berdasarkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri RIS 1 Agustus 1950 No. Dir. 13/9/19. Tugas Panitia yang diketuai oleh R. Sarimin Reksodiharjo itu ialah mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Aceh, Tapanuli, dan Sumatera Timur. Demikianlah UU no. 5 tahun 1950 mensahkan berdirinya Propinsi Sumatera Utara tanggal 15 Agustus 1950 dengan Acting Gubernur R. Sarimin Reksodiharjo. Kemudian kedudukan Gubernur Sumatera Utara A. Hakim ditetapkan dengan S.K. Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Januari 1951 No. 4 tahun 1951

8.1.4. Terbentuknya Pemerintah Daerah Tingkat I.

Keadaan Sumatera Utara setelah terbentuknya Propinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai problema seperti penye-

suaian kedudukan pejuang di bidang ketentaraan, kehidupan kaum buruh, masalah pembangunan daerah. Masalah-masalah ini mengganggu ketertiban dan keamanan serta menghambat roda pemerintahan daerah.

Puncak-puncak pergolakan itu ialah meletusnya peristiwa Darul Islam di Aceh pada tanggal 20 September 1953. Peristiwa ini berpangkal dari tuntutan agar Aceh berstatus sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri terpisah dari Propinsi Sumatera Utara.

Pada bulan September 1955 diadakan pemilihan umum I dan hasil pemilu ini menunjukkan semakin besarnya pengaruh Partai Komunis Indonesia di daerah ini. Mereka menghasut kaum buruh perkebunan, pelabuhan, perkeretaapian dan kaum tani sehingga timbul kehancuran.

Sementara itu hubungan antara daerah dengan pusat semakin tegang. Daerah tidak merasa puas karena merasa diabaikan kepentingannya. Perbedaan-perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu umum berlaku di seluruh Indonesia sebagai akibat sistem liberal menurut UUDS 1950. Kekecewaan atau frustrasi daerah-daerah dicoba mengatasinya dengan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) dan kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) di Jakarta yang dihadiri oleh wakil-wakil daerah.

Pergolakan-pergolakan DI di Aceh telah dapat diselesaikan dan daerah Propinsi Sumatera Utara dipecah menjadi dua propinsi, yaitu propinsi Aceh dan propinsi Sumatera Utara yang meliputi daerah Tapanuli dan Sumatera Timur. Pembentukan propinsi ini berdasarkan UU no. 26 tahun 1956.

Setelah peristiwa DI dapat diselesaikan, maka keadaan Sumatera Utara ternyata tidak semakin baik. Pokok persoalan ialah masalah hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Musyawarah-musyawarah tingkat nasional (Munas, Munap) ternyata tidak dapat meredakan ketegangan itu, malahan beberapa daerah tidak lagi mempercayai pemerintah pusat. Di Sumatera Utara timbul peristiwa Dewan Gajah pada tanggal 22 Desember 1956 yang dipimpin oleh Kolonel M. Simbolon yang menjabat Panglima Teritorium I. Dewan Gajah ini menggabungkan diri dengan Dewan Perjuangan yang berpusat di Padang dan kemudian membentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 28 Maret 1958.

Situasi Sumatera Utara ini di dalam sejarah Indonesia bukanlah situasi yang berdiri sendiri karena daerah-daerah lain pun mengalami pergolakan pula seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Manguni di Sulawesi yang semuanya itu mengancam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam situasi yang demikian sulit, ternyata pula Konstituante yang dibentuk sebagai hasil pemilu 1955 tidak berhasil membentuk UUD yang dibebankan kepadanya. Untuk mengatasi situasi yang semakin sulit, maka Presiden Sukarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengumumkan kembali ke UUD 1945. Untuk menampung segala masalah yang disebut tadi, maka negara dinyatakan dalam keadaan darurat perang (S.O.B.). Di tiap propinsi dibentuklah Penguasa Perang Daerah yang dipangku oleh panglima militer setempat. Panglima Kodam II Bukit Barisan memangku jabatan sebagai Penguasa Perang Daerah (Peperda).

Di bawah naungan UUD 1945 maka sedikit demi sedikit persoalan daerah-daerah dapat diatasi. Begitu pula masalah PRRI telah dapat diatasi dan dianggap berakhir pada tanggal 5 Oktober 1961 (Amnesti Umum). Pemerintahan dikembalikan dalam bentuk sipil, Gubernur sebagai pejabat utama pada setiap propinsi. Mendampingi Gubernur dibentuklah satu badan yang disebut Panca Tunggal yang terdiri dari unsur-unsur Gubernur, Panglima, Angkatan Kepolisian, Jaksa Tinggi, dan Front Nasional

Propinsi dibagi atas kabupaten-kabupaten dan kotapraja yang dipimpin oleh Bupati atau Wali Kota, kemudian tiap kabupaten dan kotapraja dibagi-bagi atas kecamatan, yang dikepalai oleh Camat. Kepala Daerah Tingkat I dan II bersama DPR GR menjalankan tugas wewenang pemerintahan di bidang Legislatif. Di bidang Eksekutif kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah, kemudian dibantu oleh suatu Badan yang disebut Badan Pemerintahan Harian (BPH).

Tugas Kepala Daerah itu sebagai alat pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif di daerah dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Di samping itu Kepala Daerah juga sebagai alat pemerintah pusat, menyelenggarakan koordinasi jawatan-jawatan pusat di daerah. Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah

(Kepala Daerah dan DPRDGR) dan pejabat-pejabat pemerintah pusat didasarkan pada desentralisasi dan dekonsentrasi yaitu menjalankan hak dan melaksanakan wewenang urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, begitu juga untuk menjalankan hak dan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah pusat kepada pejabat daerah yang teknis administratifnya dibina oleh pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan roda pemerintahan Daerah, maka sistem pemerintahan di daerah-daerah seluruh Indonesia diperbaharui dengan UU No. 18 tahun 1965 yang disebut UU Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Di dalam UU itu ditentukan tiga tingkat daerah otonom, yaitu Tingkat I (Propinsi), Tingkat II (Kotamadya/Kabupaten) dan Tingkat III (Kecamatan).

Dalam melaksanakan UU No. 18 tahun 1965 itu, maka Propinsi Sumatera Utara dibagi atas 17 Daerah Tingkat II, yaitu 11 kabupaten dan 6 kotamadya sedangkan kecamatan berjumlah 172 kecamatan. Sampai saat ini pemerintahan kecamatan belum merupakan daerah otonomi, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, melainkan baru merupakan daerah pemerintahan administratif.

Setelah Pemilu II tahun 1971 maka DPRGR diganti anggota-anggotanya dengan anggota-anggota hasil pemilu dan dewan itu disebut DPRD. Propinsi Sumatera Utara dikepalai oleh seorang Kepala Daerah (Gubernur). Kepala Daerah ini dipilih oleh DPRD Tkt. I kemudian diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kabupaten dikepalai oleh Bupati dan kotamadya dikepalai oleh Wali Kota yang masing masing dipilih oleh DPRD Tkt II diangkat oleh Mendagri melalui Gubernur

Pada masa pelaksanaan Pemilu Gubernur Sumatera Utara dipangku oleh Brig. Jen. Marah Halim Harahap dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Wilayah Daerah yang dewasa ini dijabat oleh Gubernur Muda Bardansyah. Pengangkatan Sekwilda melalui pemilihan DPRD dan diangkat oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya demi kelancaran bidang bidang Poleksosbud, yang selama ini dikoordinasi oleh Panca Tunggal sekarang diganti oleh Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang terdiri dari unsur-unsur Kepala Daerah (Gubernur) sebagai Ketua, Pangdam II Bukit Barisan sebagai anggota, Kadapol Sumut, Pangkodau I, Pangdaerah I, Jaksa Tinggi Sumatera Utara masing-masing juga sebagai anggota.

Sesuai dengan UU Pokok Pemerintahan Daerah yaitu UU no. 5 1974 maka Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Staf yang meliputi Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Wilayah dengan 8 direktorat dan tiga Biro sebagai berikut .

1. Direktorat Pemerintahan
2. Direktorat Pemerintahan Umum
3. Direktorat Pembangunan
4. Direktorat Keuangan
5. Direktorat Perekonomian
6. Direktorat Kesejahteraan Rakyat.
7. Direktorat Pendapatan Daerah.
8. Direktorat Khusus.

Biro-biro :

1. Biro Personalia.
2. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
3. Biro DPRD.

8.2. Penyelenggaraan hidup.

8.2.1. Kehidupan Sosial Ekonomi pada zaman Revolusi. Fisik (1945 – 1949).

Keadaan sosial ekonomi pada masa permulaan revolusi ditandai oleh beberapa hal. Pada umumnya kesulitan-kesulitan yang dialami sejak zaman Jepang di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan keuangan masih terus dialami pada masa permulaan revolusi.

Kemunduran produksi pertanian disebabkan, karena di zaman Jepang para petani tidak giat. Jepang membeli hasil-hasil petani seperti beras (padi) dengan harga yang sangat murah. Lagi pula bahaya banjir, musim kemarau, dan banyaknya tenaga yang dikerahkan Jepang untuk kerja **romusha** menyebabkan kemunduran produksi. Pada zaman kemerdekaan banyak pula pemuda yang ditarik ke medan pertempuran, sehingga tenaga yang diperlukan dalam pertanian berkurang.

Kesulitan-kesulitan semakin terasa karena uang Jepang yang beredar demikian besarnya (kira-kira 2000 juta), sehingga uang itu hampir-hampir tidak berharga.

Pertambangan di Sumatera Utara, yaitu tambang minyak di Pangkalan Brandan dan Pangkalan Susu telah dirusak ketika Jepang

masuk ke daerah ini. Tambang yang sebagian rusak itu telah diusahakan kembali oleh Jepang dengan mempergunakan tenaga-tenaga Jepang dan tenaga-tenaga bangsa Indonesia, namun produksi tidak seberapa karena rehabilitasi belum dapat dilakukan. Transportasi hasil tidak dapat pula dilakukan untuk membawa hasil minyak itu ke daerah lain di Sumatera Utara dan Aceh, apa lagi untuk membawa hasil minyak itu ke luar negeri. Karena kekuasaan di laut masih berada di tangan Sekutu selama zaman Perang Dunia II

Perkebunan telah terbengkalai sejak zaman Jepang. Produksi diteruskan dengan cara mempergunakan tenaga tenaga bangsa Indonesia. Pengusahaan perkebunan dilakukan oleh Badan-Badan Perjuangan. Sebagian hasil perkebunan itu telah dibawa oleh kapal-kapal Cina ke Singapura dan Malaya dengan menembus blokade Belanda.

Usaha yang paling utama pada permulaan revolusi ialah mengatur peredaran bahan makanan. Untuk itu di Medan dibentuk ERRI (Ekonomi Rakyat Republik Indonesia). Badan ini menguasai seluruh barang-barang yang masuk ke kota Medan. Untuk mengatur lebih baik, maka ERRI menjelma menjadi ENRI (Ekonomi Negara Republik Indonesia).

Badan-badan perjuangan yang menguasai daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara membentuk badan-badan yang mengatur peredaran barang-barang. Misalnya PNI membentuk NC (National Control). Badan-badan yang dibentuk oleh barisan barisan perjuangan ini, umumnya dikuasai oleh partai-partai yang mengakibatkan timbulnya pertentangan di kalangan barisan-barisan dan partai-partai untuk memperebutkan pengaruh demi perbelanjaan barisan perjuangan.

Untuk mengatur hubungan antara golongan-golongan terutama mengatur perbelanjaan organisasi, maka dibentuk P3ST (Pimpinan Persatuan Perjuangan Sumatera Timur). Di dalamnya terhimpuh seluruh kekuatan perjuangan termasuk TKR – TRI.

Sedikit demi sedikit kekuasaan pemerintah di lapangan ekonomi ditegakkan. Untuk itu pemerintah Daerah Propinsi membentuk PMR (Pengawas Makanan Rakyat). ERRI/ENRI dibubarkan karena dianggap menguasai kegiatan pemerintah. Tugas pokok PMR ialah mendorong memperbanyak hasil bumi, mengatur organisasi pertambangan dan perkebunan. Mengatur kilang-kilang dan industri. Badan-badan yang berwenang dalam perdagangan dan perkebunan disusun. Dewan Kemakmuran Propinsi Sumatera Uta-

ra bertugas memajukan perdagangan dan koperasi. Dewan Perkebunan dibentuk dengan susunan seorang dari pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan seorang lagi dari wakil buruh. Tugas Dewan Perkebunan ialah menyelenggarakan produksi, memelihara, menjual hasil perkebunan.

Usaha yang penting lagi ialah mengumpulkan dana untuk perjuangan. Dalam hal ini dilakukan pelelangan harta benda negara, memungut iuran negara, mengatur bea cukai, mengawasi impor dan ekspor, dan mengedarkan obligasi pinjaman nasional. Obligasi pinjaman Nasional itu diatur sesuai dengan UU No. 4 tahun 1946 sebesar Rp. 500 juta rupiah untuk propinsi Sumatera

Di beberapa keresidenan di Sumatera Utara untuk mengatasi pembiayaan perjuangan, di Tapanuli didirikan Kantor Urusan Harta Benda Bangsa Asing. Di samping itu juga untuk perkebunan dibentuk satu badan Pengurus Kebun-Kebun Onderneming (PKO). Kedua badan ini harus menyerahkan beberapa bagian untuk dana perjuangan. Di bidang keuangan keresidenan Tapanuli pada tanggal 13 Maret 1946 dikeluarkan surat Obligasi yang bernilai Rp. 10.000,— Jumlah obligasi yang diedarkan bernilai Rp. 40 juta dengan bunga 5% dibayar dalam tempo tiga tahun dengan jaminan beras.

Di daerah lain seperti di kabupaten Asahan dicetak uang yang dinamakan URIKA (Uang Republik Indonesia Kabupaten Asahan). Percetakan ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 1947 sampai bulan Mei 1948. Pada bulan Agustus 1947 kabupaten Labuhan Batu juga mencetak uang ORLAB (Uang Republik Indonesia Labuhan Batu). Di daerah Tapanuli dikeluarkan juga uang ORITA (Uang Republik Indonesia Tapanuli) tanggal 15 Agustus 1947. Di Tanah Karo beredar uang URIDA (Uang Republik Indonesia Daerah Aceh). Uang ini adalah sebagai ganti uang Senapang yang dicabut dari peredaran. Uang Senapang ini berlaku di daerah Resimen I di Tanah Karo, Uang Senapang maksudnya adalah uang yang dicetak oleh Resimen I yang berdasarkan surat kuasa dari Gubernur Militer Aceh/Tanah Karo, dengan ciri-ciri uang bergambar senapang. Pada bulan Oktober 1948 beredar pula Uang Republik Indonesia Nias (ORIN). Semua mata uang yang beredar di setiap kabupaten itu, adalah untuk dana perjuangan dan membiayai segala kegiatan pemerintahan.

Pada masa agresi Belanda I dan agresi ke II beberapa daerah diduduki oleh pemerintah Belanda. Di daerah pendudukan itu

Belanda mengedarkan barang-barang, terutama makanan dan pakaian. Barang-barang itu dibagi-bagikan kepada pegawai pegawai Belanda dan penduduk dengan tujuan propaganda agar mendapat kesan bahwa Belanda dapat memberikan kemakmuran yang lebih baik. Namun demikian sebagian penduduk mengungsi ke pedalaman dan merasa lebih baik hidup menderita bersama-sama tentara republik dari pada mendapat makanan dari NICA

8.2.2. Kehidupan Sosial Ekonomi pada masa sesudah Pengakuan Kedaulatan.

Keadaan ekonomi sesudah pengakuan kedaulatan banyak dipengaruhi oleh hasil-hasil KMB. Dalam hubungan itu maka perkebunan-perkebunan dan perusahaan-perusahaan milik asing dikembalikan kepada pemiliknya. Masyarakat terutama di kalangan buruh perkebunan, buruh pelabuhan dan perkeretaapian tidak menyetujui tindakan tersebut. Pemogokan-pemogokan dilakukan kaum buruh di pelabuhan Belawan, di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur, di perusahaan air bersih, di perusahaan listrik, di perusahaan kereta api (DSM) mempunyai latar belakang politik yang dikendalikan oleh organisasi organisasi buruh **onderbouw** PKI, seperti SBPP, SARBUPRI, Serikat Buruh Gas dan Listrik (SBGL), Serikat Buruh Kereta Api (SBKA).

Usaha-usaha untuk mengatasi pemogokan ini mengalami kesulitan, karena masalah-masalah politik dalam negeri yang belum stabil. Di antara masalah-masalah politik yang menimbulkan konflik dengan Belanda, ialah masalah UNI Indonesia Belanda, masalah Irian Barat, masalah campur tangan Belanda dalam pemberontakan di Indonesia. Semua masalah itu mempertajam keruncingan hubungan, antara Indonesia dan Belanda.

Dalam situasi seperti itulah kaum buruh melakukan pemogokan-pemogokan di Sumatera Utara pada perusahaan besar milik Belanda, misalnya di perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur sekitar bulan Februari 1951 dan di perusahaan perusahaan lain sekitar bulan Maret 1951. Larangan mogok dari Gubernur Militer tertanggal 31 Juli 1950 tidak diperhatikan oleh kaum buruh. Organisasi buruh mempengaruhi masyarakat dengan sikap anti Belanda, oleh sebab itu pemerintah mengalami kesulitan untuk melarang mogok. Akhirnya mulai bulan April 1950 diaturlah penyelesaian masalah perburuhan atas prakarsa Mr. Wilopo yang pada waktu itu menjadi Menteri Perburuhan. Kemudian setiap persengketaan anta-

ra buruh dengan perusahaan diselesaikan oleh P4D (Panitia Penyelesaian Persengketaan Perburuhan Daerah). Aksi aksi mogok dan persengketaan masih sering terjadi di perkebunan dan perusahaan-perusahaan asing di daerah ini sampai diambil alihnya perkebunan dan perusahaan asing itu oleh pemerintah.

Kesulitan lain yang timbul sesudah pengakuan kedaulatan ialah masalah tanah yang terkenal dengan **masalah tanah jaluran**. Yang dimaksud dengan tanah jaluran itu ialah tanah bekas perkebunan tembakau. Sistem rotasi dalam penanaman tembakau di zaman dulu memungkinkan penduduk menanami bekas bekas kebun itu setelah musim penanaman tembakau. Bila musim tanam tembakau akan dilanjutkan tanah itu dikembalikan kepada perkebunan. Pada zaman Jepang banyak kebun-kebun yang digarap penduduk. Kemudian dijadikan tanah-tanah pertanian pada zaman revolusi; Residen Sumatera Timur dari NRI, Mr. Abu Bakar Jaar mengeluarkan peraturan No. 1138/VI/16 tgl. 1 Mei 1947 yang membolehkan para petani memakai tanah kosong secara pinjam termasuk tanah-tanah konsensi. Sebaliknya pada zaman NST pemerintah kolonial melalui ordonansi No. 1 tgl. 8 Juni 1948 yang disiarkan oleh Wali Negara NST Tgl. 23 Juni 1948 No. 16/1948 menentukan bahwa orang yang memakai tanah dengan tiada hak dapat dihukum. Jadi Belanda dan NST tidak mengakui peraturan Residen NRI tersebut di atas. Sesudah pengembalian kedaulatan maka Panitia Persiapan Negara Kesatuan (PPNKST) memuatkan masalah agraria dalam programnya. Untuk itu dibentuklah Panitia urusan tanah pertanian yang merumuskan masalah tanah itu. Panitia merundingkan masalah tanah yang sudah digarap rakyat dengan pengusaha perkebunan yang tergabung dalam DPV.

Persoalan ini semakin hangat karena tidak dapat persesuaian antara pihak PPNKST dengan pihak DPV tentang jumlah tanah yang akan dikembalikan kepada perkebunan. Organisasi organisasi gerakan tani, BTI, Sekata, RTI, Gabungan Persatuan Buruh Tani, Gabungan Buruh Tani Cina Sumatera Timur, dan Sarbupri membentuk panitia untuk menyelesaikan masalah tanah. Penyelesaian itu telah diatur oleh Kementrian Dalam Negeri dalam putusan tanggal 28 Juni 1951 No. Agr. 12/5/14 yang membenarkan pihak PDV mengusahakan terus tanah konsensi dan **erfpacht** seluas 125 000 ha dan selebihnya yaitu 135.000 ha diserahkan kembali kepada pemerintah.

Untuk memenuhi keputusan Menteri ini Gubernur mem-

bentuk Komisi Agraria Sumatera Timur yang diketuai oleh Bupati d/p. Munar S. Hamidjojo. Komisi ini dikuatkan pula oleh suatu Jawatan yaitu kantor Penyelenggaraan Pembagian Tanah Dalam melaksanakan tugas pembagian tanah yaitu dengan cara undian timbul reaksi di kalangan kaum tani yang disokong oleh organisasi-organisasi politik dan surat kabar di Medan. Sampai akhir masa pemerintahan Orde Lama masalah tanah ini tetap hangat dan telah menimbulkan korban-korban akibat tindakan yang digerakkan oleh organisasi-organisasi tani terutama BTI di bawah naungan PKI. Terakhir peristiwa ini telah dipergunakan PKI dalam rangka prolog Gestapu/PKI yang terkenal dengan peristiwa Bandar Betsy, pada tahun 1964.

Sesudah pengakuan kedaulatan sampai tahun 1954 belum ada pengorganisasian pertambangan minyak di Sumatera Utara, walaupun buruh telah kembali bekerja dengan izin Gubernur Sumatera Utara. Pekerjaan diatur dalam satu badan yang disebut Tambang Minyak kabupaten Langkat. Setelah peristiwa DI-TII, maka tambang minyak Pangkalan Brandan dapat diselamatkan oleh Angkatan Darat dan Kol. G M. Pattiasina diangkat sebagai Managing Direktur. Pada bulan April 1954 didirikan badan yang disebut Tambang Minyak Sumatera Utara yang berada di bawah Kementerian Perekonomian. Problema yang dihadapi ialah masalah gaji buruh, biaya eksploitasi dan pergolakan politik di tambang minyak itu. Pada tahun 1957 urusan tambang minyak itu diserahkan kepada Angkatan Darat dan Jenderal Nasution yang pada waktu itu menjabat KSAD mengusulkan perubahan nama dari PT. ETMSU (Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara) menjadi PT. Permina (Perusahaan Minyak Nasional). Rehabilitasi dilakukan pada masa Dr. Ibnu Sutowo memangku jabatan sebagai Direktur Utama Pertamina. Kerja sama dilakukan dengan Jepang yaitu dengan Nosodeko (North Sumatera Oil Development Company). Berdasarkan UU No. 19 tahun 1960 kedudukan PT. Permina berubah menjadi PN. Permina. Akhirnya melalui PP. No. 27/1968 dibentuk PN. Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina). Kegiatan-kegiatan Pertamina meliputi berbagai bidang di lapangan pembangunan yang memberi kesempatan bagi penyaluran tenaga kerja di daerah ini.

Akibat pemogokan pada perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur produksi menurun bila dibandingkan dengan hasil tahun 1951, seperti hasil kelapa sawit, karet. Jalan keluar untuk mengada-

kan perbaikan dan meningkatkan produksi pemerintah, pusat (Kabinet Natsir) mengambil tindakan tegas atas pemogokan yang dilakukan di perusahaan-perusahaan yang dianggap vital.

Bidang pertanian rakyat yang berbeda dengan sistem onder-neming memainkan peranan penting pula dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat di Sumatera Utara. Sebagai suatu bahan perdagangan ke luar negeri, karet itu telah merupakan sumber bagi penghidupan rakyat di Sumatera Timur. Kedudukan karet rakyat di Sumatera Utara juga menarik perhatian pemerintah, karena memegang peranan dalam kehidupan sosial politik, sosial ekonomi maupun teknologi bagi negara Republik Indonesia dan dapat dilihat di dalam dunia perdagangan antar negara, seperti dengan Amerika dan Singapura.

Pada masa ini di daerah Sumatera Utara, pertanian mulai diarahkan pada peningkatannya, karena pada masa sebelum pengakuan kedaulatan bidang pertanian kegiatannya boleh dikatakan lumpuh sama sekali. Pemerintah mulai mengadakan penerangan penerangan kepada rakyat petani untuk meningkatkan pertanian. Mengadakan peningkatan sarana perhubungan dan pengangkutan untuk kelancaran lalu lintas pertanian. Namun hasil bumi masih dikuasai oleh kaum modal yang terdiri dari bangsa asing yang menekan petani dengan sistem ijon.

Dengan bantuan pemerintah hasil produksi di Sumatera Utara mulai menunjukkan tendensi yang meningkat, seperti padi sawah, padi ladang, dan palawija. Di samping itu ekspor mulai berjalan dengan baik seperti kelapa (Nias, Tapanuli Tengah, Asahan) pinang di seluruh daerah Sumatera Timur dan Tapanuli, nilam, kemenyan, lada, tembakau, kopi, dan cengkeh.

8.2.3. Kehidupan Sosial Ekonomi Sesudah Terbentuknya Daerah Tingkat I.

Menjelang akhir pemerintahan Orde Lama yaitu sekitar tahun 1965 daerah Sumatera Utara merupakan salah satu front terdepan dalam mengganyang Malaysia sesuai dengan Dwikora. Segala kegiatan di daerah ini diliputi situasi perang dan situasi revolusi yang semakin meningkat. Dari luar kelihatan situasi itu sebagai peningkatan usaha-usaha revolusi melawan Neo-Kolonialisme (Nekolim), tetapi pada hakekatnya terdapat pertentangan pertentangan di tengah masyarakat yang digerakkan oleh PKI untuk merebut pengaruh di lapangan pemerintahan. Daerah Sumatera Utara yang

kaya akan barang-barang ekspor baik dari perkebunan pertanian dan pertambangan adalah daerah yang sangat penting dalam pergolakan politik baik nasional maupun internasional.

Konflik-konflik yang berkecamuk di tengah masyarakat itu rupanya merupakan pematangan situasi bagi Gestapu PKI. Konflik tersebut tak lain dari perebutan pengaruh di lapangan pemerintahan dan sektor-sektor produksi. Perkebunan pertambangan dan perusahaan-perusahaan menjadi arena perebutan pengaruh, sehingga produksi merosot. Jika pemimpin perkebunan atau perusahaan adalah orang-orang yang tidak disukai PKI maka kaum buruh di tempat itu melakukan berbagai aksi untuk menyingkirkannya. Akibatnya keamanan bekerja tidak ada dan pembangunan terbengkalai.

Kebun-kebun banyak yang kurang terpelihara, jalan jalan raya sangat menyedihkan sedang tanggul-tanggul banyak yang rusak. Kerusakan tanggul-tanggul itu sangat mengganggu produksi perkebunan dan pertanian serta lalu lintas, sehingga bukan saja produksi terganggu, harga bahan pokok terutama beras menjadi sangat tinggi.

Keadaan ini ditambah lagi dengan inflasi yang melonjak cepat menyebabkan kenaikan harga yang sangat menyulitkan hidup. Bahan-bahan pokok sulit diperoleh sedang penyaluran-penyalurkan yang dilakukan oleh koperasi-koperasi tidak memadai. Dalam keadaan yang sulit seperti itu gaji pegawai tidak mencukupi hidup sehari-hari, sehingga tenaga kerja sangat lemah.

Sesudah pemerintahan Orde Baru mulailah diusahakan berbagai perubahan, tetapi dana yang tersedia bagi pembangunan di daerah ini terasa sangat kurang. Walaupun ekspor mulai naik perdagangan mulai lancar tetapi dana pembangunan tidak mencukupi untuk merehabilitasi pembangunan di daerah ini. Untuk pembangunan jalan-jalan di Sumatera Utara yang terdiri dari 793 Km. jalan negara dan 2.389 Km jalan propinsi hanya tersedia dana Rp. 1.200,— tiap km. untuk jalan, sedang dana yang diperlukan Rp. 6.000,— untuk pemeliharaan per km, sedang dana yang tersedia hanya Rp. 540,— tiap km. Di Sumatera Utara terdapat jembatan negara 358 buah dan pada jembatan propinsi 1.323 buah, sedang untuk pemeliharaannya hanya tersedia dana untuk pemeliharaan sepanjang 250 m. saja. Untuk mengendalikan banjir di Sumatera Utara telah dilakukan usaha pengendalian aliran sungai-sungai Wampu, sungai Deli, sungai Padang, dan sungai Merbau de-

ngan cara pembentangan, pengerukan, dan perbaikan terusan terusan, keseluruhannya menelan biaya lebih kurang Rp. 501.769.000,— tetapi ternyata belum memadai karena masih banyak pengerukan yang harus dikerjakan. Sejalan dengan itu pembukaan areal persawahan baru, meminta biaya-biaya yang sangat luas pula.

Pada sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pertanian, diperlukan biaya biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu sebelum Pelita I masalah yang hangat dibicarakan ialah masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah Sumatera Utara sebagai daerah penghasil devisa terbesar menghendaki biaya pemeliharaan yang besar pula baik dalam usaha mengembangkan usaha usaha faktor faktor produksi maupun sarana-sarana pembangunan sosial

Pada Pelita I telah dilakukan berbagai pembangunan yang menyolok. Pada "jalan sedang" telah diperbaiki 21 jembatan dan pada "jalan buruk" telah diperbaiki 35 buah jembatan. Selanjutnya antara tahun 1969 sampai tahun 1975 telah dilakukan pembangunan jembatan yang memakan biaya sekitar 150 juta sampai 350 juta dari APBN tiap tahun dan antara 150 juta sampai 200 juta dari APBD setiap tahun. Untuk rehabilitasi jalan antara tahun 1969 sampai tahun 1975 telah dikeluarkan dana sekitar 200 juta sampai 400 juta rupiah setiap tahun dari APBN dan sekitar 200 juta sampai 400 juta rupiah dari APBD. setiap tahun.

Kemajuan pembangunan daerah ini sejak Pelita I dapat dilihat pula dari jumlah proyek-proyek yang direalisasi melalui Pelita sampai tahun 1974, yaitu: Pelita Nasional 133 Proyek Pembangunan Desa 1403 buah, Proyek Bantuan Pembangunan 165 buah, Proyek PMD 1489 buah, Persawahan 409.69 ha., Pertanian 845.389 ha., Perkebunan Rakyat 371.691 ha., dengan produksi perkebunan rakyat berjumlah 166.843 ton. Di samping itu produksi perkebunan pemerintah dan swasta berjumlah 388.654.86 ton. Dari hasil perkebunan itu telah diekspor sejumlah 2 341.540 ton. (1969—1974) dan minyak bumi berjumlah 1.891.208 ton.

Untuk memajukan usaha-usaha kecil maka telah diberikan kredit kepada 1.380.895 peminjam dan melalui Kredit Investasi Kecil (KIK) kepada 1.079.721 peminjam. Peningkatan usaha usaha pengusaha kecil itu dilakukan pula melalui pembinaan koperasi. Jumlah koperasi adalah 828 buah.

Jenis-jenis barang ekspor dari Sumatera Utara yang utama ialah dari perkebunan dan pertanian rakyat di samping minyak

tanah. Hasil-hasil perkebunan dan pertanian dan peternakan itu ialah kopi, karet, kayu, kelapa sawit, kopra, minyak nilam, rotan, ikan, hewan ternak, arang, dan sayur sayuran. Kemajuan perdagangan dapat dilihat dari angka ekspor dan impor di daerah ini. Untuk tahun 1974 ternyata ekspor meliputi 901.571 ton di luar minyak sedang impor 938.244 ton.

Lain dari itu Sumatera Utara penting pula artinya bagi dunia pariwisata. Kota-kota Parapat di tepi danau Toba, Brastagi, Pulau Samosir, Nias adalah tempat-tempat yang banyak didatangi turis. Pada tahun 1974 tercatat 19.787 turis yang datang ke daerah ini.

8.3. Kehidupan Pendidikan Dan Seni Budaya.

8.3.1. Perkembangan Pendidikan.

Pembinaan pendidikan semenjak awal kemerdekaan mulai diperbaiki baik sistem maupun pelaksanaannya. Pemerintah di Sumatera Utara mulai memberikan sokongan pendidikan setelah terbentuknya Dewan Pendidikan Sumatera. Dewan ini terdiri dari unsur para pendidik, guru, ulama, dan cendekiawan. Dewan ini bertugas membantu Jawatan Pendidikan untuk mengatasi masalah pengajaran.

Pada masa penjajahan Belanda pendidikan adalah sebagai alat pemerintah kolonial yang bersifat feodalistis, intelektualistis, dan individualistis. Administrasinya diselenggarakan oleh pemerintah dan metodenya berpegang pada kurikulum yang berorientasi kepada kepentingan kolonial. Sekolah yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan dianggap liar seperti Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Pada zaman Jepang tujuan pendidikan ialah mengabdikan kepada **Tenno Haika**. Sifatnya praktis, secara militer, administrasinya dipegang pemerintah dan ditekankan kepada aktivitas fisik.

Setelah melalui dua masa di atas maka sampai kepada zaman RI suasananya telah berubah. Sifat pendidikan demokratis, pragmatis dan administrasinya dilaksanakan oleh pemerintah RI beserta pihak swasta yang dibantu pemerintah. Caranya pendidikan itu disesuaikan dengan keadaan kehidupan di daerah setempat dengan prinsip belajar sambil berbuat.

Sebagai lanjutan dari kesadaran akan kekurangan yang dihadapi dan juga untuk menyesuaikan martabat bangsa maka masyarakat haruslah dididik dan dibentuklah suatu Badan Pendidikan Masyarakat. Badan ini adalah suatu alat bagi kemajuan pendidikan untuk mencapai peningkatan dasar pengetahuan masyarakat.

Sebelum tahun 1950 di Sumatera Utara telah dibuka kursus PBH (Pemberantasan Buta Huruf) yang diusahakan oleh organisasi-organisasi PGRI dan IPI. Kursus ini mulai menarik perhatian masyarakat kemudian dibentuk sebuah panitia besar yang berkedudukan di Medan. Usaha ini mulai meluas dan pelaksanaannya dibantu oleh penilik-penilik Sekolah Rakyat. Maka di setiap kecamatan di Sumatera Utara dibentuklah Panitia Pendidikan Masyarakat.

Sampai akhir tahun 1952 kursus-kursus PBH ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan sehingga para peserta telah dapat menulis, membaca, dan berhitung. Kursus-kursus lainnya juga diadakan antara lain kursus Pengetahuan Umum di samping itu di berbagai tempat oleh organisasi wanita diberikan pula pendidikan untuk ketrampilan kaum ibu.

Pertumbuhan dan perkembangan sekolah SD, SLP, SLA maju dengan pesat hingga perlu diadakan pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan ini disesuaikan dengan Undang-undang Pendidikan yang berlaku. Sekolah-sekolah partikular ini ada yang mengikuti peraturan pemerintah dan ada yang diselenggarakan di luar peraturan seperti mempergunakan bahasa asing pada sekolah Cambridge Methodist dan sekolah-sekolah Cina. Keadaan inilah yang menyebabkan pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan, dan akhirnya menasionalisasikan sekolah-sekolah yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku itu pada tahun 1957. Sekolah-sekolah pemerintah sampai saat ini terus bertambah sesuai dengan Pembangunan Lima Tahun melalui proyek-proyek PELITA, INGUB dan INPRES. Di samping itu juga di Sumatera Utara dilaksanakan penggabungan murid-murid sekolah sejak tahun 1974 karena sebelum itu sekolah-sekolah Cina mempergunakan bahasa pengantar bahasa Cina. Setelah dikeluarkan peraturan penggabungan maka pada sekolah-sekolah ini digabungkan murid-muridnya dengan perbandingan 40% keturunan asing dan 60% keturunan pribumi.

Sejak terbentuknya Propinsi Sumatera Utara sampai saat ini telah banyak Perguruan Tinggi Akademi baik Negeri maupun Swasta yang berjumlah seluruhnya 21 buah antara lain ialah :

1. Universitas Sumatera Utara (USU).
2. IKIP Negeri Medan.
3. Institut Agama Islam Negeri.
4. Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

5. Universitas HKBP Nomensen
6. Universitas Methodist Indonesia.
7. Perguruan Tinggi Muhammadiyah
8. Universitas Dharma Agung
9. Universitas Puteri Islam Indonesia.
10. Universitas Zainul Arifin.
11. Universitas Al Washliah.
12. Universitas Cut Nya'Dien.
13. Universitas Simalungun.
14. Institut Agama Islam Negeri "IMAM BONJOL" Padang Sidempuan.
15. STO Medan.
16. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Medan.

Dan berbagai perguruan tinggi akademi swasta lainnya. Jumlah mahasiswa seluruhnya pada tahun 1974 adalah 13.382 dan dosen 1383 orang.

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan pendidikan di Sumatera Utara maka dapat dikumpulkan keadaan pada tahun 1974 sebagai berikut .

Jumlah STK sebanyak 173, SD. 3974, SLP. 5328, SMA 143 SMEA. 32 dan STM 45 sekolah. Jumlah ini meliputi sekolah-sekolah Negeri, Bersubsidi, Berbantuan, dan Swasta dengan murid seluruhnya 1.191.410 orang dan tenaga pengajar 49 438 guru.

Di samping itu masih ada sekolah sekolah lain seperti kursus-kursus kejuruan dan madrasah madrasah, jumlah sekolah sekolah ternyata masih kurang dan setiap tahun selalu diusahakan penambahannya baik melalui Pelita Nasional maupun daerah dan yang paling penting ialah penambahan lokal lokal melalui proyek Inpres (Instruksi Presiden) dan Ingub (Instruksi Gubernur).

8.3.2. Perkembangan Seni Budaya.

Pada zaman revolusi 1945 kesenian dan kegiatan seni ditujukan kepada perjuangan mempertahankan kemerdekaan Lagu lagu perjuangan seperti Butet, Meriam Tomong, Erkata Bedil Piso Surit, Inang Sarge, dan sebagainya adalah nyanyian yang populer di masa itu. Sejalan dengan itu seni drama berkembang dipentaskan di front-front untuk mengisi acara bagi pemuda pemuda yang turut berjuang.

Sejak pengakuan kedaulatan para seniman dijiwai oleh pikiran kebangsaan atau nasionalisme menentang pikiran kedaerahan yang

sempit. Kegiatan drama berisi epos perjuangan melukiskan jiwa persatuan dan pengurbanan banyak menarik perhatian Kesenian daerah dikembangkan dalam rangka pembinaan kesenian atau kebudayaan nasional. Tari tarian Melayu dan lagu Melayu sangat menonjol dan banyak dilakukan sayembara tari-tarian Melayu. Sayembara ini sering disebut sayembara Serampang Duabelas, yaitu tarian Melayu yang paling populer Sementara itu nyanyian daerah Tapanuli ciptaan komponis Guru Nahum Situmorang dan nyanyian Karo ciptaan komponis Jaga Depari mulai populer dan banyak menarik perhatian Komponis Cornel Simanjuntak yang banyak menciptakan lagu-lagu perjuangan selalu diperingati dengan menampilkan ciptaan ciptaannya. Komponis lain seperti Lily Suheyri dan Saaba, B.Y. Supardi banyak pula menciptakan lagu-lagu Melayu Modern.

Seni sastra berkembang dengan pesat pada tahun limapuluh-an. Hampir setiap harian di Medan menyediakan ruangan sastra dan beberapa penulis daerah ini telah menciptakan sanjak-sanjak serta cerpennya di berbagai harian dan majalah-majalah. Pada waktu itu seni deklamasi berkembang pula melalui sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi kebudayaan. Sanjak-sanjak Chairil Anwar, Amir Hamzah, dan Sitor Situmorang banyak dibawakan oleh deklamator/deklamatrix. Mereka ini sebenarnya penyair bertaraf nasional tetapi di daerah ini mereka lebih dicintai karena dirasakan sebagai putera daerah ini. Kecintaan itu adalah disebabkan jasa jasa dan karya mereka yang berjiwa kebangsaan. Jiwa kebangsaan lebih menonjol dari jiwa kedaerahan. Oleh sebab hasil karya sastrawan yang bertaraf nasional banyak dibaca dan didramakan seperti karya Utuy Tatang Sontani, Usmar Ismail, Abu Hanifah dan lain-lain.

Umumnya pada tahun limapuluhan orang-orang di daerah ini sangat sensitif terhadap pengaruh Barat. Hidup kebarat baratan selalu mendapat cemoohan. Pemakaian bahasa Belanda oleh berbagai kalangan tidak disukai dan bahasa Indonesia memperoleh kedudukan paling tinggi. Kehidupan yang sederhana lebih disukai sehingga orang-orang yang sehabis perang kemerdekaan itu yang mencoba hidup mewah selalu mendapat sorotan dituduh koruptor atau OKB (Orang Kaya Baru). Pemakaian mobil dinas dianggap sebagai perbuatan yang melanggar tata hidup sederhana dan mendapat sorotan masyarakat, menjadi buah bibir dan sorotan surat-surat kabar.

Pada zaman pemerintahan Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1959 sampai tahun 1965 di Sumatera Utara terasa sekali berbagai pertentangan golongan dan ideologi. Lama kelamaan terasa dominasi Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat suatu organisasi berinduk pada PKI) yang secara sistematis berusaha menyudutkan seniman-seniman yang bukan komunis. Dengan kedok revolusi kesenian dijadikan alat politik. Puncak pertentangan ini ialah pengucilan golongan non-komunis dengan tuduhan manikebuis. Orang-orang yang dituduh manikebuis itu ialah orang-orang non-komunis yang berorientasi kepada Manifesto Kebudayaan. Beberapa harian (surat kabar) dibreidel karena dituduh pro manifesto-kebudayaan.

Salah satu nilai positif di bidang kebudayaan pada masa ini ialah tertutupnya pengaruh asing. Nama-nama asing yang berbau barat ditukar dengan nama-nama dalam bahasa Indonesia. Tulisan tulisan Cina pada merek toko, reklame film, dihapus malahan nama-nama asing ditukar dengan nama-nama berbunyi nasional. Film barat jarang diputar dan sangat terpilih, sebaliknya film film Indonesia, Malaya, India banyak diputar di bioskop bioskop. Lagu-lagu barat dilarang dan lagu-lagu Indonesia menjadi sangat populer. Proses ini dilakukan dengan tekanan, sehingga kurang diresapi dan banyak mendapat reaksi secara diam-diam. Oleh sebab itulah maka setelah jatuhnya pemerintahan Orde Lama seolah-olah terjadi topan reaksi dengan penerimaan pengaruh barat dalam seni musik dengan lagu-lagu pop dan band-band ala barat. Gaya **hippies** dengan stelan gondrong, film barat Jepang dan film Hongkong yang lebih terkenal dengan film mandarin yang menyuguhkan kekerasan, pembunuhan, sadisme, narkotik, **free sex**, membanjiri bioskop-bioskop.

Gelombang penerimaan pengaruh barat ini disadari sebagai bahaya terhadap kebudayaan nasional dan kepribadian nasional. Oleh sebab itu tiap daerah mulai membina kebudayaan daerah sebagai bahagian kebudayaan nasional. Tari-tarian daerah nyanyian-nyanyian daerah mulai dibina oleh berbagai organisasi di bawah bimbingan pemerintah. Kabin Kebudayaan Departemen P dan K banyak berperan dalam pembinaan kebudayaan daerah ini. Di samping itu di Medan berdiri DKM, yaitu Dewan Kesenian Medan yang berfungsi sebagai pembina dan pengembang kebudayaan di Sumatera Utara. Sarana bagi pengembangan kesenian daerah itu pun dibangun seperti **Medan Fair** dan Pusat Kesenian Tapan Daya.

Lembaga lain yang banyak peranannya ialah RRI dan TV RI yang setiap tahun melakukan kegiatan **festival** nyanyi tari dan drama. **Festival-festival** itu mendorong berkembangnya kesenian di daerah daerah di Sumatera Utara.

Di samping itu pembinaan generasi muda dalam berbagai kegiatan kesenian dan olah raga dilakukan melalui sekolah sekolah dan di fakultas-fakultas sebagai kegiatan ekstra kurikuler Gelanggang Mahasiswa di Perguruan Tinggi turut membina kesenian dan kebudayaan. Siara radio-radio amatir yang berkembang belakangan ini turut membina para remaja dalam berbagai kegiatan. Begitu pula **grup-grup folk song** dan **grup-grup** tari dan drama mulai populer dewasa ini di Sumatera Utara. Kelompok seni tari dan nyanyi **Ensemble Bukit Barisan** adalah kelompok yang paling terkenal di daerah ini yang membawakan tari-tarian dan nyanyian daerah.

Untuk mendapat gambaran peranan pemerintah dalam pembinaan kesenian di Sumatera Utara, sejak tahun 1971 telah terdaftar sejumlah organisasi kesenian seperti Senitari Seni musik, Seni Rupa/Lukis, Seni drama/Film, Seni Sastra, Pembinaan Apresiasi Seni dan lain-lain. Jumlah organisasi yang terdaftar itu setiap tahun, misalnya organisasi Seni Tari pada tahun 1971 terdaftar 8 organisasi, pada tahun 1972 terdaftar 60 organisasi sedang pada tahun 1974 menurun menjadi 31 organisasi. Jumlah organisasi Seni Musik pada tahun 1971 terdaftar 4 organisasi tahun 1972 terdaftar 75 organisasi sedang tahun 1974 menjadi 59 organisasi Seni sastra pada tahun 1971 terdaftar 6 organisasi pada tahun 1972 terdaftar 18, tahun 1973 terdaftar 32 sedang tahun 1974 terdaftar 18 organisasi saja.

Data ini memperlihatkan jumlah organisasi yang tidak tetap perkembangannya. Hal itu disebabkan sifat amatir dari organisasi itu. Biasanya organisasi-organisasi kesenian disponsori oleh orang-orang, pemerintah daerah dan juga perusahaan-perusahaan. Pembinaannya memerlukan biaya yang besar dan tidak selamanya sponsor itu mampu membiayainya Begitu pula situasi dan waktu sangat mempengaruhi Menjelang **festival** film nasional di Medan dilakukan berbagai kegiatan pembuatan film di daerah ini Maka pada waktu itu banyak muncul organisasi Seni Drama dan Film, tetapi setelah festival itu berlalu maka organisasi-organisasi itu pun mulai berkurang.

Kegiatan seni sastra berlangsung lebih kontinu. Pengarang-

pengarang Angkatan 66 seperti Sori Siregar, Johan A. Nasution, Aldian Arifin, Burhan Piliang, Zakaria, M. Pase, Z. Pangaduan Lubis, Arif Husin Siregar, dan lain-lain banyak yang masih aktif. Sementara itu pengarang-pengarang muda telah pula muncul dan bahkan tahun 1975 telah sering mengadakan diskusi-diskusi sastra.

Pembinaan kesenian daerah sejalan pula dengan perkembangan daerah Sumatera Utara sebagai daerah pariwisata. Daerah-daerah yang banyak dikunjungi wisatawan asing ialah Tanah Karo, Simalungun, Toba, dan Nias. Para wisatawan sangat tertarik kepada kesenian asli daerah yang mereka kunjungi. Oleh sebab itu di daerah-daerah tadi dilakukan berbagai kegiatan pembinaan kesenian daerah. Begitu pula bangunan-bangunan tradisional seperti rumah adat, istana-istana, mesjid-mesjid banyak mendapat perhatian wisatawan di samping keindahan alam daerah ini. Obyek-obyek pariwisata itu telah banyak yang dipugar kembali.

8.4. Alam Pikiran Dan Kepercayaan.

8.4.1. Perkembangan Agama.

Di dalam alam kemerdekaan Republik Indonesia, maka setiap warga negara dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, seperti yang terdapat dalam pasal 29 UUD 45. Demikianlah di daerah ini seluruh kegiatan menyelenggarakan dakwah agama sejak zaman kemerdekaan telah mendapat kebebasan yang luas.

Organisasi-organisasi agama baik Islam, Kristen maupun Hindu-Budha telah banyak memperoleh kemajuan selama zaman kemerdekaan itu. Mereka telah membangun rumah rumah ibadat, sekolah-sekolah dan kegiatan-kegiatan dakwah atau penyiaran agama. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan seperlunya dan mendorong kegiatan-kegiatan tersebut. Di samping itu pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan melalui Departemen Agama dan alat-alat kekuasaan negara demi ketentraman beragama dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing. Pengawasan dan penertiban itu dilakukan terhadap persengketaan-persengketaan yang terjadi akibat kemajuan yang terjadi di tengah masyarakat. Organisasi-organisasi agama, seperti organisasi gereja dan organisasi Islam seperti HKBP, GKPI, Muhammadiyah, Al Washliyah dan lain-lain dalam melancarkan kegiatan-kegiatan mereka pernah mengalami sedikit persentuhan tetapi berkat bimbingan yang diberikan oleh pemerintah melalui Bimbingan masyarakat Islam dan

Bimbingan masyarakat Kristen. Departemen Agama, bimbingan Pemerintah Daerah melalui saluran-saluran musyawarah perselisihan itu dapat diselesaikan.

Pengawasan yang diberikan oleh pemerintah terutama ditujukan kepada penyalahgunaan hak kebebasan beragama yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ditandai oleh banyaknya aliran-aliran agama dan kepercayaan, mistik, kebatinan yang bercorak beraneka ragam. Aliran-aliran keagamaan itu muncul disebabkan salah menafsirkan pasal 29 UUD 45 sehingga menimbulkan rasa tidak aman dan bertentangan dengan keinginan untuk membina kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia No 1 tanggal 27 Januari 1965 ditegaskan.” Setiap orang dilarang dengan sengaja atau mengusahkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan dari agama itu, penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Salah satu realisasi itu, maka Jaksa Tinggi Sumatra Utara tanggal 13 September 1967 telah memutuskan melarang segala macam kegiatan organisasi Budha Jawi Wisynu di daerah hukum Sumatra Utara.

Begitu pula praktek-praktek keagamaan, klenik, tarikat-tarikat yang menyimpang dari kebenaran agama telah ditindak dan diperiksa melalui pengadilan. Paling akhir pada tahun 1976 ini pemerintah telah melarang kegiatan organisasi agama Sekte Saksi Jajova yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang diakui pemerintah. Adapun agama-agama yang diakui oleh pemerintah itu ialah Islam, Kristen, Katolik, Budha, dan Kong Hu Cu.

Kemajuan dakwah agama menimbulkan kompetisi dalam batas-batas hubungan yang harmonis. Daerah Sumatra Utara adalah daerah yang heterogen dan sebagian besar penduduknya beragama Islam dan Kristen. Pada tahun 1974 penganut agama agama itu adalah lebih kurang :

Islam . 3.989.000 Katolik . 220.000 Protestan 1.746 000, Kristen lainnya . 179.000 Hindu 12.000 Budha : 264.000 dan Kong Hu Cu 10.000. Di samping itu masih ada yang menganut kepercayaan asli seperti pelbegu dan permalim yang berjumlah sekitar 197.000. Kemajuan lalu lintas perdagangan, pembukaan areal pertanian, perburuhan dan sebagainya menyebabkan pergaulan yang semakin rapat antara pemeluk-pemeluk agama. Begitu pula

pembangunan rumah-rumah ibadah seperti gereja, mesjid, klen-teng tersebar pada daerah-daerah yang penduduknya berbeda beda agama. Pada mulanya pembangunan seperti itu menimbulkan semacam ketegangan di kalangan masyarakat, tetapi lama kelamaan disadari bahwa ketegangan itu bukan berdasarkan kepercayaan atau keyakinan masing-masing melainkan disebabkan hal hal lain seperti perbedaan suku, perbedaan taraf kemajuan dan perbedaan sikap. Oleh sebab itu setelah dilakukan berbagai pendekatan baik melalui pemerintah maupun melalui dialog antar pemuka pemuka agama, persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perkembangan agama dapat pula dilihat dari pertumbuhan sekolah-sekolah agama yang dibangun oleh berbagai organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat atau yayasan-yayasan. Sekolah-sekolah agama Islam telah dibangun oleh berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Al Jami'atul Washliyah, Al Itihadiyah Nahdhatul Ulama, dan lain lain Sekolah sekolah itu baik sekolah-sekolah umum yang diberi tambahan pendidikan agama, maupun sekolah sekolah agama seperti Ibtidaiyah Tsanawiyah, Al Qismu'l Ali (Aliyah), Pendidikan Guru Agama (PGA). Beberapa Universitas seperti Universitas Islam Sumatra Utara (UISU), Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Universitas Al Washliyah, Institut Al Itihadiyah, Universitas Puteri Islam Indonesia, Universitas K.H.Zainul Arifin adalah lembaga Perguruan Tinggi Islam. Suatu perkembangan yang sangat penting ialah berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara di Medan yang mulanya adalah cabang dari IAIN Arraniri Darussalam.

Kegiatan-kegiatan yang sama telah dilakukan pula oleh organisasi-organisasi Kristen baik Protestan maupun Katolik. Di samping sekolah-sekolah umum seperti Taman Kanak-kanak, SD. SMP. SMA., SKKP., SKKA., SPG., maka di kalangan Kristen Katolik terdapat Seminari Menengah, Seminari Tinggi, dan Sekolah Suster sedang di kalangan Kristen Protestan terdapat sekolah guru Injil, Sekolah Pendidikan Guru Agama, **Bijbel-Vrouw**, Sekolah Theologi Menengah, Sekolah Tinggi Theologi dan Institut Al Kitab. Fakultas Theologi adalah fakultas yang penting pada Universitas HKBP Nommensen. Gereja-gereja Katolik, maupun Protestan, Methodist, Advent dan organisasi-organisasi gereja seperti HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, HKI (Huria Kristen Indonesia) GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia), GBKP (Gereja Batak Karo Protestan), GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun) telah membangun sekolah-sekolah.

8.4 2. Kehidupan Intelektual.

Pada awal kemerdekaan terasa sekali kekurangan golongan intelek untuk memegang posisi di berbagai bidang seperti pemerintahan, militer, perkebunan, perdagangan dan sebagainya. Pada umumnya kriteria yang dipakai pada masa itu ialah segi mental, yaitu orang-orang yang berjiwa proklamasi dan berjiwa kolonial. Pada umumnya perjuangan dipimpin oleh orang-orang pergerakan di zaman penjajahan Belanda dan orang-orang yang telah memperoleh pembinaan di zaman Jepang.

Sesudah pengakuan kedaulatan terdapat semacam gelombang di kalangan para pemimpin dan orang-orang yang memegang posisi penting. Golongan pejuang kemerdekaan banyak mengundurkan diri dan bergerak di bidang swasta, sebagai pengusaha, petani, guru, pedagang dan partai politik. Ketentuan-ketentuan KMB menyebabkan kompromi di kalangan kepemimpinan. Posisi-posisi yang telah dipegang oleh orang-orang pro-Belanda di zaman Perang Kemerdekaan tidak segera dapat diganti oleh orang-orang republikan. Rasionalisasi menyebabkan banyak pimpinan militer pada zaman kemerdekaan merasa kecewa dan sebaliknya bekas KNIL terpaksa diterima di dalam lingkungan Tentara Republik Indonesia Serikat. Sampai tahun 1955 sebenarnya posisi orang-orang Republikan masih sangat lemah dalam kepemimpinan di daerah ini.

Pada masa Demokrasi Liberal terjadi pula semacam perlombaan kepemimpinan di dalam partai-partai politik. Multi partai yang terdapat pada masa antara tahun 1950-1959 menimbulkan terbentuknya elites politik yang berasal dari berbagai organisasi politik dan golongan. Kedudukan-kedudukan penting diperebutkan oleh organisasi-organisasi yang ikut pemilu pada tahun 1955 dan segi-segi teknis keahlian kurang diperhitungkan untuk memegang posisi itu. Dinas-dinas dan jawatan menjadi rebutan golongan-golongan dan kursi-kursi penting di pemerintahan juga demikian.

Sementara itu kemajuan pendidikan telah mengubah situasi ini. Sekolah-sekolah bertambah dengan cepat dan pada tahun 1952 telah tumbuh Universitas Islam Sumatra Utara, yaitu Universitas yang tertua di Sumatra Utara. Kemudian timbul gagasan untuk membentuk Universitas Sumatera Utara melalui Yayasan dan pada tahun 1952 itu juga berhasil mendapatkan bentuknya sebagai Universitas dan pada tahun 1957 diakui sebagai Universitas negeri oleh Pemerintah. Sementara itu pemuda-pemuda yang sejak tahun 1950 memperoleh pendidikan di Universitas-Universitas di Jawa banyak

yang kembali ke Sumatera Utara untuk menjadi dosen dan ditambah dengan tenaga-tenaga mahasiswa melalui PTM (Pengarahan Tenaga Mahasiswa).

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara adalah fakultas yang tertua dan telah menghasilkan sarjana pada tahun 1957. Kemudian menyusul Fakultas Kedokteran, Pertanian, Ekonomi, Teknik, Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam dan Fakultas Sastra. Sampai tahun 1973 Universitas ini telah menghasilkan 2133 sarjana dari berbagai Fakultas. Seluruh sarjana ini telah berpartisipasi di tengah masyarakat dan sebagian besar bertugas di Sumatera Utara.

Sementara itu sejak tahun 1965 Institut Keguruan Ilmu Pendidikan telah berdiri, setelah melalui proses sebagai Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sumatera Utara dan IKIP Jakarta Cabang Medan. Sampai tahun 1973 IKIP Medan telah menghasilkan 426 sarjana Pendidikan dari berbagai jurusan.

Pembinaan tenaga tenaga intelektual dilakukan pula oleh berbagai Universitas di Sumatera Utara seperti Universitas HKBP Nomensen UISU, dan sebagainya. Pada umumnya tenaga-tenaga mereka juga telah dimanfaatkan oleh daerah ini dalam berbagai bidang, terutama di bidang pemerintahan, pendidikan, perkebunan, jawatan-jawatan, dinas dinas, dan perusahaan-perusahaan.

Untuk mendapat gambaran sekedarnya tentang tenaga intelektual ini maka dapat kita lihat tamatan sekolah sekolah, Akademi, dan Universitas di Sumatera Utara pada tahun 1974. Jumlah seluruhnya dari tamatan itu baik yang berasal dari sekolah-sekolah negeri maupun swasta adalah sebagai berikut Tamatan SD 1.117.039; tamatan SLP 281.824 ; tamatan kejuruan SLP. 58.631; tamatan SLA 77.718; tamatan kejuruan SLA 55.912; tamatan Akademi 8.958; tamatan Universitas 8.632 orang.

Sementara itu timbul masalah penyaluran dan pemanfaatan tenaga-tenaga ini. Pada umumnya kesulitan-kesulitan yang dialami ialah karena keinginan utama para tamatan sekolah-sekolah itu ialah untuk memperoleh kedudukan di lapangan kepegawaian dan sedikit sekali yang berusaha secara swasta atau berdiri sendiri. Lapangan usaha swasta dan negeri sangat terbatas sehingga sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan dewasa ini.

Masalah lain ialah masalah **drop-out**, yaitu masalah bagi anak-anak yang terpaksa meninggalkan sekolah sebelum tamat. Jika **drop-out** itu dialami pada tingkat pendidikan yang rendah

umumnya tidak banyak persoalan, karena pekerjaan kasar masih dapat mereka kerjakan, tetapi jika seorang **drop-out** pada tingkat yang lebih tinggi seperti SLA atau Universitas maka soalnya menjadi sulit, karena mereka tidak tertampung dalam pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.

Masalah lain ialah masalah pertambahan penduduk dan kesempatan sekolah. Walaupun daerah ini sudah pernah diumumkan sebagai daerah bebas Buta Huruf tetapi kenyataan sekarang masih terdapat orang-orang yang buta huruf. Hal ini disebabkan tidak meratanya kesempatan sekolah di desa-desa dan tenaga guru serta gedung-gedung sekolah masih sangat kurang. Sejak Pelita I telah dibangun sekolah-sekolah Dasar melalui proyek proyek inpres dan Ingub. Pada tiap kabupaten telah ada SPG negeri yang menghasilkan guru-guru bagi sekolah-sekolah itu. Makin lama makin banyak sekolah yang dibangun dan makin banyak guru yang diangkat menjadi pegawai negeri.

8.5. Hubungan ke Luar.

8.5.1. Bidang Agama.

Penduduk Sumatera Utara sebagian besar beragama Islam, yaitu meliputi kira-kira 3,9 juta orang dan penduduk yang beragama Islam itu sebagian besar tinggal di beberapa kabupaten, seperti Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan. Di kabupaten-kabupaten ini mayoritas penduduknya beragama Islam, sedang di kabupaten kabupaten Tapanuli Utara, Simalungun, Tanah Karo, Dairi, dan Nias penduduknya sebagian besar beragama Kristen.

Orang-orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima tiap tahun berangkat ke Mekkah. Pemberangkatan itu diatur oleh pemerintah melalui Panitia Haji Indonesia. Jumlah orang-orang yang berangkat ke tanah suci itu selalu meningkat, sesuai dengan perkembangan transportasi melalui udara dan laut.

Pelayanan yang semakin baik menyebabkan bertambahnya jumlah jemaah itu, begitu pula bertambahnya penghasilan penduduk menyebabkan semakin banyak orang yang sanggup melaksanakan ibadah haji.

Di samping itu beberapa orang pelajar dari daerah ini telah menyambung pelajarannya di Perguruan Tinggi Islam di Mesir, Saudi Arabia, Iraq, dan Kuwait. Beberapa di antara mereka

telah mendapat beasiswa dari negara-negara tersebut dan organisasi-organisasi Islam sedunia. Mereka yang telah menyelesaikan tugas belajar ke luar negeri banyak yang kembali dan mengabdikan di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan lain yang berupa hubungan luar negeri di bidang agama Islam yaitu kegiatan **Musabaqah Tilawatil Qur'an**. Beberapa orang **Qari** dan **Qari'ah** dari daerah ini telah dikirim ke musabaqah internasional di Kuala Lumpur dan telah berhasil memperoleh gelar juara. Begitu pula tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan beberapa orang Qari dari Mesir datang ke daerah ini membacakan ayat-ayat Al Qur'an dan selalu mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Gereja-gereja Kristen baik Protestan, Katholik, Pante Kosta, dan Advent memperoleh pengikut yang banyak di Sumatera Utara. Pengikut Agama Kristen di Sumatera Utara kira-kira 2,1 juta orang pada tahun 1974. Berbagai organisasi gereja di luar negeri telah memberikan bantuan baik dari Jerman, Negeri Belanda, Italia, Amerika, dan lain-lain.

Missi-missi dari organisasi-organisasi Kristen itu ada pula yang mengirim anggota anggotanya untuk memegang berbagai jabatan kegerejaan di Sumatera Utara ini, walaupun makin lama makin banyak tenaga Indonesia berperan di dalamnya. Tenaga rohaniwan telah dididik di berbagai perguruan agama Kristen di daerah ini dan beberapa orang siswa telah melanjutkan pelajarannya di luar negeri seperti di Jerman, Negeri Belanda dan lain-lain. Yang lebih penting lagi kesempatan bagi para rohaniawan untuk menghadiri berbagai kegiatan pertemuan-pertemuan gereja di luar negeri, memperoleh pendidikan-pendidikan tambahan dan melakukan peninjauan-peninjauan.

Hasil-hasil pendidikan yang telah mereka peroleh telah dapat dibuktikan di tengah jemaahnya di daerah ini.

8.5.2. Bidang Seni Budaya.

Missi-missi kesenian dari Sumatera Utara telah melakukan perlawatan ke berbagai negara tetangga terutama ke Malaysia dan Singapura. Missi itu dikirim melalui berbagai badan antaranya melalui missi pemerintah daerah, organisasi-organisasi kesenian, sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi. Beberapa organisasi kesenian yang terkemuka ialah Ensembel Bukit Barisan, Sri Indra Ratu, Al Wathan, El Sutaya dan Yayasan Melati.

Beberapa kelompok kesenian dari daerah ini telah melakukan perlawatan ke berbagai negara seperti Jepang, Australia, dan beberapa negara di Eropah. Kelompok kesenian yang melakukan perlawatan itu yang menonjol ialah seni suara dan seni tari. Daerah Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang kaya akan berbagai nyanyian daerah dan tarian daerah.

Beberapa orang seniman dari daerah ini telah memperoleh kesempatan untuk menghadiri berbagai pertemuan internasional di luar negeri, antara lain pertemuan para sastrawan di Taipeh, Seoul, dan Malaysia.

Mereka telah banyak berjasa memperkenalkan kebudayaan nasional di luar negeri. Satu segi lain yang tak kurang pentingnya ialah hasil kesenian dan kerajinan rakyat seperti ukir-ukiran, anyaman, tenunan, lukisan yang banyak mendapat perhatian para turis yang datang ke daerah ini.

Di bidang olah raga daerah ini telah mengirim misi-misi olah raga ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Birma, Thailand, Korea, Hongkong, dan Jepang dalam berbagai cabang olah raga. Sebaliknya penyelenggaraan berbagai pertandingan internasional seperti sepak bola, golf, basket, bowling, dan lain-lain di Sumatera Utara telah mengundang berbagai negara lain seperti Australia, Jepang, Birma, Thailand, Hongkong, India, Malaysia, dan Singapura.

Kedatangan misi-misi kesenian asing seperti dari Amerika, Negeri Belanda, Australia, India, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura dan lain-lain, telah datang ke daerah ini dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Misi-misi kesenian itu telah melakukan berbagai pertunjukan seperti seni suara, musik, tari, drama, dan paling menarik ialah nyanyian nyanyian rakyat dari berbagai negara. Pengalaman akan dunia luar dari bidang kesenian dan kebudayaan itu terutama melalui pertunjukan film. Film-film asing seperti dari Amerika, Inggris, Italia, India, Hongkong, Jepang dan Malaysia banyak digemari di daerah ini. Perluasan pembangunan bioskop dewasa ini ke desa-desa dan daerah luar kota menyebabkan semakin pesatnya pengaruh seni budaya asing pada lapisan masyarakat desa.

Perluasan dan pembinaan daerah pariwisata di Sumatera Utara menyebabkan semakin banyaknya turis asing yang datang ke daerah ini. Mereka dengan mudah bergaul dengan masyarakat di berbagai daerah sampai ke desa-desa. Masyarakat di daerah ini

seperti juga di daerah lain Indonesia yang terkenal ramah tamah menyebabkan mudahnya pergaulan antara orang-orang asing dengan penduduk. Hasil dari interaksi itu menyebabkan penduduk mengenal peri kehidupan, tingkah laku, bahasa, serta kebiasaan-kebiasaan orang asing. Banyak sedikit pergaulan itu telah membawa perubahan-perubahan sikap, tata-cara berpakaian, apresiasi seni di kalangan masyarakat terutama di kalangan remaja. Lagu-lagu pop barat, **grup-grup** musik pop barat banyak penggemar dan banyak pengikutnya di daerah ini, sehingga di daerah ini pun tumbuh **grup-grup** musik yang meniru cara permainan pemusik-pemusik barat.

8.5.3. Bidang Ekonomi Sosial.

Daerah Sumatera Utara mempunyai potensi besar dalam ekspor hasil pertambangan minyak yang berasal dari tambang-tambang minyak di Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu. Bahan ekspor lain yang penting ialah hasil perkebunan seperti karet, kelapa sawit, tembakau, teh, dan hasil perkebunan rakyat seperti karet, kopi, pinang, kopra, serta hasil hutan seperti kayu, kemenyan, damar, rotan, dan lain-lain.

Pada tahun 1974 telah diekspor 1.891.208 ton minyak bumi, dan ekspor hasil-hasil lain sejumlah 901.571 ton. Ekspor minyak melalui pelabuhan minyak di Pangkalan Susu dan ekspor hasil-hasil lain itu melalui Pelabuhan Belawan. Ekspor minyak terutama ke Jepang sedang ekspor hasil-hasil lain ialah ke Eropa Amerika, dan Jepang.

Untuk memenuhi keperluan daerah ini beberapa jenis barang telah diimpor yaitu berupa bahan pangan, tekstil, bahan bangunan, bahan bakar, bahan kimia, mesin-mesin dan bahan kelontong. Jumlah impor ke daerah ini meliputi 938.244 ton pada tahun 1974. Barang-barang tersebut berasal dari Amerika, Eropa, dan beberapa negara Asia seperti Jepang, Hongkong dan Singapura.

Untuk mengembangkan kegiatan perdagangan dahulu dikembangkan kegiatan melalui Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) dan Organisasi Perusahaan Sejenis Impor. Dewasa ini peranan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) semakin penting.

Dalam kegiatan produksi berbagai cabang perusahaan dan perkebunan di daerah ini sejak pengakuan kedaulatan telah terjadi beberapa perubahan. Pada mulanya perusahaan-perusahaan asing meneruskan usahanya sebagaimana pada zaman penjajahan Belan-

da. Perkebunan-perkebunan, perusahaan kereta api, perusahaan perkapalan asing mulai kembali beroperasi di daerah ini. Sekitar tahun 1957 perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi. Kemudian perusahaan-perusahaan Inggris, Amerika, Belgia, dan lain-lain ikut dinasionalisasi. Hubungan dagang dengan Malaysia dan Singapura terputus sejak konfrontasi dengan Malaysia. Oleh sebab itu beberapa perusahaan kecil seperti remiling karet dan kebun-kebun milik warga kedua negara itu menghentikan kegiatannya dan berada di bawah pengawasan pemerintah.

Dewasa ini sesuai dengan politik pemerintah untuk menarik modal asing dalam berbagai bidang produksi dan perdagangan, maka beberapa perkebunan telah dikembalikan kepada beberapa perusahaan asing. Begitu pula perusahaan-perusahaan perkebunan yang diusahakan oleh PNP (Perusahaan Negara Perkebunan) telah direhabilitasi dengan memperoleh dana dari pinjaman dan penanaman modal asing. Perkembangan selanjutnya dari perusahaan-perusahaan itu telah semakin mantap dan status PNP diubah menjadi PT. Perkebunan.

Di bidang perminyakan kegiatan produksi tetap berada di tangan pemerintah melalui badan usaha yang dibentuk pemerintah. Usaha itu telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan asing dari Jepang dan Amerika. Kerjasama itu baik dalam bentuk modal maupun dalam bentuk teknologi.

Pertumbuhan industri mulai tumbuh walaupun sebagian besar masih berbentuk industri kecil yang diusahakan oleh modal nasional. Beberapa **assembling** telah tumbuh pula dengan menggunakan kerja sama dengan modal asing.

8.5.4. Bidang Pendidikan.

Perguruan-perguruan Tinggi di Sumatera Utara seperti Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menerima juga beberapa mahasiswa asing antara lain dari Malaysia. Banyak di antara mereka telah berhasil menyelesaikan tugas belajarnya dan kembali ke tanah air mereka.

Tenaga-tenaga Akademis dari luar negeri seperti dari Amerika, Australia, Inggris, ada juga yang memberikan imbalan tenaga di beberapa Perguruan Tinggi seperti USU dan IKIP, tetapi kedudukan mereka hanya sekedar memberi bantuan pada bidang-bidang tertentu, terutama dalam Ilmu Bahasa.

Pada tingkat Perguruan Tinggi bantuan-bantuan telah diperoleh dari berbagai negara dan lembaga terutama dalam pengajaran bahasa dan peningkatan mutu tenaga akademis, Dosen-dosen dari berbagai fakultas telah mendapat bantuan dalam program pendidikan **Post-Graduate** di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang. Di antara mereka ada yang telah berhasil menyelesaikan studi untuk memperoleh titel Ph.D dan kembali ke daerah ini untuk menyumbangkan tenaganya. Program-program ini selain dari program yang disponsori oleh pemerintah negara yang bersangkutan ada juga yang melalui Lembaga-lembaga Pendidikan seperti **Colombo-Plan, Ford-Foundation, Unesco, dan Unicef.**

Bantuan-bantuan lain telah diterima berupa buku-buku, alat-alat laboratorium, instrumen-instrumen, yang sangat penting dari beberapa negara. Bantuan lain ialah kesempatan yang telah diberikan kepada beberapa tenaga akademis untuk menghadiri seminar-seminar, peninjauan-peninjauan, dalam berbagai kegiatan Ilmu Pengetahuan. Pada umumnya kegiatan seperti ini dilakukan melalui kerjasama Pendidikan antar negara.

Pada tingkat SLTA pada waktu belakangan ini telah berkembang program pertukaran pelajar antara Amerika Serikat dengan Republik Indonesia. Mereka datang ke Sumatera Utara dan beberapa pelajar dari daerah ini telah pula berkunjung ke Amerika Serikat. Kegiatan ini disponsori oleh **American Field Service.**

Salah satu kegiatan pendidikan yang penting ialah bidang kepramukaan. Pramuka dari daerah ini telah mengirim kontingen pada kegiatan perkemahan di luar negeri seperti di Filipina, Jepang, dan Malaysia. Sebaliknya dari negara-negara lain telah datang pula pimpinan dan rombongan pandu dari Malaysia dan negara-negara lain.

8.5.5. Bidang Komunikasi.

Kemajuan lalu lintas laut dan udara makin lama makin lancar dari daerah Sumatera Utara dengan negara-negara lain. Pelabuhan Belawan didatangi berbagai kapal asing hampir dari semua negara-negara besar di dunia. Begitu pula pelabuhan udara Polonia telah didatangi berbagai pesawat asing seperti **Singapura Air Lines, Malaysia Air System**, dan lain-lain. Pesawat-pesawat GIA dan Merpati telah menghubungkan daerah ini dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perkembangan ini menyebabkan kelancaran komunikasi antar negara melalui Sumatera Utara.

Kemajuan teknologi menimbulkan hubungan yang lebih cepat, dengan memanfaatkan berbagai saluran seperti radio, radio telefoni, dan pemanfaatan alat-alat moderen itu semakin baik. Di daerah Sumatera Utara dibangun stasiun-stasiun **microwave** yang menghubungkan beberapa kota besar di Indonesia. Pemakaian Satelit Domestik Palapa pada tahun 1975 telah membuka secara luas hubungan dengan luar negeri melalui layar televisi. Berbagai kegiatan internasional dengan cepat diikuti di Sumatera Utara.

Badan-badan yang mengatur hubungan komunikasi itu dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Pos, Perum Telepon. Untuk memperlancar hubungan antara daerah ini dengan negara asing, maka beberapa negara telah membuka perwakilannya dalam tingkat Konsulat. Beberapa Konsulat Asing adalah Amerika, Rusia, Jepang, Jerman, India, Belgia, Belanda, Malaysia, Singapura, dan, lain-lain. Kegiatan dari perwakilan negara asing ini telah mempererat hubungan dalam bidang perdagangan dan budaya.

DAFTAR – BACAAN

- Dahm, Bernard., *History of Indonesia in The Twentieth Century*, Pall Mall Press, London, 1971.
- Dhaniswara., *Dokumentasi Sewindu*, Yayasan Pendidikan Kejuruan, 1953.
- Engelbrecht, Mr.W.A., *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang Dan Peraturan serta UUD Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijtoffs, Uitgevers Mij NV, Leiden, 1954.
- Gintings, Ma-Jen Djamin., *Bukit Kadir*, CV. Umum, Medan 1964.
- , *Titi Bambu*, Diterbitkan Keluarga Alm. Let-Jen Drs. Jamin Gintings.
- Junus, Mahmud , *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Pustaka Muhammadiyah, Jakarta, 1960.
- Nasution, Djenderal A.H., *Pokok-Pokok Gerilya*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1953.
- Nasution, Harun., *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.
- Rajab, Muhammad., *Catatan di Sumatera*, Balai Pustaka. Jakarta, 1949.
- Yamin, Prof. H. Muhammad., *Tinjauan Hukum dan Sejarah Tentang Kedaulatan Indonesia Sepanjang Masa*, Kem. Pen, Jakarta, Penerbitan Khusus no. 28.
- Panitia Almanak Sumatera, *Almanak Sumatera*, 1969.
- Kementerian Penerangan., *Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Utara*, 1953.
- Kantor Sensus Statistik Tkt. I Sumatera Utara., *Sumatera Utara Dalam Angka 1974*, Medan 1974.
- Biro Sejarah Prima., *Medan Area Mengisi Proklamasi*, Jilid I, Badan Musyawarah Pejuang Republik Indonesia, Medan 1975.
- Ministry on Information of The Republic of Indonesia, *Illustration of The Revolution, 1945–1949*, Jokjakarta, 1949.
- Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara., *Progress-Report*, Pada Kunjungan Presiden RI Suharto, September 1968.
-

DAFTAR RESPONDEN

1. H.M. Nurdin Nasution, 53 tahun.
Pekerjaan : ABRI
Alamat : Jln. Durian, Medan.
2. Mangaraja Oloan Nasution, 60 tahun.
Pekerjaan : Pensiunan POLRI
Alamat : Panyabungan, Tapanuli Selatan.
3. Sutan Naposi Nasution, 76 tahun.
Pekerjaan : Petani
Alamat : Panyabungan, Tapanuli Selatan.
4. Syamsunir Mandailing, 47 tahun.
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Kantor P & K Kecamatan Muara Sipongi
Tapanuli Selatan.
5. Mukhtar Lubis, 46 tahun.
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Kantor P & K Kecamatan Kotanopan,
Tapanuli Selatan.
6. Munar Lubis, 39 tahun.
Pekerjaan : Kepala SD
Alamat : SD Hutagodang, Tapanuli Selatan.
7. H.A. Nasution, 73 tahun.
Pekerjaan : -----
Alamat : Medan.
8. J.M. Harahap, glr. Baginda Mursak, 45 tahun.
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Kantor Dinas Kehewanan Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan.
9. Sabirin Nasution, 40 tahun.
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Perpustakaan IKIP Negeri Medan Cabang Padang Sidempuan.
10. Adenan Zain Lubis, 57 tahun.
Pekerjaan : Ketua Federasi Penderita Cacat Sumatera Utara
Alamat : Jln. Darussalam, Medan.

11. B. Gultom, 55 tahun.
 Pekerjaan : Pensiunan T N I.
 Alamat : Jln. Ismailiyah no. 10C Medan.
12. A.B. Gultom, 57 tahun.
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri
 Alamat : Pangaribuan, Tarutung, Tapanuli Utara.
13. H. Zainal Hamid
 Pekerjaan : Pedagang.
 Alamat : Jl. Sutoyososromiharjo 54 Sibolga.
14. Mian S. Wijaya.
 Pekerjaan : Pensiunan T N I.
 Alamat : Jl. Rahmadsyah Medan.
15. M.A. Ridwan, (Ex TNI Brigade 12).
 Pekerjaan : Sekretaris Perpustakaan USU Medan
 Alamat : Jl. Universitas Medan.
16. J.E. Saragih.
 Pekerjaan : Pegawai Musium Simalungun.
 Alamat : Musium Simalungun Pematang Siantar.
17. G. Purba.
 Pekerjaan : Pegawai Musium Simalungun
 Alamat : Musium Simalungun Pematang Siantar.
18. Asmah, 55 tahun.
 Pekerjaan : Guru Agama, Sungai Serindan
 Alamat : Pangkalan Tembok, Tanjung Balai, kabupaten Asahan.
19. Zainab, 60 tahun.
 Pekerjaan : Veteran R.I.
 Alamat : Pangkalan Tembok, Tanjung Balai, kabupaten Asahan.
20. Siti Asnah.
 Pekerjaan : Veteran R.I.
 Alamat : Jl. Karya, Tanjung Balai, kabupaten Asahan.
21. Gr. R.K.A. Purba, 55 tahun;
 Pekerjaan : Kepala SMP Negeri Pematang Siantar.
 Alamat : SMP Negeri IV Pematang Siantar.

22. K. Sipayung, 45 tahun.
 Pekerjaan : Pegawai.
 Alamat : Kantor Kebudayaan Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar.
23. P. Saragih, 55 tahun.
 Pekerjaan : Pensiunan Japen Kabupaten Simalungun
 Alamat : Pematang Siantar.
24. B. Purba 75 tahun (Keluarga Raja Dolok Batu Naggar).
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Sinaksak, kabupaten Simalungun.
25. J.M. Sinaga, 70 tahun.
 Pekerjaan : Bertani/Ex. Kepala Kampung
 Alamat : Sandi Raya kabupaten Simalungun.
26. G. Sitompul, 55 tahun.
 Pekerjaan : P.S. Tkt. III Kecamatan Raya
 Alamat : Merek Raya, kabupaten Simalungun.
27. G. Girsang, Ex. Laskar Rakyat.
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Haranggaol, kabupaten Simalungun.
28. Drs. Asril Tamar.
 Pekerjaan : Direktur S.P.G. Negeri Tanjung Balai.
 Alamat : SPG Negeri Tanjung Balai, Asahan.
29. H. Mohammad Zein.
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah
 Alamat : Kampung Tangsi 21E Binjai, Langkat.
30. Rizal Zein.
 Pekerjaan : Wartawan.
 Alamat : Kampung Tangsi 21E Binjai, Langkat.
31. M. Razali.
 Pekerjaan : Bekas Peg. Perkebunan.
 Alamat : Kampung Jatinegara Binjai, Langkat.
32. Ng. Ginting.
 Pekerjaan : Pegawai RSUP. Medan.
 Alamat : Jl. Rahmadsyah Medan.
33. Dra. Peraturen Sukapiring.
 Pekerjaan : Dosen.
 Alamat : Jl. Bintang no. 25A Medan.

34. Absalam Simanjuntak, 56 tahun.
Pekerjaan : Pensiunan K.B.N.
Alamat : Perumahan Pegawai K.B.N. Pematang Siantar.
35. Sabri Munir.
Pekerjaan : Guru Agama
Alamat : Jl. F.L. Tobing 27 Medan.
36. H. Khaidir.
Pekerjaan : Pedagang.
Alamat : Jl. Mesjid 96 Sibolga.
37. M. Zilly Tanjung.
Pekerjaan : Pegawai
Alamat : Jl. Imam Bonjol 51 Sibolga.
38. Abdurrahim T.
Pekerjaan : -----
Alamat : Jl. Japaris Gg. Cempaka 399 Medan.
39. Tengku Ahmad Mad.
Pekerjaan : Korps Musik Kotamadya Medan.
Alamat : Jl. Japaris Gg. Cempaka 401 Medan.
-

DAFTAR KATA

Abris sous roche	= Gua-gua batu dekat sungai tempat tinggal manusia pra-sejarah.
Acte van Erkenning en Bevestiging Afdeling	= Piagam penyerahan hak raja-raja kepada pemerintah Belanda. = Daerah yang diperintah oleh Controleur di zaman Belanda, sama dengan Kabupaten sekarang.
Anak boru	= Pihak keluarga suami (Karo).
Artefak	= Benda-benda peninggalan manusia pra-sejarah.
Austro-Melanosoid	= Penduduk yang mendiami daerah Asia Tenggara pada masa Messolitikum.
Bahal Batu	= Tempat peninggalan bangunan Hindu di Tapanuli Selatan.
Bakkara	= Kampung tertua di Toba.
Banua	= Kampung di Nias.
Banua Toru	= Alam tempat bersemayam roh-roh jahat (Batak).
Banua Tonga	= Alam atau bumi tempat hidup manusia (Batak).
Banua Ginjang	= Alam yang tinggi tempat bersemayamnya para dewa (Batak).
BAPEN	= Badan Pertahanan Negeri.
Barosai	= Nama negeri yang diidentikkan dengan Barus sekarang.
Batara Guru	= Dewa tertinggi.
B e g u	= Roh.
Beradu	= Tidur, bahasa raja-raja (Melayu).
Bersiram	= Mandi, bahasa raja-raja (Melayu).
Bestuur	= Pemerintahan.
Biara	= Tempat beribadah agama Budha.
Bius	= Sekumpulan Huta atau desa (Tapanuli).
BOMPA	= Badan Untuk Membantu Pertahanan Asia.
Boru	= Pihak keluarga suami (Batak).
Boto	= Tubuh yang kasar (pisik) (Nias).
Bunsyu	= Daerah kabupaten pada zaman Jepang.
Bunsyu-Tyo	= Kepala Pemerintahan kabupaten di zaman Jepang (Bupati).

Burutiroangi Buruti-mora'ana'a	= Dewa perempuan yang pertama bagi suku Nias.
Cap-Sembilan	= Disebut juga Cap Sikerueng yang diberikan raja Aceh kepada raja-raja takluk.
Che-li-fo-che	= Sriwijaya menurut berita Cina.
Cho-po	= Jawa menurut berita Cina.
Comite van Ontvangst	= Badan yang dibentuk orang-orang pro Nica di Medan.
Daompung Debata na Tolu, natolu gugu natolu haranjaon	= Seruan kepada Dewa-dewa yang tertinggi yaitu Batara Guru, Soripada, Mangalabulan (Batak).
Datu	= Orang sakti (Dukun)
Datuk	= Keturunan bangsawan (Deli).
Dongan sabutuha	= Golongan semarga dan sederajat (Batak).
D.S.M.	= Deli Spoorweg Maatschappij, Perusahaan kereta api Deli di zaman Belanda.
Eigenaar	= Pemegang hak penggunaan tanah, tuan pengusaha kebun.
Erfpacht	= Hak menguasai tanah buat perkebunan.
E N R I	= Ekonomi Nasional Republik Indonesia.
E R R I	= Ekonomi Rakyat Republik Indonesia.
Esplanade	= Lapangan tempat upacara-upacara di Medan (sekarang bernama lapangan Merdeka).
Flake	= Kampak batu.
Fujiwara	= Barisan mata-mata untuk pemerintah Jepang.
Gemeente	= Pemerintahan kota di zaman Belanda.
Gendang aron	= Tari dan nyanyian rakyat (Karo).
Gi-Tyo	= Walikota di zaman Jepang.
Gyu-gun	= Pasukan yang dibentuk Jepang dari pemuda Indonesia.
Golat	= Desa asal dari suatu marga (Batak Toba).
Gondang naposo	= Tari-tarian jenis tor-tor bagi anak muda (Batak).
Gubernemen	= Sebutan pemerintahan Belanda untuk membedakan dengan pemerintahan raja.
G u n	= Daerah kecamatan di zaman Jepang.
Gun-tyo	= Camat di zaman Jepang.
Guru	= Orang yang mengajar, sebutan sakti di kalangan orang Batak (=datu).

Hades	= Tempat roh-roh jahat (Batak).
Handaruan	= Perikatan Huta (kampung-kampung).
Hei-ho	= Pembantu prajurit di zaman Jepang.
Hoche courte	= Kampak pendek.
Hoho	= Mitologi suku Nias yang berbentuk syair dan yang ditembangkan.
Ho-ling	= Kalingga menurut berita Cina.
Ho-lo-tan	= Kelantan menurut berita Cina.
Hula-hula	= Pihak keluarga istri di kalangan orang Batak.
Huta	= Desa, kampung (Batak).
Ingub	= Instruksi Gubernur.
Inpres	= Instruksi Presiden.
Interniran	= Tawanan.
Intimidasi	= Tekanan-tekanan.
Jambar	= Hidangan adat yang dihormati (Batak).
Janjian	= Perikatan desa.
Jembalang	= Roh jahat.
Kadapol	= Kepala Daerah Kepolisian.
Kaijo Jikei Dan	= Barisan Pantai dan Laut di zaman Jepang.
Kalimbubu	= Pihak keluarga istri (Batak-Karo).
Kan-to-li	= Kandari menurut berita Cina.
Katakana	= Huruf. abjad Jepang.
Keibodan	= Barisan Pemadam Kebakaran, khusus dalam serangan musuh di zaman Jepang.
Keimubutyō	= Polisi Karesidenan di zaman Jepang.
Keisatsu-Tyō	= Polisi Kabupaten di zaman Jepang.
Kenko Tai Sin Tai	= Barisan Pantai dan Laut di zaman Jepang.
Kerajaan Maropat	= Empat kerajaan di Simalungun.
Kingrohoshi	= Gotong royong untuk pemerintah Jepang.
Kyoken moddinger	= Bukit karang yang berasal dari sisa-sisa makanan manusia pra-sejarah.
Komico	= Kepala lorong di zaman Jepang.
K.M.B.	= Konperensi Meja Bundar.
Korte Verklaring	= Perjanjian Pendek.
Kuria	= Kesatuan pemerintahan meliputi beberapa desa di Tapanuli.
Kuta	= Desa, kampung (Karo).

Landek	= Tari adat (Karo).
Lange Verklaring	= Perjanjian/Plakat Panjang.
Landschap	= Pemerintahan raja-raja.
Latu Radano	= Dewa menurut kepercayaan asli Nias yang bersemayam di dunia bawah.
Lawa Langi	= Raja sekalian dewa yang di atas dunia menurut kepercayaan asli Nias.
Ligor	= Tempat peninggalan Kuno di Semenanjung Melayu.
Lumo-lumo	= Tubuh/fisik yang halus sebagai bayangan (Nias).
Magi	= Kekuatan gaib.
Malohe adu	= Penganut-penganut penyembah roh (Nias).
Mamele	= Upacara membujuk roh supaya hadir dengan membaca doa-doa dan memberikan sajian di kalangan orang Batak.
Mana	= Kekuatan gaib.
Mangala Bulan	= Nama Dewa menurut kepercayaan asli orang Batak.
Mantra	= Kata-kata yang dapat memberi pengaruh baik dan buruk.
Mobilisasi	= Pengerahan tenaga masyarakat.
Mao	= Kucing yang menjaga jembatan untuk dunia roh (Nias).
Merga	= Marga, suku.
Mesolitikum	= Zaman Batu Pertengahan.
Makutai	= Barisan Harimau, nama pasukan di zaman Jepang.
Mo-lo-yeu	= Melayu menurut berita Cina.
Mula Jadi Na Bolon	= Dewa tertinggi (Batak).
Mora	= Pihak keluarga istri pada suku Batak Mandailing.
Muspida	= Musyawarah Pimpinan Daerah.
Napindo	= Nasional Pemuda Indonesia.
N.C.	= National Control.
Indung ni surat	= Huruf-huruf utama pada aksara Batak.
Noso	= Fisik halus yaitu nafas menurut kepercayaan di Nias.
Obligasi	= Surat-surat berharga.

Onder-afdeling	= Daerah kecamatan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Onderneming	= Perkebunan.
Ori	= Kesatuan Pemerintahan Desa (Nias).
ORLAB	= Uang Republik Indonesia Labuhan Batu.
ORIN	= Uang Republik Indonesia Nias.
ORITA	= Uang Republik Indonesia Tapanuli.
P.A.D.I.	= Persatuan Anak Deli Islam.
Panca Tunggal	= Unsur-unsur pimpinan daerah yaitu Gubernur, Kepolisian, Panglima Militer, Jaksa Tinggi dan Front Nasional.
Pangdaeral	= Panglima Daerah Angkatan Laut.
Pangdam	= Panglima Daerah Militer.
Pangkodau	= Panglima Komando Daerah Angkatan Udara.
Parbaringin	= Agama asli suku Toba-Toba (Parmalim).
Parhutaan	= Perkampungan (Toba).
Para Ere	= Pemuka agama di Nias.
P.K.O.	= Pengurus Kebun-kebun Onderneming.
P.M.R.	= Pengawas Makanan Rakyat.
P.3.S.T.	= Pimpinan Persatuan Perjuangan Sumatera Timur.
Pasificator	= Pengaman.
Patahian	= Perikatan desa pada suku Batak Toba.
Pawang	= Datu.
Pebble	= Kampak batu.
Pelbegu	= Agama asli di Batak Karo.
PELITA	= Pembangunan Lima Tahun.
Penganak	= Sejenis gong kecil.
Penggual	= Sejenis gong besar.
Pension	= Hotel.
Peri	= Makhluk halus.
Permalim	= Agama asli suku Batak Toba (Parbaringin).
Poenale Sanctie	= Undang-Undang yang mengatur bentuk kontrak bagi kuli perkebunan.
Poh An Tui	= Pasukan bersenjata bangsa Cina yang pro Belanda di Medan.
Po-li	= Bali menurut berita Cina.
Portibi	= Daerah bangunan candi di Tapanuli Selatan.

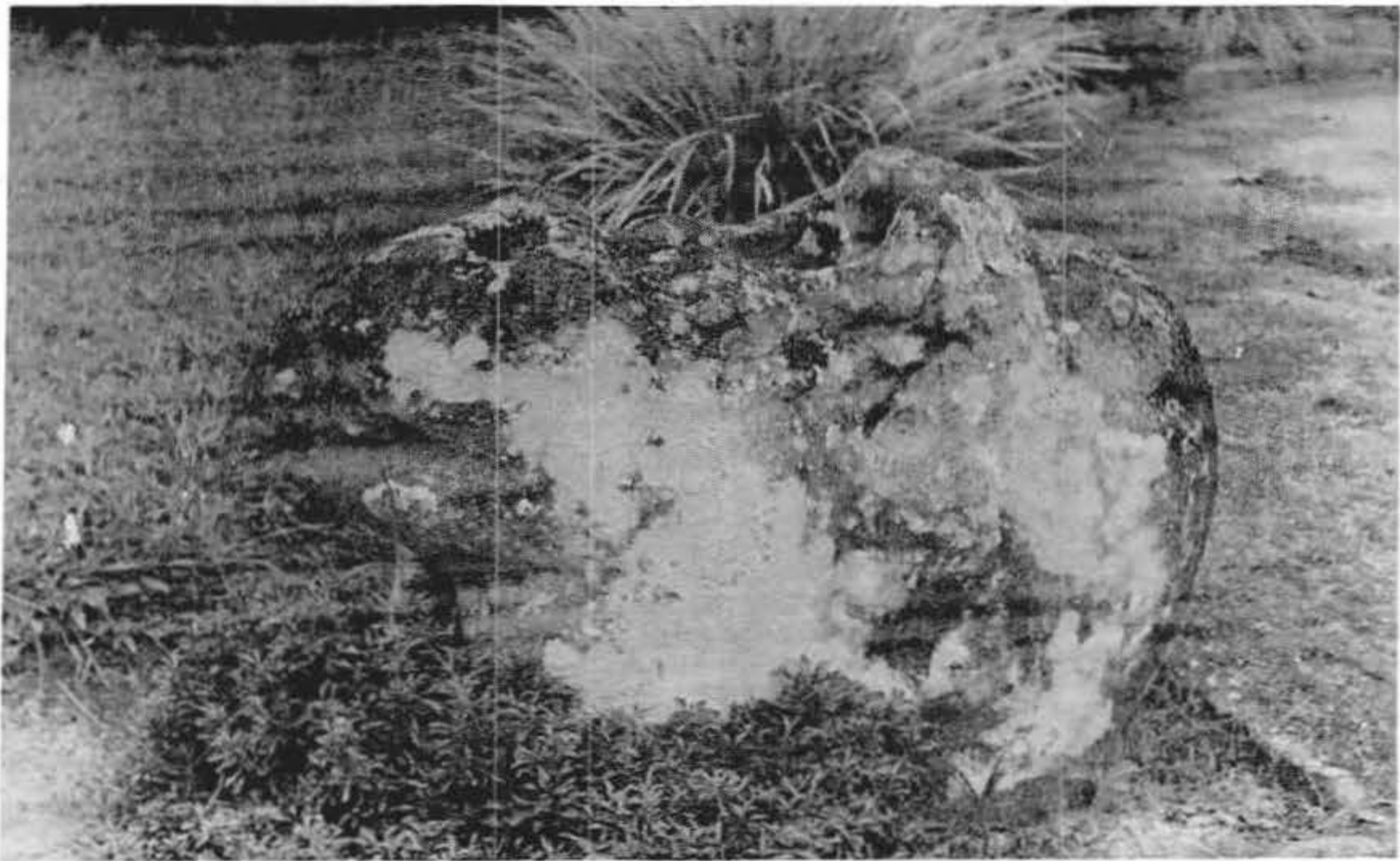
Premogeniture	= Orang yang paling mengenal adat dan berfungsi sebagai pimpinan, biasanya orang tua dalam keluarga desa.
Priplous Eristras Tallas	= Buku Ilmu Bumi karangan Ptolemaeus di Alexandria yang menyebut beberapa negeri di sebelah timur India.
Prolog	= Permulaan dari kegiatan sampai terjadinya peristiwa.
Ptolemaeus	= Seorang ahli ilmu bumi bangsa Yunani di Alexandria.
Pustaha	= Buku-buku yang berisi adat, kepercayaan, pengobatan, dan sebagainya (Batak).
Pusuk Buhit	= Gunung di Tapanuli Utara. Menurut tradisi tempat turunnya nenek moyang orang Batak.
Raja na opat	= Kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan dinasti Raja Sisingamangaraja.
Raja Urung	= Raja yang menguasai beberapa desa (Karo).
Rehan	= Sebutan dalam bahasa mantra terhadap roh (Melayu).
Romusha	= Pekerja paksa di zaman Jepang.
Sacral	= Suci.
Saiko Sikikan	= Pemerintahan sipil di zaman Jepang.
Salawa	= Pemimpin desa yang mempunyai kesaktian (Nias).
San-fo-tsi	= Sriwijaya atau Palembang menurut berita Cina.
Sapuluh Siah	= Sembilan belas (jumlah huruf pada aksara Batak).
S.B.G.L.	= Serikat Buruh Gas dan Listrik.
Seikan Gansyu Hoo-kokai	= Badan Kebaktian Rakyat di zaman Jepang.
Seikere	= Penghormatan untuk Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit.
Seinendan	= Barisan Pemuda di zaman Jepang.
Seinen Ren Seisyo	= Sejenis Sekolah Lanjutan di zaman Jepang.
Selewenasara	= Dewa pelindung (Nias).

Senina	= Marga-marga yang sederajat (Karo).
Sekwilda	= Sekretaris Wilayah Daerah.
Shi	= Kotamadya di zaman Jepang.
Shi-Tjo	= Wali Kota di zaman Jepang.
Shu-rei	= Peraturan peradilan di zaman Jepang.
Shu Sangikai	= Dewan Perwakilan Rakyat di zaman Jepang.
Sibayak	= Sebutan Raja (Karo).
Sigale-gale	= Tari patung (Batak).
Sihai	= Nama tongkat yang menciptakan alam semesta (Nias).
Sirao Uwu Zehano	= Dewa Penghuni Langit (Nias).
Soko	= Tombak (Nias).
Solu	= Sampan kecil, buduk (Toba).
Son	= Daerah swapraja di zaman Jepang.
Son-Tjo	= Kepala pemerintahan Swapraja
Soripada	= Nama Dewa (Batak).
Su-lu-tan Hut-sin	= Sultan Husin menurut berita Cina.
Sumatora Tjuo Sangiin	= Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera di zaman Jepang.
Suppletoire Verklaring	= Ikatan antara Sultan dengan pemerintah Hindia Belanda.
Syu	= Keresidenan di zaman Jepang.
Syu-Tjokan	= Residen di zaman Jepang.
Ta-che	= Sebuah nama negeri dalam berita Cina kemungkinan yang dimaksud ialah Aceh.
Stupa	= Bangunan agama Budha tempat menyimpan abu jenazah.
Tabu	= Pantangan.
Taiso	= Senam pagi di zaman Jepang.
Tanah jaluran	= Tanah yang diusahakan oleh petani selama tidak dipakai untuk perkebunan.
Tora'a	= Pohon kehidupan yang diciptakan dewa Lawa Langi (Nias).
Tari Huda-huda	= Tarian pada upacara kematian (Simalungun).
Temuni	= bahasa mantra di Pesisir Sumatera Timur, asal dari pada arwah.
Terpangir Ku Lau	= nama tarian adat atau landek yang tertua (Karo).

Teteholi ana'a	= Dunia roh (Nias).
Tokubetsu	= Polisi Brigade Mobil di zaman Jepang.
Tonggo-tonggo	= doa, mantra (Batak).
Torombo	= silsilah.
Tor-tor	= tarian adat (Batak).
Trepes	= Berasal dari kata "two rivers", nama markas Laskar Medan Area di Deli Tua pada masa Revolusi 45.
Tuhamora'a Auji	= Dewa yang pertama yang diciptakan Lawa Langi (Nias).
Tuhenori	= Raja desa (Nias).
Uang Senapang	= Uang yang beredar di Tanah Karo dengan gambar senapang pada zaman Revolusi 45.
Ulos	= selendang mempunyai nilai adat dan kepercayaan (Batak).
URIDA	= Uang Republik Daerah Aceh.
URIKA	= Uang Republik Indonesia kabupaten Asahan.
Urung	= Perikatan desa di Tanah Karo.
Voedings middelen	= Organisasi yang dibentuk orang-orang Nica untuk mengumpulkan bahan makanan bagi bekas tawanan Jepang.
Fonds	
Zelfbestuur Landschap	= Daerah kekuasaan raja-raja di bawah pemerintahan Hindia Belanda.



Bekas-bekas pengerukan pada Bukit Karang.



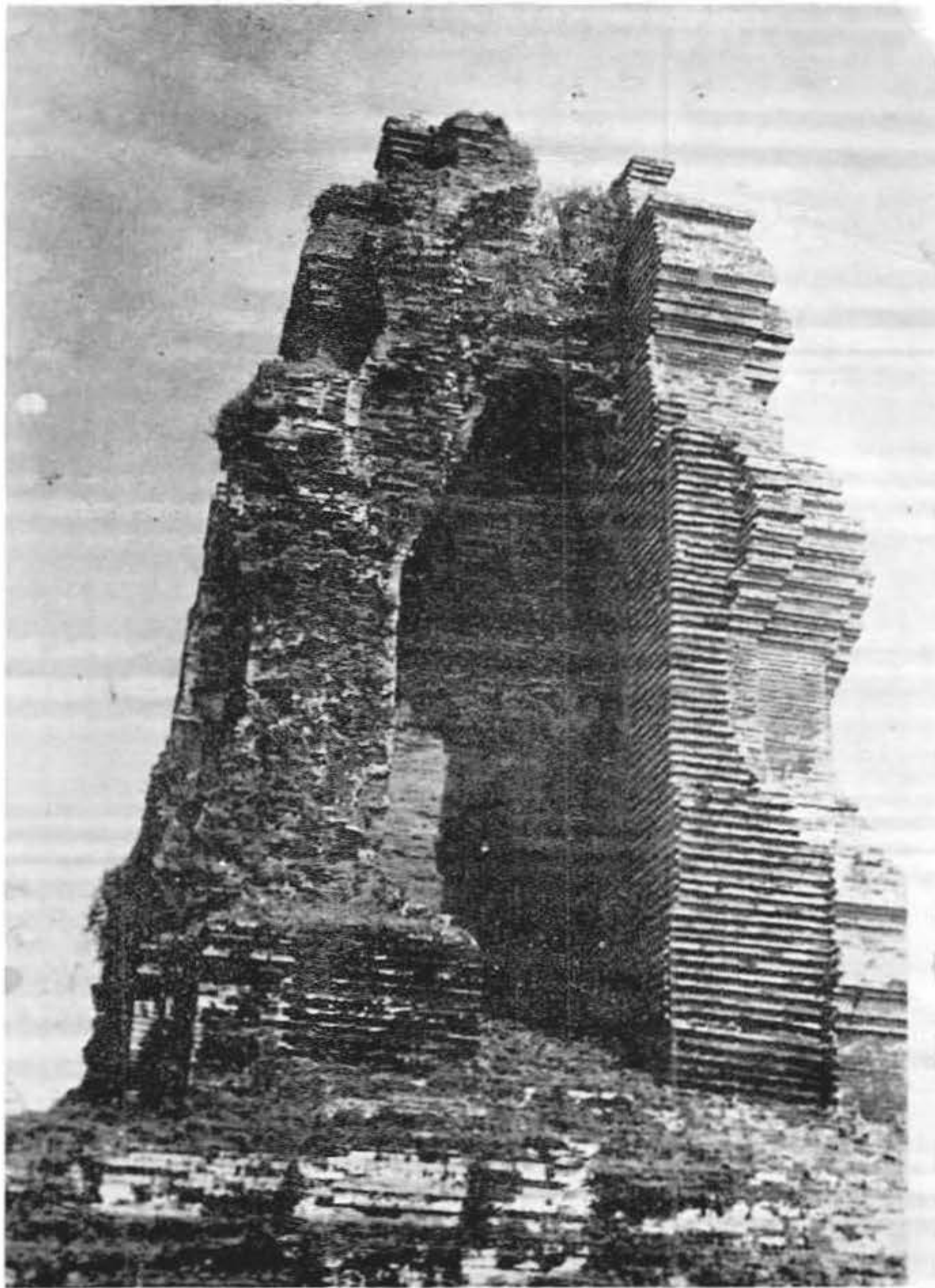
Sebuah arca hewan dengan penunggangnya dari Simalungun.



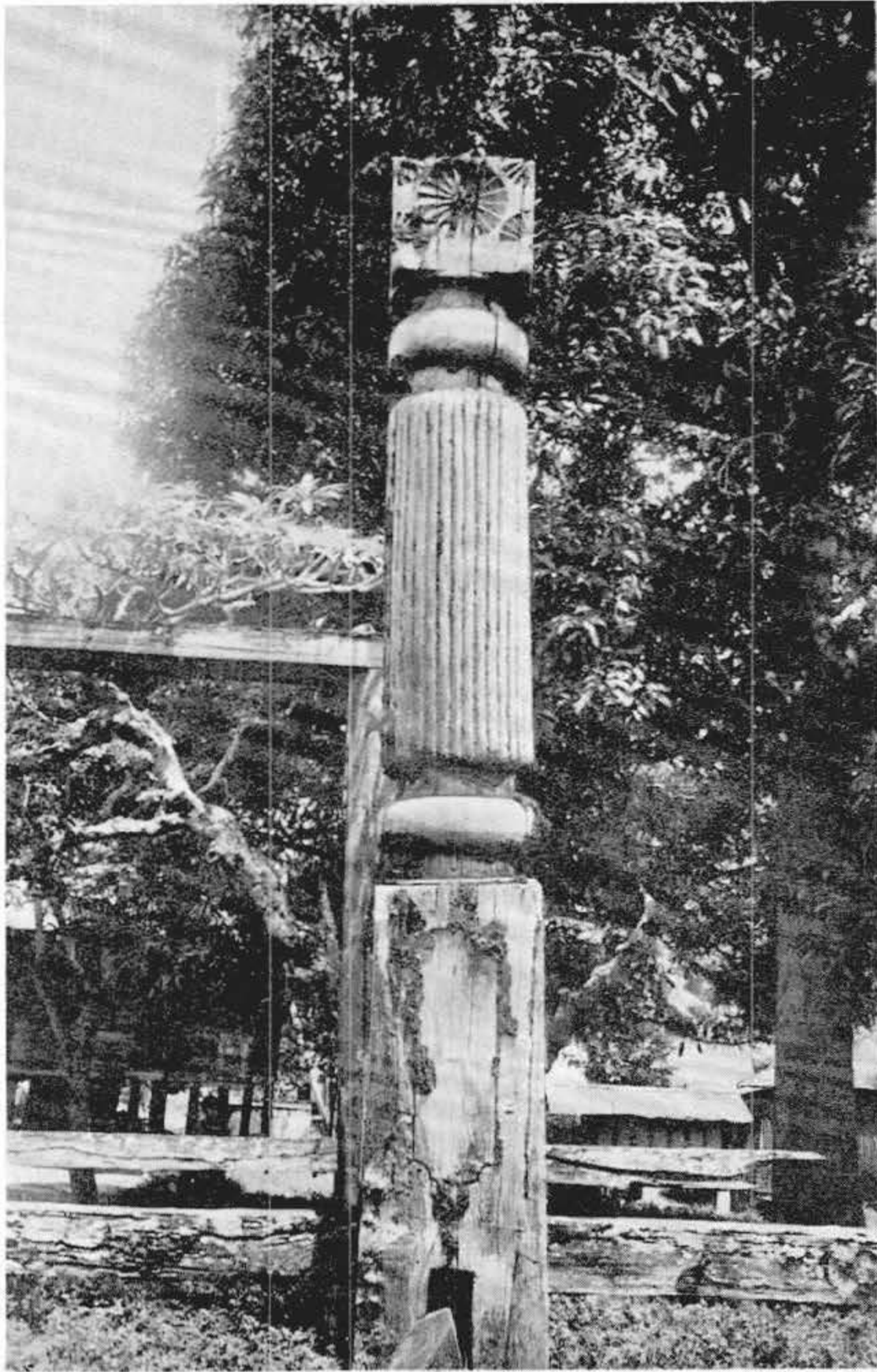
Patung Ibu dengan putera-puteranya di Simalungun.



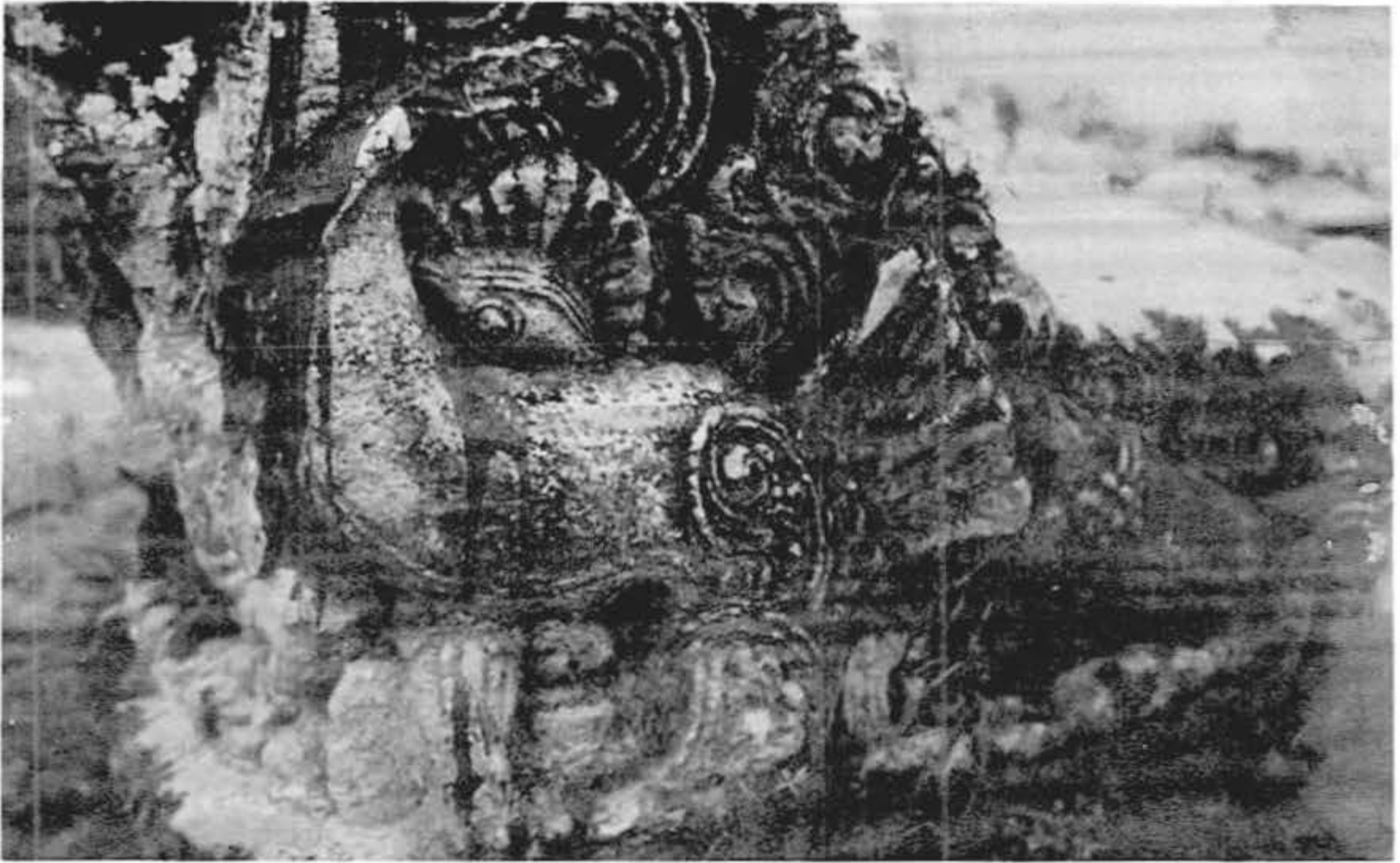
Patung Nenek Moyang di Panyabungan.



Bahagian dalam candi Bahal di Portibi.



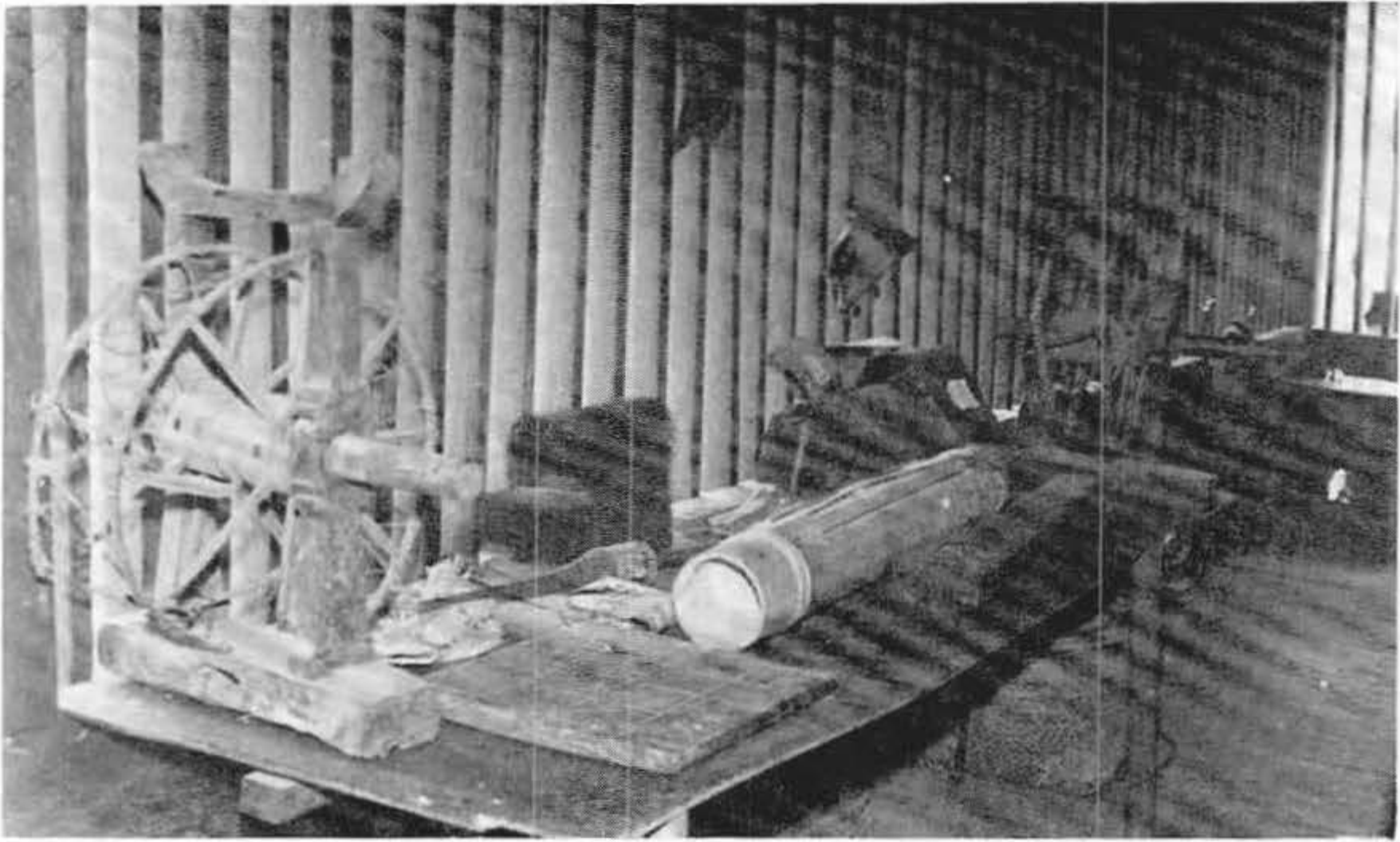
Pahatan kayu sisa sebuah bangunan.



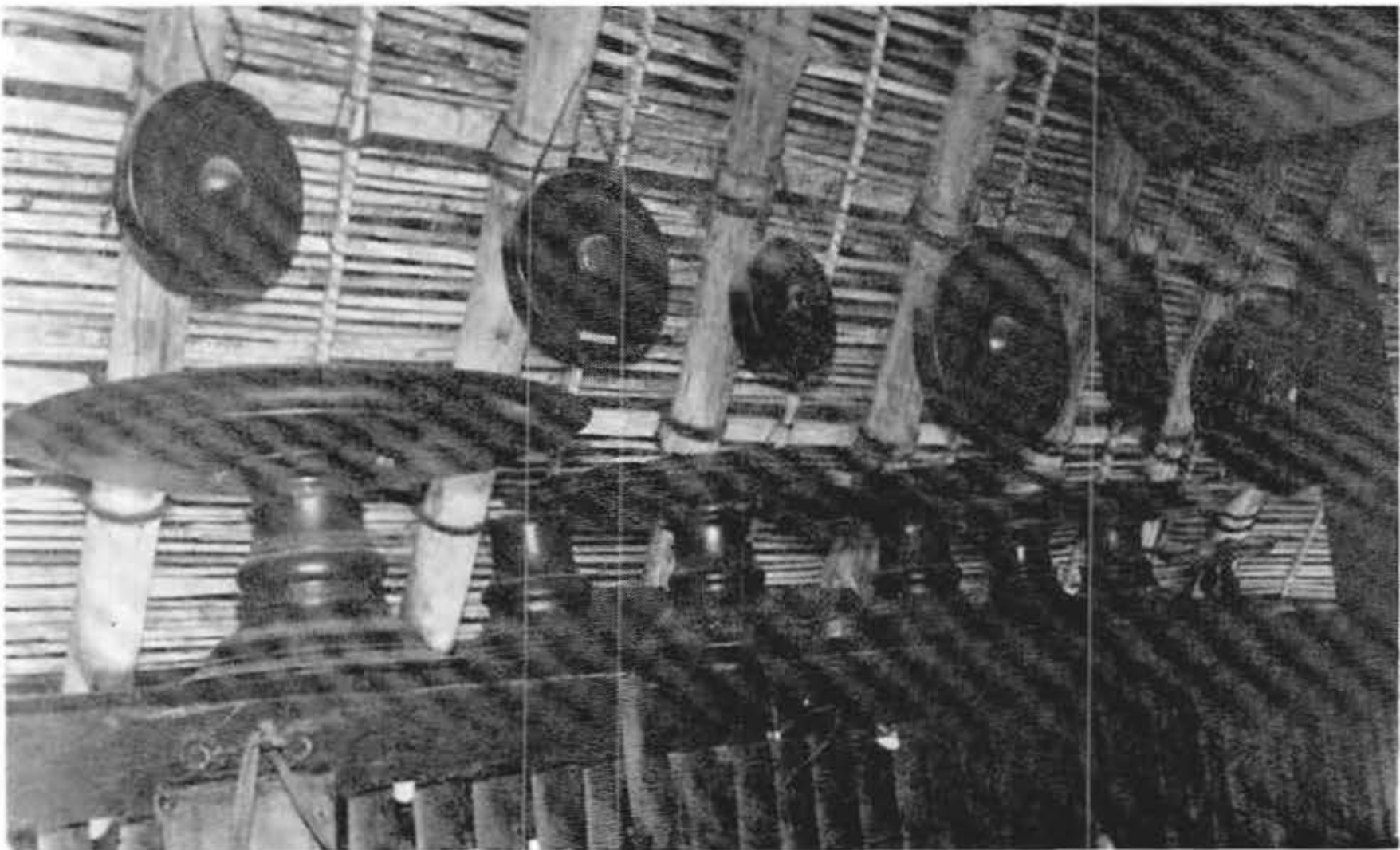
Sebuah Arca dari Gunung Tua.



Perlengkapan dapur tradisional.



Alat-alat pemintal tradisional.



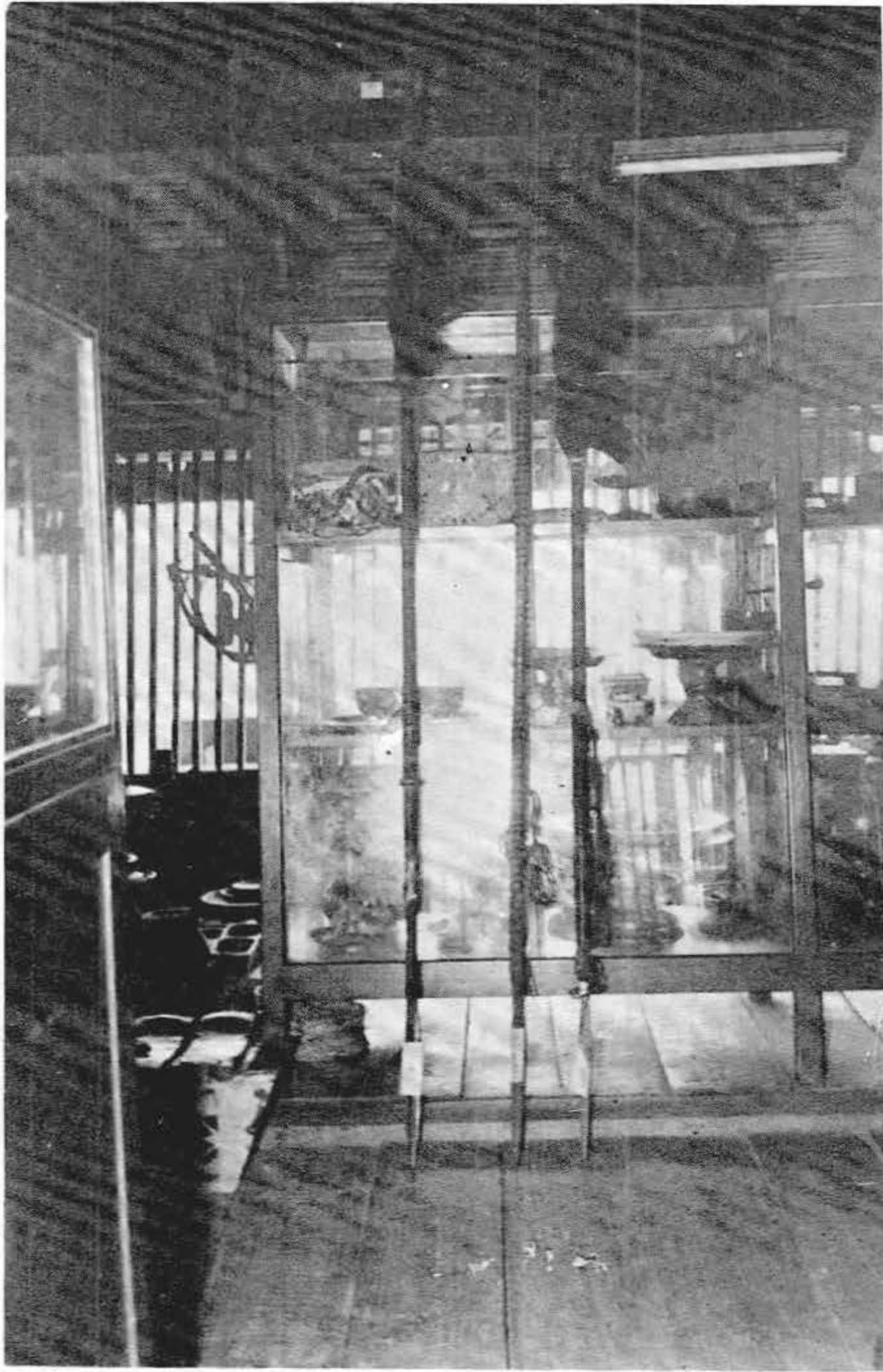
Seperangkatan gong dan alat hidangan pada kerajaan-
kerajaan di Simalungun.



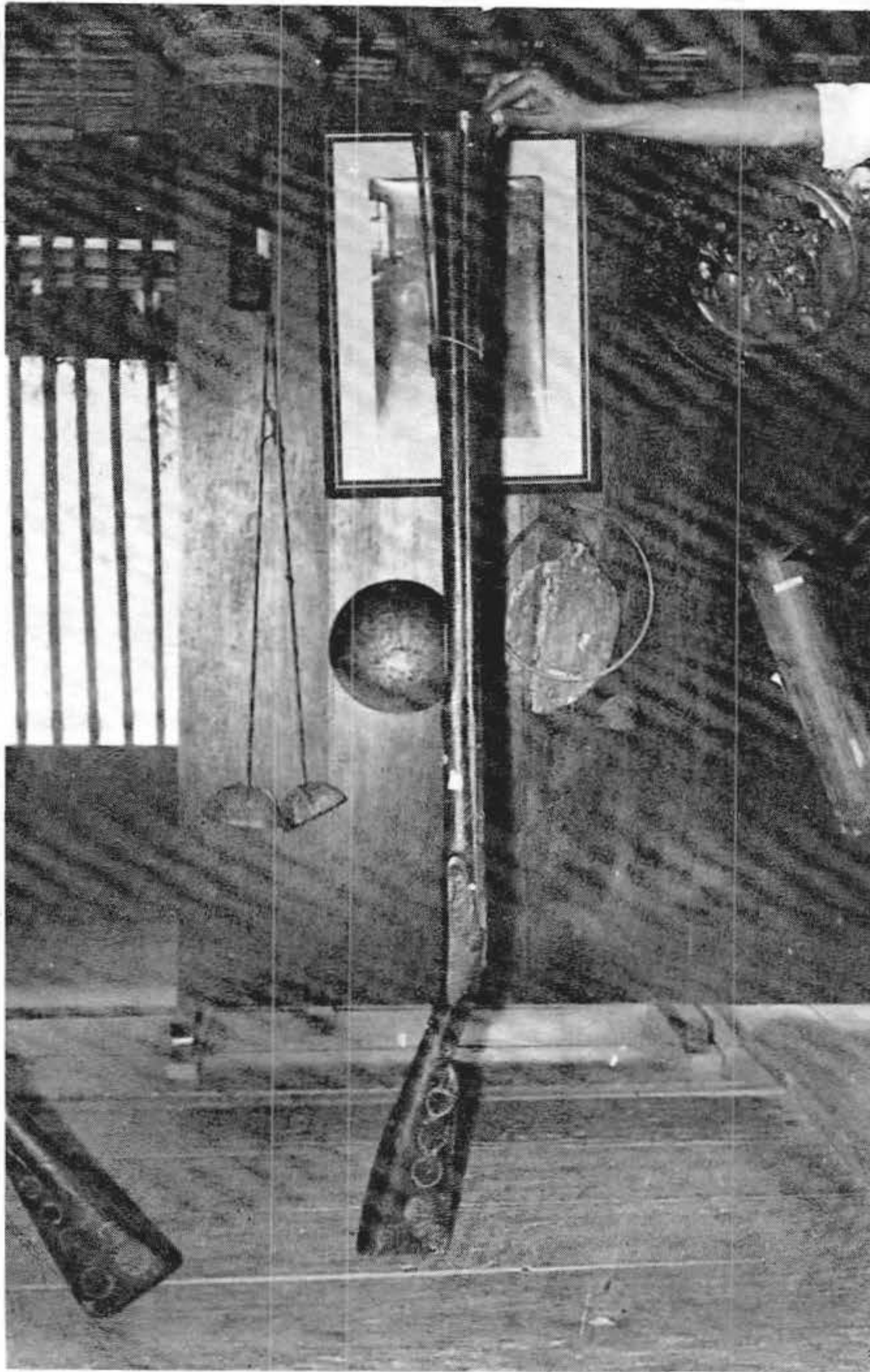
Sebuah Pustaha Batak.



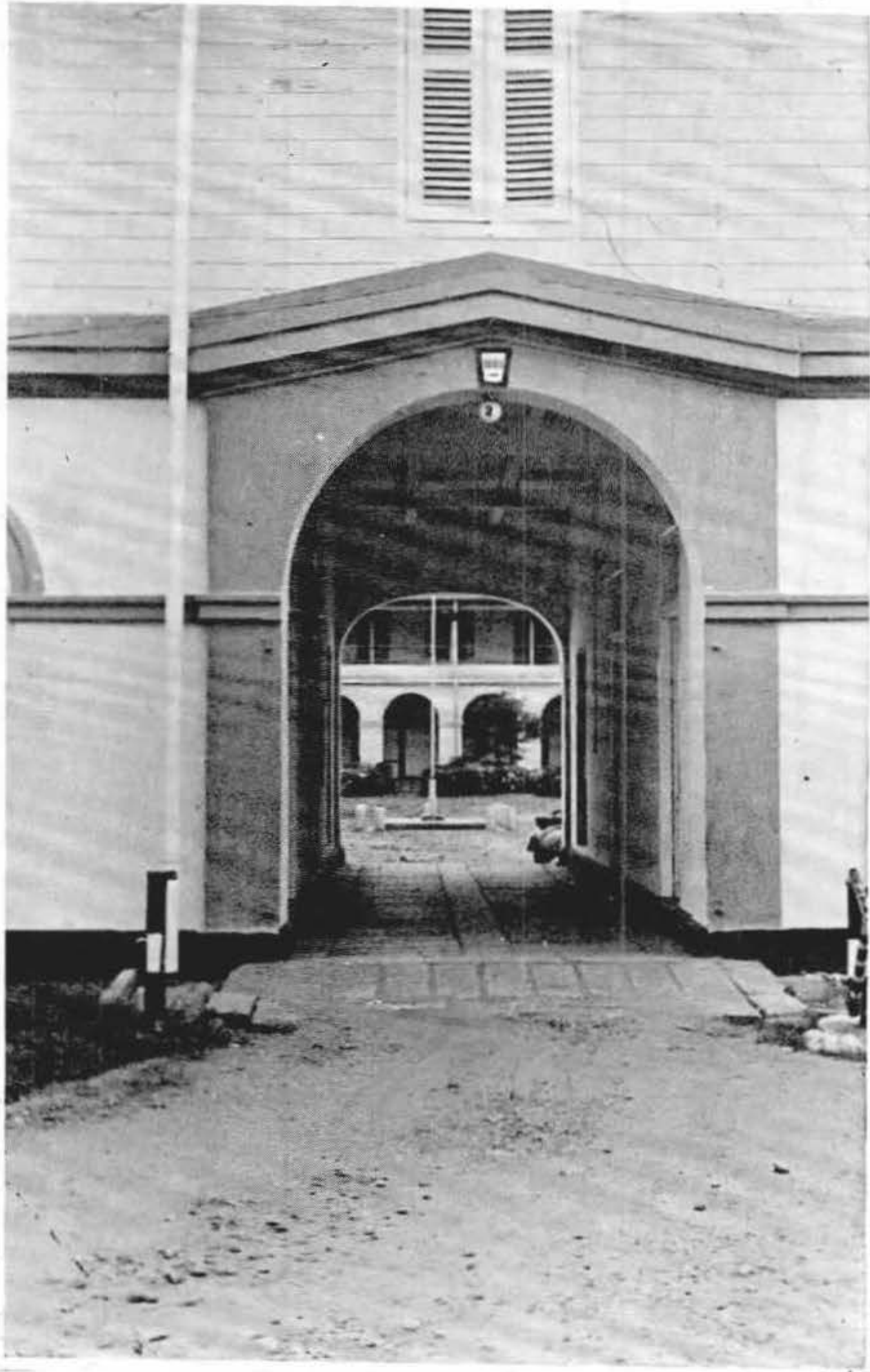
Kalender tulisan Batak pada bambu.



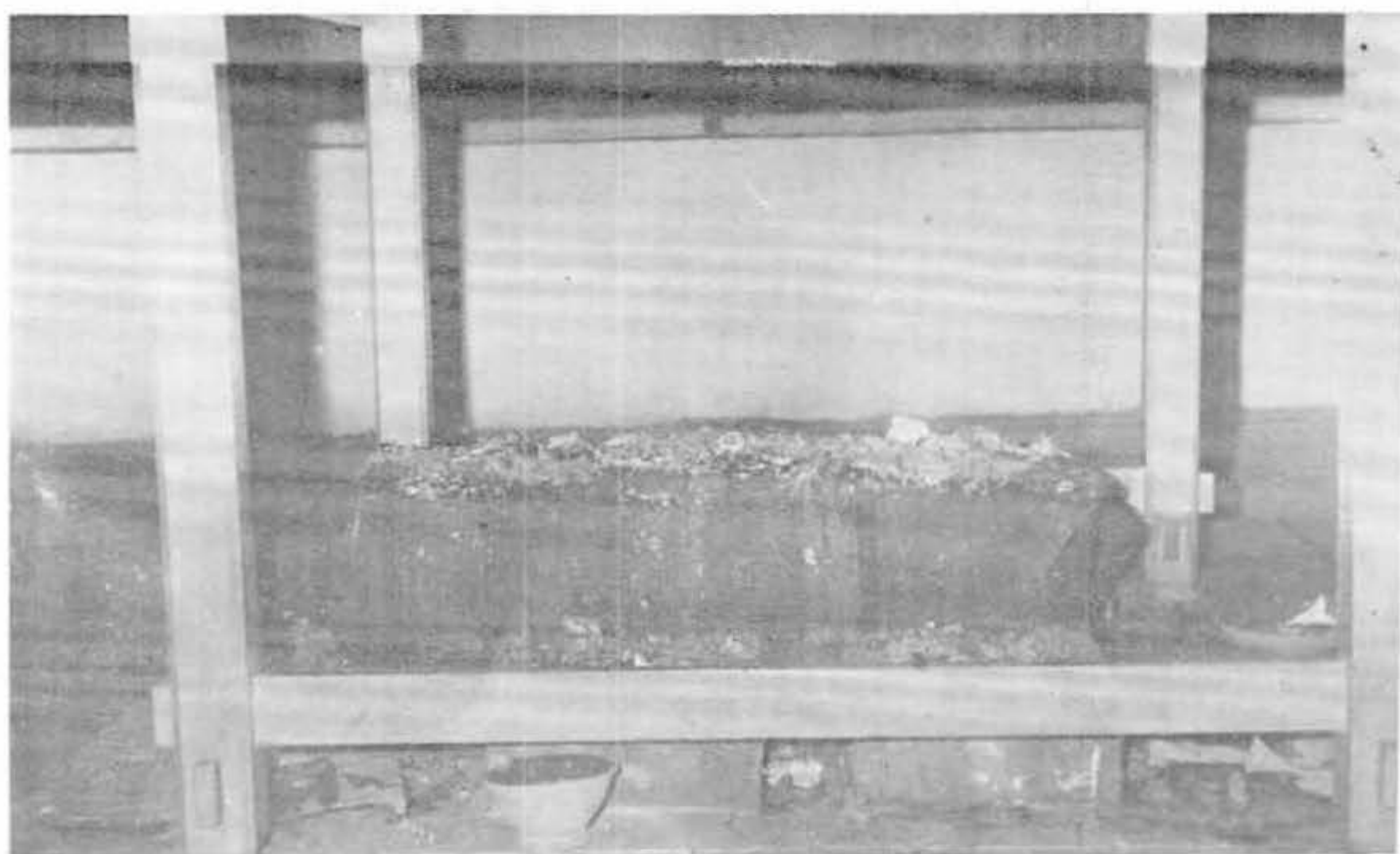
Perlengkapan pasukan kerajaan.



Senjata api yang dipakai pada Abad XIX



Gerbang sebuah benteng 1885 di Medan.



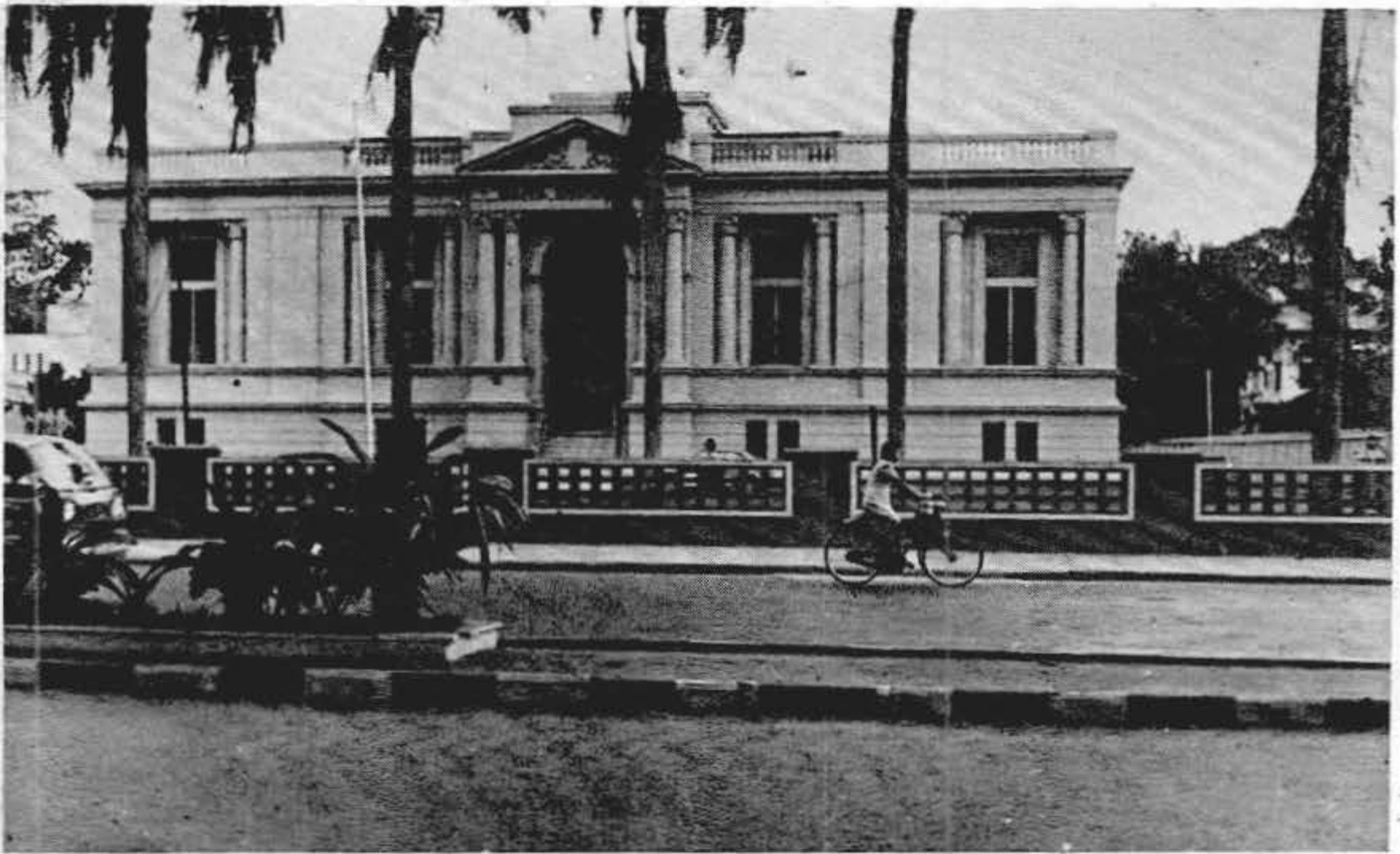
Meriam puntung dari istana kerajaan Deli.



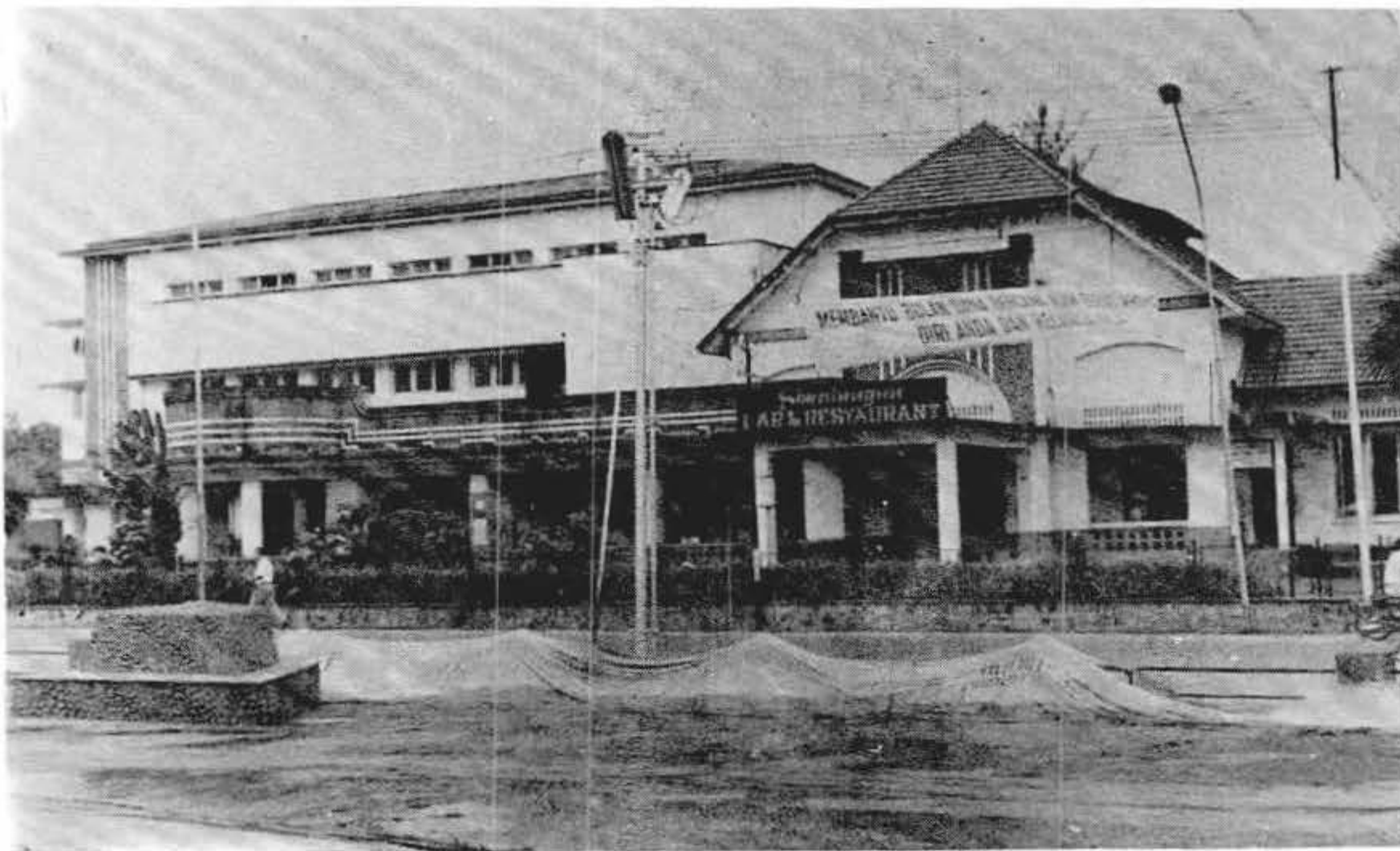
Peringatan pembangunan istana Maimun, Deli 1888.



Hotel Dharma Bhakti d/h Hotel de Boer.



Salah satu gedung yang dibangun pada Abad XIX
di Medan.



Gedung bersejarah bagi pertumbuhan TNI di Sumatera Utara
1945 – 1947.



Tugu peristiwa Siantar – Hotel.



Perpustakaan
Jenderal

95



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA